3. Buku Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Relasi Kuasa Michel Foucault.docx

by Turnitin.

Submission date: 21-Oct-2025 07:30AM (UTC-0500)

Submission ID: 2787813097

File name: 3._Buku_Ekonomi_Politik_Pembangunan_Dalam_Perspektif_Relasi_Kuasa_Michel_Foucault.docx (1.47M)

Word count: 71269

Character count: 544689

EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

Dalam Perspektif Relasi Kuasa Michel Foucault

Perspektif kajian ekonomi politik merupakan hasil dari kebijakan ekonomi dan politik yang muncul dari hasil pergumulan berbagai aktor di dalam konteks suatu negara, interaksinya diantara negara, dan dalam konteks perkembangan kapitalisme global. Dalam konteks relasi politik, penguasa bersama pengusaha membangun pola-pola kerjasama melalui berbagai pendekatan dalam meng-eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan dan aturan sengaja dirancang dan dilegalkan yang hanya memberikan efek kesejahteraan dan keuntungan bagi kelompok pengusaha, sementara efek kerugian hingga kesengsaraan bagi warga masyarakat.

Secara umum substansi sajian buku ini menekankan bahwa proses pembangunan senantiasa "tidak dapat terhidandar" dari praktik-praktik relasi kuasa antara pemerintah dan bisnis. Analisis yang disajikan dalam buku ini didasarkan pada isu-isu strategis dalam ekonomi politik pembangunan dengan menggunakan perspektif relasi kuasa Michel Foucault. Semoga kehadiran buku ini dapat menambah khasanah kepustakaan tentang topik-topik pembangunan di tanah air. Buku ini sangat relevan menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, birokrasi, politisi, dan pemerhati isu-isu pembangunan. Akhir kata penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan buku ini ke depan.

CV. Literasi Indonesia
Jl. Wanggu, Kendari 93231
editor@literacyinstitute.org
www.literacyinstitute.org
0852-9979-3323

ISBN 978-623-90677-1-7
9 786239 067717

EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN
Dalam Perspektif Relasi Kuasa Michel Foucault
Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si.

Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si.

EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN
Dalam Perspektif Relasi Kuasa Michel Foucault



Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si.

30

EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

Dalam Perspektif Relasi Kuasa Michel Foucault

CV. Literasi Indonesia, 2022

EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

Dalam Perspektif Relasi Kuasa Michel Foucault

Penulis
Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si.

ISBN: 978-623-90677-1-7
vi + 266 hlm.; 15,5 x 23 cm

Editor
Dr. Ambo Upe, S.Sos., M.Si.

Desain Sampul
wbookdesign

Penerbit
CV. Literasi Indonesia
Bumi Wanggu Permai II Blok D/12
Kota Kendari, 93231, Telp. 085299793323
Email: editor@literacyinstitute.org
Website: www.literacyinstitute.org

Cetakan Pertama: Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Prakata

Teori kuasa/pengetahuan Michel Foucault dipergunakan sebagai pendekatan penelitian dengan perspektif Foucauldian, namun tidak berarti bahwa pandangan orisinil Michel Foucault dapat diterima begitu saja, terlebih lagi tidak bermaksud untuk memaksakan keberlakuan teorinya secara utuh. Pada aspek tertentu perspektif teoretis Foucault bahwasanya kuasa menyebar di mana-mana; kuasa senantiasa bersinergi dengan wacana/pengetahuan; kuasa bukanlah milik melainkan strategi, dipandang masih relevan, namun pada aspek lain juga mendapat penolakan sekaligus pengembangan. Melalui penafsiran teori Michel Foucault, realitas sosial struktur pengendalian dibangun dalam relasi kekuasaan dan pengetahuan, dan relasi keduanya beroperasi dalam formasi diskursif. Dalam sejarah pengetahuan, Foucault mengkaji wacana dengan memperhatikan aspek penggunaan bahasa, dan bagaimana penggunaan bahasa diartikulasikan dalam praktik sosial. Wacana dimaknai sebagai penggerak pengetahuan di mana kuasa terdapat di dalamnya. Kajian wacana Foucault menekankan pada relasi kekuasaan, bahwasanya kekuasaan didefinisikan sebagai suatu yang produktif ialah kuasa dibangun, diterapkan, dan dipelihara melalui regulasi wacana. Kekuasaan terlaksana melalui wacana, dan wacana selalu berakar pada kekuasaan.

Mengenai pola relasi penguasa dan pengusaha, James Scott (1972) dalam artikelnya yang berjudul *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* menguraikan makna hubungan patron-klien adalah suatu kasus khusus hubungan antar dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien), yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan yang

umum dan bantuan, temasuk jasa-jasa pribadi kepada patron. Dalam hubungan ini, pertukaran tersebut merupakan jalinan yang rumit dan berkelanjutan, biasanya baru terhapus dalam jangka panjang. Imbalan yang diberikan klien bukan imbalan berupa materi melainkan dalam bentuk lainnya. Si patron tidak akan mengharapkan materi atau uang dari klien tapi mengharapkan imbalan lainnya yang dibutuhkan si patron. Selanjutnya, ikatan patron klien didasarkan dan berfokus pada pertukaran yang tidak setara yang berlangsung antara kedua belah pihak, serta tidak didasarkan pada kriteria askripsi. Oleh karena itu, siapa saja yang memiliki modal dalam hubungan yang bersifat vertikal, maka ia dapat berstatus sebagai patron.

Pada dasarnya sifat ikatan patronasi juga bervariasi, namun lebih kuat tertanam dalam sistems tratifikasi kerajaan, dimana pembagian peran otoritas lokal/daerah kadang didasarkan atas hubungan patronase tersebut. Peran otoritas pada tingkat lokal diambil alih/terletak pada tokoh-tokoh yang mampu untuk menggerakan pengikutnya sehingga lalu diakui sebagai agen pemimpin di daerah. Ketika seiring melemahnya sistem kerajaan tradisional dan menguatnya sistem pemerintahan modern maka yang terjadi adalah jaringan patron-kliern yang terstruktur tidak teratur di lokasi sekitar jalur-jalur perdagangan, pemajakan. Selanjutnya secara kultural dan geografis dapat dikatakan bahwa semakin jauh dari pusat—pada tempat dan kebudayaan pinggir dan pada dasar dari hirarki sosial-ikatan patron klien kurang terlembaga dan karenanya sifatnya menjadi fleksibel.

Sementara untuk ruang tersediakan lebih banyaknya didominasi oleh kelompok pengusaha yang merasa bahwasanya mereka telah memiliki peran oleh karena berperan sebagai sponsor dalam pertarungan politik calon penguasa ke kursi kekuasaan. Fenomena ini yang membuat dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan lebih banyak didominasi oleh aspek-aspek kepentingan balas budi dan jasa daripada kesejahteraan warga masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan untuk ruang terciptakan yang terjadi adalah warga masyarakat merasa kecewa dengan beberapa kebijakan yang dianggap hanya berpihak kepada

kelompok pengusaha dengan tidak memperhatikan kepentingan warga masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan dan aturan sengaja dirancang dan dilegalkan yang hanya memberikan efek kesejahteraan dan keuntungan bagi kelompok pengusaha, sementara efek kerugian hingga kesengsaraan bagi warga masyarakat. Dengan melakukan eksploitasi dan eksplorasi dari hasil-hasil sumber daya alam yang dimiliki wilayah tanpa mengedepankan aspek pemberdayaan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Di samping itu juga kelompok penguasa sengaja mengadakan proyek baik berupa proyek pengadaan maupun proyek pembangunan fisik di mana sifatnya lebih kepada aspek kepentingan bagi kelompok pengusaha untuk mengejar keuntungan.

Secara umum substansi sajian buku ini menekankan bahwa proses pembangunan senantiasa "tidak dapat terhidandar" dari praktik-praktik relasi kuasa antara pemerintah dan bisnis. Analisis yang di-sajikan dalam buku ini didasarkan pada isu-isu strategis dalam ekonomi politik pembangunan dengan menggunakan perspektif relasi kuasa Michel Foucault. Semoga kehadiran buku ini dapat menambah khasanah kepustakaan tentang topik-topik pembangunan di tanah air. Buku ini sangat relevan menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, birokrasi, politisi, dan pemerhati isu-isu pembangunan. Akhir kata penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk per-baikan buku ini ke depan.

Makassar, November 2022

Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si.

Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan 1
A. Konteks Relasi Ekonomi Politik 1
B. Perspektif Ekonomi Politik 7
C. Relasi Kuasa Negara dan Bisnis 15

Bab 2 Teori Relasi Kuasa Michel Foucault 25
A. Teori Kuasa dan Pengetahuan 25
B. Ideologi sebagai Praktik Kuasa Pengetahuan 38
C. Tipologi Kekuasaan 44

Bab 3 Menakar Ekonomi Politik Pembangunan 59
A. Ekonomi Politik Pembangunan di Kabupaten Maros 59
B. Sektor Ekonomi Politik Pembangunan Daerah 63
C. Inventarisasi Perusahaan 67

Bab 4 Isu-Isu Strategis dalam Ekonomi Politik Pembangunan 83
A. Polemik Isu Pertambangan 83
B. Investasi dan Perdagangan 138
C. Transparansi dan Akuntabilitas Daerah 146
D. Realisasi Proyek Pembangunan 156

Bab 5 Pola Relasi Ekonomi Politik Pembangunan 176
A. Pola Relasi Politik 176
B. Pola Relasi Ekonomi Politik 181

Bab 6 Penutup 239
A. Kesimpulan 239
B. Kontribusi Buku Ini 241
C. Saran 250

Daftar Pustaka 251

Tentang Penulis 266

Bab 1
Pendahuluan

A. Konteks Relasi Ekonomi Politik

Relasi politik pada penguasa memungkinkan bagi pengusaha untuk membangun pola-pola kerjasama melalui pendekatan sosial dan kekeluargaan. Sementara hubungannya dengan kekuasaan dan ekonomi politik dalam kerangka atmosfer politik ialah perusahaan hanya memanfaatkan sumber daya alam dan mengesampingkan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga memicu proses terjadinya degradasi lingkungan hidup. Sementara itu, dampak negatif lainnya ialah terhadap pemanfaatan sumber daya manusia dan pembangunan menimbulkan masalah dualisme yang terdiri dari kekuatan pola struktur sosial (relasi aktor) dan struktur material (kondisi sosial ekonomi dan morfologi wilayah).

Di samping itu juga memunculkan kapitalisme semu, alhasil munculnya pengusaha/konglomerat hitam yang di dalam proses pengelolaan dan pemanfataan sumber daya alam hanya menguntungkan kepada kelompok mereka sendiri. Kelompok dimaksud ialah penguasa dan pengusaha yang membangun dan menjalin relasi dalam melanggengkan usaha mereka. Selanjutnya, memunculkan iklim politik dan ekonomi yang terjadi diantara para kaum borjuasi dengan pemegang kekuasaan yang terjebak dalam dimensi kapitalisme semu yang didominasi oleh para pengusaha yang memiliki modal besar dan kedekatan emosional dengan penguasa. Sehubungan dengan itu, pengusaha yang tidak memiliki akses langsung kepada penguasa, sehingga secara optimal mereka tidak dapat mengelola sumber daya alam oleh karenanya sumber daya alam tersebut sudah menjadi bagian dari skenario dari kelompok penguasa untuk memberikannya kepada kelompok pengusaha yang secara khusus memiliki kedekatan (patron klien).

Pola hubungan diantara kelompok penguasa dan kelompok pengusaha tidaklah sesederhana seperti yang dinarasikan dalam konsep *state capture* yang diwarnai dengan pola hubungan diantara kelompok elite yang berkuasa dengan kelompok bisnis. Hal ini ditunjukkan bilamana kelompok pengusaha ingin merengkuh langsung kepada sumber daya publik, beberapa diantara mereka menduduki jabatan publik, termasuk kursi parlemen. Sedangkan, relasi yang terbangun dengan profil ekonomi didominasi oleh sektor publik (*state driven-economy*) yang membuat pengusaha menjadi sangat tergantung pada kelompok-kelompok elite berkuasa yang dengan demikian bertolak belakang dengan konsep *state capture*. Secara substantif, penelitian terdahulu perihal kajian tema relasi penguasa dan pengusaha baik yang dilakukan dalam konteks internasional maupun nasional terpola pada dua kajian utama. Pertama, pada aspek pengetahuan cenderung meliputi; pengusaha mulai berakrobat untuk menemukan suatu cara merebut posisi super-ordinat yang selanjutnya penguasa diskenariokan sedemikian rupa sebagai subordinat dengan melakukan upaya pem-balikan posisi dalam relasi penguasa dan pengusaha. Kedua, pada aspek kekuasaan adalah pengusaha tampil sebagai kekuatan pengoreksi terhadap penguasa melalui berbagai upaya koreksi pengusaha sifatnya subjektif, namun demikian sifat koreksi ini tidak dapat menjadi pilar penentu tegaknya rasionalitas dalam situasi ekonomi politik.

Pada masa pemerintahan orde baru peran pengusaha hanya sebatas berada pada tataran sistem dorongan (*supporting system*) belaka yang mereka peroleh dari jejaring politik dan ekonomi. Karenanya, hal ini disebabkan pemerintah pada waktu itu kekurangan modal, sehingga memberikan kepercayaan kepada pemilik modal atau pengusaha untuk ingin melakukan kerja sama. Peran negara sangatlah penting dalam menumbuh kembangkan sistem borjuasi, dimana modal kontrak, konsesi, dan kredit dari negara diberikan secara langsung kepada pengusaha dan pada kesempatan yang sama mereka meman- faatkan melalui rezim patron dalam kelompok kekuasaan politik- birokrasi. Para pengusaha diatur sedemikian rupa di bawah kendali

aparat birokrasi yang bergantung dengan modal asing. Oleh sebab itu, pengusaha hanya berperan sebagai pemain pendukung di belakang pemerintah. Berubahnya sistem politik dan ekonomi pasca Orde Baru membuat kekuasaan tersebar di mana-mana serta memiliki pengaruh politik yang luas. Sebagai akibat memperoleh kemudahan dan proteksi politik dalam berbisnis makin lebar dan berbiaya tinggi. Semakin banyaknya kelompok pengusaha mendekati kelompok pusat kekuasa- an, sehingga menimbulkan biaya transaksi keuntungan pemburuan ekonomi rente.

Fenomena pengembangan perusahaan tidak terlepas dari bentuk kerja sama antara kelompok penguasa dan pengusaha serta partai politik yang berkuasa. Terjadinya sebuah relasi diantara penguasa dengan pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya serta menimbul- kan dampak terhadap relasinya yang saling memberikan dukungan diantara penguasa dan pengusaha. Sehubungan dengan itu, teori negara Marxian dimulai dengan asumsi bahwa masyarakat ekonomi terpola- risasi ke dalam kelas-kelas yang terpisah. Tiap kelas memiliki kepen- tingan yang berbeda-beda yang tidak dapat dikemas ke dalam sebuah kebijakan yang dapat menyenangkan setiap individu. Dalam situasi seperti ini, isu tentang otonomi daerah akan muncul sebagai jalan ke- luar untuk merespons beberapa paradoks yang dihadapi oleh kelas kapitalis, terutama antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok (kolektif).

Kondisi perkembangan partai politik di Kabupaten Maros yang ikut berperan dalam pengambilan kebijakan pada pemerintahan orde reformasi yang memiliki variasi tersendiri sesuai dengan keadaan dan trend yang berlaku di setiap masanya. Variasi inilah yang memberikan gambaran terhadap kondisi kekuasaan yang berlaku pada masing-masing masa pemerintahannya yang menjadi tampuk perkembangan dan arah atmosfer politik yang tidak terlepas dengan aspek ekonomi politik yang berada dalam tipologi wilayah di Kabupaten Maros. Dengan melihat berbagai kekuatan politik dan bisnis maka relasi penguasa dan pengusaha merupakan fokus fenomena yang dicermati

dalam konteks ekonomi politik sebagaimana praktik relasi penguasa dan pengusaha dalam konteks ekonomi politik dan manfaat dari atmosfer politik itu sendiri untuk mengetahui kondisi ketimpangan wilayah.

Dalam hal ini, relasi bisnis yang mendapat sorotan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros me- nilai pabrik marmer di Leang Leang Maros dapat mengancam keber- adaan situs pra sejarah Leang Leang yang sudah dinobatkan sebagai situs prasejarah tertua di dunia. Keberadaan perusahaan marmer tersebut tidak bisa diberikan kebijakan lagi karena tidak memberikan kontribusi yang banyak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini Komisi III, melakukan peninjauan langsung ke lokasi tambang marmer. Komisi III juga meminta Dinas Pertambangan dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Maros untuk mencabut izinnya serta menuntut mereka membayar ganti rugi kepada warga yang merasa dirugikan (Makassar Tribunnews.Com. 2015. *Komisi III DPRD Maros Ancam Cabut Izin Tambang Marmer*).

Dampak relasi bisnis yang selama ini diagung-agungkan oleh penguasa perihal peningkatan ekonomi dan taraf kesejahteraan warga masyarakat, maka dipergunakan data indeks gini ratio atau koefisien gini yang merupakan alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Hal ini didasarkan dengan kesesuaian kondisi yang terdapat di Kabupaten Maros. Selanjutnya mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan Tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Peme- rintah Kabupaten Maros dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan peme- rintahan dan kemampuan keuangan daerah.

Adapun fungsi distribusi APBD yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah daerah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gambaran mengenai perkembangan APBD Kabupaten

Maros beserta alokasi peruntukannya kepada masyarakat yang me- miliki trend dan variasi. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros pada tahun 2000 untuk alokasi belanja hibah dalam kurun waktu tahun 2000-2004 mengalami kondisi yang fluktuatif. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2000 belanja hibah yang terealisasi sebesar Rp.9.580.897. 000 dan pada tahun 2004 belanja hibah yang terealisasi sebesar Rp.9.599.851.776. Sedangkan untuk dana bantuan sosial pada tahun 2000 mengalami penurunan. Hal ini terdapat pada tahun 2000 dana bantuan sosial yang terealisasi sebesar Rp.4.478.188.053 pada tahun 2004 turun sebesar Rp.4.345.508.607.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2010 untuk alokasi belanja hibah dalam kurun waktu tahun 2010-2014 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2010 belanja terealisasi sebesar Rp.20.219.666.750 dan pada tahun 2014 belanja hibah terealisasi sebesar Rp.24.222.134.502. Dengan demikian, jumlah peningkatan selama kurun waktu tahun 2010-2014 sebesar Rp.4.002.467.752. Sementara alokasi belanja Bantuan Sosial (Bansos) dalam kurun waktu tahun 2010-2014 mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2010 belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp.6.478.188.053 dan pada tahun 2014 belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp.4.355.605.000. Dengan demikian, jumlah penu- runan selama kurun waktu tahun 2010-2014 sebesar Rp.2.122.583.053. Pola relasi penguasa dan pengusaha juga diharapkan menghasil-

kan dampak positif kepada kondisi kesejahteraan warga masyarakat melalui peningkatan taraf kesejahteraan. Melalui pola relasi penguasa dan pengusaha maka penguasa mampu melahirkan konstruksi kebija- kan yang lebih mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Untuk mencermati relasi penguasa dan pengusaha di Kabupaten Maros, maka ditemukan wacana yang berkembang di kalangan warga masyarakat tentang kebanggan dengan beroperasinya Semen Bosowa Maros yang mampu memasukkan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.300.000.000., serta mampu menyerap lapangan pekerjaan sebesar 60% tenaga kerja lokal. Kondisi ini berada pada

masa pemerintahan Bupati Drs. H. A. Nadjamuddin Aminullah, M.S. di tahun 2000. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Kabupaten Maros merupakan berkah tersendiri bagi kabupaten yang menghubungkan Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Bone.

Sementara itu, untuk wacana tandingan yang merupakan wacana perlawanan (antithesa) dari wacana kesejahteraan adalah terjadinya kegiatan penambang liar terjadi pada tahun 2002 di masa kepemimpi- nan Bupati Drs. H. A. Nadjamuddin Aminullah, M.S.Wacana ini mem- produksi kegiatan penambangan liar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam kawasan ekologi karst di Kabupaten Maros. Kondisi ini berkaitan dengan menjamurnya kasus penambangan galian golo- ngan C yang membuat pihak Pemerintah Kabupaten Maros menjadi gerah. Hasil tambang galian tersebut sejatinya sama sekali tidak mem- berikan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Maros. (Koran Fajar {Metro Makassar} edisi Sabtu, 8 Juni 2002. *Penambang Liar Rusak Lingkungan*).

Secara sosiologis yang menunjukkan bahwa relasi penguasa dan pengusaha studi atmosfer politik yang termuat dalam setiap aktivitas perkembangan perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Maros senantiasa dihiasi dengan ‗benturan wacana' sebagai bentuk represen- tasi kepentingan multiaktor. Di satu pihak terproduksi wacana yang menyatakan perkembangan perusahaan menjadi aktivitas produksi salah satu penggerak utama pembangunan wilayah melalui pendapatan asli daerahnya, penyerapan tenaga kerja, dan diikuti pertumbuhan sektor ekonomi informal juga pengurangan kemiskinan. Sementara di lain pihak terproduksi wacana perlawanan yang memandang praktik perkembangan perusahaan terdapat hubungan antara kelompok pe- nguasa dengan kelompok-kelompok pengusaha yang memiliki kepen- tingan terbungkus dalam sebuah kepentingan tertentu yang menguasai dan mengatur arah kebijakan terkait dengan pengembangan perusahaan di Kabupaten Maros.

B. Perspektif Ekonomi Politik

Perspektif kajian ekonomi politik merupakan hasil dari kebija- kan ekonomi dan politik yang muncul dari hasil pergumulan berbagai aktor di dalam konteks suatu negara, interaksinya diantara negara, dan dalam konteks perkembangan kapitalisme global. Setiap kategori aktor, baik itu kelompok masyarakat, organisasi sipil, pemerintah, dan kelompok bisnis tidak dapat dipandang sebagai kelompok yang mono- litik dan homogen. Artinya pergumulan, perlawanan, dan pertentangan termasuk jugakerjasama dan aliansi dapat ditemukan muncul diantara individu atau kelompokbaik dalam masing-masing kategori aktor mau- pun antar lintas aktor. Hal inilah yang melatarbelakangi analisis tentang konflik atas akses dan penguasaan sumber-sumber alam yang memerlukan pengkajian secara spesifik dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Dengan kata lain, proses makro, mezo, dan mikrodalam konteks ekonomi politik dapat berimplikasi berbeda di suatu tempat dengan tempat lainnya dalam waktu yang berbeda. Sehubungan dengan itu, maka kajian tentang ekonomi politik yang berfungsi untuk me- ngetahui dan mengidentifikasi pola relasi kuasa dan pengusaha dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Sewaktu memproduksi relasi diantara penguasa dan pengusaha akan menghasilkan agensi dan aktor-aktor diantara pemangku kelompok kepentingan.

1. Ekonomi politik dan jaringan struktur kekuasaan

Sering kali diasumsikan bahwa ekonomi politik adalah integrasi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Satu hal yang kurang jelas diungkapkan adalah bahwa ide ekonomi politik itu sendiri sebenarnya didasarkan pada pemisahan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Jika dianalogikan ilmu ekonomi dan ilmu politik disatukan secara konsep- tual, maka ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang sebagai hubungan antara dua jenis telaah yang berbeda. Dalam pembahasan ini ekonomi politik beranjak dari pemikiran neoklasik tentang argumen tentang pasar yang meregulasi dirinya sendiri adalah sistem pasar akan mengetemukan orang yang memiliki permintaan dengan orangyang

memiliki pasokan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan dari semua orang akan terpenuhi sedapat mungkin yang berkesesuaian dengan sumber daya yang tersedia (optimalitas Pareto). Argumen neoklasik ini merujuk pada harga dan permintaan. Harga dari barang akan naik atau turun, sehingga semua kebutuhan dalam pasar akan terpenuhi yaitu semua yang dibawa produsen ke pasar akan selalu mendapatkan pembeli (Caporaso dan Levine, 2015).

Sehubungan dengan itu, maka dikalangan ekonom-ekonom abad ke XIX, Karl Marx adalah yang paling keras mengeritik ide tentang pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Marx berpendapat bahwa per- ekonomian kapitalis memiliki kecenderungan untuk mengalami krisis yang akan mengakibatkan pengangguran dalam skala besar dalam pasar produk akan gagal untuk menyalurkan keseluruhan kapasitas produksi yang ada dalam bentuk peralatan kapital (*capital equipment*; mesin-mesin produksi). Marx menegaskan bahwa proses reproduksi dalam perekonomian kapitalis tidak terjadi secara lancar melainkan akan melalui sederetan letupan bencana dan krisis yang disebabkan oleh adanya kontradiksi-kontradiksi yang memang selalu ada dalam sebuah perekonomian yang didasarkan pada kepemilikan kapital secara pribadi dan pasar yang tidak diregulasi (pasar yang meregulasi dirinya sendiri) (Tucker, 1978).

Selanjutnya ekonom yang termasuk dalam aliran Keynesian menerima argumen bahwa perekonomian kapitalis, kalau dibiarkan bekerja dengan sendiri tanpa adanya regulasi dari luar, tidak akan bisa memanfaatkan secara sepenuhnya sumber daya yang tersedia. Ke- gagalan ini yang akan memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan intervensi. Dalam pengertian ketidakstabilan dari perekonomian kapitalis menimbulkan keraguan terhadap hipotesis tentang _tangan-tangan tak terlihat' dan selanjutnya menimbulkan keraguan terhadap implikasi-implikasi dari hipotesis itu terhadap eko-nomi politik pada simpulan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan untuk menjamin adanya stabilitas dari proses reproduksi dan adanya penyerapan tenaga kerja secara memadai (Caporaso dan Levine, 2015).

Selanjutnya, ekonom Okun (1970), mengemukakan ketika pada Tahun 1965 Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson yang mengeluarkan statement yang kontroversi tentang ketidakpercayaannya terhadap resesi (merupakan kondisi yang ketika produk domestik bruto (GDB) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif) tidak dapat dihindari. Pada zaman sekarang pernyataan seperti itu tidak lagi kontroversi. Resesi sekarang dianggap sebagai fenomena yang pada dasarnya dapat dihindari, sama seperti kecelakaan pesawat ter- bang, dan berbeda dari bencana alam. Akan tetapi, biarpun kecelakaan pesawat terbang bisa ditekan, namun kecelakaan pesawat terbang tidaklah dapat dihapuskan dengan sepenuhnya. Begitu juga sampai sekarang kita masih belum tentu tahu apakah kita benar-benar memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk menghapuskan resesi oleh karena bahaya terjadinya resesi belum sepenuhnya hilang. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan resesi secara berulang kali masih tetap ada, dan tinggal menunggu waktu lagi sebelum terjadi (Okun, 1970). Lebih lanjut, Okun menegaskan bahwa permasalahannya terletak pada ‗rentannya' perekonomian terhadap pergerakan naik turun secara kumulatif (Okun, 1970).

2. Pola hubungan ideal antara relasi negara dan perusahaan

Instabilitas pasar adalah fakta yang menyanggah simpulan bahwa pasar dapat meregulasi dirinya sendiri. Fakta tentang terjadinya instabilitas ini memberikan dukungan terhadap pendapat bahwa tujuan sosial dan tujuan pribadi yang pemenuhannya menjadi pembenaran bagi pengaturan terhadap kehidupan ekonomi melalui pasar juga dapat sekaligus membenarkan adanya pembatasan atau intervensi terhadap pasar lewat perubahan-perubahan terhadap institusi hubungan kepe- milikan (*proverty relation*) seperti regulasi dan kebijakan. Instabilitas dapat terjadi dalam perekonomian kapitalis karena proses-proses dalam perekonomian itu (pergerakan, output, investasi, lapangan kerja, dan harga) cenderung untuk saling menguatkan satu sama lain atau yang disebut dengan istilah kumulatif. Untuk bisa membatasi atau meng- intervensi proses-proses yang bersifat kumulatif seperti ini, maka di-

perlukan perubahan pada hubungan kepemilikan dan jenis kontrak yang bisa digunakan para pelaku pasar (Caporaso dan Levine, 2015). Ciri khas dari pendekatan Keynesian yang membedakannya dari pen- dekatan neoklasik dapat dilihat pada pandangan dari pendekatan Keynesian bahwa keputusan investasi lebih dipengaruhi oleh perkiraan akan permintaan di masa depan daripada biaya produksi yang sudah terjadi. Pandangan itu memiliki implikasi penting bagi argumen Keynesian tentang instabilitas dari pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Pasar tenaga kerja merupakan inti dari permasalahan instabi- litas dalam ekonomi politik (Caporaso dan Levine, 2015).

Sehubungan dengan itu, Lindblom (1977) menegaskan terdapat dua alasan mengapa pasar tenaga kerja menduduki posisi inti dalam ekonomi politik ini. Pertama, pasar tenaga kerja adalah mekanisme yang digunakan sebagian besar individu dalam perekonomian kapitalis untuk mendapatkan nafkah bagi penghidupan mereka dalam sebuah perekonomian kapitalis yang dipertaruhkan dalam pertukaran adalah nafkah untuk menyambung hidup. Kedua, kontrak upah meng- hubungkan antara permintaan produk dengan upah dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini senada dengan sirkulasi dari proses ekonomi dalam sebuah perekonomian swasta bisa terjadi karena penyerapan tenaga kerja akan ditentukan oleh permintaan dan sekaligus menentu- kan permintaan.

Kesuksesan dari perekonomian kapitalis akan ditentukan oleh kemampuannya untuk memberikan nafkah bagi individu-individu dalam masyarakat lewat beberapa kontrak yang dibuat secara sukarela. Instabilitas ekonomi akan mengganggu kelancaran dari permintaan tenaga kerja yang artinya bahwa dari waktu ke waktu, permintaan akan tenaga kerja tidak memadai untuk memberikan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, sehingga tidak bisa memberikan pendapatan yang memadai bagi para pekerja (Caporaso dan Levine, 2015).

Pendekatan Keynesian tentang keputusan untuk menabung tidaklah menimbulkan atau mendorong orang untuk membeli barang kapital (investasi riil). Kalau pemikir-pemikir sebelum Keynes me-

mandang bahwa terdapatnya perimbangan antara tabungan dengan konsumsi yang sama seperti perimbangan antara membeli sarana produksi dengan membeli barang konsumsi (perimbangan *trade off*) dalam artian bahwa jika yang satu naik, maka dengan sendirinya yang lain akan turun dan sebaliknya. Semakin besar niatan masyarakat untuk menabung, maka semakin parah kondisinya di masa sekarang dan masa depan. Hal ini merupakan kritik terhadap argumen ekonomi politik yang membenarkan kesenjangan pendapatan yang ditimbulkan oleh operasi-operasi dalam pasar yang tidak diregulasi dengan baik.

Ketika diasumsikan bahwa stabilisasi memang perlu dilakukan terhadap perekonomian swasta, beberapa ekonom memandang bahwa metode-metode stabilisasi adalah sekadar alat, di mana proses politik dan penilaian politik tidak perlu ikut campur. Dengan demikian tindakan stabilisasi dipandang sebagai sebuah masalah teknis belaka yang sebaiknya dijalankan oleh mereka yang memiliki pengetahuan dalam melakukannya (Caporaso dan Levine, 2015). Pandangan bahwa tindakan stabilisasi adalah masalah teknis belaka merupakan pan- dangan yang memang sesuai dengan agenda pendekatan klasik yaitu depolitisasi terhadap masyarakat. Bahkan dalam kondisi di mana intervensi dari lembaga politik dirasa perlu, aspek politik masih tetap bisa dikurangi sedapat mungkin dari dalam intervensi itu. Jika negara dipandang sebagai manager ekonomi yang kompeten, maka kita tidak perlu menggunakan konteks politik untuk memahami apa yang dilaku- kan negara, karena manajemen ekonomi dapat tetap dipandang sebagai kegiatan ekonomi biarpun pelaksananya adalah lembaga politik. Namun jika pengelolaan ekonomi itu sudah mulai melibatkan proses politik dan jika intervensi negara tergantung pada politik juga, maka kita tidak dapat lagi memandang negara sebagai sekadar manager ekonomi yang kompeten, oleh karena aspek politik sudah tidak dapat dihindari lagi di dalam kegiatan stabilisasi terhadap perekonomian (Caporaso dan Levine, 2015).

Sehubungan dengan itu, literatur dari teori siklus bisnis politik menekankan sebuah dimensi politik yang penting dalam pengelolaan

terhadap permintaan (Kalecki, 1971). Selanjutnya, kondisi ekonomi dalam sebuah masyarakat membawa dampak besar terhadap hasil-hasil dari proses pemilu. Ketika para pejabat dianggap bertanggung jawab atas kondisi perekonomian negara, maka kemungkinan apakah mereka akan terpilih lagi akan ditentukan oleh apakah perekonomian sedang mengalami resesi yang membuat mereka disalahkan ataukah per- ekonomian sedang mengalami lonjakan naik, sehingga mereka dipuji. jika kalangan pemilih (*electorate*) memiliki ingatan yang pendek, maka para pejabat dapat memperbesar kemungkinan mereka untuk terpilih lagi dengan cara mengelola siklus ekonomi, sehingga bisa memastikan bahwa fase tertentu dari siklus itu akan terjadi pada masa-masa tidak lama sebelum pemilu dilaksanakan. Hal ini menjadi pertimbangan-pertimbangan ekonomi akan menjadi lebih besar bobotnya daripada pertimbangan ekonomi, dan instabilitas ekonomi yang terjadi dalam masyarakat bukannya mendorong pejabat-pejabat untuk mengelolanya dengan kompeten melainkan akan menghasilkan apa yang disebut sebagai siklus bisnis politik (Caporaso dan Levine, 2015).

Ada satu dimensi politik lain yang memiliki implikasi yang bahkan lebih luas daripada siklus bisnis politik adalah ketika terjadi penolakan atau tantangan terhadap institusi-institusi dasar dari pasar tenaga kerja. Beberapa teoretisi memandang bahwa tantangan seperti ini adalah upaya untuk menstabilkan perekonomian dan melindungi level pendapatan dari naik turunnya pasar yang tidak diregulasi (Offe, 1984). Semakin kuat anggapan masyarakat bahwa fungsi per- ekonomian harus diserahkan kepada administrasi politik, maka semakin lemah pula keyakinan masyarakat tentang pentingnya pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Dekomodifikasi terhadap tenaga kerja dianggap bukan lagi komoditas yang bisa diperjual belikan akan menimbulkan krisis legitimasi yang dapat menimbulkan tantangan politik terhadap perekonomian pasar.

Adapun pengelolaan terhadap permintaan, biarpun diupayakan untuk didepolitisir (dijadikan masalah administrasi) sedapat mungkin, tetap memiliki dampak-dampak yang relevan dengan dimensi politik.

Pengelolaan permintaan membuat masalah konfigurasi hubungan antara publik dengan swasta masuk ke dalam agenda politik dan menimbulkan dorongan untuk mempertahankan kembali prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengatur sistem pasar swasta. Jika proses pengelolaan terhadap permintaan dapat menghapuskan sifat komoditas dari tenaga kerja, sehingga nilai tenaga kerja harus ditentukan ber- dasarkan kebutuhan untuk menyejahterakan individu yang memiliki tenaga kerja itu, maka batas-batas dari pasar dan spesifikasi dari sifat komoditas menjadi problematis dan menjadi bahan perdebatan politik mengenai regulasi pasar terhadap dirinya sendiri (Caporaso dan Levine, 2015).

Selain itu, interaksi antara kekuasaan dengan fenomena ekonomi dapat menjadi fokus dalam ekonomi politik. Namun, hambatan yang mempersulit pembentukan kerangka ekonomi politik dengan berdasar- kan pada kekuasaan juga tidak sedikit. Konsep pasar sangat erat kaitan- nya dengan ide bahwa individu dapat memilih dan membuat kontrak secara sukarela. Pasar adalah struktur pembeli dan penjual yang bersifat impersonal dan tersebar di mana para pembeli dan penjual ini bekerja secara independen di dalam mengejar tujuan pribadi mereka sendiri. Pasar seringkali dipahami sebagai terdiri dari banyak orang, di mana biaya peluangnya tidak besar oleh karena peluang baru akan selalu muncul bersifat optimal (Caporaso dan Levine, 2015).

Sehubungan dengan itu, pemahaman semacam ini semakin diperkuat oleh kriteria utama yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dalam teori ekonomi neoklasik, yaitu kriteria optimalitas Pareto. Sebuah pertukaran akan dikatakan memiliki ke- unggulan Pareto (Pareto-superior) dari pada pola yang sedang berlaku kalau pertukaran itu dapat membuat satu orang atau lebih menjadi lebih sejahtera tanpa merugikan siapa pun. Jika pihak-pihak yang melakukan pertukaran melakukannya tanpa paksaan, dan jika pertukaran itu dispesifikasikan secara penuh, sehingga semua pelaku dan barang yang relevan dengannya ikut diperhitungkan, setidaknya secara *exante* (secara teoritis).

Penggunaan standar optimalitas Pareto dan pengabaian terhadap faktor kekuasaan ini saling menguatkan satu sama lain. Kriteria optimalitas Pareto membuat perhatian kita teralih pada kasus-kasus di mana tidak seorangpun pelaku pasar mengalami kerugian. Dalam sebuah pasar, orang bisa jadi tidak berhasil mendapatkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraannya, atau tidak berhasil mendapat- kan pekerjaan yang menarik, tapi posisi yang paling bawah, yaitu titik terendah yang bisa dialami seseorang adalah *status quo* (kondisi awal sebelum pertukaran terjadi atau sebelum pasar terbentuk). Penggunaan kriteria optimalitas Pareto dan fokus terhadap pilihan sukarela mem- buat faktor kekuasaan menjadi terabaikan (Caporaso dan Levine, 2015).

Bagi mereka yangmembela konsep kekuasaan menjadi terabai- kan, kekuasaan tidak ada dan tidak boleh ada dalam pasar. Ke- munculan dari kekuasaan sangat tidak diinginkan dan harus dihambat. Namun, bagi mereka yang mengeritik kapitalisme pasar, di dalam pasar sebenarnya tetap ada kekuasaan dan bahkan pasar itu sendiri memiliki kekuasaan namun kekuasaan itu cuma sekadar tembus pandang dan seolah tidak kelihatan (Caporaso dan Levine, 2015). Sehubungan dengan itu, maka dalam pandangan Galbraith, pasar adalah sarana memperlancar fungsi dari kekuasaan kapitalisme industrial dan sekaligus menyembunyikan kekuasaan itu. Tidak kentaranya faktor ke- kuasaan dalam pasar dipandang bukan sekadar sebagai kebetulan ter- jadi, melainkan sebuah syarat mutlak atau tidak sebuah kondisi yang menguntungkan bagi landasan idiologis bagi kapitalisme. Untuk mem- bela perusahaan modern adalah argumen bahwa mereka tidak memiliki kekuasaan, bahwa semua kekuasaan telah dilepaskan dan diserahkan kepada mekanisme pasar yang bersifat impersonal (Galbraith, 1983).

Dalam beberapa tahun terakhir istilah ekonomi politik digunakan oleh beberapa pemikir untuk menyebut hubungan antara pasar dengan kekuasaan. Selanjutnya, pandangan Keohane (1984), menyatakan bahwa ketika dalam sebuah perekonomian, pelaku yang satu menerap- kan kekuasaan para pelaku yang lain, maka perekonomian itu bersifat

politis. Sehubungan dengan itu, pandangan dari beberapa ekonom radikal yang menyatakan bahwa perekonomian (terutama per-ekonomian pasar kapitalis) adalah sebuah sistem kekuasaan (Caporaso dan Levine, 2015). Selanjutnya, Lukes (1986), tentang konsep ke- kuasaan memiliki beberapa makna dan sejauh mana berhasil meng- hubungkan antara kekuasaan dengan perekonomian pasar akan sangat tergantung pada apa makna kekuasaan yang digunakan.

C. Relasi Kuasa Negara dan Bisnis

1. Kekuasaan dalam jaringan bisnis

Konsep kekuasaan yang paling sederhana, paling banyak dianut dan paling mudah dipahami secara intuitif adalah pandangan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan kita untuk mencapai tujuan kita di dunia ini (Caporaso dan Levine, 2015). Kekuasaan merupakan bentuk pengungkapan ide bahwa agar kita bisa mencapai tujuan kita, maka kita harus melakukan sesuatu untuk memengaruhi dan mengubah dunia sekitar kita. Sehubungan dengan itu, faktor hambatan atau kesulitan adalah sangat penting perannya di dalam mendefinisikan kekuasaan. Dalam bukunya *Economy and Society*, Max Weber (1956, 1978) men- definisikan kekuasaan sebagai probabilitas bahwa seseorang pelaku dalam hubungan sosial mampu melaksanakan kehendaknya sendiri biarpun ada hambatan, tanpa memperdulikan dasar-dasar untuk me- nemukan probabilitas itu. Tapi, biarpun faktor hambatan atau kesulitan selalu ada dalam hubungan kekuasaan dalam politik, tapi faktor hambatan ini tidaklah secara logis menjadi syarat mutlak agar sesuatu dapat disebut sebagai kekuasaan (misalnya seseorang memanipulasi kondisi yang dihadapi orang lain sedemikian rupa, sehingga orang lain ini akhirnya merasa perlu untuk bertindak yang dapat menguntungkan orang yang pertama tadi, sehingga hambatan bagi kepentingan orang itu menjadi tersingkir).

Selanjutnya, ide tentang hambatan memegang peranan penting di dalam analisis kekuasaan, namun perannya memiliki banyak jenis dan kadang-kadang tidak kentara. Hambatan bisa saja terjadi karena

kita berusaha mengubah sesuatu yang pada dasarnya memang sulit untuk berubah. Ini dapat disebut sebagai hambatan alami (*natural resistance*). Tapi di sisi lain hambatan juga bisa timbul dari orang lain yang memiliki tujuan yang berbeda dari diri kita. Hambatan juga bisa berbentuk adanya atau tidak adanya institusi sosial politik tertentu. Institusi bisa menghambat pencapaian tujuan manusia (Caporaso dan Levine, 2015).

Dapat dikatakan bahwa, memiliki kekuasaan terhadap alam bila- mana individu dapat mencapai tujuannya biarpun ada hambatan dari alam seperti misalnya membajak tanah, di mana individu dituntut untuk mengeluarkan tenaga yang dimiliki berasal dari tubuh individu sendiri. Selanjutnya, individu dapat menguasai individu lain dengan cara mengubah insentif yang diperoleh individu itu agar menjadi positif bagi individu itu, atau yang disebut sebagai dorongan atau mengubah insentif yang diterima orang lain agar menjadi negatif yang biasanya disebut sebagai koersi atau kekuasaan. Jenis kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan bersama individu lain adalah lebih kompleks sifatnya. Individu tidak selalu bisa mencapai tujuannya kalau harus berusaha sendirian, sehingga agar tujuan itu tercapai, maka ia harus bekerja sama dengan orang lain. Kerja sama ini bisa bersifat sementara, tetapi bisa juga memerlukan adanya institusi (Caporaso dan Levine, 2015). Semua konsep kekuasaan didasarkan pada ide tentang tujuan atau ke- pentingan. Ketika kepentingan ini didasari oleh pelaku yang membuat keputusan (ketika pelaku itu secara sadar berusaha mengejar kepen- tingan mereka), maka kita dapat menyebutnya sebagai kebutuhan, pilihan, dan tujuan (Caporaso dan Levine, 2015).

Ketika para pelaku tidak sadar tentang pentingnya berbagai dampak tertentu bagi dirinya, maka kita dapat menyebutnya sebagai kepentingan. Sehubungan dengan itu, maka Max Weber dalam bukunya yang berjudul *Protestant Ethic and Spirit of Capitalism* (1904-1905, 1958), manusia didominasi oleh keinginan untuk men- dapatkan uang, oleh keinginan untuk mendapatkan kekayaan sebagai tujuan yang paling utama dalam hidupnya. Keinginan untuk mendapat-

kan kekayaan ekonomi bukan lagi untuk memuaskan kebutuhan meterial melainkan sudah menjadi tujuan akhir atau tujuan mutlak.

Oleh karenanya, dalam pandangan para ekonom, kepentingan secara otomatis akan diterjemahkan menjadi pilihan, dan pilihan secara otomatis berubah menjadi keputusan tentang mana dari alternatif- alternatif yang tersedia yang akan diambil di mana konsep ini yang selanjutnya, disebut sebagai kepentingan langsung (*direct interest*) (Caporaso dan Levine, 2015). Selanjutnya, para ekonom menyebut konsep ini sebagai kepentingan subjektif (Flathman 1966; Balbus 1971) atau konsep kepentingan behavioral (Lukes, 1974). Selanjutnya, Connoly (1983), tentang kepentingan riil adalah kepentingan yang terbentuk akan adanya kesadaran akan diri sendiri (*self awereness*) dan pilihan yang dibuat dengan informasi lengkap (*fully informed choice*). Sehubungan dengan itu, Balbus (1971) berpendapat bahwa kepentingan dalam artian ini dapat diketahui dengan melihat bahwa dapat mengajukan bukti untuk membuktikan bahwa seorang individu bisa memiliki kepentingan walaupun ia tidak menyadarinya atau biarpun apa yang dianggap individu itu sebagai kepentingannya sebenarnya bukanlah kepentingannya yang sebenarnya.

Selain itu, peran lain dari negara ialah menyatakan perubahan persaingan ekonomi yang mengikis basis kedaulatan politik mengatakan ketika di bawah wilayah rezim perdagangan bebas tidak bisa lagi dilindungi dari persaingan dari daerah lain di dunia tidak lagi identik dengan kaum borjuis dan ketika kekuatan politiknegara ini dirusak oleh kekuatan pasar. Dalam sebuah situasi bangsa, negara, dan daerah men- coba untuk mendapatkan kembali kedaulatan mereka dengan kompen- sasi karenasuku bunga mereka menurun, nilai tukar dan harga komoditas dengan program politik dalam meningkatkan daya saing sistemik dari wilayah tertentu (Porter, 1990).

Pengurangan biaya tenaga kerja tersebut (misalnya hilangnya kewajiban dan pengurangan upah/gaji), penciptaan sinergi jaringan positif dalam dan impuls teknologimerupakan pilar utama biaya intensive. Secara mikro dan makro untuk tetap

kompetitif, maka eko-

nomi harus dikurangi dalam kondisi tertentu yang ditentukan oleh komoditas harga, nilai tukar dan suku bunga yang berada di luar pengaruh masing-masing negara. Dalam konteks seperti negara bangsa sedang berubah menjadi negara kompetitif (Hirsch, 1977) yang mem- promosikan lokasi produksi ekonomi dan membela mereka secara politik terhadap produk asing dan daerah penghasil. Strategi tersebut bermasalah selama memperluaspasar dunia dalam memberikan kondisi sebagai *positive sum game*. Namun jika *zero sum game* atau bahkan *negative sum game* menentukan aturan persaingan kebijakan menjadi jalur untuk menghancurkan rasionalisasi (misalnya menggantikan tenaga kerja dan meningkatkan pengangguran) dan strategi berbahaya eksternalisasi sosial dan kerugian masyarakat.

2. Jaringan kekuasaan dalam perburuan ekonomi rente

Sehubungan dengan itu, menggunakan konsep pendapatan (*income*) yang ditransformasikan menjadi konsep perburuan rente. Konsep ini sangat penting untuk menjelaskan perilaku pengusaha, politisi, dan kelompok kepentingan lainnya (Rachbini, 2002). Teori *rent-seeking* pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Krueger pada Tahun 1974 yang kemudian dikembangkan oleh Bhagwati Tahun 1982, dan Srinivisan Tahun 1991 (Yustika, 2014). Dalam pengertian ini, perilaku mencari rente dianggap sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi atau menelikung kebijakan ter- sebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente (Little, 2002). Asumsi dasar yang dibangun dari teori ekonomi politik adalah setiap kelompok kepentingan berupaya untuk mendapatkan keuntungan eko- nomi yang sebesar-besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya. Pada titik inilah, seluruh sumber daya ekonomi politik yang dimiliki, seperti misalnya lobi yang akan ditempuh demi menggapai tujuan tersebut (Olson, 1982; Dasgupta, 1998).

Selanjutnya, kegiatan mencari rente (*rent seeking*) bisa di- definisikan sebagai upaya individual atau kelompok untuk meningkat- kan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Kelompok- kelompok bisnis dan perseorangan (individu) mencari rente ekonomi

ketika mereka menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menghambat penawaran atau peningkatan permintaan sumber daya yang dimiliki (Clark, 1998). Selanjutnya pandangan yang dikemukakan oleh Prasad (2003), tentang *rent-seeking* yang mendefinisikannya sebagai proses di mana individu memperoleh pendapatan tanpa secara aktual meningkatkan produktivitas, atau malah mengurangi produktivitas tersebut. Hal ini juga didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Little (2002), tentang semakin besar perluasan pemerintah untuk menentukan alokasi kejahteraan (*allocation of wealth*), maka kian besar kesempatan bagi munculnya para pencari rente.

Untuk kasus di Indonesia, misalnya dalam pemerintahan Orde Baru, kegiatan *rent-seeking* tersebut dapat ditelusuri dari persekutuan bisnis besar (yang menikmati fasilitas monopoli maupun lisensi impor) dengan birokrasi pemerintah. Perusahaan-perusahaan swasta itu sebagian besar dikuasai oleh mereka yang memiliki hubungan pribadi khusus dengan elite pemerintah, dan dalam banyak kasus dengan pe- merintahan Soeharto (Mallarangeng, 2002). Dengan adanya dukungan fasilitas tersebut, maka secara langsung pemilik ekonomi rente se- kaligus memperoleh dua keuntungan; pertama, mendapatkan laba yang berlebih, dan kedua, mencegah pesaing masuk dalam pasar.

Selanjutnya menurut Krueger (2000), menjelaskan ihwal aktivitas mencari rente, seperti misalnya lobi untuk mendapatkan lisensi atau surat izin, akan mendistorsi alokasi sumber daya, sehingga membuat ekonomi menjadi tidak efisien. Sehubungan dengan hal itu, Tullock juga memberikan contoh yang terdapat di negara berkembang, di mana pejabat pemerintah menjual posisinya untuk merekrut tenaga kerja. Pada saat pejabat pemerintah tersebut menerima uang sebagai imbalan atas jasanya memasukkan seseorang menjadi pegawai tanpa kompetensi yang memadai, maka implikasi kinerja (ekonomi) negara tersebut akan buruk oleh karena ditangani pegawai-pegawai yang tidak cakap (Tullock, 1980; Dasgupta, 1998).

Pada kategori ini *rent-seeking behavior* tidak saja membuat alokasi sumber daya ekonomi menjadi melenceng, melainkan secara

langsung mengikis kesempatan untuk mencapai efisiensi ekonomi yang lebih tinggi. Dengan begitu, maka beberapa hal bisa disimpulkan dari penjelasan mengenai perilaku mencari rente (Krueger, 2000), pertama, masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menangkap peluang hak milik (*property rights*) yang ditawarkan oleh pemerintah. Pada titik ini, kemungkinan munculnya perilaku mencari rente sangat besar. Kedua, bahwa setiap kelompok atau individu pasti akan ber- upaya untuk mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan. Implikasinya, keseimbangan politik (*political equilibrium*) mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka panjang karena akan selalu muncul kelompok penekan baru yang mencoba untuk mendapatkan fasilitas istimewa. Ketiga, bahwa di dalam pemerintah sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dengan kata lain, kepentingan pemerintah tidaklah tunggal. Dalam konteks inilah ideologi menjadi faktor determinan penting yang akan menuntun bentuk kepentingan pemerintah.

Mas‖oed (2003) mengemukakan pandangannya tentang gagasan pemberdayaan masyarakat lapisan menengah dan bawah, terutama melalui pemupukan sumberdaya ekonomi mereka. Masyarakat lapisan bawah masih mengalami keburukan kekuasaan negara dalam kehidu- pan nyata, misalnya dalam bentuk klientisme dan *rent-seeking*. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa negara masih berfungsi sebagai monopolis politik, pengendali sosial, dan sekaligus sebagai katalisator ekonomi. Dalam hal ini pemerintah memonopoli kemampuan dalam mencari dan mengerahkan aliran investasi ke arah yang mereka tetapkan.

Oleh karenanya, banyak pengusaha yang berhasil di tingkat lokal sebab memiliki hubungan patronase politik dengan penguasa lokal, berbagai cara yang dimanfaatkan oleh para kelompok pengusaha untuk mencari akses ke dalam birokrasi (kelompok penguasa). Selanjutnya, memunculkan hipotesis kaum modernisasionis tentang hubungan antara asset ekonomi dengan asset otonomi perilaku politik diputar- balikkan. Sementara hipotesis tersebut menyatakan bahwa asset eko-

nomi yang dikuasai seseorang berkorelasi positif dengan tingkat otonomi politiknya yang kenyataannya di kalangan pengusaha di tingkat lokal umumnya menunjukkan korelasi yang negatif. Dengan kata lain semakin besar asset usaha, semakin kecil otonomi politiknya. Sebagaimana yang dicontohkan Mas‖oed tentang sektor bisnis konstruksi. Kontraktor besar (misalnya, type B) di daerah kabupaten cenderung memiliki otonomi politik lebih kecil dibanding dengan kontraktor kecil (misalnya, type C) hal ini disebabkan semakin besar volume pekerjaan yang ditangani semakin banyak pula memerlukan peranan pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa betapa pengembangan kekuatan eko- nomi lokal sangat ditentukan oleh peran negara.

Selain itu Mas‖oed (2003) mengungkapkan pandangannya ihwal dampaknya tentang rentannya pengorganisasian kekuatan di tingkat masyarakat lapisan bawah sebab lemahnya mekanisme artikulasi. Tanpa pengorganisasian yang efektif, potensi rakyat pada lapisan bawah tidak akan bisa diterjemahkan menjadi kekuatan aktual untuk memperbaiki nasibnya. Seharusnya proses demokratisasi yang ber- makna mesti ditopang dengan upaya pemberdayaan aktor pada lapisan bawah. Baik pada sektor birokrasi, bisnis, maupun kegiatan masyarakat pada umumnya yang bertujuan agar aktor pada tingkat lokal dapat mengembangkan dan mengelola sumberdayanya secara mandiri.

Sehubungan dengan itu, menurut Stigler (dalam Rachbini, 1996), ada dua alternatif pandangan tentang bagaimana sebuah per- aturan diberlakukan. Pertama, peraturan dilembagakan terutama untuk memberlakukan proteksi dan kemanfaatan tertentu untuk publik atau sebagian subkelas dari publik tersebut. Kedua, suatu tipe analisis di mana proses politik dianggap merupakan suatu penjelasan yang rasional. Pada posisi ini, masalah peraturan ekonomi adalah bagian dari proses politik dan fenomena ekonomi. Di dalam sistem politik yang demokratis, sistem politik bisa menjadi medium yang tepat bagi penduduknya.

Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi yang dibuat, menurut perspektif ekonomi politik, pertama-tama yang harus dianalisis sampai

sejauh mana kebijakan tersebut berpotensi memunculkan perilaku mencari rente. Jika kemungkinan ke arah itu terbuka secara lebar, maka sebaliknya kebijakan ekonomi tersebut dibatalkan. Dalam pemanfaatan hukum bagi kepentingan kelompok tertentu, saat ini perkembangannya sudah sedemikian memuncak, sehingga pembentukan organisasi untuk memperoleh pendapatan dengan cuma-cuma (*unearned income*) yang dibagikan oleh negara atau disalurkan melalui sistem hukum, atau setidak-tidaknya untuk melindungi diri sendiri dengan membentuk apa yang dinamakan *redistributive combines* (kelompok redistribusi) yang tidak terbatas pada bidang-bidang lazimnya erat berhubungan dengan kegiatan politik, partai politik, media massa, atau organisasi informal, tetapi meluas sampai ke perusahaan-perusahaan dan bahkan pada keluarga-keluarga penguasa maupun pengusaha. Kelompok-kelompok ini selalu bertarung satu sama lain untuk menjaga jangan sampai suatu peraturan baru mengancam kepentingan mereka, tetapi juga dapat menguntungkan. Akibatnya, pihak yang berwenang di negara jika membuat peraturan hukum hampir selalu semata-mata untuk tujuan membagi-bagi pendapatan tanpa kerja dan menjadikan negara sebagai sebuah demokrasi kelompok-kelompok kepentingan (De Soto, 1992).

Selain itu, menurut Rachbini (1996), dalam pola *redistributive combines* ini sumber-sumber ekonomi, aset produksi, dan modal di- distribusikan secara terbatas hanya di lingkungan segelintir orang saja. Dengan demikian, di dalam suatu negara korporatis kesejahteraan dan hasil-hasil pembangunan ekonomi hanya bergulir dilingkungan ter- batas, puncak kekuasaan dan segelintir pengusaha besar yang mem- peroleh previlege khusus.

Dalam kerangka pemikiran De Soto (1992), berlakunya pola *redistributive combines* ini terjadi akibat sistem politik yang tertutup oleh karena dilindungi sistem hukum yang kabur dan ketiadaan *rule of law* di bidang ekonomi. Dengan demikian sistem ekonomi bersedia mengabdi kepada sistem politik dengan pola *redistributive combines* tersebut. Sistem hukum sengaja dibiarkan kabur dan prosedur pe-

netapannya dikendalikan di tangan kekuasaan eksekutif, sehingga produk hukum yang muncul tetap berpihak kepada penguasa.

3. Pengembangan bisnis dan pemerataan pembangunan

Di samping itu, menarik juga untuk menghubungkan dengan teori *distributive combines* yang dikembangkan oleh De Soto dengan teori keadilan (*theory of justice*) yang dikembangkan oleh Rawls (1999). Lebih lanjut, Rawls (1999), relasi antara dua teori ini bisa di- lacak dari dua logika berikut. Pertama, teori *redistributive combines* mengandaikan adanya otoritas penuh dari negara/pemerintah untuk mengalokasikan kebijakan kepada kelompok-kelompok ekonomi yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan tertentu. Masalah yang ber- kembang ialah negara/pemerintah bukanlah agen yang netral, melain- kan organ yang memiliki kepentingan seperti yang diasumsikan dalam teori pilihan publik. Akibatnya, kebijakan yang muncul sebagai hasil dari interaksi antara kelompok kepentingan ekonomi dan pemerintah yang kerapkali cuma menguntungkan salah satu diantara pihak saja serta merugikan pihak yang lainnya, sehingga memunculkan isu ketidakadilan. Kedua, kelompok kepentingan ekonomi yang eksis tidak selamanya mengandaikan tingkat kemerataan seperti yang di- harapkan masyarakat, khususnya masalah kekuatan ekonomi. Pada kasus struktur produksi sistem kapitalis, bahwa struktur kepemilikan modal yang inheren di dalam strukturnya memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan struktur lainnya.

Dengan kondisi demikian, Rawls (1999), struktur yang akan mendikte perilaku agen yang bekerja dibawahnya (kelompok kepen- tingan (ekonomi) yang memiliki modal yang lebih besar akan di- pastikan akan lebih mampu membeli kebijakan pemerintah dibanding- kan dengan kelompok kepentingan yang memiliki modal kecil). Sehubungan dengan itu, Rawls (1999), mengonseptualisasikan teori keadilan yang bertolak dari prinsip; pertama, setiap orang harus me- miliki hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar (*equal basic liberties*) yang sekaligus kompatibel dengan skema ke- bebasan yang dimiliki oleh orang lain. Kedua, ketimpangan sosial dan

ekonomi harus ditangani, sehingga keduanya dapat diekspektasikan secara logis menguntungkan bagi setiap individu dan dicantumkan posisi jabatan yang terbuka bagi seluruh pihak. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian membawa Rawls pada sikap untuk meyakini bahwa sebetulnya keadilan itu tidak lain dari bentuk kepatutan/kepantasan. Kebijakan yang mengandaikan adanya relasi antar aktor dan struktur dengan sendirinya akan meng-akibatkan ketidakadilan apabila isi dari kebijakan tersebut mengandung unsur ketidakpatutan.

Dalam pandangannya Rawls, 1999 (dalam Little, 2002), memberikan fokus pemikiran untuk menciptakan sistem prinsip-prinsip politik yang berbasis kontrak atau kesetaraan. Di mana prinsip inilah yang kemudian membedakan konsep keadilan prosedural dengan prinsip keadilan sosial yang dikembangkan oleh Rawls. Keadilan sosial ini yang kemudian diarahkan pada penyiapan penilaian terhadap sebuah standar aspek distribusi dari struktur dasar masyarakat. Sejalan dengan konsep keadilan yang telah dikemukakan oleh Rawls, maka pandangan dari Mujahidin (2012) bahwa dengan meningkatkan kua- litas demokrasi dengan budaya politik hibriddi mana kekuasaan demokrasi ditentukan oleh seberapa besar publik ikut mengontrol ke- kuasaan. Mujahidin memberikan contoh terhadap penggunaan simbol budaya, kuasa, dan uang dalam proses pembentukan elite politik dan ekonomi di Sulawesi Selatan akan sangat membahayakan pertumbuhan demokrasi. Padahal, demokrasi yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama kepada warga negara untuk bermain pada panggung publik. Untuk menghindari penggunaan simbol budaya, kuasa dan uang yang berlebihan maka proses demokrasi harus di-jalankan dengan sistem yang jelas dan pengawalan yang ketat oleh kelompok-kelompok masyarakat. Dengan begitu, keadilan sosial berdiri diatas bangunan kepatutan (*justice as fairness*). Oleh karenanya hal ini disebabkan karena prinsip-prinsip keadilan tersebut akan menghasilkan kesepakatan dan negosiasi yang imparsial (situasi yang didesain untuk memperkuat ketiadaan kepentingan perwakilan yang dapat dibebankan kepada pihak lain).

Bab 2
Teori Relasi Kuasa Michel Foucault

A. Teori Kuasa dan Pengetahuan

Pemahaman tentang relasi kuasa dan pengetahuan merupakan dasar teoritis Michel Foucault. Secara eksplisit kajian Foucault tentang relasi kekuasaan dan pengetahuan sangat jelas dalam beberapa kajian- nya seperti misalnya kegilaan, arkeologi pengetahuan, penjara, dan seksualitas yang kemudian dipertegas dalam *power/knowledge*. Per- tautan antara keduanya berlangsung dalam proses relasi aktor dalam memproduksi dan mereproduksi wacana serta bagimana wacana be- kerja membentuk realitas. Beranjak dari pemikiran tersebut Foucault, tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, begitu pula tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Secara sinergis keduanya menentukan babakan per- adaban (Foucault, 1972; 1977; 1978; 1980). Untuk lebih memahami tentang relasi kuasa dan pengetahuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Foucault, maka berikut diuraikan pokok-pokok pemikirannya.

1. Konsep kuasadan pengetahuan

Dalam memaknai kuasa (*power*) Foucault berbeda dengan para ahli sebelumnya. Selanjutnya, konsep kuasa dalam perspektif Foucault bukanlah sebagai fitur material yang dikuasai dan digunakan oleh klas tertentu yang bertujuan menindas klas yang lain. Seperti yang dikemu- kakan dalam pemikiran Marxis, juga berbeda dengan pandangan Weberian bahwa kuasa sebagai kemampuan subjektif aktor untuk men- dominasi aktor yang lain. Dalam pandangannya, Foucault tidak sejalan dengan pandangan Jhon Locke bahwa kuasa sebagai hasil dari kontrak sosial, bukan pula sebagai milik lembaga negara yang cenderung represif dan otoriter seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Oleh karenanya, menurut Foucault (1980) kekuasaan menyebar di mana-mana (*power is omnipresent*).

Sehubungan dengan hal tersebut kekuasaan beroperasi secara terus-menerus dalam menciptakan pengetahuan. Sehubungan

dengan

itu, kekuasaan selalu beroperasi melalui nalar konstruksi pengetahuan, di mana keduanya bersinergi satu sama lain. Dalam sejarah penge- tahuan, tidak ada dikenal istilah seri dalam babakan peradaban yakni pengetahuan tanpa adanya kekuasaan, demikian juga sebaliknya, me- lainkan kekuasaan selalu bersemayam di pengetahuan. Lebih lanjut, Foucault (1977) bermaksud melakukan penataan kembali atas konsep kekuasaan yang selama ini dipahami sebagai milik negara yang mutlak memerintah, melarang, dan memberikan pemaksaan.

Kekuasaan bukanlah merupakan hak istimewa yang dipertahan-kan klas dominan, melainkan sebagai akibat dari keseluruhan posisi strategisnya. Dengan demikian bahwa kekuasaan-kekuasaan tidak di- miliki (*power is not possessed*) dengan maksud lain tidak semata-mata terkonsentrasi di tangan individu atau struktur yang dominan, baik oleh negara, perusahaan, ataupun organisasi, melainkan kekuasaan meresap dalam seluruh jalinan relasi-relasi sosial (Foucault, 1977). Dalam pandangan Foucault, kuasa bukanlah hal negatif, melain-kan positif dan produktif. Kekuasaan bukan sarana represi atau pemaksaan, me- lainkan mengalir dengan sendirinya di seluruh masyarakat dalam jaringan pengetahuan. Dengan cara ini, maka kekuasaan menjadi ter- desentralisasi dan terplurasi (Neal, 2009). Setiap kekuasaan pada dasar- nya berusaha membentuk pengetahuannya sendiri, menciptakan rezim kebenaran sendiri. Kekuasaan selalu datang dengan memproduksi suatu ekonomi politik kebenaran, melalui makna kekuasaan begitu di-mapankan, disusun, dan diwujudkan serta dilestarikan. Oleh karenanya, dalam kontestasi wacana sangat penting menelusuri bagaimana strategi produksi wacana, pola kontestasinya, dan strategi melestarikan wacana melalui reproduksi wacana dalam masyarakat.

Secara implisit akan diuraikan lima proposisi kekuasaan oleh Foucault (1978) sebagai berikut; (1) kekuasaan bukan sesuatu yang di-dapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam, akan tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak; (2) relasi kekuasaan bukanlah datang dari bawah yang menunjukkan relasi struktural hierarkis yang menunjukkan

adanya posisi yang menguasai dan yang dikuasai; (3) kekuasaan itu datang dari bawah yang menunjukkan tidak ada lagi distingsi bineritas karena kekuasaan itu mencakup keduanya; (4) relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif; (5) di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan, dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan.

Dalam memahami jejaring kuasa dalam relasi sosial, Foucault (2003a) menguraikan lima tahapan pendekatan, yakni; (1) men-desentralisasikan analisis terhadap kekuasaan dengan menolak model kekuasaan sentralistik yang bertujuan untuk melihat eksternalitas dari kekuasaan dan berbagai teknik material bagaimana ia mengintervensi kehidupan; (2) melihat kekuasaan secara eksternal dengan cara lebih mendekat pada kajian empiris, di mana lokasi yang bentuk-bentuk *power*-nya memiliki efek; (3) tidak menganggap kekuasaan sebagai komoditas yang dapat dimiliki, sebagai rezim dominasi antara yang kuat dan yang tidak berdaya, melainkan dalam jaringan yang melibat- kan individu sebagai subjek yang sekaligus objek kekuasaan; (4) tidak bekerja dari atas ke bawah, melainkan dari bawah ke atas; dan (5) tidak memulai dengan ideologi dan mengeksplorasi instrumen apa yang digunakannya, tetapi dimulai melalui mekanisme dan praktik-praktik dan menjelajahi bagaimana aktor membantu ideologi dan pengetahuan. Oleh sebab itu, terdapat empat uraianyang mendasari tentang konsep kuasa Foucault, yakni; (1) kuasa bukanlah milik, melainkan strategi. Kuasa tidak dimiliki, tidak disimpan, tidak pula dibagi, ditambah, atau juga dikurangi, melainkan kuasa dipraktikkan dalam arena sosial secara strategis; (2) kuasa tidak dapat dibatasi, melainkan tersebar di mana-mana. Kuasa dalam arena relasi kelompok kekuasaan dengan kelompok pengusaha di Kabupaten Maros tidak terbatas pada domain aktor, pemerintah, politisi begitu pula dengan masyarakat pemilih, melainkan kuasa bertebaran melalui produksi dan reproduksi wacana; (3) kuasa tidak bekerja secara represif, melainkan melalui normalisasi dan regulasi; (4) kuasa tidak bersifat destruktif, melainkan

produktif. Kuasa tidak bekerja secara negatif dan represif, melainkan dengan cara positif dan produktif.

2. Kuasa dalam regulasi wacana

Secara faktual, realitas sosial struktur pengendalian dibangun dalam relasi kekuasaan dan pengetahuan, dan bagaimana relasi kedua- nya beroperasi dalam formasi diskursif. Dalam sejarah pengetahuan, Foucault (1972) mengkaji wacana dengan memperhatikan aspek peng- gunaan bahasa, dan bagaimana penggunaan bahasa diartikulasikan dalam praktik sosial. Wacana dimaknai sebagai penggerak penge- tahuan di mana kuasa terdapat di dalamnya. Kajian wacana Foucault menekankan pada relasi kekuasaan (Mills, 2003). Bahwasanya ke- kuasaan didefinisikan sebagai suatu yang produktif ialah kuasa di- bangun, diterapkan, dan dipelihara melalui regulasi wacana. Kekuasaan terlaksana melalui wacana, dan wacana selalu berakar pada kekuasaan.

Namun demikian, Foucault tetap mencermati aspek kebahasaan dalam regulasi wacana, memaknai wacana/diskursus (*discourse*) berbeda dengan wacana dalam perspektif linguistik yang memfokuskan kajian pada struktur teks. Menurut Foucault (1972) wacana tidak dapat direduksi menjadi sekadar bahasa (*language*) dan sekadar ucapan (*speech*), melainkan wacana membentuk kekuasaan, dan kuasa di- praktikkan dalam setiap wacana. Kuasa bersemayam di balik penge- tahuan dan dioperasionalkan melalui aturan-aturan atau formalitas wacana (*formation discursive*). Setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan melalui produksi wacana tertentu. Dalam pandangan Foucault (2003b), bahwa proses penciptaan diskursus dalam setiap masyarakat akan senantiasa diatur, diseleksi, disusun, dan disebarkan berdasarkan prosedur-prosedur tertentu.

Pembentukan regulasi-regulasi diskursus (*the discursive regularities*) oleh Foucault (1972) meliputi beberapa aspek, yakni produksi objek, produksi modalitas penyampaian, produksi konsep-konsep, dan produksi berbagai strategi. Berbagai regulasi diskursif ini menentukan seseorang dalam memilah, mengelasifikasikan, dan menggolongkan wacana yang benar dan yang salah, mana yang sah dan mana yang

tidak. Dengan demikian, formasi wacana menentukan pola struktur sosial dan pola struktur material. Dalam konteks penelitian ini, me- nunjukkan bahwa pola relasi diantara kelompok penguasa dengan kelompok pengusaha bagian dari proses pembentukan kuasa yang menciptakan disiplin terhadap aktor-aktor politik yang berada dalam struktur pemerintahan.

Konsep wacana memiliki makna luas yakni baik yang tertulis maupun yang dikomunikasikan. Hal ini terpenting dalam telaah relasi kuasa dan pengetahuan adalah mengurai elemen-elemen wacana yang bergumul dalam pembentukan pengetahuan sebagai suatu kebenaran dalam lintasan historis tertentu. Oleh karena itu, tidak hanya sekadar menangkap realitas kekuasaan yang nampak dipermukaan, melainkan menemukan dan memaknai regularitas formasi diskursifnya sebagai- mana tradisi post-struktural. Formasi diskursif dalam relasi sosial manusia tidaklah berdiri secara otonom dalam kerangka kebenaran, melainkan wacana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses dan mekanisme kekuasaan.

Wacana bukanlah sekadar pembicaraan sehari-hari, namun lebih kepada perbincangan yang serius. Serius tidaknya suatu wacana di- tentukan oleh intensitas keterlibatan unsur relasi kuasa dan penge- tahuan dalam produksi dan reproduksi wacana. Analisis produksi dan reproduksi wacana bukan ditujukan pada nilai kebenaran wacana, melainkan bagaimana sebuah wacana bekerja dalam kaitannya dengan struktur kekuasaan dalam arena sosial tertentu. Dalam hal itu, Foucault (1980) menjelaskan bahwa masalahnya bukan menyusun garis pem- beda antara wacana yang termasuk dalam kategori ‗benar' dan wacana yang termasuk dalam kategori ‗salah', melainkan melihat bagaimana efek historis dari kebenaran yang diproduksi dalam sebuah formasi wacana.

Wacana mengacu pada produksi dan reproduksi pengetahuan melalui bahasa dalam memaknai struktur material (dunia benda material) dan struktur sosial (praktik sosial). Meski berada di luar bahasa, dunia benda dan praktik sosial dimaknai oleh bahasa, sehingga

dunia benda material dan praktik sosial itu dibentuk secara diskursif. Formasi diskursif merupakan peta-peta makna yang sudah diregulasi melalui proses kontestasi wacana. Oleh karena itu, wacana meng-konstruksi, mendefinisikan, dan memproduksi objek-objek penge- tahuan dengan cara yang dapat diterima oleh pemikiranmanusia yang secara keseluruhan serta menyingkirkan pemikiran negatif lainnya (Foucault, 1972).

Sehubungan dengan itu, Foucault (1972), menguraikan tentang pandangan seseorang terhadap suatu objek yang dibentuk dalam batas- batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif tersebut. Dalam hal ini, wacana dicirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi dan perspektif yang paling dipercaya dan dianggap benar. Dalam beberapa kajiannya seperti penjara, seksualitas, dan kegilaan, Foucault menun- jukkan bahwa seperti konsep gila, tidak gila, sehat, sakit, benar, dan salah, bukanlah konsep yang dengan sendirinya datang, melainkan lewat proses bentukan dan pelestarian oleh regulasi wacana. Produksi dan reproduksi wacana dalam arena pertarungan multi kepentingan akan menghasilkan pola wacana dominan dan wacana yang terpinggir- kan sebagai efek dari kontestasi wacana.

Sehubungan dengan hal itu, Salman (2012) menguraikan tiga rekonstruksikan berpola, yakni; (1) *zero zum game* berlangsung ketika terjadi saling meniadakan di dalam kontestasi antara narasi; (2) hibridisasi berlangsung ketika terjadi pencampuran kemudian melahir- kan fitur baru pengetahuan dalam kontestasi antara narasi; dan (3) ko- eksistensi berlangsung ketika terjadi kehadiran bersama tanpa saling pengaruh dalam kontestasi antara narasi.

Wacana dominan menyebabkan dua konsekuensi dalam relasi sosial. Pertama, wacana dominan memberikan arahan bagaimana suatu objek harus dipahami. Kebebasan memberi pandangan menjadi tidak penting, oleh karena wacana telah membentuk pola persepsi dan tindakan yang sesungguhnya sudahsiap untuk digunakan. Pandangan dibatasi hanya dalam batas-batas struktur diskursif tersebut, tidak dengan maksud lainnya. Kedua, struktur diskursif yang tercipta atas

suatu objek tidaklah berarti kebenaran. Batas-batas yang tercipta tersebut bukan hanya membatasi pandangan seseorang, melainkan juga menyebabkan wacana lain yang tidak dominan menjadi terpinggirkan (Foucault, 1972).

Untuk memahami formasi diskursif, Foucault (1972) menggunakan pendekatan arkeologi yang dimaksudkan untuk mengkaji per- bedaan-perbedaan wacana dalam setiap babakan peradaban. Dalam hal ini dikenal, dua macam kontradiksi yakni; (1) kontradiksi yang hanya nampak di permukaan yang akan hilang jika dicermati kesatuan men- dalam dari diskursusnya; dan (2) kontradiksi yang menyangkut ber- bagai fundamen diskursus. Kontribusi pendekatan arkeologi adalah mengungkapkan seluruh kontradiksi yang terdapat dalam setiap diskursus pemikiran, tanpa mengesampingkan antara wacana yang tampil di permukaan maupun fundamen wacana sebagai esensinya.

Analisis arkeologi juga menyangkut perbandingan-perbandingan antara satu praktik diskursif lainnya, atau perbandingan antara suatu praktik diskursif dengan suatu praktik non-diskursif, misalnya lembaga, peristiwa politik dan proses sosial ekonomi lainnya. Dalam *the birth of the clinic*, Foucault (1973), melihat adanya relasi-relasi antara praktik diskursif dan non-diskursif, dimana terdapat kejadian- kejadian politik, kebutuhan ekonomis, dan konstelasi sosial. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa Foucault menolak materialisme historis Marxist yang memandang bahwa keadaan sosial politik telah menentukan cara pandang medis. Bagi Foucault, diskursuslah yang menentukan praktik-praktik sosial.

Pendekatan arkeologi Foucault (1972), dimaksudkan untuk mengkaji sistem pemikiran atau formasi diskursif dengan meng- elaborasi tiga konsep penting, yakni; (1) positivities; (2) historical apriori; dan (3) *archive*. Positivitas dimaknai sebagai lingkup komuni- kasi (kesatuan wacana) antara berbagai aktor yang memproduksi wacana dalam waktu tertentu, sehingga dapat ditemukan kesamaan ataupun perbedaan (sinkronisasi) dari wacana yang bertebaran di mana-mana. Untuk dapat memahami sinkronisasi positivitas, maka

tolok ukur yang digunakan ialah apriori historis yang terdapat dalam setiap pernyataan pada aktor. Selanjutnya, medium yang digunakan untuk menemukan positivitas tersebut adalah arsip.

Dalam pandangannya Foucault dikutip oleh Milss (1997) men- jelaskan bahwa arsip merupakan seperangkat kaidah yang ada pada suatu periode dan pada suatu masyarakat tertentu untuk mendefinisikan berbagai batasan, yakni; (1) batas dan bentuk apa yang boleh diungkap- kan (*expressibility*); (2) batas dan bentuk konservasi (*conservation*); (3) batas dan bentuk memori (*forms of memory*); dan (4) batas dan bentuk pegiat kembali (*reactivation*). Foucault menjelaskan bahwa arsip merupakan sistem pernyataan yang dihasilkan oleh berbagai positivitas dengan apriori historisnya masing-masing.

Sehubungan dengan itu, Foucault secara implisit menjelaskan bahwa rezim wacana itu merupakan bentuk dari kekuasaan. Wacana dapat berwujud sebagai praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan yang dapat mengubah konstelasi sosial dan meng- hasilkan wacana sebagai memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan. Pada konteks ini kekuasaaan beroperasi secara positif dan produktif. Artinya, bahwa wujud kekuasaan itu tidak nampak, maka beroperasinya kekuasaan menjadi tidak disadari dan memang tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik kekuasaan yang sebenarnya mengendalikan tubuh individu.

Dengan demikian, relasi kuasa diantara penguasa dengan kelompok pengusaha yang terdapat pada semua pihak, serta wacana risiko yang ada pada pihak lain merupakan hasil dari relasi pemerintah dengan perusahaan. Konsep ‗menang-kalah' wacana tersebut bukanlah hal penting dalam pendekatan arkeologis, melainkan yang terpenting adalah mengungkapkan berbagai ruptures (patahan-patahan) pada setiap produksi dan reproduksi wacana, dan bagaimana wacana efek bekerja mengkonstruksi pola struktural dan pola material baru. Dalam kajian sejarah pengetahuan Foucault, hal ini berlangsung secara diskontuinitas dalam rentang historis. Pendekatan ini menjadi penting

untuk diperhatikan dalam menelusuri berbagai wacana yang diproduksi yang terdapat pada setiap babakan historis baru.

3. Kuasa membangun jaringan disiplin tubuh yang patuh

Seperti yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya bahwa kekuasaan menurut Foucault bukanlah subjektif searah, bukan pula kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan ke- hendak kepada yang lain secara represif, melainkan kekuasaan merupa- kan strategi yang secara kompleks dalam suatu masyarakat melalui mekanisme pendisiplinan. Demikian juga dengan wacana tidak di- bentuk atau diproduksi melalui regulasi formasi wacana, melainkan di- lestarikan. Fungsi wacana yang dilestarikan oleh Foucault (1977) adalah melestarikan hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat. berbagai wacana seperti misalnya gila, tidak gila, sehat, sakit, benar dan salah, ialah bukan merupakan konsep yang abstrak yang tidak memiliki maksud politis, melainkan dimaksudkan untuk melestarikan wacana. Melalui wacanalah struktur sosial dan struktur material dibentuk sekaligus dikontrol dan didisiplinkan.

Wacana merupakan manifestasi kuasa dan pengetahuan yang be- kerja secara halus dan membentuk seperti pola ‗gurita' dalam menciptakan tubuh-tubuh sosial yang patuh melalui mekanisme pen- disiplinan. Disiplin terhadap norma merupakan nilai bersama yang di- hasilkan melalui acuan diri, dan kelompok merupakan mekanisme untuk mendisiplinkan anggota komunitas. Disiplin tidaklah identik dengan suatu institusi atau aparat tertentu, melainkan suatu teknologi. Disiplin dapat dijalankan oleh institusi-institusi yang sudah ter- spesialisasi seperti halnya penjara, atau institusi lainnya yang meng- gunakan mekanisme disiplin sebagai sarana mencapai tujuan, seperti rumah sakit, sekolah, tempat pendidikan militer, termasuk juga dalam keluarga (Rabinow, 1984).

Tubuh secara khusus dimanipulasi, dibentuk, dan dilatih oleh beragam rezim kebenaran melalui produksi wacana. Menurut Foucault (1977) menganalogikan kekuasaan sebagai panoptikal. Panoptikal ialah kekuasaan yang terdapat pada masyarakat modern seolah seperti

impersonal machine yang menundukkan individu-individu dalam pengawasan masyarakat. Kekuasaan yang menormalisir tidak hanya di- jalankan dalam arena penjara, melainkan beroperasi melalui mekanis- me sosial di berbagai arena kehidupan. Disiplin merupakan bentuk ke- kuasaan yang berlangsung dalam suatu institusi terhadap tubuh individu. Beroperasinya kekuasaan secara legitimasi oleh rezim penge- tahuan tertentu sebagai normalisasi itu juga berlangsung dalam ruang yang lebih luas, yakni terhadap tubuh sosial.

Mekanisme pendisiplinan tubuh menguatkan pandangan Foucault bahwa kekuasaan tidak bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan melalui normalisasi dan regulasi, menghukum, dan membentuk publik yang disiplin. Publik tidak dikontrol melalui ke- kuasaan yang sifatnya fisik, melainkan dikontrol, diatur, dan di- siplinkan melalui wacana. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Foucault sebagai *bio power* atau *bio politics* yakni kekuasaan yang berfokus pada pola kehidupan manusia pada tingkat populasi massa (Foucault, 2008; Rabinow, 1984; Neal, 2009). Dalam pandangannya, Foucault mengungkapkan untuk dapat berfungsi sebagai subjek modern, setiap individu dapat disiplinkan dan dinormalkan melalui latihan berupa bentuk-bentuk teliti dan terperinci dari *power* melalui lembaga- lembaga dan dalam hubungan mereka dengan lainnya. Mereka kemu- dian melanjutkan, melaksanakan bentuk-bentuk *power* dalam kehi- dupan sehari-hari melalui kelembagaan, hubungan kerja, dan hubungan sosial. Begitu *power* sudah dijalankan, maka dengan cara ini sangat sulit untuk mengidentifikasi di mana dia berada (Neal, 2009).

Meski mekanisme pendisiplinan dapat melibatkan institusi, namun Foucault menegaskan bahwa konsep kekuasaan dalam masya- rakat modern bukanlah *sovereign power*, melainkan *disciplinary power*. Kekuasaan yang dimaksudkan oleh Foucault tidak dimiliki ber- dasarkan otoritas untuk mengontrol yang lain, melainkan kekuasaan berfungsi dalam dan terhadap setiap relasi sosial, ekonomi, keluarga, dan seksualitas. Kekuasaan pada konteks ini bukanlah soal legalitas tindakan dan penghukuman dalam mengontrol yang lain, melainkan

mengenai normalisasi kelakuan yang didesain sedemikian rupa dalam memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif tubuh. Pengetahuan dan penguasaan ini membentuk yang disebut oleh Foucault (1977) sebagai teknologi politis terhadap tubuh (*the political technology of body*).

Foucault (1977), *disciplinary power* beroperasi terhadap tubuh untuk mengedepankan normalisasi kekuasaan sebagai proses pem- biasaan dalam subjek tubuh, dan selanjutnya memosisikan subjek yang patuh sebagai efek dan sekaligus sebagai kendaraan dalam memelihara kekuasaan. Dengan kata lain *disciplinary power* mengontrol tubuh melalui mekanisme pengawasan yang diinternalisasi sebagai proses normalisasi, di mana beroperasinya proses normalisasi, di mana ber- operasinya kekuasaan terhadap tubuh. Dengan demikian, maka Foucault (1991), subjek modern merupakan kendaraan bagi kekuasaan dan objek bagi pengetahuan. Mekanisme pendisiplinan, normalisasi tubuh, dan kontrol tubuh dalam beberapa tulisan dan ceramahnya Foucault dikemas dalam suatu konsep *governmentality*.

4. Diskontuinitas kuasa dan pengetahuan

Terdapatnya hal yang menarik dalam produksi dan reproduksi wacana Foucault adalah apa yang disebutnya sebagai diskontuinitas, tahan, seri, dan keretakan (*rupture*). Dalam pandangannya Foucault (1972), berasumsi bahwa setiap periode peradaban niscaya memiliki kekhasannya sendiri. Kekhasan masing-masing identitas peradaban sangat ditentukan tiga pilar yang mendominasi, diantaranya; (1) wacana; (2) kekuasaan; dan (3) pengetahuan. Ketiga pilar ini tidak dapat saling dipisahkan hal ini disebabkan ketiga pilar ini saling ber- sinergi satu sama lainnya dalam peradaban pengetahuan (*episteme*). Dalam memahami episteme dalam setiap peradaban, maka diperlukan pendekatan arkeologis. Foucault (1972) menggunakan pendekatan arkeologi untuk menginvestigasi retakan-retakan (*ruptures*) peradaban dari setiap seri episteme. Pendekatan arkeologi menuntut penulis untuk mencermati fitur-fitur peradaban, karena episteme bukan merupakan

apa yang muncul di dalam peradaban, melainkan apa yang tersembunyi di baliknya didominasi pengetahuan pada masa lalu.

Istilah seri dalam pandangan Foucault (1972), dimaknai sebagai sebuah rangkaian peristiwa masa lalu yang retak (*rupture*), berambang, sekaligus berbatasan, namun masih pada sebuah episode yang besar dari sejarah yang sedang berlangsung. Untuk menandai terjadinya per- geseran sekaligus perubahan sejarah, Foucault menawarkan istilah transformasi. Salah satu bagian dari sejarah tertentu bisa jadi akan berlanjut pada peristiwa sejarah berikutnya, namun tidak akan pernah terulang sama persis seperti semula. Ada penggalan sejarah maupun unit-unit gagasan tertentu yang tetap tertinggal di masa lalu, dan ada juga yang kemudian diadaptasi di masa berikutnya. Sebab pada dasar- nya, tidak ada satupun momentum sejarah yang lain, meskipun pada masa dan tempat yang sama. Di sini Foucault dengan tegas menyatakan bahwa dalam sejarah pengetahuan terdapat keterputusan epistemik (*epistemic breaks*), yakni keterputusan perkembangan struktur diskursif (Milss, 1997).

Dalam sejarah pengetahuan, Foucault (1972), tidak menilai per- daban sebagai suatu yang benar-salah atau baik-buruk, tetapi yang ter- penting dalam kajiannya bahwa setiap peradaban adalah unik, khas, dan tersendiri oleh karena adanya ciri tersendiri dalam produksi dan reproduksi wacana tertentu. Semakin menguat diskursus itu, maka mengakibatkan semakin mendorong diskontuinitas. Seiring dengan runtuhnya episteme lama akibat desakan diskursus-diskursus yang memicu diskontuinitas, maka diskursus tersebut akan menduduki kursi episteme baru yang selanjutnya menjadi peradaban baru pula. Inilah yang menjadikan setiap babakan peradaban sedemikian unik dan khas. Kekhasan setiap episteme dan peradaban lahir oleh karena gerakan diskontuinitas. Soal apakah diskontuinitas menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau tidak, bukanlah poin utama bagi Foucault. Akan tetapi melalui diskontuinitas itulah, maka babakan peradaban manusia terus berlangsung (Foucault, 1972).

Lebih lanjut Foucault (1972), menambahkan pengetahuan dari masa ke masa bukan suatu perkembangan yang evolutif, melainkan sebagai pergeseran dari satu bentuk pengetahuan ke pengetahuan lain- nya yang berkuasa pada masanya sebuah rezim wacana. Oleh sebab itu. Pendekatan arkeologis dalam memahami sejarah pengetahuan di- maksudkan untuk menangkap sebagai episteme, yakni bentuk penge- tahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu zaman tertentu. Konsep episteme Foucault pararel dengan paradigma Thomas Kuhn. Artinya, episteme merupakan dis- posisi pengetahuan yang unik dan khas pada zaman tertentu. Seperti misalnya, Foucault dalam studinya tentang kegilaan menangkap dis- posisi pengetahuan atas pemaknaan terhadap normalisasi sebagai lawan dari abnormal atau kegilaan.

Penguatan dan legitimasi episteme sebagai bentuk sistem penge- tahuan yang unik dan khas di zamannya melibatkan berlangsungnya operasi kekuasaan yang tidak lepas dari bagaimana pengetahuan yang ilmiah berelasi dengan pengetahuan awam. Episteme sebagai sistem pengetahuan tidak lagi sekadar cara pandang melihat pembedaan dan pemisahan antara yang benar dan yang salah, melainkan pemisahan dalam ranah praktis antara yang mungkin dan yang tidak mungkin dilakukan atau dipikirkan dengan mendasarkan pada pengetahuan yang ilmiah.

Kajian teoritis sebagaimana diuraikan pada pembahasan se- belumnya tentang pemikiran Foucault bahwa wacana, kuasa, dan pengetahuan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ber- sinergi dalam praktik sosial. Wacana diproduksi dan reproduksi untuk mengatur, mengendalikan, dan mendisiplinkan individu atau kelompok dalam relasi sosialnya. Dalam mekanisme inilah kuasa hadir ber- semayam dalam pengetahuan setiap aktor. Diskursus yang dianalogi- kan sebagai ‗petugas keamanan' yang bertujuan untuk mengendalikan seseorang atau kelompok dalam memaknai, mempersepsikan, dan me- nentukan pola tindakannya.

Inilah yang membangun satu paket peradaban pengetahuan (*episteme*) dalam lintasan historis tertentu yang memiliki sifat khas dan unik. Relasi penguasadan pengusaha yang pada pelaksanaannya banyak identik dengan politik kepentingan diantara aktor yang me- miliki hubungan kedekatan dengan penguasa dan juga kedekatan dengan unsur politik yang memainkan perannya dalam melanggengkan bisnisnya menggunakan sumber daya-sumber daya yang hanya meng- untungkan sebagian besar kelompok tertentu dan tidak berdampak positif terhadap kelangsungan hidup masyarakat luas. Seperti itulah gambaran pola konstruksi struktur sosial dan struktur material meng- ikuti arus wacana yang bekembang. Seperti inilah realitas berjalan mengikuti pola episteme dalam babakan tertentu yang oleh Foucault dipandang sebagai proses diskontuinitas.

B. Ideologi sebagai Praktik Kuasa Pengetahuan

Ideologi, bagi Fairlough merupakan makna yang melayani ke- kuasaan (Fairlough, 1995). Lebih tepatnya, dia memahami ideologi sebagai mengonstruksian makna yang memberikan kontribusi bagi pemroduksian, pereproduksian, dan transformasi hubungan-hubungan dominasi (Fairlough, 1992; cf, Chouliaraki dan Fairlough, 1999). Ideologi tercipta dalam masyarakat-masyarakat. Dari sinilah hubungan dominasi didasarkan pada struktur sosial seperti kelas dan gender. Menurut definisi Fairlough, wacana bisa kurang lebih bersifat ideologis, wacana ideologis yang memberikan kontribusi bagi usaha untuk mempertahankan dan mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan.

Pemahaman wacana tentang ideologi sebagaimana yang disisip- kan dalam praktik kewacanaan bergantung pada pandangan yang menyatakan ideologi sebagai praktik yang beroperasi dalam proses pemroduksian makna dalam kehidupan sehari-hari, sebaliknya makna dimobilisasikan agar bisa mempertahankan hubungan-hubungan ke- kuasaan (Thompson, 1990). Fokus ini bertentangan dengan konsepsi ideologi pada banyak pendekatan Marxist. Marxist tidak tertarik pada

struktur ideologi-ideologi tertentu, atau pada bagaimana ideologi di-artikulasikan dalam konteks-konteks sosial khusus. Namun demikian, mereka telah memberikan perlakuan ideologi sebagai sistem nilai abstrak yang memiliki fungsi sebagai daya tarik sosial (*social pull factor*), yakni menarik dan mengikat orang-orang secara bersama-sama dan dengan demikian mengukuhkan keruntutan tatanan sosial.

Selaras dengan Thompson dan banyak teoritisi kultural dan sosial lain ialah merumuskan pendekatan-pendekatan pada praktik ideologis. Fairlough menggunakan karya Althuser dan pada derajat ter- tentu juga menggunakan karya Antonio Gramsci. Kedua teoritisi itu menggambarkan bentuk-bentuk penting perspektif Marxist kultural dan keduanya menganggap pemroduksian makna dalam kehidupan sehari- hari itu memiliki peran penting dalam mempertahankan tatanan sosial. Selanjutnya Fairlough juga mematuhi konsensus yang dibuat dalam kajian-kajian kritis dengan menolak bagian-bagian teori Althuser dengan dalih bahwa Althuser menganggap manusia sebagai subjek ideologis pasif dan dengan demikian meremehkan kemungkinan mereka untuk melakukan tindakan. Dalam kajian kultural dan komuni- kasi, sekarang ini ada konsensus bahwa makna teks sebagian dicipta- kan dalam proses interpretasi. Fairlough memiliki posisi konsensus yang sama. Teks memiliki beberapa potensi makna yang memung-kinkan mengalami pertentangan yang satu dengan lainnya dan me- miliki potensi keterbukaan untuk beberapa interpretasi yang berbeda.

Terdapatnya kemungkinan timbulnya penolakan kendati demi-kian orang-orang tidak harus sadar akan dimensi ideologis praktiknya: Objek diposisikan secara ideologis, tapi subjek juga mampu bertindak secara kreatif untuk menciptakan hubungan antara praktik-praktik dan ideologi-ideologi yang beragam tempat dipajangkannya subjek tersebut dan menata kembali posisi praktik dan struktur itu (Fairlough, 1992).

Fairlough juga menolak pemahaman Althuser tentang ideologi sebagai keseluruhan entitas. Fairlough percaya bahwa orang-orang dapat diposisikan dalam ideologi-ideologi yang berbeda dan

saling bersaing dan bahwa kondisi semacam ini dapat menggiring ke arah

rasa ketidakpastian yang efeknya dapat menciptakan kesadaran akan efek ideologis (Fairlough, 1992). Sudut pandang ini didasarkan pada gagasan Gramsci bahwa akal sehat berisi beberapa unsur yang saling bersaing yang merupakan hasil negosiasi maknatempat berproses ke- terlibatannya semua kelompok sosial (Gramsci, 1991). Hegemoni tidak hanya merupakan dominasi namun juga proses negosiasi yang me- lahirkan konsensus tentang makna. Keberadaan unsur-unsur yang saling bersaing seperti demikian akan menaburkan benih-benih per- lawanan oleh karenanya unsur-unsur yang menantang makna dominan membekali orang-orang dengan sumberdaya untuk melakukan per- lawanan. Sebagai akibat, hegemoni tidak pernah stabil namun senan- tiasa berubah dan tidak selesai dan konsensus seringkali berkaitan dengan masalah derajat keseimbangan yang saling bertentangan dan tidak stabil (Fairlough, 1992).

Menurut Fairlough, konsep hegemoni memberi kita alat yang bisa kita gunakan untuk menganalisis bagaimana praktik kewacanaan menjadi bagian dari praktik sosial yang luas melibatkan hubungan ke- kuasaan; praktik kewacanaan dapat dipandang sebagai aspek per- juangan hegemonis yang memberikan kontribusi bagi reproduksi dan transformasi tatanan wacana yang merupakan bagiannya (dan akibat- nya juga hubungan kekuasaan yang ada). Makna kewacanaan terjadi bila unsur-unsur kewacanaan diartikulasikan dengan cara-cara yang baru.

Konsep wacana yang diajukan oleh Laclau dan Mouffe tidak hanya memberikan pedoman kepada bahasa namun juga mencakup semua fenomena sosial. Wacana mencoba menata tanda, seolah semua tanda memiliki makna yang tetap dan tidak taksa dalam suatu struktur secara keseluruhan. Logika yang sama juga berlaku pada bidang sosial yang utuh; ‗kita bertindak seolah ‗realitas' yang ada di sekitar kita itu memiliki struktur yang stabil dan tidak taksa; seolah masyarakat, kelompok kita berada, dan identitas kita secara objektif merupakan fakta-fakta yang memang ditetapkan. Namun seperti halnya struktur bahasa yang tidak pernah sepenuhnya bisa tetap, begitu pula masya-

rakat dan identitas, dan identitas yang fleksibel dan bisa diubah tidak pernah sepenuhnya bisa tetap. Meskipun Marxisme menduga adanya struktur sosial yang objektif yang terus diungkap oleh analisis, titik awal teori wacana Laclau dan Mouffe adalah bahwa kita mengkonstruk objektivitas melalui pemroduksian makna kewacanaan.

Laclau dan Mouffe mengubah tradisi Marxist tersebut dengan menggunakan tiga cara. Pertama, Laclau dan Mouffe meniadakan pem- bagian antara dasar dan superstruktur dan memahami semua formasi kemasyarakatan sebagai produk proses kewacanaan. Kedua, mereka menolak konsepsi Marxist tentang masyarakat; bahwa masyarakat bisa diuraikan secara objektif, sebagai suatu totalitas yang disusun oleh kelas-kelas tertentu. Menurut Laclau dan Mouffe, masyarakat tidak pernah bersifat taksa sebagaimana yang dikemukakan oleh material- isme kesejarahan. Menurut mereka, _masyarakat' merupakan usaha kita untuk memberikan makna masyarakat, bukan fenomena yang ada secara objektif. Ketiga, dan sebagai hasil pandangan terhadap fenomena sosial ini, Laclau dan Mouffe menolak pemahaman Marxist tentang identitas dan formasi kelompok. Bagi Marxisme, orang me- miliki identitas (kelas) yang objektif kendati tidak menyadarinya. Bagi Laclau dan Mouffe, identitas tersebut tidaklah bisa ditentukan sebelum lahirnya kelompok-kelompok apa yang secara politik relevan. Identitas orang-orang (baik secara kolektif maupun individu) merupakan hasil proses yang bersifat kewacanaan dan mungkin terjadi seperti itu merupakan bagian dari perjuangan kewacanaan. Untuk memperkuat argumentasinya, Laclau dan Mouffe memandang konflik atau antago- nisme dengan konsep hegemoni Gramsci.

Konsep hegemoni Gramsci menjelaskan, dasar material merupakan titik awalnya dan superstruktur ditentukan oleh dasar material tersebut. Gramsci mengemukakan dialektik antara dasar dan super- struktur; kondisi dasar material memenaruhi superstruktur, namun proses politik yang terjadi pada superstruktur juga dapat berbalik ke arah dasar material itu. Sedangkan menurut Laclau dan Mouffe, proses politiklah yang paling penting, politik memiliki keunggulan (Laclau,

1990). Artikulasi politik menentukan bagaimana kita bertindak dan berpikir, dan dengan begitu tergambarlah bagaimana masyarakat ter- cipta. Oleh sebab itu, proses penentuan perekonomian sepenuhnya ditiadakan dalam teori wacana. Akan tetapi tidak serta merta segalanya adalah soal bahasa atau bahwa materi itu tidak memiliki signifikansi. Pernyataan tersebut akan jelas bila kita memandang bagaimana Laclau dan Mouffe memahami dua konsep yakni wacana dan politik.

Reproduksi dan perubahan makna, dalam istilah umumnya, merupakan tindakan politik. Politik dalam teori wacana tidak harus dipahami sebagai misalnya, politik ke-partai-an yang sebagian besar hanya membicarakan representasi politik dan kekuasaan. Akan tetapi, politik dilihat sebagai konsep yang luas dan mengacu pada bagaimana cara kita menyusun fenomena sosial dengan cara-cara yang meniada- kan cara-cara yang lain. Laclau dan Mouffe memahami politik sebagai organisasi masyarakat dari satu sisi tertentu dengan cara tertentu yang meniadakan semua kemungkinan adanya cara yang lain. Oleh sebab itu, politik tidak hanya merupakan permukaan yang merefleksikan realitas sosial yang lebih luas, melainkan organisasi sosial yang meru- pakan hasil proses sosial politik yang terus menerus. Sebagai misal, bila terjadi suatu perjuangan antara wacana-wacana tertentu, maka terlihat dengan jelas bahwa para aktor yang berbeda sedang berusaha mempromosikan cara-cara yang berbeda dalam mengorganisasikan masyarakat. Pada posisi seperti ini, konsep hegemoni muncul antara

_objektivitas‘ dan politik. Sama seperti sesuatu yang objektif yang dapat menjadi bersifat politik dengan berjalannya waktu, konflik yang mencuat bisa menghilang dan memberi jalan munculnya objektivitas karena satu perspektif dinaturalisasikan dan lahirlah konsensus. Perkembangan dari konflik politik ke objektivitas akan senantiasa melewati garis intervensi hegemonis.

Konsep kekuasaan dalam pendekatan Laclau dan Mouffe erat kaitannya dengan konsep politik dan objektivitas (Laclau, 1990). Kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki orang-orang dan dilaksanakan terhadap orang lain, melainkan sesuatu yang

dapat

menghasilkan dunia sosial. Kelihatan aneh jika menggunakan kata _kekuasaan' untuk menggambarkan kekuatan dan proses yang dapat menciptakan dunia sosial kita dan membuat dunia sosial tersebut bermakna bagi kita. Namun demikian, hal yang utama bahwa pemahaman tentang kekuasaan ini menekankan adanya ketergantungan dunia sosial. Kekuasaanlah yang menciptakan pengetahuan kita, identitas kita dan bagaimana kita berhubungan satu sama lain sebagai kelompok atau individu. Pengetahuan, identitas, dan hubungan sosial tergantung; pada waktu tertentu, ketiganya melahirkan suatu bentuk tertentu, namun bisa saja dan bisa menjadi berbeda. Oleh sebab itu, kekuasaan itu sifatnya produktif maksudnya bisa menghasilkan dunia sosial dengan cara-cara tertentu. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang bisa dibuat menjadi tidak ada; tapi sangat tergantung kepada penghidupannya yang berada dalam suatu tatanan sosial dan tatanan sosial selalu tercipta dalam kekuasaan, namun demikian kita tidak tergantung pada kehidupan pada tatanan sosial tertentu, dan peniadaan tatanan-tatanan sosial yang lain juga merupakan salah satu efek kekuasaan. Di satu sisi, kekuasaan meng- hasilkan dunia yang dapat dihuni yang memang diperuntukkan bagi kita dan di sisi lain kekuasaan dapat menghalangi kemungkinan-kemungkinan alternatif.

Karenanya dalam pandangan ini, objektivitas merupakan kekuasaan yang terendap. Di sinilah jejak-jejak kekuasaan telah terhapus dan telah terlupakan. Dunia ini memang dikonstruk secara politis (Laclau, 1990). Pemahaman kita terhadap teori Laclau dan Mouffe adalah bahwa kekuasaan dan politik merupakan dua sisi keping mata uang logam yang tidak terpisahkan. Kekuasaan mengacu pada pem- roduksian objek-objek seperti _masyarakat' dan _identitas', sementara politik mengacu pada ketergantungan yang selalu ada pada objek-objek tertentu. Dengan demikian objektivitas mengacu pada dunia yang ke- beradaannya dianggap lumrah, dunia yang telah kita _lupakan' namun senantiasa tersusun oleh kekuasaan dan politik. Satu hal yang menjadi poin penting dari konsep Laclau dan Mouffe adalah bagaimanakah mengkonseptualisasikan para aktor yang berproses keterlibatan dalam

perjuangan mencari definisi dan pembentukan realitas? Seperti halnya tesis yang telah dibangun oleh Laclau dan Mouffe terhadap teori Marxist, mereka menolak pendapat bahwa identitas kolektif (dalam teori Marxist, terutama kelas-kelas) ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi dan materi. Menurut Laclau dan Mouffe, identitas individu dan kolektif keduanya diorganisasikan menurut prinsip-prinsip yang sama seperti pada proses kewacanaan yang sama pula.

C. Tipologi Kekuasaan

Dalam studinya Steven Lukes, 1974 (Faulks, 2012), mengenai pentingnya kekuasaan yang membagi kekuasaan dalam tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut selanjutnya dapat diringkas sebagai berikut. *Pertama*, berhubungan dengan kapasitas seorang individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, walaupun tujuan tersebut ditentang oleh pihak-pihak yang memiliki perlawanan. Dimensi ini relatif mudah untuk diukur karenanya mencakup hasil- hasil konkrit yang secara jelas dan nyata cenderung ada pada salah satu aktor daripada yang lainnya. *Kedua*, dimensi ini jelas mengasumsikan adanya hubungan hierarkis di antara kelompok-kelompok sosial. Para aktor yang berada pada posisi kuat memiliki kapasitas untuk mencapai kepentingannya lebih jauh lagi, bukan hanya secara langsung seperti yang terungkap dalam dimensi kekuasaan yang pertama, melainkan juga mencegah agar kepentingan alternatif lainnya tidak diper- timbangkan sama sekali. Hal ini membuahkan pengendalian isi agenda politik.

Ketiga, kekuasaan dalam dimensi ini lebih mengelabui lagi karena ia tidak hanya memanipulasi agenda politik, melainkan juga mencakup persuasi atas kelompok-kelompok subordinat bahwa agenda ini benar-benar merupakan kepentingan mereka. Bentuk kekuasaan ini pada intinya melibatkan kontrol pemikiran dan penciptaan ‗kesadaran semu' diantara orang-orang yang tidak memiliki kuasa yang menjadi beridentitas dan mendukung apa yang sebetulnya bertolak belakang dengan kepentingan mereka yang sesungguhnya. Karena metode-

metode yang digunakan untuk mewujudkan kekuasaan semacam ini seringkali tersembunyi dan sangat halus dan juga karena berbagai kesulitan untuk memastikan kepentingan seseorang yang sesungguhnya, maka pengukurannya amat sulit dilakukan. Pada saat ini misalnya kelompok pengusaha yang memiliki kedekatan atau hubungan dengan kelompok penguasa masuk ke dalam subjektivitas melalui diskursus yang kemudian memproduksi kebijakan diantara kelompok penguasa dan kelompok pengusaha yang tujuannya untuk kepentingan secara bersama-sama yang dikemas dalam konsep atmosfer politik.

1. Jaringan kekuasaan

Paham behavioralisme menekankan fenomena yang dapat diuji secara empiris, secara berlebihan berfokus pada dimensi pertama kekuasaan yang dengan demikian berarti mengabaikan apa yang merupakan dimensi struktural kekuasaan yang lebih penting; penetapan agenda dan manipulasi pemikiran. Namun demikian, banyak kritik yang telah ditujukan terhadap kekeliruan konsepsi kekuasaan Lukes, tersebut, khususnya terhadap penilaian-penilaian etis yang muncul dari pemahaman dimensi ketiga kekuasaan. Dalam pandangannya Hay, 1997 (Faulks, 2012) yang memiliki pandangan bahwa Lukes men- campuradukkan analisis distribusi kekuasaan itu. Terlebih lagi, jika kita mengikuti logika Lukes, akan sulit melihat pada dasarnya apa suatu komunitas politik dapat dibangun karena menurut pendapatnya kekuasaan merupakan atribut sepenuhnya negatif. Oleh karenanya, semua sistem politik dalam batasan tertentu melibatkan penggunaan kekuasaan, maka teori Lukes terkesan berpijak di atas suatu pandangan yang tidak realistis mengenai hubungan manusia.

Konsepsi alternatif Hay, 1997 (Faulks, 2012), tentang kekuasaan adalah berupa pembentuk sikap (*conduct-shaping*), dimana A bertindak dengan cara tertentu yang secara tidak langsung menghalangi tindakan B dimasa yang akan datang, namun tidak selamanya mengandung hal tersebut. Hal ini menandai langkah maju yang substansial dari teori Lukes, karena kita berkesempatan untuk menganalisis kekuasaan tanpa harus membuat penilaian mengenai pendistribusiannyadi mana kita

tidak harus menyalahkan A atas penghalangannya terhadap pilihan- pilihan B yang berasal dari apa yang mungkin merupakan konsekuensi yang tidak disengaja dari tindakan-tindakan A.

Lebih lanjut dalam pandangannya Hay, 1997 (Faulks, 2012), untuk memisahkan kekuasaan dari maksud atau tujuan (*intention*) yang memiliki wujud dalam pemikirannya mengenai (*context-shaping*) akan berlangsung berhadapan dengan kritik yang menyatakan bahwa kita disodori pemikiran tentang kekuasaan yang amat sangat kabur. Bila- mana kita tidak mampu untuk mengidentifikasi dengan jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap efek-efek kekuasaan, lalu apa pula fungsi- nya konsep? Sebuah cikal bakal solusi atas permasalahan ini adalah dengan mempertimbangkan kekuasaan berikut persoalan tentang agensi dan struktur.

Bilamana kita menilai kekuasaan hanya semata-mata dalam hubungannya dengan kemauan individu, maka secara implisit sejatinya menggunakan pendekatan yang berpusat pada agen. Kita mengasumsi- kan bahwa kekuasaan itu hanya muncul dari tindakan-tindakan individual dan aktor-aktor rasional. Oleh sebab itu, maka hal ini meng- abaikan fakta bahwa individualitas dan rasionalitas itu terbentuk secara sosial dan tidak mengakui aspek struktural dari kekuasaan. Dengan demikian, maka sebab-sebab munculnya ketidaksetaraan kekuasaan diantara para aktor pun menjadi tidak jelas. Dalam konteks ini menerima dimensi struktural kekuasaan kita tidak perlu untuk me- ninggalkan konsep maksud (*intention*). Namun demikian, setiap pem- bahasan yang mendalam mengenai pendistribusian kekuasaan harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural bagi tindakan-tindakan individu. Kekuasaan terkandung di dalamnya dan beroperasi melalui struktur-struktur sosial, disamping juga dilaksanakan oleh para aktor sosial yang mengontrol secara sadar akan akibat dari tindakan mereka. Namun demikian, para individu dibatasi oleh kekuatan sosial yang melampaui kontrol mereka, tindakan-tindakan mereka tidak sepenuh- nya ditentukan oleh kekuatan semacam itu (Faulks, 2012).

Sehubungan dengan hal tersebut maka teori kekuasaan Hay, 1997 (Faulks, 2012), lebih bernuansa dibandingkan pemikiran Lukes dalam hal hubungan antara agensi dan struktur dan oleh sebab itu me- representasikan titik awal yang lebih bermanfaat bagi pengkajian tentang hubungan kekuasaan. Dengan berpijak pada pendirian Hay, di mana mengusulkan agar setiap analisis tentang kekuasaan memper- timbangkan faktor-faktor, diantaranya; pertama, jenis kekuasaan, bisa digunakan negara dan juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ter- organisir yang berusaha mengubah cara pengelolaan sebuah masya- rakat, termasuk rangkaian teknik yang berkenaan dengan persoalan resolusi konflik dan kompromi di antara kelompok-kelompok sosial yang bertentangandengan mengamankan pendistribusian kekuasaan sesuai dengan ketertiban dan keadilan.

Kedua, sumber daya kekuasaan, termasuk kemakmuran, infor- masi, gagasan, bahasa dan teknologi. Pendistribusian semua sumber daya ini sangat penting untuk memahami siapa yang memiliki ke- mampuan untuk menjalankan kehendaknya. Ketiga, metode kekuasaan, termasuk penggunaan kekuatan, manipulasi, persuasi, dan otoritas. Di mana bentuk yang paling aman adalah mengurangi otoritas, di mana A mengakui hak B untuk bertindak atas kemauannya sendiri, Keempat, struktur kekuasaan, termasuk kelas, etnisitas, generasi dan gender. Pemisahan sosial semacam ini bisa berlaku bagi pembatas kekuasaan sejumlah aktor dalam menajalankan kehendak mereka, sementara para individu yang menikmati status kelas istimewa, misalnya, lebih ber- kemungkinan besar untuk menguasai sumber daya yang dibutuhkan untuk kepentingan mereka.

Kelima, situs kekuasaan, di dalamnya termasuk keluarga, asosiasi masyarakat sipil dan negara. Hubungan kekuasaan akan di- jalankan dalam situs-situs ini. Para pakar sosiologi politik secara legitimatif dapat fokus terhadap perhatian mereka pada hakikat ke- kuasaan yang ada di dalamnya. Namun demikian, karena berbagai macam alasan mereka seringkali berkonsentrasi pada institusi negara. Keenam, akibat kekuasaan, terdapatnya sisi lain, meningkatnya rasa

percaya diri dan rasa mampu diantara para individu yang berke- kuasaan, dan di sisi lain, rasa terasing dan apatis di pihak mereka yang menjadi objek dari apa yang mereka pandang sebagai kekuasaan yang tidak sah atau mereka yang tidak berkekuasaan lantaran tidak adanya sumber daya.

Hal yang utama ialah akibat dari keluaran dari setiap tindakan kekuasaan dapat berimplikasi pada kemampuan aktor-aktor yang ter- libat dalam pelaksanaan kekuasaan berikutnya. Oleh karena itu, pelak- sanaan kekuasaan merupakan sebuah proses dinamis yang dibentuk oleh kejadian-kejadian dan akibat-akibat penggunaan sebelumnya.

2. Distribusi kekuasaan

Menurut Andrain (Surbakti, 1992), umumnya para pakar politik menggambarkan distribusi kekuasaan dan bentuk tiga model. Pertama, model elite yang memerintah. Model ini menggambarkan sebagian besar dimiliki oleh sekelompok kecil orang yang disebut sebagai elite. Kedua, model pluralis di mana menggambarkan kekuasaan sebagai dimiliki dengan berbagai kelompok sosial dalam masyarakat dan berbagai lembaga dalam struktur pemerintahan. Ketiga, model populis ialah model yang menggambarkan kekuasaan sebagai dipegang oleh setiap individu warga negara atau rakyat secara kolektif.

Menurut Gaetano Mosca (Neil, 1984), mengklasifikasikan kekuasaan dalam tiga kelompok. Pertama, elite yang memerintah menggambarkan distribusi kekuasaan dalam masyarakat sebagai berikut. Dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol, diantaranya; (1) kelas yang memerintah yang terdiri dari sedikit orang, melaksanakan fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kekuasaan; dan (2) kelas yang diperintah yang memiliki jumlah yang lebih banyak yang diarah- kan dan dikendalikan oleh penguasa dengan cara-cara yang kurang lebih berdasarkan hukum, semaunya dan dipaksakan.

Asumsi dasar yang melandasi model ini, pertama setiap masya- rakat tidak pernah terdapat distribusi kekuasaan secara merata. Mereka yang memiliki sumber kekuasaan yang memiliki kekuasaan

(*bargaining politic*) sedikit sekali jumlahnya, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam masyarakat-negara. Kedua, jumlah orang yang memerintah suatu masyarakat selalu lebih sedikit daripada yang diperintah. Itu sebabnya, mengapa elite politik dirumuskan sebagai kelompok kecil orang yang memiliki pengaruh besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Ketiga, diantara elite politik terdapat kesamaan nilai dan berusaha mempertahankan nilai- nilai yang berarti mempertahankan status elite politik.

Model elitisme secara terinci diuraikan oleh Pareto dan Mosca (Neil, 1984), di mana mereka membagi masyarakat menjadi dua bagian kelompok, yakni; pertama, mereka yang sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan. Kedua, mereka yang banyak orang yang tidak memiliki kekuasaan yang berarti. Hanya sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan itulah yang mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat atau hanya sekelompok kecil orang yang membuat dan melaksanakan keputusan politik. Dalam hal ini dianalogikan bahwa khalayak (rakyat) banyak yang tidak ikut menentukan kebijakan umum karena mereka tidak memiliki kekuasaan. Sekelompok kecil orang yang membuat dan melaksanakan keputusan politik bukanlah pen- cerminan dari khalayak yang diperintah. Elite politik itu diambil secara tidak proporsional dari lapisan atas masyarakat. Mobilitas non elite untuk mencapai kedudukan elite harus berjalan secara lambat sambil tetap memelihara stabilitas, yakni menghindari perubahan yang revolusioner.

Non elite yang telah menerima _konsensus dasar elite' saja yang dapat diterima dalam lingkungan elite. Golongan elite memiliki konsensus mengenai nilai-nilai dasar suatu sistem dan berusaha meme- lihara dan mempertahankan sistem tersebut. Selain itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh elite politik bukanlah cerminan aspirasi khalayak, juga bukan hasil tuntutan yang diajukan khalayak, melainkan merupakan cerminan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh kelompok elite. Perubahan dalam kebijakan tidak akan dilakukan secara radikal. Jadi, khalayak yang memiliki sikap apatis sangat sedikit memengaruhi

secara langsung elite yang memerintah. Fenomena yang terjadi malah golongan elite yang menentukan khalayak yang apatis. Namun demikian, kelompok elite kalau ditelaah dari segi sifat dan karakternya, sesungguhnya bukanlah kelompok yang homogen, namun kelompok yang heterogen.

Kedua, model pluralis di mana asumsi yang mendasari model ini adalah setiap individu menjadi anggota satu atau lebih kelompok sosial atau kekuatan sosial tertentu sesuai dengan aspirasi dan kepentingan yang bersifat kultural dan ideologis maupun yang berdasarkan okupasi dan profesi seperti aspirasi ekonomi. Kelompok kepentingan atau ke- kuatan sosial ini memiliki fungsi sebagai wadah memperjuangkan kepentingan para anggota dan menjadi perantara diantara para anggota- nya dan pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Kelompok sosial dan kekuatan sosial tersebut, berupaya untuk mempertahankan karakteristik otonominya dari pengaruh organisasi lain maupun dari campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu, menurut model ini kekuasaan dalam masyarakat akan terdistribusikan secara relatif merata diantara berbagai organisasi dan kelompok kepentingan. Menurut kelompok ini peranan pemerintah sebgai arena persaingan dan kompromi diantara berbagai organisasi dan kelompok kepentingan sebagai pihak yang merumuskan dan mengawasi permainan agar per- saingan tidak merusak kesatuan masyarakat dan sebagai pihak yang mengesahkan hasil kompromi berbagai kelompok yang bersaing men- jadi keputusan politik. Diantara berbagai kelompok dan kekuatan sosial terdapat suatu kesadaran pentingnya persaingan yang sehat dan kompromi, sehingga kepentingan mereka tetap terjamin.

Ketiga, model kerakyatan, asumsi yang mendasari model ke- rakyatan ialah demokrasi. Artinya, partisipasi individu warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang jelas akan memengaruhi sendi-sendi kehidupan individual dan sosial dalam masyarakat. Kunci utama demokrasi sebagai suatu pandangan hidup, partisipasi setiap individu yang telah dewasa dalam pembentukan nilai- nilai yang mengatur hidup mereka. Oleh sebab itu, maka demokrasi

menghendaki partisipasi rakyat dalam mengalokasikan dan mendistribusikan nilai-nilai kepada masyarakat.

3. Peran pemerintah dalam pembangunan

Isu lemahnya kapasitas pemerintah (*state capacity*) di negara-negara yang sedang berkembang yang ditandai dengan ketidak- mampuan menjalankan pembangunan, menjadi topik hangat yang sering didiskusikan oleh para pakar. Teori-teori kegagalan pemerintah yang dicirikan dengan penekanan pendekatan _*top down*', maupun teori modal sosial yang diidentikkan dengan pendekatan _*bottom up*', keduanya menawarkan *framework* yang melandasi kerangka dasar untuk mengidentifikasikan gejala-gejala _*state incapacity*' (Wallis dan Dollery, 2001). Mengenai *state incapacity*, beberapa pakar yang optimis menyatakan bahwa kapasitas pemerintah dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kegagalan pemerintah dapat diatasi (Betancourt, 1977), sebaliknya Langford (1999) dengan nada pesimis menyatakan bahwa harus ada intervensi dan advokasi (*trusteeship*) internasional untuk penanggulangan permasalahan tersebut.

Ada beberapa teori tentang tipologi kegagalan pemerintah yang pernah dikemukakan oleh O‖Dowld, 1978; Weisbord, 1978; Wallis dan Dollery, 1997 (Rustiadi, E. dkk, 2009), penyebab kegagalan tersebut dibagi dalam tiga faktor utama; pertama, disebabkan oleh inefisiensi dan sistem/struktur politik yang asimetrik. Hal ini sering disebut juga
_*constitutional failure*' atau _*legislative failure*'. Politisi lebih mementingkan kelompok, terutama untuk pemenangan pemilu yang akan datang, sehingga tidak lagi memikirkan kepentingan dan perbaikan- perbaikan kondisi kemasyarakatan. Kedua, disebabkan karena berhenti atau tersendatnya kegiatan pelayanan masyarakat yang berakibat in- efisiensi, di mana hal ini sering disebut sebagai _*bureaucratic failure*'. Ketiga, intervensi pemerintah dalam sektor _*rent seeker*', sebagai akibat dari *social waste* yang dihasilkan senantiasa lebih besar di- bandingkan *social surplus*-nya.

Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kegagalan pemerintah disebabkan oleh karena *public sector* seringkali

dipandang sebagai *vertical sector*, sehingga menyebabkan rantai birokrasi yang panjang dalam pelayanan masyarakat. Menurut Moe (1984), menjuluki rantai birokrasi ini sebagai ‗*chain of principal-agent relationship*' dengan struktur rantai sebagai berikut; *citizen-politician- bureaucratic superior-bureauratic sub ordinate-lowest bureaucratic-citizen*.

4. Dimensi dan kubus kekuasaan

Teori kubus kekuasaan (*the power cube approach*); di mana pendekatan ini memisahkan tiga komponen yakni; (1) ruang-ruang interaksi, (2) wilayah-wilayah interaksi, dan (3) dimensi-dimensi ke- kuasaan. Dengan demikian, pandangan ini difokuskan pada ruang- ruang yang telah dibuat baik oleh elite Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan maupun masyarakat secara umum. Akibatnya me- munculkan pertanyaan bagaimana ruang-ruang tersebut digunakan atau dibangun oleh para aktor. Untuk membantu membaca kualitas proses keterlibatan politik dan ekonomi dalam setiap ruangnya, maka penulis memasukkan ‗tangga proses keterlibatan' yang diperkenalkan oleh Pretty di mana terdapat 7 anak tangga proses keterlibatan yang dimulai dengan; (1) proses keterlibatan pasif, (2) proses keterlibatan melalui informasi, (3) proses keterlibatan sebagai konsultan, (4) proses keter- libatan dalam pemberian material, (5) proses keterlibatan secara fungsional melalui pembentukan kelompok-kelompok, (6) proses ke- terlibatan secara interaktif dan (7) proses keterlibatan sebagai ke- mampuan memobilisir diri dalam menghadapi persoalan internal.

Pandangan tentang ruang sudah cukup luas digunakan dalam literatur sosiologi politik dan sosial khususnya dalam konteks ke- kuasaan, kebijakan, demokrasi, dan aksi warga (Gaventa, 2005). Ruang dalam hal ini mengutip pandangan Gaventa adalah *spaces are seen as a opportunities, moments, and channels, where citizens can act to potencially affects policies, discourses, decisions, and relationships which affect their lives and interest* (Gaventa, 2005). Ruang dilihat sebagai peluang, momen, dan wahana yang dapat memengaruhi ke- bijakan-kebijakan, wacana, dan keputusan-keputusan. Dengan demi-

kian ruang untuk berproses keterlibatan di level lapangan tidaklah netral oleh karena adanya relasi kekuasaanyang eksis baik secara nyata (*visible*), tidak terlihat (*invisible*) atau tersembunyi (*hidden*) apakah dalam konteks lokal, nasional, hingga konteks Global (Conchwall A, 2002).

Ruang-ruang yang dimaksud adalah ruang tertutup (*closed*), ruang tersediakan (*invited*), dan ruang terciptakan, diklaim atau bahkan dibuat sendiri (*created*). Pertama, ruang tertutup, adalah ruang yang dibuat oleh sekelompok aktor atau elite yang difungsikan untuk meng- ambil keputusan tanpa melibatkan pihak lain tanpa ada keinginan untuk membuka lebih luas ruang tersebut untuk membuka kemungkinan masuknya pihak lain atau partisipan secara lebih luas. Kedua, ruang tersediakan, adalah ruang yang sengaja dibuat oleh para penentu ke- bijakan baik pada level negara, daerah maupun desa baik yang disah- kan secara hukum maupun tidak, dan bertujuan untuk mengundang lebih banyak pihak untuk duduk bersama memutuskan sesuatu (NGO, donor, sektor swasta, kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, dan lain-lain). Ketiga, ruang terciptakan, adalah ruang yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat yang secara umum yang diakibatkan oleh kekecewaan atas ruang-ruang yang tersedia di wilayah mereka untuk berproses keterlibatan atau dibangun secara khusus untuk menyediakan ruang bagi aktivitas mereka sendiri tanpa ada intervensi dari pihak luar. Biasanya ruang semacam ini terbangun akibat mobi- lisasi rakyat atas persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pejabat setempat yang bertanggungjawab atas ruang dan proses yang ada (Conchwall, A., 2002). Selanjutnya menurut Soja, memilih bahwa untuk menyebut ruang terciptakan ini sebagai ‗*the third spaces*' di mana aktor-aktor sosial menolak hegemoni ruang yang dilakukan oleh Negara dan pada akhirnya membuat sendiri ruang mereka (Soja, E., 1996).

Wilayah proses keterlibatan politik dan ekonomi merujuk pada tempat di mana proses keterlibatan berlangsung. Sebagaimana yang di- ungkapkan oleh Gventa, bahwa fokus pada bagaimana dan oleh siap

ruang-ruang proses keterlibatan dibentuk tentu saja bersinggungan dengan perdebatan tentang tempat-tempat atau arena-arena di mana kekuasaan ekonomi, politik dan sosial kritis berada. Dengan demikian, proses keterlibatan pada level praktis seharusnya kemudian dapat berada pada level global, nasional dan lokal di mana juga berfungsi sebagai lokasi bersemayamnya kekuasaan (nyata, takterlihat, dan ter- sembunyi), bahkan ada juga yang berpendapat bahwa kekuasaan ber- pindah dari aktor-aktor pada arena global dan dengan demikian perjuangan untuk memperluas proses keterlibatan harus terleburkan pada level tersebut (Gaventa, 2005). Sedangkan dimensi kekuasaan yang dimaksudkan untuk menguji hubungan antara ruang dan wilayah proses keterlibatan politik dan ekonomi berhadapan dengan ide proses keterlibatan politik, Gaventa menyarankan untuk menguji dinamika kekuasaan yang membentuk inklusifitas proses keterlibatan di antara mereka. Dengan mengadopsi pendapat Veena Klasen dan Miller, maka Gaventa mengelasifikasi kekuasaan ke dalam format visible, invisible, dan hidden (Veena Klasen dan Miller, 2002).

Kekuasaan nyata (*visible power*) kekuasaan di sini biasanya disebut sebagai kekuasaan politik (*bargaining politic*) dan termasuk diantaranya adalah kekuasaan yang diatur secara hukum, memiliki struktur, kewenangan, institusi, dan prosedur dalam pengambilan keputusan secara jelas. Veena Klasen dan Miller menyebutnya; *Strategies that target this level are usually to change the who, how, and what of policy-making so that the policy process is more democratic and accountable, and serves the need and rights of people and the survival of planet*.

Dengan demikian, batasan kekuasaan terpaku pada proses-proses demokratiis dan adanya pertanggungjawaban yang jelas. Sementara itu kekuasaan tersembunyi (*hidden power*), adalah kekuasaan yang dikontrol oleh orang-orang tertentu atau institusi yang memiliki *power institutions* yang menjaga pengaruh mereka melalui pengontrolan ter- hadap siapa yang dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan agenda. Dinamika semacam ini beroperasi

pada banyak level kekuasaan, sedikit banyak menafikkan dan menge-cilkan arti atau nilai dari orang-orang tersisih. Sedangkan kekuasaan tak terlihat (*invisible power*), dimensi kekuasaan ini membentuk batasan-batasan porses keterlibtana secara ideologis dan psikologis. Dengan demikian, persoalan dan isu-isu tidak hanya dijaga pada meja pengambilan keputusan, tapi juga melalui pikiran, dan kesadaran dari para pemain yang terlibat. Dengan memengaruhi bagaimana masya- rakat berpikir tentang tempat mereka di dunia, maka level kekuasaan ini adalah membentuk kepercayaan (*beliefs*). Rasa kedirian (*sense of self*), dan penerimaan akan status quo (*acceptance of the status quo*) mendefinisikan apa yang dimaksud dengan normal, apa yang dapat diterima, dan apa yang dianggap aman.

5. Pola kekuasaan

Pola kekuasaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana sese- orang atau sekelompok orang untuk menggapai dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan disini sangat dekat dengan pengertian Weber di mana pihak yang memiliki kuasa bisa mendesakkan kehendaknya atau gagasan-gagasannya kepada orang lain bahkan ketika mereka tidak sepakat dengannya. Antony Giddens yang tidak puas dengan pengertian yang terlalu luas ini, maka setiap bentuk hubungan sosial dengan mudahnya dapat menjadi relasi kuasa antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Untuk itu Giddens membedahnya lebih jauh konsesp ini dengan mengambil konsepsi yang lebih spesifik dari Weber, yaitu dominasi. Dominasi menurut Weber adalah pendesakan kekuasaan, di mana seorang pelaku menuruti perintah yang spesifik yang dikeluarkan oleh orang lain. Mengapa orang menurut pada perintah yang semacam ini? Giddens mengidentifikasi bahwa penyebabnya bisa merentang antara kebiasaan hingga kepentingan pribadi. Selanjutnya, kemung- kinan untuk menerima bahkan memperoleh hadiah maupun imbalan baik berupa materil maupun kehormatan sosial merupakan dua bentuk yang paling meresap dari ikatan yang mengikat pemimpin dan pengikut (Giddens, 1985). Tentu saja dalam hal ini Weber telah mengantisipasi bahwasanya tiap dominasi pasti mengalami kegoyaan. Namun alasan-

nya tentang instabilitas dominasi tersebut, kepercayaan atas pihak bawahan atas legitimasi kedudukan mereka sebagai bawahan tidak begitu mudah untuk ditemukan dalam penelitian yang akan penulis bahas.

Beranjak dari pemahaman tersebut maka selanjutnya, teori kekuasaan lain dari Weber yang akan dimanfaatkan di sini, adalah pemilahannya tentang pola hubungan dominasi, atau kita bisa sebut pola relasi kekuasaan, yakni tradisional, kharismatik, dan resional-legal. Menurutnya, relasi kekuasaan tradisional adalah kekuasaan yang bersandar pada aturan turun-temurun yang dipercaya oleh sebagian besar pendukungnya. Biasanya yang dianggap paling mengetahui aturan-aturan tersebut dijadikan sebagai pemimpin, atau memiliki otoritas untuk menjalankan pemerintahannya. Orang-orang ini biasanya adalah orang-orang tua yang memiliki pengetahuan sudah mencapai tingkat lebih matang dibandingkan dengan anggota masyarakat lain- nya, dianggap paling meresapi kearifan tradisionalnya, sehingga ber- implikasi kepada sebagian besar pemimpin di banyak kalangan tradisional atau ―kesukuan‖ adalah orangtua laki-laki yang pararel dengan apa yang disebut Weber sebagai sistem patriarkhis. Sistem ini tumbuh di dalam keluarga di mana aturan-aturan dalam keluarga tersebut diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Penjelasan Weber mengenai pola relasi kekuasaan legal-rasional merupakan hiasan yang paling meyakinkan. Sistem pemerintahan biro- kratis menjadi contoh utama Weber dalam ulasannya tentang pola relasi kuasa ini. Mengenai sistem ini Giddens (1986) merangkumnya seperti bahwa kegiatan-kegiatan staf administrasi dilaksanakan secara teratur, dan merupakan ―kedinasan-kedinasan‖ resmi jelas batas-batas- nya. Bidang-bidang wewenang para pejabat dibatasi dengan jelas, dan tingkat-tingkat otoritas digariskan batasnya dengan jelas dalam bentuk hierarki kantor. Aturan-aturan mengenai perilaku staf, otoritas dan tanggung jawabnya, dicatat dalam bentuk tertulis. Penerimaan tenaga administrasi didasarkan atas terbuktinya kemampuan spesial melalui ujian persaingan dan pemilikan diploma atau gelar yang memberikan

bukti tentang kemampuan-kemampuan yang cukup memadai. Milik kantor bukan milik pejabat. Suatu pemisahan antara pejabat dan kantor dipertahankan sedemikian, sehingga dibawah kondisi apa pun, kantor itu tetap tidak bisa dimiliki oleh yang berwenang di kantor (pejabat).

Mengenai dominasi yang berwatak kharismatik Weber menjelas- kan bahwa pola ini bergantung pada individu yang dipercaya memiliki kemampuan aneh yang sangat mengesankan, sesuatu yang membuat- nya lain dan terpisah dari orang kebanyakan, kharisma. Apakah seseorang benar-benar memiliki kualitas kharismatik yang dimaksud bukanlah hal yang begitu penting. Penekananannya ada pada kualitas- kualitas yang membuat orang tersebut kharismatik. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kharisma itu, Weber menyatakan: Suatu sifat tertentu dari suatu kepribadian seorang individu berdasarkan mana orang itu dianggap luar biasa dan diperlakukan sebagai seorang yang mempunyai sifat-sifat gaib, sifat unggul, atau paling sedikit dengan kekuatan-kekuatan yang khas dan luar biasa.

Kekuasaan yang mengikuti tokoh yang luar biasa ini bisa muncul di banyak etnis masyarakat. Pengikutnya didulang melalui kepercayaan akan kemampuan luar biasa sang tokoh. Kharisma bisa dipindahkan dengan menjadikannya sebagai sebuah kualitas yang dapat dipindahkan ke orang lain. Pemindahan kualitas ini bisa dilakukan lewat latihan atau pewarisan. Sebagai contoh, bila kharisma diubah menjadi kekuasaan model tradisional atau legar-rasional, maka dia bisa dijadikan sebagai ―sumber kekuasaan yang sakral‖, bisa menjadi salah satu alat yang legitimate untuk merebut atau bahkan mempertahankan kekuasaan. Orang-orang biasa yang dilatih dengan baik dalam penge- tahuan ajaran Islam bisa kemudian muncul sebagai orang punya kharisma, punya kemampuan khusus. Paling penting adalah orang ter- sebut dapat membuktikan keluarbiasaannya kepada para pengikutnya.

Hal lain yang penting mengenai kharisma menurut Weber adalah model bisa menjadi pendobrak untuk mengubah model tradisional warisan turun-temurun. Pengikut dari pemimpin kharismatik juga men- jadi pengikut secara sukarela, tidak terdapat

hierarki kepengikutan

seperti dalam birokrasi moderen (kepangkatan dan jabatan), juga tidak terdapat aturan yang terlalu mengikat tentang tanggungjawab spesifik masing-masing anggota, dana yang diperoleh kebanyakan berasal dari sumber informal, sumbangan atau rampasan.

Bab 3
Menakar Ekonomi Politik Pembangunan

A. Ekonomi Politik Pembangunan di Kabupaten Maros

Pada bagian ini penulis melakukan settingan pada kondisi atmosfer politik Maros dibagi menjadi dua masa kepemimpinan yakni di masa Kepemimpinan Bupati Maros periode tahun 1999-2004 dan periode tahun 2005-2010. Dalam perkembangan pemerintahannya yang lebih banyak fokus kepada sektor pembangunan khususnya pem- bangunan gedung, perbaikan sarana dan prasarana pendukung, pem- bangunan Pasar Sentral Maros, membuka akses bagi para investor yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Maros. Salah satu contohnya yang paling terkenal adalah mempertajam kerjasama bagi perusahaan PT. Semen Bosowa untuk mengembangkan perusahaannya yang ter- letak di Desa Simbang, Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros yang menggelontorkan wacana kesejahteraan bilamana perusahaan ter- sebut telah berhasil mendatangkan devisa bagi Kabupaten Maros.

Selanjutnya, pola-pola lain yang berkembang adalah upaya pen- ciptaan masyarakat mandiri. Upaya penciptaan masyarakat madani ini sejalan dengan visi pembangunan daerah Maros ke depan harus lebih diarahkan kepada upaya terciptanya masyarakat mandiri dan mampu membangun dirinya. Kemandirian tersebut ditandai dengan meningkat- nya peran serta seluruh lapisan masyarakat sebagai asset daerah dalam proses pembangunan. Kemandirian masyarakat utamanya program untuk membangun daerah ini adalah bagaimana memanfaatkan secara maksimal posisi strategis Maros sebagai daerah *hinterland* Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). Strategi yang dilakukan adalah dengan cara memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah ini, utamanya disektor per- ekonomian, perdagangan, dan permukiman.

Selanjutnya, pengupayaan beberapa proyek pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Proyek- proyek tersebut sangat vital, khususnya untuk menunjang pelayanan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Maros. Proyek pembangunan kantor Bupati Maros yang baru dan perampungan pasar raya Maros dimana kedua proyek tersebut yang berlokasi di kawasan pengem- bangan Kota Baru Maros membutuhkan dana yang cukup besar. Hal tersebut juga didukung dengan potensi sumber daya alam daerahnya yang secepatnya untuk dikembangkan, sehingga hasilnya dapat diniktai oleh kalangan masyarakat Maros. Kondisi pengembangan sumber daya alam juga diikuti dengan penngkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Maros. Dengan mengoptimlaisasi sumber daya manusia maka diharapkan pembangunan hasilnya akan maksimal. Selain dari pada itu juga situasi perkembangan dan pengem- bangan para pedagang yang dimulai dari pedagang yang memiliki modal usaha kecil, menengah, hingga pedagang yang bermodal besar juga ditentukan oleh kesediaan dan daya tampung yang dimiliki oleh wilayah serta sumber daya manusianya yang bilamana tidak ditingkat-kan kualitasnya maka pedagang yang bermodal kecil tetap saja tidak dapat beradaptasi dengan kesesuaian jaman yang berlaku.

Selanjutnya situasi lain yang terekam dalam kondisi atmosfer politik Maros adalah proses kerja sama yang dilakukan oleh peme- rintah Kabupaten Maros (Penguasa) yang berkontrbusi terhadap proses kerjasama yang dilakukan dengan beberapa anggota Gabungan Pengusaha dan Kontraktor Nasional (Gapeknas) dalam proses pe- kerjaan dan penyelesaian proyek-proyek yang diciptakan melalui iklim pembangunan. Kondisi ini tercipta berkat adanya pola-pola relasi yang dibangun dan dibentuk oleh pengusaha umunya lebih kepada pen- dekatan nilai politik.

Pengusaha juga berbaur melalui kelompok politik yang dilakon-kan oleh penguasa, sehingga dengan mudahnya pengusaha untuk me-nembus akses langsung dalam jejaring kekuasaan. Kondisi ini juga dapat memberikan angin segar dalam memperoleh akses dan informasi

dalam jejaring kelompok penguasa di Kabupaten Maros melalui partai politik. Di samping itu juga pengusaha seringkali melibatkan diri dalam kegiatan sosial baik yang sifatnya formal maupun non formal yang menggandeng penguasa untuk menampilkan wajahnya di depan publik. Di samping itu pula kegiatan lainnya yang memiliki peran dan dampak adalah kegiatan keikutsertaan dalam hal sponsor di setiap pagelaran yang dilaksanakan oleh penguasa, sehingga menimbulkan rasa hutang budi diantara kedua belah pihak. Kondisi singkat ini adalah gambaran atmosfer pemerintahan di masa Bupati Maros Drs. H. A. Nadjamuddin Aminullah, M.S., dan Wakil Bupati Drs. H. A. Paharuddin, M.M.

Selanjutnya, atmosfer kepemimpinan Bupati Maros periode tahun 2010-2015 dan tahun 2016-2021. Program kerjasama dengan investor dalam mengembangakan Kabupaten Maros sebagai kota dagang. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan cara mem- berikan kesempatan dan peluang yang seluas-luasnya bagi investor untuk datang membenamkan sahamnya dan membangun di Kabupaten Maros dengan cara menyediakan lokasi yang terletak di Kecamatan Marusu bagi perusahaan industri pengolahan, di Kecamatan Banti- murung bagi industri pertambangan dan galian, hingga industri pengolahan minuman kemasan yang jga terletak di Kecamatan Banti- murung. Selain dari pada itu juga adanya perluasan penyediaan lapangan usaha yang berlokasi di Kecamatan Simbang bagi industri Semen China PT. Conch.

Selain bagi penciptaan iklim usaha yang dilakukan oleh penguasa juga menciptakan pola kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan di sektor pengadaan barang dan jasa, kontraktor, sewa menyewa alat berat, dan lain sebagainya. Kerjasama ini di bangun ber- dasarkan kesepakatan bersama yang dilandasi dengan kerjasama ter- tulis bagi kedua belah pihak. Dalam pola kerjsa sama diantara penguasa dan pengusaha ini maka seringkali memunculkan wacana. Wacana yang muncul tersebut bersifat positif dan juga negatif. Wacana yang bersifat positif adalah dengan adanya pola kerjasama yang di-

bangun diantara Pemerintah Kabupaten Maros dengan investor, pemilik perusahaan pertambangan, pemilik perusahaan pengadaan barang dan jasa, maupun kontraktor maka didapatkan keuntungan bagi perputaran ekonomi di Kabupaten Maros. Sedangkan wacana negatif yang ditimbulkan adalah banyaknya praktik suap, pelanggaran administrasi, kongkalikong, pemberian izin usaha yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hingga pada tahap pemberian kebijakan ke- pada pemilik modal agar mengeluarkan aturan yang sifatnya meng- untungkan bagi penguasa dan pengusaha dengan tidak memperdulikan nasib warga masyarakat.

Kondisi semacam ini yang menjadi pusat sorotan utamanya pemberian ijin dan praktik korupsi diantara penguasa dan pengusaha. Adanya hubungan yang terbangun diantara kedua belah pihak baik itu melalui jejaring politik maupun jejaring relasi bisnis yang sebelumnya terbangun oleh kedua belah pihak sehingga berdampak kepada pola hubungan yang mementingkan kelompok tertentu belaka daripada me- mikirkan nasib warga masyarakat. Alhasil, wacana tentang adanya relasi diantara penguasa dengan pengusaha juga tidak dapat dihindari. Pengusaha dapat menembus akses kepada jejering penguasa disebab- kan faktor kedekatan politik maupun kedekatan investasi peluang bisnis. Penguasa juga terlibat sebagai bendahara umum di salah satu partai pendukung penguasa maka dengan sendirinya akses jejaring pun terbangun dengan sendirinya. Sementara untuk akses jejering bisnis seringkali penguasa menjadi patron bagi pengusaha, maupun sebalik- nya pengusaha akan menjadi patron dari penguasa. Kondisi singkat tentang gambaran atmosfer politik Maros di masa kepemimpinan Bupati Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M., dan Wakil Bupati Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M., telah terjadi adanya faktor kedekatan yang tidak dapat dihindari, sehingga mengakibatkan perlakuan khusus bagi mereka yang memiliki akses.

B. Sektor Ekonomi Politik Pembangunan Daerah

1. Sektor pariwisata

Salah satu penghasil pendapatan terbesar di Kabupaten Maros adalah sektor pariwisata. Penyebabnya adalah terdapat beberapa objek wisata yang cukup terkenal di Indonesia berada di Kabupaten Maros, sehingga objek wisata itu banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun internasional. Jumlah objek wisata di Kabupaten Maros pada Tahun 2014 sebanyak 11 titik. Namun objek wisata yang memiliki pengunjung terbanyak berjumlah 3 titik, yaitu objek wisata Bantimurung, Kolam Renang Bantimurung, dan Taman Prasejarah Leang-leang. Secara kuantitas jumlah wisatawan yang ber- kunjung mengalami penurunan, namun demikian telah terjadi pening- katan kunjungan oleh wisatawan mancanegara. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Maros khususnya objek wisata yang ada semakin dikenal oleh dunia internasional sehingga banyak turis-turis asing yang berkunjung. Pengunjung wisatawan mancanegara terjadi peningkatan yang signifikan di mana pada tahun 2010 berjumlah 2.810 pengunjung, sampai pada tahun 2014 terjadi pengunjung wisatawan mancanegara berjumlah 4.073. Sedangkan pengunjung untuk wisatawan domestik mengalami penurunan yang pada tahun 2010 jumlahnya 604.430 hingga pada tahun 2014 jumlah pengunjung sebanyak 272.428.

2. Sektor perdagangan

Kondisi perdagangan di Kabupaten Maros dapat diukur dari besaran nilai barang yang diekspor dan impor di Kabupaten Maros. Berdasarkan data observasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Maros, diper- oleh nilai ekspor Kabupaten Maros sampai tahun 2014 sebesar Rp.84.136.470.373. Kondisi ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan nilai, apabila dibandingkan dengan tahun 2010 di mana ekspor bersih Kabupaten Maros sebesar Rp.68.868.522.375.

3. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia maka sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting, utamanya bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh sektor UMKM. Selain memiliki arti strategis bagi pembangunan, UMKM juga berfungsi sebagai sarana untuk meme- ratakan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Perkembangan UMKM di Kabupaten Maros cukup pesat antara tahun 2011 dan 2012, dimana pada tahun 2011 jumlah pelaku UMKM sebanyak 5.904 unit yang kemudian meningkat secara pesat pada tahun 2012 menjadi
30.494 unit. Selanjutnya, pada tahun 2014 jumlah UMKM yang ada sebanyak 30.963 unit. Dari jumlah pelaku UMKM yang ada tersebut tenaga kerja yang dapat diserap sebanyak 16.890 orang pada tahun 2010 orang yang kemudian meningkat menjadi 93.787 orang pada tahun 2014.

4. Sektor pertambangan dan galian

Sektor pertambangan dan galian di Kabupaten Maros memiliki potensi yang cukup tinggi, utamanya batubara, marmer, dan beberapa produk tambang lainnya. Namun demikian sektor pertambangan ini masih memerlukan pengelolaan yang lebih maksimal dan lestari agar hasilnya lebih baik, juga menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya.

5. Sektor Industri

Industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah, sehingga keberadaan dan tingkat pertumbuhan sektor industri umum- nya dapat menentukan seberapa besarnya perkembangan ekonomi daerah tersebut. Melihat potensi tersebut maka program pengembangan industri di Kabupaten Maros sampai tahun 2032, adalah sebagai berikut:

1) Kawasan-kawasan yang mempunyai bahan baku yang cukup memadai, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri, dan tidak terletak atau berdekatan dengan kawasan lindung dan pertanian lahan basah;

2) Lokasi industri yang tidak sesuai rencana tata ruang harus di- kendalikan pengembangannya dan untuk lokasi industri baru di- tempatkan di zona industri yang telah direncanakan atau di sekitarnya;
3) Kegiatan industri yang mempunyai potensi untuk mencemari lingkungan perlu dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah industri;
4) Pengembangan kegiatan industri ditujukan untuk dapat menyerap tenaga kerja, menggalakkan ekspor, dan pengembangan industri yang terkait dengan sektor pertanian;
5) Pengeluaran izin lokasi kegiatan industri baru harus dilengkapi dengan ijin pemanfaatan ruang dan persyaratan teknis yang berlaku.

Untuk pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Maros sampai tahun 2032 digunakan pendekatan terpusat di mana kegiatan industri dikembangkan dalam satu zona yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkannya, yakni:

a. Kawasan peruntukan industri besar
   1) Kawasan peruntukan industri semen terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung;
   2) Kawasan peruntukan industri manufaktur diarahkan di Kawasan Industri Maros di Kecamatan Marusu;
   3) Kawasan peruntukan industri pengolahan marmer diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Turikale, dan sebagian wilayah Kecamatan Lau; dan
   4) Kawasan peruntukan industri peleburan diarahkan di Kecamatan Bontoa.
b. Kawasan peruntukan industri sedang
   1) Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas perikanan diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, dan sebagian wilayah Kecamatan Lau; dan

2) Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas peternakan di sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.

c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga

Kawasan peruntukan industri rumah tangga ini berupa aglomerasi industri rumah tangga diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale (Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros 2016).

6. Perkembangan perusahaan dan industri

Dalam mencermati relasi antara kelompok penguasa dan pengusaha di Kabupaten Maros diperlukan gambaran kondisi perkembangan perusahaan dan industri di Kabupaten Maros dalam kurun waktu tahun 2000-2004 dan tahun 2010-2014. Karenanya, perkembangan perusahaan di Kabupaten Maros sangat berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan bagian dari pengurangan peng- angguran. Dalam kurun waktu tahun 2000-2004 jumlah perkembangan perusahaan terbanyak berada pada tahun 2000 berjumlah 706 unit dan jumlah perusahaan terendah berada pada tahun 2001 sebanyak 240 unit. Sedangkan perkembangan perusahaan dalam kurun waktu tahun 2010-2014 jumlah perusahaan terbanyak berada pada tahun 2014 se- banyak 4.961 unit dan terendah berada pada tahun 2010 sebanyak 385 unit. Dengan demikian, maka perkembangan perusahaan dalam kurun waktu tahun 2010-2014 mengalami perkembangan yang berbeda dengan kondisi kurun waktu tahun 2000-2004 yang mengalami penurunan perkembangan perusahaan.

C. Inventarisasi Perusahaan

1. Perusahaan pertambangan dan pabrik minuman

a. Perusahaan pertambangan

Pada setting bagian ini akan menguraikan beberapa jumlah perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan operasional di be- berapa tempat yang tersebar di pelosok Kabupaten Maros. Kegiatan pertambangan ini tidak sedikit diantara warga masyarakat lokal meng- anggapnya sebagai sebuah anugerah oleh karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus mendatangkan pemasukan ekonomi bagi mereka. Namun demikian kegiatan pertambangan di Kabupaten Maros ini juga tidak sedikit yang menimbulkan masalah yang dapat merusak habitat dan ekosistem alam lainnya, seperti misalnya kerusakan pada kawasan karts dan Taman Nasional yang terletak di Kecamatan Bantimurung.

Hal ini sangatlah bertentangan dengan semangat para penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus di bidang lingkungan maupun para aliansi mahasiswa dan masyarakat pencinta lingkungan yang menganggap bahwa kegiatan pertambangan ini telah menyalahi dari konsensus peraturan tentang kelestarian cagar budaya. Di mana terdapatnya perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dapat merusak dari kelestarian ekosistem dan biodata yang ada di sekitar lokasi pertambangan. Selanjutnya, pihak pemerintah perlu dengan serius untuk mencermati isu-isu yang beredar di media cetak maupun media online. Oleh karena isu ini sangatlah sesuai dengan kondisi yang terdapat di lapangan yang diduga telah terjadi kerusakan pada kawasan karst dan juga habitat biota-biota lainnya. Secara singkat akan diuraikan beberapa profil perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Maros yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sebagaimana berikut ini;

1) Perusahaan PT. Semen Bosowa Maros

Bosowa merupakan perusahaan perdagangan yang didirikan oleh oleh H. M. Aksa Mahmud pada tanggal 22 Februari 1973. Pada awal berdirinya perusahaan ini bernama CV. Moneter yang terletak di Kota

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan memiliki visi menjadi pemain utama ekonomi nasional yang didukung oleh tenaga kerja yang prima, produk berkualitas, pelayanan yang terbaik, dan sistem yang terintegrasi, perusahaan ini melakukan perluasan industri yang dibagi dalam beberapa unit bisnis, yakni otomotif, semen, logistik dan transportasi, pertambangan, properti, jasa keuangan, infrastruktur, energi, media, dan multibisnis.

Salah satu unit bisnis Bosowa adalah PT. Semen Bosowa Maros. Unit ini merupakan salah satu unit usaha andalan yang dimiliki oleh Bosowa Group. Produksi ini meliputi proses penggunaan bahan baku, proses produksi semen hingga proses pengiriman kepada konsumen. Setiap tahapan proses dilakukan secara profesional dengan bantuan para tenaga ahli dibidangnya. Dengan itu Semen Bosowa menghasilkan sertifikat ISO 9001 dan 14001. Unit Semen Bosowa sendiri terbagi menjadi dua perusahaan yakni PT. Semen Bosowa Maros dan PT. Semen Bosowa Indonesia. Kedua perusahaan cabang ini memiliki tugas masing-masig dalam mengelola bisnis semen. Diantaranya PT. Semen Bosowa Maros yang memproduksi semen secara full integrated dengan total produksi sebesar 2 juta ton klinker pertahunnya. Pabrik semen ini berpusat di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedangkan Semen Bosowa Indonesia memproduksi semen secara semi integrated (*grinding*). Pabrik mampu menghasilkan semen sebesar 1,2 juta ton per tahun. Selain itu, pabrik Semen Bosowa juga membangun beberapa tempat lainnya, seperti di Kabupaten Barru (Provinsi Sulawesi Selatan), Kabupaten Ciwanden (Provinsi Banten), Kabupaten Banyuwangi (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Rembang (Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten Sorong (Provinsi Papua Barat). Dalam perkembangannya Semen Bosowa juga ikut andil dalam perkembangan persepakbolaan Indonesia. Salah satunya dengan men- jadi sponsor utama bagi klub sepak bola asal Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yakni PSM Makassar pada musim pertandingan tahun 2013.

Semen Bosowa sempat menemui kendala pada awal Tahun 2013. Perusahaan mengalami kemunduran saat cuaca ekstrem melanda Indonesia. Hal ini terjadi lantaran distribusi bahan baku yang terhambat oleh karena kapal pengangkut bahan baku berhenti di pelabuhan. Dengan terjadinya ini, membuat produksi semen anjlok hingga men- capai 20%. Penyebab lain adalah belum diselesaikannya tender proyek penambahan kapasitas di beberapa pabrik. Selanjutnya, pabrik semen ini sering melakukan kegiatan-kegiatan guna mendukung Pemerintah, salah satu diantaranya adalah yang diluncurkan pada Bulan Februari tahun 2013 adalah pengoperasian Batching Plant atau mesin pembuat beton untuk mensuplai kebutuhan semen bagi Pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB) (Sumber; Diolah dengan data dasar primer, 2016).

2) PT. Hamparan Laut Sejahtera

PT. Hamparan Laut Sejahtera merupakan perusahaan yang di-dirikan oleh Achmad Taufik Nuriman (Bupati Serang periode tahun 2005-2015). Diketahui, terdapat tiga perusahaan yang dimiliki oleh Ahmad Taufik Nuriman, yakni; PT. Hamparan Laut Sejahtera (HLS), PT. Anugerah Tirta Bumi (ATB), dan PT. Pandu Khatulistiwa. Ketiga perusahaan ini muncul saat Ahmad Taufik Nuriman masih menjabat sebagai Bupati Serang. Namun demikian yang tertera dalam nama pemilik perusahaan ini adalah Ignatius Suharyanto. Dalam sejarah perkembangannya, penambangan pasir laut di perairan Banten diawali oleh PT. Jetstar yang didasarkan pada izin pertambangan pasir laut di lepas pantai Lontar melalui S.K Bupati No.540/Kep-Huk 2003, ter- tanggal 21 Januari 2003. Sejak saat itu, kapal tongkang penambang pasir milik PT. Jetstar mulai beroperasi di wilayah zona tangkap lontar.

Selain itu, saat ini juga ada tiga anak cabang perusahaan baru yang tengah mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke Pemerintah Provinsi Banten, yakni PT. Cakra Kerta Banten, PT. Mineralindo Sukses Mandiri, dan PT. Sapta Pilar Energi. Di mana ketiga perusahaan tersebut statusnya masih dalam tahap uji coba (*dredging operation*) Maret 2016 di perairan Pulau Tunda dan juga di perairan

Ciwandan, yang terletak di daerah Kota Cilegon, Provinsi Banten (Sumber; Diolah dengan data dasar primer, 2016).

3) PT. Bosowa Mining

Profil perusahaan PT. Bosowa Mining Marmer Maros, yang terletak di Desa Barugae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan perusahaan yang bergerak di sektor Industri Barang, Marmer, dan Granit untuk keperluan rumah tangga maupun untuk pajangan. Pemilik perusahaan ini adalah H.Erwin Aksa, S.E. yang merupakan putra dari pemilik dan pendiri Bosowa Corporation H. M. Aksa Mahmud. PT. Bosowa Mining me- lakukan penambangan dan pembuatan tile marmer dengan kapasitas produksi minimal 450 m3/bulan untuk produksi blok dan 3500 m2/bulan untuk produksi tile.

Produk yang dihasilkan perusahaan PT. Bosowa Mining meru- pakan produk blok dan tile dalam ragam ukuran dan warna, dengan kualitas tinggi karena berasal dari daerah lithologi-nya secara alami ter- bentuk dari batu gamping. Hal ini dikarenakan proses perubahannya secara alami menjadi batu marmer. Produk yang dihasilkan juga telah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia hingga mencakup Benua Asia, Benua Eropa, dan Benua Amerika. Adapun jenis marmer yang diproduksi oleh perusahaan PT.Bosowa Mining adalah; (1) marmer type cream, (2) marmer type standar, (3) marmer type parleto, dan (4) marmer type nero (Sumber; Diolah dengan data dasar primer, 2016).

4) PT.Sedia Cipta Laksana Mining

PT. Sedya Cipta Laksana Mining (batubara) yang beralamatkan di Graha Tirtadi R 402. Jl. Raden Saleh No.24 Jakarta Pusat. Sedianya PT.Sedia Cipta Laksana Mining ini melakukan kegiatan eksplorasi tambang batu bara di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulwesi Selatan. Perusahaan ini telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Eksplorasi perusahaan ini berpusat di tiga dusun yang terletak di Kabupaten Maros. Dusun yang dimaksudkan adalah Dusun Pangisoreng, Dusun Atuma Denring, dan Dusun Lapahilalang

di Desa Batu Putih, Kecamatan Mallawa. Perusahaan ini menargetkan produksi batu bara untuk tahun pertamanya sebesar 160.000 ton (dimulai pada Tahun 2010) hingga target dalam tempo lima tahun ke depan sebesar 240.000 ton.

Kegiatan eksplorasi akan dilakukan selama sembilan tahun lamanya, di mana setiap lima tahun sekali dilakukan perpanjang usaha izin industri. Perusahaan ini memperoleh izin Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dari Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros (BLHD Kabupaten Maros). Amdal-nya akan dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Untuk tahap pra- rekonstruksi, maka perusahaan ini tengah menyusun rencana serta alokasi anggaran pembebasan lahan. Kompensasi yang diberikan adalah terhadap tanaman atau tegakan yang ada di areal lahan yang digunakan atau dikuasai oleh masyarakat, seperti tanaman dan juga pepohonan. Perusahaan ini akan mengeksplorasi dan eksploitasi berupa jenis tambang batu bara. Sementara perusahaan ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 65 orang tenaga lokal yang diprioritaskan khusus yang memiliki keahlian dibidang pertukangan dan konstruksi serta tenaga kerja buruh kasar (Diolah dengan data dasar primer, 2016).

5) PT. Arwachna Marmer Prima

PT. Arwachna Marmer Prima adalah sebuah perusahaan tambang marmer yang beroperasi sejak tahun 2012 di Kelurahan Leang-leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Perusahaan ini memiliki luas area operasi sekitar 25 Ha. Perusahaan ini beralamatkan di Jl. K.H. Achmad Dahlan No.1 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Perusahaan ini mem- produksi marmer yang berkualitas terbaik di seluruh dunia dengan corak, dan warna kualitas marmer yang bagus, serta alami yang baik untuk dikelola menjadi ubin, dan lainnya. Perusahaan ini memiliki pengalaman dalam memproduksi marmer dari tambang dan memiliki pangsa pasar di dalam hingga luar negeri Indonesia. Seperti negara China yang seringkali memesan marmer di perusahaan Arwachna baik

itu dalam berupa blok, slab, hingga tiles (Diolah dengan data dasar primer, 2016).

b. Perusahaan pabrik minuman

Perusahaan pabrik minuman yang mendapat sorotan melalui wacana yang berkumandang baik yang bersifat positif maupun negatif adalah perusahaan Industri Pabrik Minuman PT. Sinar Sosro. Per- usahaan tersebut mengelola jenis usaha di sektor teh botol kemasan. Perusahaan ini seringkali tampil sebagai wacana kesejahteraan. Wacana kesejahteraan yang ditampilkan adalah mampu mendatangkan devisa bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros dan juga menyerap lapangan pekerjaan bagi warga lokal yang bermukim di sekitar lokasi perusahaan.

Selanjutnya, pabrik Teh Gelas di bawah produksi PT. CS2. Teh gelas ini juga seringkali menampilkan wacana kesejahteraan melalui kesejahteraannya yang mampu menyerap lapangan pekerjaan yang diperoleh dari hasil perluasan dan penambahan disektor perusahaan ter- sebut. Selanjutnya perusahaan yang beroperasi di Dusun Bontosunggu, Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros juga mendapat sorotan dan kritikan dari kalangan tokoh masyarakat sekitar. Wacana kerugian yang ditampilkan oleh tokoh masyarakat ini berupa pencemaran lingkungan dan air. Menurutnya sumber air yang berada di sekitar lingkungannya yang juga dijadikan untuk konsumsi sejak produksinya perusahan Teh Gelas kini sudah tercemar. Dampak yang ditimbulkan adalah kerugian yang disebabkan matinya hewan-hewan ternak peliharaannya yang selama ini mengkonsumsi air di sekitar perusahaan. Wacana yang berkembang ditengah kelompok masyarakat adalah perusahaan melakukan kegiatan pembuangan limbah di sungai yang berada di sekitar lokasi perusahaan. Kegiatan ini dilakukan pada waktu dini hari, sehingga tidak banyak yang melihat proses kegiatan pembuangan limbah yang dilakukan oleh perusahaan Teh Gelas ter- sebut (Makassar terkini. Com).

2. Perusahaan non-pertambangan

Settingan pada bagian ini selanjutnya menguraikan situasi dan perkembangan perusahaan non-pertambangan dimana kegiatannya di bidang jasa konstruksi, sewa menyewa alat berat, kontraktor, pengadaan, dan perdagangan umum melakukan kegiatan operasional di beberapa tempat yang sersebar luas di Kabupaten Maros. Kegiatan perusahaan non-pertambangan juga seringkali mengandalkan faktor relasi yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa dalam men- dapatkan akses informasi untuk mengerjakan proyek yang diciptakan melalui kegiatan pembangunan yang prosesnya lewat tender maupun penunjukan langsung di Kabupaten Maros. Dalam kondisi tersebut pengusaha yang ingin mengerjakan sebuah pekerjaan yang diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros paling tidak memiliki akses atau relasi dengan penguasa, sehingga mereka dengan mudahnya untuk memperoleh akses informasi perihal jadwal pelaksanaan adanya kegiatan proyek yang akan ditender atau dengan cara penunjukan langsung oleh penguasa. Kondisi inilah yang memungkinkan ter- ciptanya pola-pola atmosfer politik di mana pengusaha yang memiliki relasi politik mereka peroleh dengan cara sebagai sponsor pada saat masa kampanye maka dengan leluasanya mereka dapat menembus jejaring penguasa melalui faktor relasi yang sebelumnya mereka bentuk. Sementara pengusaha yang hanya sebatas sebagai pendukung di luar dalam konteks jejaring politik dengan penguasa maka secara otomatis proyek yang mereka kerjakan hanyalah sisa dari proyek utama yang sebelumnya telah terlebih dahulu dikerjakan oleh pengusaha kontraktor yang memiliki relasi dengan penguasa.

Pola relasi penguasa dan pengusaha ini juga berdampak kepada aspek pemberian izin usaha yang seringkali membentur aturan yang berakibat kepada mutu dan kualitas hasil kerja perusahaan melalui proyek, penyelewengan anggaran, praktik kongkalikong diantara penguasa dan pengusaha, hingga pada aspek wacana tunggakan pajak. Dalam konteks tersebut perusahaan non pertambangan ini seringkali melakukan hubungan gelap dengan penguasa tujuannya proyek yang

mereka kerjakan sepenuhnya dikerjakan oleh perusahaannya dengan harapan akan membawa banyak keuntungan. Namun kondisi keuntungan tersebut berbanding terbalik dengan keuntungan yang akan diperoleh warga masyarakat dari hasil kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh penguasa. Alhasil, dari pengerjaan proyek tersebut akan menimbulkan banyak kerugian baik yang ditimbulkan yang ber-akibat pada kerugian warga masyarakat.

3. Profil pemilik perusahaan di Kabupaten Maros

Settingan pada bagian ini adalah untuk menguraikan beberapa diantara pengusaha yang melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Maros, dengan beberapa pertimbangan bahwa mereka yang sering memproduksi dan mereproduksi wacana di media, sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

a. H.M.A.M.

H.M.A.M. adalah pengusaha yang dilahirkan di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, 16 Juli 1945. Selain berprofesi se- bagai pengusaha juga berprofesi sebagai politisi Indonesia. Kiprahnya sangat dikenal luas sebagai pendiri Bosowa Corp yang menjadikan dirinya menduduki peringkat 38 dalam daftar 40 orang terkaya versi majalah Forbes. Berdasarkan data dari majalah Forbes, H.M.A.M. memiliki kekayaan sebesar US$780 Juta. Bosowa Corp, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotof, semen, logistik dan transportasi, pertambangan, properti, jasa keuangan, infrastruktur, energi, media, dan multibisnis. H.M.A.M. juga memiliki saham di PT. Bank Bukopin, Tbk., dan PT. Bank QNB Kesawan, Tbk.

Sebagai politikus H.M.A.M. juga pernah menjadi Anggota MPR RI Fraksi Utusan Daerah dari Sulawesi Selatan pada tahun 1999-2004 dan berlanjut menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah periode tahun 2004-2009 mewakili Provinsi Sulawesi Selatan. Saat H.M.A.M. masih aktif sebagai politikus senior Partai Golongan Karya. Pada tahun 1995 H.M.A.M. mendirikan pabrik Semen Bosowa di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kapasitas 1,8 juta ton pertahun. Namun demikian pada tahun 1998,

pabrik Semen Bosowa terkendala oleh krisis ekonomi. Akhirnya proyek itu baru berjalan di tahun krisis itu dengan nilai aseet sebesar Rp.3 Triliun. Sebanyak 80% produksi diperuntukkan bagi pasar dalam negeri, sementara 20% sisanya diekspor ke Negara Filiphina dan Negara Afrika.

Selain itu, H.M.A.M. juga memiliki yayasan yang diberi nama Yayasan Aksa Mahmud yang merupakan Bosowa Foundation yang merupakan wujud dari *Corporate Social Responsibility* (CSR Bosowa). Sebagai lembaga nirlaba yang berada dalam organisasi Bosowa Corporation yang berorientasi pada kegiatan-kegiatan sosial kemasya- rakatan. Bosowa Foundation menjembatani dan menjalankan fungsi sosial perusahaan agar memberikan dampak positif terhadap ke- sejahteraan masyarakat dan turut serta dalam melestarikan lingkungan. Di samping itu, Bosowa Foundation sudah mempersiapkan institusi perguruan tinggi berkualitas. Selain mengembangkan Politeknik Bosowa, salah satu perguruan tinggi yang membina mahasiswa yang terampil dan siap kerja, Bosowa Foundation juga telah mengambil alih asset dan manajemen Universitas 45 Makassar, yang gadang-gadang merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Bosowa Foundation di sektor pendidikan.

Sorotan publik terhadap H.M.A.M. yang dimulai dengan latar belakang pengusaha dan kebetulan juga dekat dalam hubungan keluarga dengan H. M. Jusuf Kalla, sebagai Wakil Presiden RI Periode tahun 2014-2019, yang berada di pusaran kekuasaan, di mana

H.M.A.M. memang tidak bisa lepas dari sorotan publik yang seringkali menyudutkannya. Diantaranya posisinya yang seringkali diragukan ke- tulusannya memilah-milah ketiga profesinya sebagai pebisnis, politisi, dan sebagai pejabat negara (pejabat publik) yang ditambah lagi sebagai keluarga dekat dengan Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla. Dalam hal ini, memunculkan pertanyaan kritis, apakah tidak ada benturan kepen- tingan antara bisnis dengan jabatan sebagai seorang pejabat negara?

Namun tudingan itu H.M.A.M. menepisnya secara arief dan bijaksana. H.M.A.M. menampiknya bahwa statusnya sebagai adik ipar

Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla, H.M.A.M. bukanlah tipikal manusia yang suka bersandar kepada pihak lain atau kepada penguasa. Oleh karena itu, seluruh bisnis Bosowa yang kini dikendalikan oleh anaknya, dia melarang untuk mengerjakan proyek pemerintah. _Boleh dicari, mana ada proyek yang bersumber dananya dari pemerintah, tidak ada. Semuanya bekerja untuk umum. Seperti jalan tol, dana pem- bangunannya bukan dari pemerintah. Membangun pabrik listrik bukan uang yang bersumber dari pemerintah, membuat kebun bukan uang yang bersumber dari pemerintah.'

Namun pada kenyataannya kebijakan pemerintah yang memang mengatakan bahwa siapa yang mau membangun jalan tol, maka yang memiliki uang dipersilahkan untuk bangun jalan tol. Siapa yang mau bangun pembangkit energi listrik, yang memiliki uang dipersilahkan juga untuk membangun. Pemerintah hanya menciptakan iklim usaha- nya saja. _Jadi saya suruh anak saya, masuklah pada bisnis yang tidak bersumber dari dana pemerintah, tapi masuk dalam bisnis yang iklim-nya diciptakan oleh pemerintah'.

Proses pembentukan jati dirinya sejak kecil, cukup memberi jaminan bahwa dia seorang manusia yang berkepribadian yang kuat, memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Sejak kecil H.M.A.M. sudah melakoni bisnis, diantaranya dengan berjualan permen di sekolahnya. Menjual hasil desa ke kotanya. Memisahkan diri dari perusahaan mertuanya dengan secara mandiri mendirikan perusahaan sendiri.

H.M.A.M. menempah diri laksana berlian dalam dirinya. Menamatkan Sekolah Rakyat di desa kelahirannya Kabupaten Barru, 1959. Melanjutkan Sekolah Tekinik di Kota Pare-Pare yang ditammatkan pada tahun 1962. Lalu setelah tammat Sekolah Teknik Menengah di Kota Makassar tahun 1965, melanjutkan kuliahnya di Fakultas Teknik Elektro Universitas Hasanuddin Makassar.

H.M.A.M. juga aktif berorganisasi, diantaranya aktif sebagai Anggota Badan Pertimbangan KADIN Indonesia (2004-Sekarang). Ketua Dewan Bisnis Sulawesi (tahun 2003-Sekarang). Anggota Wali Amanat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (tahun 2001-Sekarang).

Ketua Dewan Pembinaan Daerah dan Permasyarakatan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), tahun 2001. Ketua Yayasan Universitas Islam Indonesia Makassar, Ketua Dewan Penyantun Politeknik Negeri Makassar, dan Ketua Dewan Penyantun Politani Negeri Pangkep (tahun 2000-Sekarang). Selanjutnya, pada tahun 1999 sampai saat ini menjabat sebagai Ketua Umum KADIN Sulawesi Selatan. Tahun 1994 sampai saat ini menjabat Ketua Dewan Penasihat GAPENSI Pusat. Tahun 1987-1994 Ketua Gapensi Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 1983-1986 Ketua Bidang Pembinaan Anggota Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI. Tahun 1976-1985 Sekretaris Umum AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia) Sulawesi Selatan. Tahun 1982-1985 Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Sulawesi Selatan. Juga pernah aktif sebagai Ketua Umum Bidang Dana Persatuan Anggar Seluruh Indonesia. Karirnya selain sebagai pendiri dan pemimpin Group Bosowa (1968-2004), juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPRRI (2004-2009), Anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Perekonomian Daerah (tahun 2002-Sekarang) dan Anggota MPR RI Fraksi Utusan Daerah (tahun 1999-2004). (Tokoh Indonesia.com. *Pengusaha dan Politisi Negarawan*).

b. H.E.A

Sosok H.E.A. yang dilahirkan di Ujung Pandang, 7 Desember 1975. Ia selalu mengingat bahwa bisnis merupakan bagian dari hidupnya. Ayahnya H.M.A.M. yang merupakan orang terkaya urutan ke 34 versi Majalah Forbes, pada tahun 2013, memberikan ketegasan dan disiplin tinggi. H.E.A. merasakan betul bagaimana tekanan ayah-nya, sosoknya baik sebagai pengsuaha dan pribadi. Baginya sosok H.M.A.M. merupakan tokoh yang inspiratif, selain pengusaha dia juga pernah menjabat sebagai Ketua HIPMI sebanyak dua kali. H.E.A. yang memiliki sifat yang suka menerima tantangan membuatnya aktif dalam berorganisasi. Terakhir, H.E.A. tercatat sebagai Ketua HIPMI dari Provinsi Sulawesi Selatan, yang mengikuti jejak ayahnya (H.M.A.M.). Jabatan strategis H.E.A. di perusahaannya dimulai pada jenjang dari bawah di Bosowa Corp. Pada Tahun 1997, H.E.A. memulai karirnya

sebagai Executive Director dan Deputy VPD, PT. Semen Bosowa Maros. H.E.A jebolan Universitas Pittersburgh, Pennsylvania USA, akhirnya resmi menjadi Direktur Utama di PT. Bosowa Energi. H.E.A. kemudian meneruskan kariernya sebagai pengganti ayahnya (H.M.A.M.). H.E.A. merupakan Direktur Utama Bosowa Corporation.

Kelebihan yang dimiliki oleh H.E.A. adalah bakat alami yang dia miliki di mana mampu mengubah keuntungan bisnis yang berkali-kali lipat. H.E.A. sendiri diangkat menjadi Ketua HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), yang memiliki pribadi yang vikal dalam hal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui HIPMI,

H.E.A. menyuarakan tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang kala itu dianggap klaimnya itu sangatlah sulit. Setelah masa jabatannya di HIPMI berakhir, H.E.A. kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN), dan bertanggung jawab terhadap perkembangan UMKM.

H.E.A. juga pernah menangani sebuah klub sepakbola selepas kuliah di Amerika. Kegiatannya untuk mengurus sepakbola dilakukan- nya di sela-sela mengerjakan tugasnya di Bosowa. Ia juga dianggap sanggup dalam mengembangkan PSM Makassar yang dibuktikannya membuat PSM Makassar sukses menjadi runner-up di Liga Indonesia. Kemudian H.E.A. berhasil mengangkat pamor PSM Makassar menjadi salah satu tim elite sepakbola di Indonesia (Pengusaha.us. *Bosowa Membangun Mental Erwin Aksa*).

c. A.T.N.

Sosok A.T.N. lahir di Serang, Banten, 2 Oktober 1953, adalah seorang Bupati Kabupaten Serang di Provinsi Banten periode tahun 2005-2015, yang jabatan sebelumnya adalah sebagai Wakil Bupati periode tahun 2000-2005. A.T.N., juga merupakan mantan anggota Kopassus (Komando Pasukan Khusus) yang menjabat sebagai Kabintal Kopassus. Diketahui bahwa munculnya perusahaan PT. Hamparan Laut Sejahtera merupakan perusahaan yang didirikan oleh A.T.N. Selanjutnya, perusahaan A.T.N. juga mengalami perkembangan men- jadi tiga perusahaan, yakni; PT. Hamparan Laut Sejahtera (HLS), PT.

Anugerah Tirta Bumi (ATB), dan PT. Pandu Khatulistiwa. Ketiga perusahaan ini muncul saat A.T.N. masih menjabat sebagai Bupati Serang.

Perusahaan yang beroperasi di lingkungan/Dusun Kuri Lompo Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros ini beroperasi sejak tahun 2007. Perusahaan ini beralamatkan di Jalan Jend. Sudirman Ka. 52-53 Senayan Kemayoran Baru Jakarta Selatan yang bergerak dalam eksplorasi di sektor pertambangan batu bara. Luas wilayah operasi perusahaan ini mencapai 2014 Ha yang memperoleh izin operasi dari Kementrian Energi Sumber Daya Mineral, dimana atas nama kepemilikan perusahaan adalah Ignatius Suharyanto (Diolah dengan data dasar primer, 2016).

d. S.H.T.

Profil S.H.T. merupakan sosok Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jabatan fraksi sebagai Bendahara yang ditempatkan di Komisi A, dengan jabatan komisi sebagai anggota, selain itu S.H.T. juga duduk sebagai Badan Musyawarah di DPRD Sulawesi Selatan dengan jabatan sebagai anggota Badan Musyawarah pada periode tahun 2014-2015. S.H.T. selanjutnya mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan memilih untuk maju pada pertarungan pe- milihan Calon Kepala Daerah di Kabupaten Pangkep yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebelum berprofesi sebagai Politisi, S.H.T. berprofesi sebagai pengusaha. Dengan mendirikan perusahaan PT. Menara Indra Utama yang bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan alat, kemudian perusahaan inilah yang berhasil mengantarkannya untuk berkenalan dengan sejumlah elite penguasa di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain mengerjakan proyek di Provinsi Sulawesi Selatan, perusahaan S.H.T. juga berhasil mengerjakan beberapa proyek di provinsi lain, diantara- nya Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, bisnis S.H.T. juga menggurita hingga ke Kabupaten Maros yang lokasi operasionalnya terletak di Lingkungan/Dusun Moncongloe, Kelurahan Moncongloe

Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dengan luas lahan operasional sebesar 4,8 Ha. Perusahaan ini beralamatkan di Poros Raya BTN Benua Kota Makassar, dengan status Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi batuan *clay* (tanah timbunan/urug) yang masa berakhirnya sampai tahun 2019 (Diolah dengan data dasar primer, 2016).

e. A.S.A.

Sosok A.S.A. merupakan pria asli Kabupaten Maros yang di-lahirkan di Kabupaten Maros pada tanggal 31 Januari 1981. A.S.A. tercatat sudah memiliki sembilan perusahaan yang wilayah operasi kerjanya di Kabupaten Maros yang umumnya bergerak di bidang jasa konstruksi, sewa menyewa alat berat, kontraktor, pengadaan, dan perdagangan umum.

Awal karir A.S.A. dimulai bekerja sebagai kontraktor dalam proyek tender yang kala itu dimulai pada tahun 2005. A.S.A. seringkali memenangkan proyek penunjukan langsung yang dlaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Dari hasil perkembangan tender proyek tersebut kemudian A.S.A. mengembangkan dan mengguritakan usaha- nya di berbagai sektor dan bidang. Alhasil, perkembangan usaha

A.S.A. mengantarakannya untuk berkenalan dengan jejaring kekuasaan di Kabupaten Maros utamanya dengan kepala daerah dan juga beberapa petinggi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Maros. Dari hasil perkenalannya itulah A.S.A. seringkali diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan berbagai kegiatan proyek pembangunan di Kabupaten Maros.

Dengan berbagai bekal jam terbang yang dimilikinya sebagai seorang pengusaha, maka A.S.A. kemudian terpilih secara aklamasi sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Maros Periode tahun 2012-2017. Kiprahnya di pentas dunia usaha juga mengantarkannya sebagai pengurus partai politik yang dipercaya sebagai bendahara Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Maros. Dari kepengurusannya sebagai bendahara Partai Amanat Nasional (PAN), maka A.S.A. di- percaya sebagai Ketua Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon

Pemilihan Bupati Maros Periode tahun 2016-2021, dengan membentuk sebuah tim yang dibei nama Tim Pemenangan ASA. Tim inilah yang berhasil menghantarkan salah satu pasangan calon Bupati Maros berhasil memenangkan pertarungan politiknya (Diolah dengan data dasar primer, 2016).

f. Keluarga Sosrojodjo

PT. Sinar Sosro adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang minuman ringan, terutama yang berbahan dasar teh. PT Sinar Sosro merupakan perusahaan minuman teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. Perusahaan ini mem- produksi minuman teh dalam botol yang bernama Teh Botol, Joy Green Tea, Fruit Tea, dan lain-lain. Pembentukan perusahaan Sosro tidak lepas dari sejarah terciptanya Teh Botol yang diciptakan oleh keluarga Sosrodjojo pada tahun 1940 (http://id.wikipedia.org). Dalam perkembangannya perusahaan Teh Botol Sosro awal perkembangannya tahun 2013 menjadikan jumlah investasi di Kabupaten Maros. Dalam penjelasannya Bupati Maros Hatta Rahman sejak tahun 2012 jumlah investasi perusahaan yang masuk mencapai Rp.2.000.000.000.000,-. (tribunnews.com. 2013. *Teh Botol Sosro Investasi di Kabupaten Maros*).

g. Keluarga Husain Djojonegoro

Husain Djojonegoro adalah pendiri perusahaan orangtua yang merupakan salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia yang juga cikal bakal lahirnya perusahaan Pabrik Teh Gelas PT. CS2. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk-produk makanan mulai dari makanan ringan hingga makanan berat. Pada tahun 1985 mem- bentuk *holding company* dengan nama ADA, singkatan dari *Attention*, *Direction and Action*. Di bawah bendera ADA pengembangan usaha dan diversifikasi produk pun terus berlanjut. Peningkatan kapasitas produksi yang terus menerus berlangsung dan bertambahnya produk yang dihasilkan membutuhkan tim penjualan yang solid. Untuk menangani dan menguasai jalur distribusi dalam penyebaran produk- produk ini, Manajemen menunjuk P.T. Arta Boga Cemerlang sebagai

distributor tunggal di Indonesia. Penetrasi produk-produk ke pasar tradisional maupun modern ditangani dan dikelola dengan baik oleh Arta Boga Cemerlang. Pada tahun 1995 ADA kembali berganti nama menjadi Orang Tua. Merek Orang Tua yang sarat nilai historis ternyata telah mengakar dalam masyarakat Indonesia, sehingga menjadi salah satu keunggulan dalam memposisikan dirinya di tengah masyarakat. Di lain sisi, kata Orang Tua itu juga identik dengan minuman kesehatan tradisional yang sudah tertanam di benak konsumen.

Bab 4
Isu-Isu Strategis dalam Ekonomi Politik Pembangunan

A. Polemik Isu Pertambangan

1. Kesejahteraan dalam bingkai pertambangan

Eksplorasi yang dilakukan untuk mengetahui data wacana pada penelitian ini, mengungkapkan beberapa motif dasar yang dimulai dari data wacana memproduksi tentang posisi strategis Maros harus di- manfaatkan sebagaimana yang terdapat pada wacana tahun 1999-2009 yang akan diarahkan pada upaya penciptaan masyarakat mandiri. Wacana yang didalilkan oleh Bupati Maros, bahwa visi pembangunan Kabupaten Maros ke depan harus lebih diarahkan kepada upaya ter- ciptanya masyarakat madani. Kemandirian tersebut ditandai dengan meningkatnya peran serta seluruh lapisan masyarakat sebagai asset daerah dalam proses pembangunan. Selain itu juga kemandirian masyarakat program utamanya untuk membangun daerah ini adalah bagaimana memanfaatkan secara maksimal posisi strategis Maros sebagai daerah hinterland Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) (Koran Fajar Makassar {Metro Makassar}, edisi Selasa, 4 Januari 2000. *Posisi Maros Harus di Manfaatkan*).

Data wacana tersebut menandakan bahwasanya terdapat keter- kaitan logis antara proses pembangunan dengan memanfaatkan secara maksimal posisi Kabupaten Maros dalam pengembangan wilayah khususnya pengembangan industri maupun perusahaan untuk mening- katkan ekonomi wilayah. Ada semangat kemandirian dan emansi- patoris tersirat di balik wacana yang didalilkan oleh Bupati Maros tersebut. Meskipun situasi yang masih dapat dikatakan sulit, Bupati Maros tetap menaruh harapan dan bersikap optimis terhadap pengembangan wilayah. Sikap optimis yang tumbuh pada diri sorang

penguasa, dipengaruhi juga oleh latar belakangnya yang memang berasal dari birokrat dan politisi partai Golongan Karya.

Selanjutnya, pembangunan wilayah juga kembali diwacanakan yang berbasis pengembangan sektor industri nampak dalam wacana Maros diproyeksi jadi kawasan industri khusus asal Korea. Pemerintah Kabupaten Maros menyediakan lahan sekitar 200 hingga 500 hektar untuk dijadikan kawasan industri khusus pengusaha Korea di Kecamatan Marusu dan Tanralili, Maros (Koran Fajar {Halaman Pertama}, edisi Selasa, 5 Februari 2002. *Maros Diproyeksi Jadi Kawasan Industri Khusus Asal Korea*). Bupati mengisyaratkan bahwa derasnya tuntutan untuk membangun wilayah dengan cara memberi- kan peluang bagi investor untuk menanamkan sahamnya. Semarak pembangunan wilayah di Kabupaten Maros, tidak hanya memberikan keleluasaan bagi para investor untuk menanamkan sahamnya, melain- kan juga penguasa menyediakan lahan untuk dijadikan sebagai kawasan industri. Kondisi menggiurkan ini berhasil dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk memanfaatkan situasi atmosfer di Kabupaten Maros.

Sehubungan dengan hal tersebut, bergulir pula wacana ke- sejahteraan yang disuarakan oleh Bupati Maros Drs. H. A. Nadjamuddin Aminullah, M.S., perihal Pemerintah Kabupaten Maros kembangkan Maros jadi Kota Dagang. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Maros pada Tahun 1999 adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan hal ini ditunjang oleh posisi Kabupaten Maros yang berada pada kawasan strategis sebagai daerah penunjang daerah ibu kota provinsi. Melihat potensi tersebut menurut Nadjamuddin Aminullah bahwasanya Pemerintah Kabupaten Maros telah merencanakan menjadikan Maros sebagai kota dagang, jasa, dan pariwisata yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Koran Fajar {Ekonomi dan Bisnis}, edisi Jum‖at, 30 Desember 2002. *Pemkab Kembangkan Maros Jadi Kota Dagang*).

Kondisi ini menciptakan peluang untuk iklim usaha di Kabupaten Maros. Berbagai cara dan upaya yang dilakukan penguasa

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Cara dan upaya itu adalah mendatangkan para investor maupun pengusaha untuk mendirikan perusahaan di Kabupaten Maros. Namun demikian hal ini tidak selamanya berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena terdapat beberapa investor yang enggan untuk bermitra dengan pengusaha lokal selaras dengan yang diwacanakan oleh Wakil Bupati Maros Drs. H. A. Paharuddin, M.M., tentang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros investor gandeng pengusaha lokal, sebagaimana yang ditegaskan oleh Paharuddin bahwa investor tidak ingin bermitra dengan pengusaha lokal. Hal ini disebabkan karena para investor tersebut telah meng- gandeng para pengusaha dari luar daerah dan dari provinsi luar. Pihak kami memutuskan untuk meninjau kembali kerja sama tersebut oleh karena lebih memilih untuk memberdayakan pengusaha lokal (Koran Fajar {Ekonomi dan Bisnis}, edisi Senin, 17 Juni 2002. *Pemkab Maros Investor Gandeng Pengusaha Lokal*).

Dari data yang didalilkan oleh Wakil Bupati Maros, telah berhasil memberikan penegasan bahwasanya investor yang ingin menanamkan sahamnya hanya mau bekerjasama dengan pengusaha asing, namun tidak ingin menggandeng pengusaha lokal. Hal ini memicu pemerintah untuk meninjau ulang kerjasama diantara pengusaha dengan penguasa. Penguasa hanya ingin melakukan kerjasama bila- mana pengusaha dari luar kabupaten ingin menggandeng pengusaha lokal, dengan tujuan ingin memberdayakan pengusaha lokal. Pengem- bangan industri di Kabupaten Maros, nyaris berkembang di seluruh pelosok kecamatan. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya beberapa industri di kecamatan seperti; Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Turikale, dan Kecamatan Simbang. Perkembangan industri ini, berkembang sesuai dengan kapasitas dan daya dukung lahan yang dimiliki pada setiap kecamatan- nya. Di samping itu industri yang terdapat di Kabupaten Maros ini memiliki berbagai tingkatan, yang dimulai pada tingkatan skala besar, menengah, hingga industri kecil (rumahan).

Pola pengembangan industri juga diikuti dengan peningkatan ekonomi wilayah di Kabupaten Maros. Oleh karena pengembangan industri ini mampu menciptakan peluang bagi para pengusaha untuk meningkatkan produktivitas mereka. Selain itu juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Selanjutnya, peningkatan ekonomi juga mampu memberikan daya saing bagi wilayah Kabupaten Maros. Daya saing yang dimaksudkan adalah Pemerintah Kabupaten Maros dapat menciptakan iklim usaha bagi para usaha yang ingin membenamkan sahamanya di Kabupaten Maros, sehingga dapat merangsang pertumbuhan usaha di Kabupaten Maros. Dari perkembangan industri di Kabupaten Maros, juga dapat mendatangkan devisa dan membantu pengeluaran bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan juga membantu pertumbuhan Pen- dapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Maros juga tidak sepenuh- nya mengandalkan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang ditegaskan oleh informan bahwa pem- bangunan wilayah di Kabupaten Maros adalah juga sebagian bersumber dari dana CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Corporate Social Responsibility (CSR) atau seringkali disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak disampaikan oleh banyak pakar maupun lembaga internasional. CSR didefinisikan sebagai rangkaian tindakan perusahaan yang muncul untuk meningkat- kan produk sosialnya, memperluas jangkauannya melebihi kepentingan ekonomi eksplisit perusahaan, dengan pertimbangan semacam ini maka tidak diisyaratkan oleh peraturan hukum (Mc.William dan Siegel, 2001). Selanjutnya, dalam bukunya, *Cannibals with Forks*: *The Triple Bottom Line of 21" Century Business* (1997), Jhon Elkington mengemukakan bahwa perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada kemajuan masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*), serta lingkungan hidup/bumi (*planet*) dan peningkatan kualitas perusahaan (*profit*).

Tidak dapat dipungkiri lagi, perkembangan perusahaan dan bisnis di wilayah memiliki pola yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) perusahaan mendapatkan keuntungan (*profit*) dan pertumbuhan, serta kepada para pekerja dalam hal pekerjaan dan pengembangan karier yang menguntungkan pekerja dan perusahaan. Sedangkan keuntungan eksternal lainnya adalah perusahaan bertindak sebagai penyaji pembayar pajak dan penyedia pekerjaan yang ber- kualitas, kesejahteraan dan kompetensi masyarakat yang meliputi bidang bisnis, baik itu yang sesuai dengan bisnis perusahaan maupun sesuai dengan orientasi bisnis perusahaan, serta hal yang paling penting adalah menjaga kelestarian ekologi agar menghindari kerusakan yang diakibatkan oleh operasionalisasi perusahaan demi generasi penerus di masa yang akan datang. Sejalan dengan wacana yang telah didalilkan oleh Bupati Maros periode tahun 1999-2004 dan periode tahun 2005- 2010 adalah Drs. H. A. Nadjamuddin Aminullah, M.S., tentang masyarakat bangga dengan keberadaan Semen Bosowa Maros, sebab memasukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.300. 000.000., kemudian menyerap tenaga kerja sebesar 60% adalah putra daerah (penduduk lokal Kabupaten Maros).

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nadjamuddin Aminullah, bahwa kekayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di Kabupaten Maros merupakan ber- kah tersendiri bagi daerah itu. Pasalnya, dengan kekayaan yang di- limpahkan oleh Allah SWT, maka daerah Buttasalewangang ini pun banyak mendatangkan berkah. Dari aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalnya, dengan berkah tersebut tidak heran kalau jajaran pemerintah dan masyarakat daerah ini menyatakan rasa syukurnya kepada yang maha pencipta. Data yang diperoleh tahun 1999 yang baru lalu Rp.1.300.000.000., pemasukan PAD Maros berasal dari pabrik Semen Bosowa Maros (SBM) yang dibangun serba canggih itu. Belum lagi dari usaha perusahaan Bosowa lainnya yang berlokasi di Kabu- paten Maros. Bukan hanya berkontribusi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Maros, tapi juga dari ribuan karyawan Bosowa, khususnya

PT. SBM, 60% diantaranya adalah putra daerah Maros (Koran Fajar {Metro Makassar}, edisi Sabtu, 15 Januari 2000. *Masyarakat Bangga Dengan SBM: Masukkan PAD Rp.1.300.000.000., Pekerjakan 60% Putra Daerah*).

Dari data wacana yang bergulir pada tahun 1999-2009 diketahui bahwa penguasa pada saat itu senang sekali jika bekerjasama dengan pihak pengusaha. Penguasa berdalih bahwa dibalik didirikannya perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha, maka dengan sendirinya akan tercipta peluang kesempatan lapangan pekerjaan. Dengan terciptanya lapangan pekerjan dengan demikian juga berkorelasi terhadap pening- katan ekonomi wilayah. PT. Semen Bosowa Maros, diketahui telah memberikan kesempatan bagi masyarakat warga lokal untuk meniti karir sebagai pegawai di perusahaan. Oleh karena itu, PT. Semen Bosowa Maros, lebih mengutamakan menerima penduduk asli untuk diterima menjadi pegawai perusahaan. Di samping berdampak kepada penduduk di Kabupaten Maros, juga berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi lainnya yang bersumber kegiatan perusahaan.

Semaraknya pertumbuhan perusahaan juga memberikan dampak bagi fasilitas infrastruktur jalan dan penerangan. Kondisi yang nampak dalam PT. Semen Bosowa Maros, di mana pihak manajemen per- usahaan menyalurkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) lewat bantuan semen bagi penduduk yang membutuhkannya. Penduduk di- berikan jatah dalam sebulan boleh mengambil semen sebanyak 50 zak, dengan izin manajemen PT. Semen Bosowa Maros. Di samping itu juga manajemen perusahaan juga menerima berbagai macam proposal bantuan dana yang selanjutnya pihak manajemen perusahaan akan menindaklanjuti permohonan bantuan dana tersebut.

Pengelompokan formasi wacana kesejahteraan karena pertambangan merupakan realitas sosial yang dibangun oleh dua konsep fundamental, yakni kuasa dan pengetahuan. Kuasa lahir atas dasar kesadaran sebagai kelompok penguasa yang memegang kekuasaan yang membuka ruang dalam menjalin pola relasi dengan pengusaha untuk

mengembangkan usaha maupun membenamkan investasinya. Semen- tara itu, praktik pengetahuan dengan memanfaatkan kondisi geografis wilayah misalnya ketersediaan lahan dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk dijadikan sebagai daerah pengembangan perusahaan.

Formasi wacana kesejahteraan perusahaan menurut logika di atas merupakan sebuah realitas yang dikonstruksi oleh sikap dan per- lakuan kelompok penguasa dan kelompok pengusaha dalam kehidupan sosial ekonomi warga masyarakat dengan jalan membuat wacana. Seperti yang dikemukakan oleh Foucault (1980), kekuasaan menyebar di mana-mana (*power is omnipresent*). Kekuasaan beroperasi secara terus-menerus dalam menciptakan pengetahuan. Sehubungan dengan itu, kekuasaan selalu beroperasi melalui nalar konstruksi pengetahuan, dimana keduanya bersinergi satu sama lain. Kekuasaan-kekuasaan tidak dimiliki (*power is not possessed*) dengan maksud lain tidak semata-mata terkonsentrasi di tangan individu atau struktur yang dominan, baik oleh negara, perusahaan, ataupun organisasi, melainkan kekuasaan meresap dalam seluruh jalinan-jalinan relasi sosial (Foucault, 1977).

Pandangan Foucault di atas seakan masih terasa terjadi dalam dunia kesejahteraan yang diakibatkan oleh perusahaan. Jika pandangan teoritik Foucault mengakui bahwasanya kekuasaan tidak dimiliki (*power is not possessed*) untuk menghadapi kekuasaan eksternalitas, lain halnya dengan wacana kesejahteraan perusahaan yang memiliki kesadaran filosofis terhadap warga masyarakat. Wacana kesejahteraan perusahaan ini diproduksi dan didalilkan oleh kelompok penguasa melalui konsep optimisme yang berseliweran luar biasanya untuk memberikan ruang dukungan dari warga masyarakat dalam memini- malisir pengaruh dari aksi penolakan dan aksi protes yang begitu kompleksnya seringkali dikumandangkan oleh pemerhati lingkungan dan tokoh masyarakat yang fokusnya pemerhati lingkungan.

Sejumlah kelompok penguasa yang sudah menciptakan wacana- nya, mulai membangun kekuatan dengan memanfaatkan pengetahuan. Penguasa secara sadar mengetahui betul, kekuatan dan

kekuasaan yang

dimilikinya dapat mendatangkan relasi dengan investor untuk membenamkan saham maupun mengembangkan perusahaannya. Skema konstruktivis yang diperankan oleh penguasa lembaga eksekutif meru- pakan hasil olahan dari kerjasama kognitif dalam menafsirkan relasi dengan pengusaha yang telah ada maupun yang akan baru menjalin kerjasama diantara multiaktor. Seperti yang diketahui dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penguasa dari lembaga eksekutif adalah pemerintah. Pemerintah yang selanjutnya menguasai sistem peme- rintahan, birokrasi, hingga partai politik di daerah sangatlah berperan terhadap pertanggung jawaban amanah yang dititipkan kepada kepala daerahnya.

Kesadaran untuk bekerjasama ini kemudian menggunakan kekuasaan yang ada dan kuasa dipraktikkan dalam setiap wacana yang didalilkan. Kondisi ini nampak ketika penguasa memproduksi wacana kesejahteraan melalui pengembangan perusahaan maupun industri di Kabupaten Maros. Sebagaimana yang ditegaskan Foucault (1972), mengenai pembentukan regulasi-regulasi diskursus (*the discursive regularities*) meliputi beberapa aspek, yakni produksi objek, produksi modalitas penyampaian, produksi konsep-konsep, dan produksi ber- bagai strategi. Berbagai regulasi diskursif ini menentukan seseorang dalam memilah, mengelasifikasikan, dan menggolongkan wacana yang benar dan yang salah, mana yang sah dan mana yang tidak. Dengan demikian, formasi wacana menentukan pola struktur sosial dan pola struktur material. Oleh karenanya, tidak hanya sekadar menangkap realitas kekuasaan yang nampak dipermukaan, melainkan menemukan dan memaknai regularitas formasi diskursifnya sebagaimana tradisi post-struktural. Formasi diskursif dalam relasi sosial manusia tidaklah berdiri secara otonom dalam kerangka kebenaran objektif, melainkan wacana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses dan mekanisme kekuasaan.

Mengenai pembentukan diskursus seperti yang ditegaskan Foucault dengan fakta dan data hasil eksplorasi penelitian di Kabupaten Maros umumnya struktur wacana disistematiskan oleh

kelompok penguasa yang memiliki kepentingan untuk membangun daerah. Kelompok kepentingan yang dimaksud adalah penguasa dari lembaga eksekutif. Kelompok penguasa inilah yang memiliki kepen- tingan dengan mengatasnamakan pembangunan daerah perihal keber- hasilannya dalam model pembangunan wilayah berbasis pengem- bangan industri dengan memproduksi dalil wacana yang berkembang di kalangan warga masyarakat khususnya mereka yang memiliki taraf pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas (awam). Alhasil, dengan sendirinya wacana inipun berhasil merasuki alam bawah sadar warga masyarakat dan menganggapnya sebagai sebuah bentuk keberhasilan yang dilakukan oleh penguasa lembaga eksekutif, sehingga penguasa lembaga eksekutif dianggap berhasil dalam peme- rintahannya. Dari wacana inilah maka dengan sendirinya kerjasama kognitif diantara kelompok penguasa dari kalangan eksekutif dengan kelompok pengusaha menjalin kerjasamanya dengan mengatasnama- kan kepentingan pengembangan wilayah untuk meningkatkan PAD.

Temuan yang menarik dari hasil eksplorasi dan ekperimen dalam penelitian ini juga datang dari wacana pengembangan per- usahaan dan industri yang sama sekali tidak pernah diketemukan penguasa lembaga legislatif yang memproduksi wacana kesejahteraan yang bersumber dari perusahaan. Umumnya wacana kesejahteraan ini diproduksi oleh penguasa lembaga eksekutif. Arti dan makna subjektif dari wacana tersebut kemudian ditafsirkan ke dalam pola relasi kuasa yang domain dimiliki dan diproduksi oleh penguasa lembaga eksekutif. Penguasa dari lembaga legislatif nanti kemudian mengetahui bahwa- sanya penguasa dari kalangan eksekutif dalam tahap pelaksanaannya sering menutup diri dalam pola relasinya dengan kelompok pengusaha. Hal ini akan diketahui manakala program pengembangan industri ter- sebut akan diresmikan oleh kalangan penguasa lembaga eksekutif.

2. Pertambangan sebagai investasi daerah

Selanjutnya wacana pertambangan sebagai investasi daerah di- suarakan oleh penguasa tentang pengembangan industri semakin terus bergulir pada tahun 2010-2016 yang memproduksi dalil wacana

tentang PT. Kawasan Industri Makassar (Kima) berencana membangun kawasan industri baru seluas 250 hektare yang berlokasi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Proyek yang diperkirakan bakal menelan investasi mencapai Rp.750 miliar itu dipersiapkan untuk menampung hingga 250 industri baru yang akan melakukan ekspansi ke daerah ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Direktur Utama Kima Bachder Johan, bahwa ketersediaan lahan di Kima dinilai sudah tidak mampu lagi menampung pabrik maupun industri, di mana lahan produktif yang tersisa hanya 27% dari total luasan Kima yang mencapai 370 hektare. Pembangunan PT. Kima II ditargetkan terealisasi tahun ini yang pengerjaannya akan dikerjasamakan dengan investor swasta. Adapun, PT. Kima merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan komposisi kepemilikan saham 60% pemerintah pusat, 30% oleh Pemprov Sulsel dan sisanya dipegang Pemkot Makassar. Lokasi pembangunan Kima II di Kabupaten Maros juga terbilang potensial karena menjangkau kawasan pengembangan Mamminasata selain Kota Makassar. Guna menunjang kenyamanan industri dalam kawasan Kima II, PT. Kima juga berencana membangun pembangkit listrik pribadi berkapasitas 20 MW. Seluruh tahapan perencanaan pembangunan Kima II telah kami finalisasi, seperti pengwilayahan ruang maupun rencana infrastruktur pendukung lainnya. Namun demikian , belum menjelaskan secara detail siapa saja pihak swasta yang bakal menjadi

mitra perseroan dalam pembangunan Kima II . Adapun, pembangunan Kima II menjadi bukti komitmen Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan ihwal kesiapan diri menuju kota berbasis industri dengan harapan bahwa akan banyak tumbuh industri baru dalam menunjang perekonomian daerah (Sulawesi Bisnis.Com.2014. *Kima Akan Bangun Kawasan Industri Baru di Kabupaten Maros*).

Drama wacana pun terus-menerus digelontorkan oleh penguasa. Penggelontoran wacana pembangunan wilayah melalui wacana pengembangan industri dengan cara menciptakan iklim usaha. Melalui iklim usaha yang diciptakan oleh penguasa adalah dengan menyedia- kan lahan untuk dipersiapkan menampung

beberapa industri yang akan

beroperasi di Kabupaten Maros. Hal ini nampak dengan kesiapan penguasa yang berhasil menyediakan fasilitas pendukung lainnya untuk menggandeng para pengusaha dalam menanamkan modalnya. Dengan masuk dan berkembangnya perindustrian di Kabupaten Maros, maka penguasa sangatlah berharap akan diikuti dengan tumbuhnya per- ekonomian daerah.

Selanjutnya wacana kesejahteraan sebagai bentuk investasi adalah sebagaimana yang didalilkan Bupati Maros, Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M., berharap ada bantuan Pemerintah Pusat mengembang- kan atau membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modal di Maros. Pada dasarnya kami memiliki potensi, hanya masih terbatas dan belum dikelola optimal. Pemaparan peluang investasi di Kabupaten Maros, di antaranya di bidang pertanian, perindustrian, pertambangan, peternakan, pengairan, dan perhubungan. Dengan pertimbangan ke- sejahteraan dan memiliki argumentasi tentang potensi pengembangan industri di Kabupaten Maros. Selain itu potensi untuk membuka peluang pengembangan sektor industri pertambangan di Maros yang memiliki potensi marmer di areal seluas 122,1 juta meter persegi dengan memiliki cadangan 2 miliar ton. Pasir kuarsa di areal 3.520.000 meter persegi dan cadangan 21,12 juta ton. Ada juga batu bara pada hamparan lahan 5,6 juta meter persegi dengan cadangan 1.350.000 ton. Di bidang perikanan, produksi ikan laut pada 2010 mencapai 13.534 ton dengan jenis tangkapan ikan, teripang, dan kepiting (Kemendagri.go.id.2011. *Bupati Undang Investor ke Maros*).

Dari data wacana tersebut menandakan bahwa peluang pengem- bangan investasi di Kabupaten Maros dengan memprioritaskan bidang pertanian, perindustrian, pertambangan, peternakan, pengairan, dan perhubungan. Selain itu juga potensi pengembangan sektor industri pertambangan yang memiliki potensi marmer di areal seluas 122,1 juta meter persegi dengan memiliki cadangan 2 miliar ton. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Syamsul Rifai melalui wacana medianya yang memuji langkah Bupati Hatta Rahman untuk mengundang investor ke Maros, sebagaimana yang ditegaskan bahwa

hal ini merupakan kali pertama seorang bupati melakukan ekspose secara langsung di hadapan kami. Selama ini kami hanya menerima proposal, sehingga tidak bisa mengetahui secara tepat apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut (Kemendagri.go.id.2011. *Bupati Undang Investor ke Maros*).

Dari data wacana yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, maka disambut dengan penegasan dari Bupati Maros Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M., bahwa pola pengembangan industri ini merupakan salah satu komitmen Pemkab Maros dalam rangka mengembangkan kawasan industri dalam rencana pem- bangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2010-2015. Kawasan industri tersebut rencananya ditempatkan di Bulu-bulu karena memiliki posisi yang strategis (Kemendagri.go.id.2011. *Bupati Undang Investor ke Maros*). Pola wacana pengembangan industri ini selanjutnya kembali diproduksi oleh Bupati Maros Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M., memproduksi wacana tentang investasi di Kabupaten Maros melalui pertemuan dengan Dubes Kanada Mackenzie Clugston yang bertempat di Hotel Imperial Aryaduta Makassar. Pada kesempatan itu Bupati Maros siap memberi kemudahan kepada investor Kanada perihal pengembangan kawasan industri (Koran Fajar {Metropolis-Gowa- Maros}, edisi Jum‖at, 3 Februari 2012. *Jajaki Investasi*). Dimensi wacana yang digelontorkan oleh penguasa di Kabupaten Maros, nampak sangatlah jelas bahwa orientasi pembangunan wilayah sebagai upaya meningkatkan ekonomi wilayahnya adalah dengan cara mem- produksi wacana pengembangan industri.

Selanjutnya, Bupati Maros Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M., juga mengemukakan dalil wacananya tentang Maros jadi pilihan ber- investasi, sebagaimana yang ditegaskan bahwa Kabupaten Maros ibarat magnet yang terus menarik minat pengusaha untuk berinvestasi. Dalam hal ini pengusaha dan investor secara terus menerus berdatangan untuk membenamkan modalnya di Kabupaten Maros. Kesempatan diikuti dengan akan bertambahnya satu perusahaan pabrik lagi di Kabupaten Maros, yakni perusahaan pabrik minuman Teh Botol Sosro. Sebelum-

nya perusahaan seperti Teh Gelas dari Grup Orang Tua, pabrik farmasi, pabrik pakan ternak, dan beberapa pengembang perumahan telah terlebih dahulu menjadikan Maros sebagai tempat investasi. Jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Maros dari Tahun 2012 sudah mencapai Rp.2 Triliun dan pihak Pemerintah Kabupaten Maros akan menargetkan Tahun 2013 ini akan melonjat sampai Rp.3 Triliun. Banyaknya perusahaan maupun industri yang melakukan investasi di Kabupaten Maros disebabkan memiliki letak geografisnya sangat strategis. Selain faktor jarak tempuh dengan Kota Makassar yang relatif dekat, juga memiliki fasilitas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Selain itu Kabupaten Maros menjadi pilihan investasi bagi pengusaha baik itu pengusaha perumahaan sampai pengusaha makan dan minuman. Bahkan ada beberapa perusahaan asing yang mulai me- nunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di Kabupaten Maros. Untuk mengatur industri, Pemerintah Kabupaten Maros telah menyiapkan satu kawasan khusus industri yang letaknya dekat dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, yakni terletak di Kecamatan Marusu (Maroskab.go.id. 2014. *Maros Jadi Pilihan Berinvestasi*).

Dari data wacana yang bergulir tersebut, maka orientasi peningkatan ekonomi wilayah adalah pihak penguasa memanfaatkan pen- ciptaan iklim usaha. Penguasa dengan lapangnya menyediakan lahan bagi pengusaha maupun investor untuk membenamkan modalnya di Kabupaten Maros. Perusahaan yang beroperasi adalah bergerak di sektor minuman kemasan yang sebelumnya telah diikuti dengan masuknya perusahaan farmasi, pakan ternak, hingga pengembang perumahan.

Berikutnya, data wacana terus bergulir dan berkumandang di media yang didalilkan oleh Bupati Maros, Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M., pada Pemilihan Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021, di mana posisinya berada pada status Petahana, memproduksi wacana tentang Hatta Rahman: ingin jadikan Kota Maros sebagai Kota Industri dan Mandiri. Dalam wacananya Hatta Rahman, dengan percaya dirinya meyakini kansnya terpilih kembali sebagai bupati untuk periode kedua.

Menurutnya, Kabupaten Maros memiliki banyak sektor yang dapat di-kembangkan. Faktor utamanya adalah Kabupaten Maros sebagai penyanggga Kota Makassar memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Pertama, ia dekat dengan kota Makassar. Kedua, sarana transportasi bagus dan lancar, sehingga *cost* menuju dan keluar pelabuhan menjadi murah. Dengan biaya yang ringan ini, maka ber- bagai peluang bisa dikembangkan. Keunggulan komparatif itulah yang ditawarkan kepada investor juga kemudahan perizinan, sehingga para pemilik modal tertarik datang. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Maros, menginginkan agar investor yang menanamkan modalnya harus memberikan dampak kepada masyarakat yakni terbukanya lapangan kerja, memberikan kontribusi perekonomian, meningkatkan per- tumbuhan ekonomi serta bagaimana memberikan dana CSR untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam bentuk investasi antara lain membangun pabrik semen, power plant, perhotelan, industri pertanian, pertambangan dan lainnya. Sementara di sektor pariwisata, Kabupaten Maros telah memiliki fasilitas penunjang untuk pengem- bangan sektor pariwisata, namun demikian Pemerintah Kabupaten Maros masih memerlukan investor untuk meningkatkan dan meng- optimalkan fasilitas yang telah tersedia pada sektor ini. Oleh karena pengembangan sektor pariwisata memerlukan biaya (*cost*) yang mahal. Selain itu keunggulan kompetitif lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Maros adalah tersedianya lahan tidur yang siap untuk dijadikan sebagai lahan produktif dan juga peruntukan pembangunan perumahan mewah (*real estate*), sehingga mendatangkan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros (Majalah Pinisi.Com.2015. *Hatta Rahman: Kami Ingin Jadikan Maros Kota Industri dan Mandiri*).

Dari data wacana tersebut, mengindikasikan bahwa dominasi wacana pengembangan industri di Kabupaten Maros umumnya di- produksi oleh pihak eksekutif. Hal ini nampak dari beberapa temuan data wacana yang seringkali digulirkan dan digelontorkan oleh penguasa kalangan eksekutif. Mulai dari penyediaan lahan bagi investor yang ingin membenamkan sahamnya di Kabupaten Maros,

hingga para pengembang perumahan yang ingin mendirikan perumahan elite di kawasan yang telah disediakan oleh penguasa. Peran elite legislatif sangatlah jarang diketemukan perihal produksi wacana pengembangan industri. Selanjutnya, memunculkan pertanyaan kritis, mengapa hanya pihak eksekutif yang seringkali menggelontor- kan wacana pengembangan industri dan apakah pembangunan wilayah hanya didominasi oleh eksekutif tanpa keikutsertaan lembaga legislatif?

Selanjutnya, produksi dalil wacana tentang perusahaan diminta untuk berpartisipasi dalam menata kebersihan Kota Maros, sebagai- mana yang ditegaskan oleh Hatta Rahman, bahwa perusahaan besar yang ada di Kabupaten Maros diminta untuk berpartisipasi dalam menata kebersihan kota. Terutama menjelang penilaian piala Adipura tahap ke II, oleh karena piala Adipura bukanlah hal yang sulit jika semua pihak ikut berpartisipasi. Pihak yang dimaksud ialah seluruh elemen, mulai dari masyarakat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), sampai perusahaan besar diharapkan mau untuk turun langsung untuk me- wujudkan kebersihan ini. Khusus untuk perusahaan besar pihak kami meminta agar dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat di- berikan untuk pencapaian Adipura (Koran Fajar {Metropolis-Gowa- Maros}, edisi Kamis, 16 Februari 2012. *Perusahaan Diminta Berpartisipasi*).

Dari wacana yang di dalilkan oleh Hatta Rahman, berikutnya juga mendapat respon dukungan dari pernyataan Asisten Manajer Sim Tapor Humas PT.Angkasa Pura 1 (Persero) Andrias Yustrian, bahwa akan mendukung program Pemerintah Kabupaten Maros bahkan jauh sebelumnya pihak Angkasa Pura selalu memberikan CSR-nya dalam bentuk bina lingkungan. Lebih lanjut, Andrias mengatakan bahwa selama itu memiliki nilai positif, tentu kami akan tetap mendukungnya (Koran Fajar {Metropolis-Gowa-Maros}, edisi Kamis, 16 Februari 2012. *Perusahaan Diminta Berpartisipasi*).

Berdasarkan data wacana yang diproduksi oleh Bupati Ir. Hatta Rahman, M.M., maka dapatlah diketahui bahwa perusahaan yang ber-

ada di Kabupaten Maros, juga telah membawa manfaat bagi keber- langsungan pembangunan. Nampak secara jelas pola relasi yang sistematis diseputaran pihak penguasa dan pengsuaha. Hal ini dike- temukan melalui pihak manajemen perusahaan yang mendukung se- penuhnya visi-misi yang telah dikumandangkan oleh penguasa di- antaranya turut menyumbangkan CSR-nya bagi keberlangsungan program kebersihan yang semarak dilakukan para Kepala Daerah untuk menyukseskan Piala Adipura di tiap-tiap Kabupaten.

Wacana pertambangan sebagai investasi daerah dari hasil temu- an penelitian ini dengan tujuan pemerintah daerah (penguasa) melalui kebijakannya untuk mengundang investor dalam berinvestasi dan membenamkan modal usahanya dalam rangka peningkatan ekonomi di Kabupaten Maros. Selanjutnya, kondisi ini diikuti dengan akselerasi pertumbuhan perusahaan diantaranya bertambahnya perusahaan minuman kemasan yang terletak di Kecamatan Bantimurung dan ber- tambahnya perusahaan industri pengolahan bahan jadi (pembuatan gelas plastik, pembuatan meubel, pembuatan kertas, dan lain-lain), pengolahan indsutri rumah tangga, dan industri lainnya yang difokus- kan di Kecamatan Marusu. Sementara untuk perusahaan industri yang bergerak di sektor pertambangan dan galian juga mengalami penam- bahan yang terletak di Kecamatan Simbang dengan masuknya per- usahaan semen China atau PT. Conch.

Upaya yang dilakukan pemerintah ini adalah dengan masuknya para investor dan membenamkan sahamnya maka hal utama yang di- harapkan adalah terjadinya perputaran ekonomi diantaranya penye- rapan lapangan pekerjaan dan pemasukan bagi kas daerahnya khusus- nya PAD Kabupaten Maros. Namun demikian, usaha ini tidak serta merta berjalan dengan mulus oleh karena mendapatkan sikap penolak- an dari LSM yang berkecimpung dalam kajian lingkungan, menduga bilamana perusahaan pertambangan bertambah di Kabupaten Maros, maka dengan sendirinya juga akan membantu proses pengrusakan lingkungan yang diakibatkan oleh operasionalisasi dari perusahaan per- tambangan tersebut. LSM lingkungan menduga selama ini perusahaan

yang beroperasi di sektor pertambangan dan galian sangat minim perhatiannya terhadap kelestarian dan ekosistem alam, sehingga dapat merusak ekologi karst dan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini bilamana dikaitkan dengan pemikiran dari para pakar perihal kekuasaan dalam jaringan bisnis adalah konsep kekuasaan yang paling sederhana, paling banyak dianut dan paling mudah dipahami secara intuitif adalah pandangan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan kita untuk men- capai tujuan kita di dunia ini (Caporaso dan Levine, 2015). Kekuasaan merupakan bentuk pengungkapan ide bahwa agar kita bisa mencapai tujuan kita, maka kita harus melakukan sesuatu untuk memengaruhi dan mengubah dunia sekitar kita.

Sehubungan dengan itu, faktor hambatan atau kesulitan adalah sangat penting perannya di dalam mendefinisikan kekuasaan. Dalam bukunya *Economy and Society*, Max Weber (1956, 1978) mendefinisikan kekuasaan sebagai probabilitas bahwa seseorang pelaku dalam hubungan sosial mampu melaksanakan kehendaknya sendiri biarpun ada hambatan, tanpa memperdulikan dasar-dasar untuk menemukan probabilitas itu. Tapi, biarpun faktor hambatan atau kesulitan selalu ada dalam hubungan kekuasaan dalam politik, tapi faktor hambatan ini tidaklah secara logis menjadi syarat mutlak agar sesuatu dapat disebut sebagai kekuasaan (misalnya seseorang memanipulasi kondisi yang di- hadapi orang lain sedemikian rupa, sehingga orang lain ini akhirnya merasa perlu untuk bertindak yang dapat menguntungkan orang yang pertama tadi, sehingga hambatan bagi kepentingan orang itu menjadi tersingkir).

Selanjutnya, ide tentang hambatan memegang peranan penting di dalam analisis kekuasaan, namun perannya memiliki banyak jenis dan kadang-kadang tidak kentara. Hambatan bisa saja terjadi karena kita berusaha mengubah sesuatu yang pada dasarnya memang sulit untuk berubah. Ini dapat disebut sebagai hambatan alami (*natural resistance*). Tapi di sisi lain hambatan juga bisa timbul dari orang lain yang memiliki tujuan yang berbeda dari diri kita. Hambatan juga bisa berbentuk adanya atau tidak adanya institusi sosial politik tertentu.

Institusi bisa menghambat pencapaian tujuan manusia (Caporaso dan Levine, 2015).

Dapat dikatakan bahwa, memiliki kekuasaan terhadap alam bilamana individu dapat mencapai tujuannya biarpun ada hambatan dari alam seperti misalnya membajak tanah, dimana individu dituntut untuk mengeluarkan tenaga yang dimiliki berasal dari tubuh individu sendiri. Selanjutnya, individu dapat menguasai individu lain dengan cara mengubah insentif yang diperoleh individu itu agar menjadi positif bagi individu itu, atau yang disebut sebagai dorongan (*inducement*), atau mengubah insentif yang diterima orang lain agar menjadi negatif yang biasanya disebut sebagai koersi (*coerscion*) atau kekuasaan (*power*). Jenis kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan bersama individu lain adalah lebih kompleks sifatnya. Individu tidak selalu bisa mencapai tujuannya kalau harus berusaha sendirian, sehingga agar tujuan itu tercapai, maka ia harus bekerja sama dengan orang lain. Kerja sama ini bisa bersifat sementara (*ad hoc*) tetapi bisa juga memerlukan adanya institusi (Caporaso dan Levine, 2015). Semua konsep kekuasaan didasarkan pada ide tentang tujuan atau kepentingan. Ketika kepentingan ini didasari oleh pelaku yang membuat keputusan (ketika pelaku itu secara sadar berusaha mengejar kepentingan mereka), maka kita dapat menyebutnya sebagai kebutuhan (*wants*), pilihan (*preference*), dan tujuan (*goals*) (Caporaso dan Levine, 2015).

Ketika para pelaku tidak sadar tentang pentingnya berbagai dampak tertentu bagi dirinya, maka kita dapat menyebutnya sebagai kepentingan (*interest*). Sehubungan dengan itu, maka Max Weber dalam bukunya yang berjudul *Protestant Ethic and Spirit of Capitalism* (1904-1905, 1958), manusia didominasi oleh keinginan untuk men- dapatkan uang, oleh keinginan untuk mendapatkan kekayaan (*aqusition*) sebagai tujuan yang paling utama dalam hidupnya. Ke- inginan untuk mendapatkan kekayaan ekonomi bukan lagi untuk me- muaskan kebutuhan meterial melainkan sudah menjadi tujuan akhir atau tujuan mutlak.

Oleh karenanya, dalam pandangan para ekonom, kepentingan secara otomatis akan diterjemahkan menjadi pilihan, dan pilihan secara otomatis berubah menjadi keputusan tentang mana dari alternatif- alternatif yang tersedia yang akan diambil di mana konsep ini yang selanjutnya, disebut sebagai kepentingan langsung (*direct interest*) (Caporaso dan Levine, 2015). Selanjutnya, para ekonom menyebut konsep ini sebagai kepentingan subjektif (Flathman 1966; Balbus 1971) atau konsep kepentingan behavioral (Lukes, 1974). Selanjutnya, Connoly (1983), tentang kepentingan riil adalah kepentingan yang terbentuk akan adanya kesadaran akan diri sendiri (*self awereness*) dan pilihan yang dibuat dengan informasi lengkap (*fully informed choice*). Sehubungan dengan itu, Balbus (1971) berpendapat bahwa kepen- tingan dalam artian ini dapat diketahui dengan melihat bahwa dapat mengajukan bukti untuk membuktikan bahwa seorang individu bisa memiliki kepentingan walaupun ia tidak menyadarinya atau biarpun apa yang dianggap individu itu sebagai kepentingannya sebenarnya bukanlah kepentingannya yang sebenarnya.

Selain itu, peran lain dari negara ialah menyatakan perubahan persaingan ekonomi yang mengikis basiskedaulatan politik mengata- kan ketika di bawah wilayah rezim perdagangan bebas tidak bisa lagi dilindungi dari persaingan dari daerah lain di dunia tidak lagi identik dengan kaum borjuis dan ketika kekuatan politik negara ini dirusak oleh kekuatan pasar. Dalam sebuah situasi bangsa, negara, dan daerah mencoba untuk mendapatkan kembali kedaulatan mereka dengan kompensasi karena suku bunga mereka menurun, nilai tukar dan harga komoditas dengan program politik dalam meningkatkan daya saing sistemik dari wilayah tertentu (Porter, 1990).

3. Dampak lingkungan pertambangan

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa dampak perkembangan dan operasionalisasi perusahaan sebagai dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh penguasa dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Diantara pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimaksud adalah perusahaan yang mendapatkan kritik dari Wahana Lingkungan

Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang diwakili oleh Ketua Advokasi Walhi Sulsel, Muhammad Amin, tentang terungkapnya beberapa perusahaan tambang yang sudah berakhir masa izinnya, namun masih terus melakukan penambangan di Kabupaten Maros. Dalam kritikannya aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel yang menuding Bupati Maros, Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M., telah gagal menjaga dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan.

Kondisi ini berdampak kepada kepemimpinan dan kebijakan yang diberikan oleh Bupati yang memunculkan kesan telah terjadi pembiaran, di mana penambang yang izinnya sudah tidak aktif dengan bebasnya melakukan penambangan tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah. Sejatinyapenguasa memiliki hak dan kewenangan mutlak untuk melakukan penutupan kepada perusahaan tambang yang melanggar aturan. Penguasa selama ini terkesan tutup mata dengan ancaman kerusakan lingkungan dengan tidak membuat proteksi legalitas atas perlindungan kawasan strategis seperti karst dan Taman Nasional Bulusaraung.

Muhammad Amin menegaskan bahwa selama ini Pemkab bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros tidak pernah membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan kawasan karst dan juga kawasan strategis lainnya. Di sisi lain, malah membuat aturan untuk mempermudah investasi tanpa melihat efek yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti masuknya perusahaan semen Cina, Pemkab Maros tidak mengkaji terlebih dahulu dampak dari perusahaan semen terbesar kedua di dunia saat ini. Pemkab Maros terkesan menyembunyikan setiap tahapan dan proses masuknya pabrik tersebut, bahkan ironisnya DPRD hingga kini juga tidak dilibatkan. Perusahaan semen asal Negeri China (PT. Conch) ini memang sudah pernah menyurat ke Walhi Sulsel, tapi dengan tegas kami sudah melakukan penolakan. Advokasi kami sudah berjalan disana dengan membentuk aliansi aktivis lingkungan dan mahasiswa. Dinas Pertambangan dan Energi Maros tidak transparan terkait informasi terkait izin perusahaan tambang. Buktinya, terjadi perbedaan data antara Dinas Pertambangan

dan Energi (Distamben) Maros dengan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ihwal izin usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Maros (Radar Makassar.Com. 2015. *Walhi: Bupati Maros Gagal*).

Dari penjelasan yang dikatakan oleh aktivis LSM Walhi me- nguatkan wacana pemberitaan dimedia tentang perusahaan per- tambangan di Kabupaten Maros khususnya mereka yang bergerak di sektor eksplorasi dan eksploitasi umumnya memberikan dampak ter- hadap kerusakan ekologi. Kerusakan ekologi yang dimaksud adalah kerusakan kawasan lindung karst sebagai batuan endemik di kawasan pertambangan. Dimensi perizinan pada pihak penguasa seolah-olah tidak transparan perihal mekanisme aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (penguasa dan pengusaha). Pihak perusahaan dan rakyat yang berada di lokasi pertambangan belum menemui kese- pakatan. Alhasil, memunculkan opini publik bahwa penguasa hanya berpihak kepada perusahaan dan tidak mendengarkan aspirasi masya- rakat, sebagaimana yang ditegaskan oleh Muhammad Amin, bahwa terdapatnya suatu politik konspirasi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten oleh karena adanya perbedaan antara data yang dirilis oleh KPK dengan data yang diberikan oleh Distamben Maros. Beberapa identitas perusahaan yang tidak di daftarkan di data Distamben Maros, namun di temukan ada pada data KPK (Radar Makassar.Com.2015. *Walhi: Bupati Maros Gagal*).

Penegasan Muhammad Amin tersebut menandakan bahwa ter- dapatnya keterkaitan logis antara penguasa dan pengusaha dengan kasus eksplorasi dan eksploitasi perusahaan pertambangan. Sebab per- nyataan Muhammad Amin ini menyatakan dengan jelas adanya indikasi kongkalikong sejak diberikannya izin operasional perusahaan dari penguasa. Penyebab munculnya dugaan praktik kongkalikong dapat diidentifikasi dalam tiga hubungan logis, berdasarkan kecen- derungan pernyataan Muhammad Amin, yaitu; pertama, penguasa menutup diri akan penerbitan perpanjangan izin operasional per- usahaan, kedua, eksekutif tidak memberikan ruang kepada legislatif

untuk mengadakan dialog terkait perpanjangan izin, ketiga, terjadi perbedaan data yang dirilis oleh instansi pemerintah dengan lembaga anti korupsi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan.

Motif lain yang berdampak terhadap ancaman kerusakan lingkungan akibat masuknya perusahaan Semen China di Kabupaten Maros, selanjutnya ditegaskan oleh Muhammad Amin, bahwa ada 3 Desa di Kabupaten Maros, Kecamatan Simbang yang memiliki potensi batu gamping, dan itu terdapat di Desa Simbang, Sambueja dan To‖ddolimae. Ketiga desa ini, selain dikenal sebagai wilayah pertanian yang salah satu pemasok beras di Kabupaten Maros, juga menjadi daerah produsen bambu terbesar di Maros. Jika tiga desa ini dijadikan sebagai area pertambangan bahan baku semen, maka otomatis desa ini tak lagi menjadi desa agraris dan itu juga berarti bahwa ada sekitar 700 KK yang akan terkena dampak dari proses pertambangan tersebut (Seputar Sulawesi.Com. 2015. *Tiga Desa di Kabupaten Maros Terancam Dengan Kehadiran PT.Conch.*).

Informasi wacana yang berkembang, sebagaimana diberitakan media massa memunculkan reaksi dari kalangan lembaga legislatif di Maros. Salah satu reaksi penolakan juga ditegaskan dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Maros yang menyatakan penolakan keras atas rencana hadirnya pabrik semendi Kecamatan Simbang. Semen asal China tersebut diijinkan mengeksplorasi selama tujuh tahun di lokasi pabrik tersebut karena telah mengantongi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per September 2014.

Anggota Fraksi Gerindra, Drs. Irwansyah Kasim, DM, menegaskan bahwa pihaknya bersikeras menolak atas rencana tersebut dan menyalahkan Bupati Maros H.M.Hatta Rahman karena dengan mudah merekomendasikan terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik PT. Conch Maros South Sulawesi Mine tanpa mem- pertimbangkan banyak hal. Salah satunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjelaskan karst di Simbang merupakan bagian dari kawasan lindung nasional. Hal itu juga bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Maros terdapat beberapa pertentangan dengan perizinan tersebut, seperti Pasal 32 tentang kawasan lindung. Pasal 41 dan 42 tentang perlindungan terhadap kawasan karst, dan Pasal 50 tentang kawasan peruntukan industri (Tribun News.Com. 2014. *DPRD Maros Tolak Semen China*).

Informasi yang berkembang memproduksi wacana tentang ancaman yang diakibatkan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di terhadap kawasan karst. Informasi dan penegasan ini telah menggiring kepada aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Terjadinya pertentangan diantara regulasi dan aplikasi, sebagaimana yang tertera dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) karst di Kecamatan Simbang merupakan bagian dari kawasan lindung nasional. Selain itu juga bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Maros, sebagaimana yang terdapat pada pasal 32 tentang kawasan lindung. Namun pada kenyataannya juga tetap ada saja perusahaan yang izin operasional sudah tidak berlaku masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Disamping itu juga terdapat perusahaan yang mendapatkan izin dari pihak penguasa untuk mendirikan perusahaan di daerah kawasan lindung.

Perihal perlindungan kawasan karst, pihak Komisi III juga sudah menjalin kerja sama dengan beberapa organisasi untuk menyusun draft Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan kawasan karst dan kawasan lingkungan hidup lainnya, sebagaimana yang ditegaskan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros dari Partai Demokrat, Akbar Endra, bahwa saat ini pihaknya sudah bekerja sama dengan beberapa organisasi untuk menyusun draft Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan kawasan karst. Komisi

III juga sudah menjalin kerja sama dengan beberapa organisasi untuk menyusun draft Perda perlindungan kawasan karst dan kawasan lingkungan hidup lainnya (Radar Makassar.Com. 2015. *Walhi: Bupati Maros Gagal*).

Wacana kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Semen Bosowa Maros, juga memberikan implikasi kerusakan yang disebab- kan getaran yang bersumber dari aktivitas peledakan oleh PT. Semen Bosowa Maros. Seperti yangterdapat pada sejumlah rumah warga yang terletak di Dusun Bungaeja dan Dusun Bonto Kappong Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung. Hal ini dibuktikan dengan penegasan warga Dusun Bonto Kappang Amal Saleh, menyatakan bahwa Dusun Bungaeja dan Dusun Bonto Kappang Desa Tukamasea Kecamatan Bantimurung adalah wilayah yang paling meresahkan dampak peledakan yang dilakukan PT. Semen Bosowa Maros. Per- usahaan milik Aksa Mahmud itu sering melakukan kegiatan peledakan di atas batas normal yang diberlakukan. (Skornews.Com. 2016. *Bosowa Tolak Ganti Rugi Peledakan*).

Informasi data wacana lain tentang aktivitas penambangan kapur yang dilakukan oleh dua industri semen besar (PT. Semen Tonasa dan PT. Semen Bosowa Maros) dengan luas daerah operasi mencapai 2.354,7 ha sampai saat ini berjalan mulus tanpa hambatan ber- arti. Selain itu, sedikitnya terdapat 24 perusahan penambangan marmer dengan luas areal eksploitasi 15-25 ha setiap perusahaan muncul satu demi satu. Namun demikian, pihak perusahaan PT. Semen Tonasa telah menjalin kerjasama dengan Perusahaan Perhutanan Indonesia (Perhutani) untuk menyukseskan program penghijauan dan perbaikan lingkungan namun berbanding terbalik dengan data dan fakta di mana lokasi pertambangan tersebut semakin meluas.

Keberadaan perusahaan tambang di areal kawasan Taman Nasional ini sebenarnya melanggar UU Pertambangan tahun 1997 yang mengatur masalah klasifikasi karst yang boleh ditambang dan tidak. Dalam UU tersebut, ada tiga klasifikasi yang mereka tentukan lengkap dengan persyaratan yaitu, karst kelas 1, karst kelas 2 dan karst kelas 3.

Karst kelas 1 dicirikan memiliki kekhasan tersendiri antara lain ada sumber air yang mengalir dibawa karst tersebut, memiliki satwa endemik dan situs atau gua purbakala. Karst kelas 2 juga hampir me- miliki ciri yang sama dengan kelas 2, dan terakhir adalah karst kelas 3 hanya memiliki bantuan karst, tapi tidak ditemukan satwa endemik demikian pula gua prasejarah.

Informasi data wacana yang dibuktikan melalui hasil pene- lusuran penelitian oleh beberapa aktivis lingkungan mengungkapkan banyak kejanggalan terhadap ijin pertambangan di kawasan karst Kabupeten Maros terdapat banyak perusahaan tambang yang melaku- kan aktivitas pertambangan di kawasan karst kelas 1 dan 2 yang secara jelas menyalahi UU Pertambangan. Keberadaan PT. Semen Bosowa Maros yang menambang di kawasan karst kelas 1 untuk bahan baku semen mampu memenuhi persyaratan Amdal, UKL dan UPL-nya namun aktivitas pertambangan tersebut pada akhirnya menimbulkan masalah secara ekologis seperti keretan gua prasejarah, rusaknya gambar/lukisan di gua purbakala, bahkan ada yang hilang. Satwa endemik banyak yang pergi dari kawasan tersebut karena terusik oleh getaran peledakan tambang. Aktivitas pertambangan juga menimbul- kan polusi yang mengganggu areal pertanian termasuk tambak yang juga terkena imbas langsung dari debu pertambangan.

Kawasan disekitar pertambangan perusahaan swasta ini memang dipenuhi debu halus berwarna putih. Sementara tambang-tambang kecil-kecil yang beroperasi di sekitar dan di dalam Taman Nasional ini, ijinnya diperoleh dari kabupaten. Mereka menambang karst yang memiliki kualitas marmer yang bagus dalam kawasan karst kelas 1 dan 2 tanpa pengawasan memadai. Eksploitasi lingkungan Karst Maros dan Pangkep inilah merupakan cerminan dari otonomi daerah yang hanya mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) belaka, sekalipun dengan merusak lingkungannya sendiri. Krisis ekologi ini terjadi, karena pemodal dan sistem pengetahuan modern telah mereduksi alam menjadi onggokan komoditi yang bisa direkayasa dan dieksploitasi. Oleh sebab itu, lingkungan dan ekosistem lainnya rusak disebabkan

dampak dari politik ekologi (atas nama kebijakan pembangunan maka dibuatlah izin untuk melakukan kegiatan industri/perusahaan di lingkungan yang dilindungi) (Kabar Kami.Com. 2015. *Karst Maros- Pangkep Eksploitasi Turun Temurun Untuk Kepentingan Elit*).

Informasi lain juga diperoleh tentang pengamatan Walhi dari aspek ekologi di kawasan karst, informan penelitian Ir. Asm, pria yang berprofesi sebagai Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Sulawesi Selatan. Motif lain yang ditegaskan oleh informan Asm, mengenai dampak yang disebabkan perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan karst. Setelah mendengarkan informasi dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), datang penjelasan dari informan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Bantimurung Bapak Ir. MH, M.Si., Sisi lain yang menarik yang dapat dianalisis lebih tajam adalah penjelasan seperti gangguan karst, dan perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Informasi yang diperoleh dari informan Ir. SR, bahwa perusahaan yang berskala kecil yang hanya menggunakan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) saja tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan di Kabupaten Maros. Bagi perusahaan yang mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) itu dikeluarkan oleh Komisi Amdal Provinsi Sulawesi Selatan yang sejatinya belum mengetahui secara detail dampak eksplorasi dan eksploitasi yang terjadi di kawasan kerst Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Sesungguhnya motif keluhan dari masyarakat lokal dan LSM, berkaitan dengan kawasan karst, ekosistem, gangguan debu, dan peledakan bahan peledak yang disebabkan oleh operasionalisasi perusahaan dan kondisi lahan pertanian yang tidak terlalu subur. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan diantaranya menyebabkan gangguan ekologi karst, gang- guan debu, kerusakan biota tanaman, kondisi tanaman yang tidak subur, umumnya tidak diketahui oleh Dinas Kementrian Lingkungan

Hidup yang tidak memiliki data yang lengkap, sehingga dengan mudahnya mengeluarkan izin eksplorasi dan eksploitasi bagi perusahaan-perusahaan pertambangan.

Kejadian seperti kerusakan ekologi karst, dan gangguan biota alam lainnya sering kali didapati. Wilayah yang pada umumnya me- miliki kualitas Sumber Daya Alam (SDA) di sektor industri per- tambangan, mengoptimalkan komunikasi diantara multiaktor yang ber- kepentingan. Penguasa daerah melakukan komunikasi dengan Dinas Kementrian dan Lingkungan Hidup, pihak pengusaha juga memberikan data yang lengkap sesuai dengan kegiatan yang akan dikerjakan di kemudian harinya. Hindari manpulasi nama perusahaan yang akan melakukan kegiatan eksplorasi. Jangan memasukkan perusahaan kecil dalam pengusulan perizinan, namun pada kenyataannya perusahaan besarlah yang akan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi lingkungan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir kemungkinannya di masa yang akan datang.

Dimulai dari wacana yang didalilkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maros Budiman Effendi, tentang kerusakan hutan penyebab bencana. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Maros menyebut sebagai salah satu daerah rawan bencana yang juga didukung oleh keterangan Pemerintah Kabupaten Maros. Adapun bencana yang rawan menimpa Maros adalah banjir, longsor, dan puting beliung. Hal tersebut disebab- kan karena kondisi alam Maros yang mengalami kerusakan akibat dari aktivitas pertambangan. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Maros Budiman Effendi, bahwa Kabupaten Maros sangat berpotensi banjir utamanya Desember hingga Januari. Pada kondisi curah hujan yang tinggi maka sudah dipastikan Maros akan mengalami banjir. Hal tersebut sudah menjadi persoalan tiap tahunnya, potensi banjir dan longsor berada pada Kecamatan Cenrana, Camba, dan Mallawa. Sementara potensi banjir berada di Kecamatan Turikale, Maros Baru, Lau, dan Bontoa (Koran Fajar {Pamminasata}, edisi Sabtu, 6 November 2010. *Kerusakan Hutan Penyebab Bencana*).

Berdasarkan data wacana yang digulirkan oleh informan Budiman Effendi, modus operandi hingga terjadinya kerusakan hutan dan penebangan pohon. Kerusakan hutan dan penebangan pohon disebabkan karena adanya aktivitas pertambangan yang beroperasi dikawasan lahan yang berpotensi mengakibatkan kelongsoran. Motif inilah yang kemudian mengantar warga masyarakat, tercipta ke- khawatiran akan keselamatan dirinya dan juga keselamatan lingkungan dan ekosistemnya.

Wacana kerusakan hutan dan lahan terus menerus bergulir seiring maraknya pertumbuhan perusahaan di sektor pertambangan, sebagaimana wacana yang bergulir didalilkan oleh Lembaga Permusyawaratan Masyarakat (LPM) Kelurahan Leang-leang, Tadjuddin Rani, ihwal warga keluhkan tambang uruk. Sejumlah warga yang bermukim di wilayah lingkungan Panaikang, Kelurahan Leang-leang, Kecamatan Bantimurung mengaku resah. Aktivitas tambang uruk atau tanah untuk timbunan di wilayah mereka mengakibatkan kerusakan jalan yang parah. Menurut Ketua LPM Kelurahan Leang-Leang, Tadjuddin Rani, bahwa tambang tersebut dilakukan oleh UD. Lima Putra, sudah menyalahi kesepakatan pihak perusahaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Perusahaan berjanji akan menambang pasir dan batu atau sirtu. Tapi yang ditambang justru tanah (Koran Fajar {Metropolis-Gowa-Maros}, edisi Kamis, 5 April 2012. *Warga Keluhkan Tambang Uruk*).

Alhasil, motif kerusakan lingkungan ini mendapat respon dan tanggapan melalui wacana yang ditanggapi oleh Ketua Komisi II DPRD Maros H. Husain Rasul, bahwa pihaknya telah menerima keluhan warga Leang-leang. Dia pun meminta agar Dinas Per- tambangan dan Energi (Distamben) Maros melakukan pengawasan dan penertiban terhadap truk sepuluh roda yang digunakan perusahaan tambang (Koran Fajar {Metropolis-Gowa-Maros}, edisi Kamis, 5 April 2012. *Warga Keluhkan Tambang Uruk*).

Data wacana menunjukkan kerusakan yang diakibatkan operasionalisasi perusahaan pertambangan adalah kerusakan infrastruktur

jalan. Kerusakan infrastruktur jalan disebabkan oleh keluar masuknya mobil truk pengangkut hasil pertambangan yang melintasi perumahan warga masyarakat lokal. Kondisi ini diperparah dengan kondisi infrastruktur jalan yang tadinya selesai diperbaiki kembali mengalami kerusakan jalan akibat beban kendaraan yang melebihi batas tonase yang telah ditentukan untuk melintasi jalan di sekitar perumahan pen- duduk.

Selanjutnya, wacana yang sama juga muncul dan diproduksi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bumi Mentari, Andi Ilham Lahiya. Wacana yang diproduksi tentang LSM melaporkan dugaan pencemaran lingkungan. Setelah kurang lebih tiga bulan melakukan penimbunan proyek perumahan di jalan poros Makassar-Maros Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai, PT. Giarto Aurewai Cemerlang dilaporkan oleh Direktur Eksekutif LSM Bumi Mentari Andi Ilham Lahiya atas dugaan pencemaran lingkungan, sebagaimana yang ditegaskan bahwa pihaknya melaporkan pengembang setelah pihaknya mendapat keluhan dari warga dan pengguna jalan yang kerap melintas di jalan poros ini. Kondisi jalan yang tidak aman. Saat kemarau berdebu dan saat hujan becek. Kegiatan perusahaan ini sudah merusak dan dampaknya pencemaran lingkungan (Koran Fajar {Metropolis-Gowa-Maros}, edisi Sabtu, 14 April 2012. *LSM Melaporkan Dugaan Pencemaran Lingkungan*).

Motif wacana kerusakan lingkungan yang sedianya dilaporkan oleh LSM Bumi Mentari, Andi Ilham Lahiyya mendapat respon dan tanggapan dari Kepala Polisi Sektor Kota Mandai (Kapolsekta) Ajun Komisaris Polisi (AKP) Sulaiman, pihaknya sementara melakukan penyidikan dan pengumpulan data-data soal laporan pencemaran lingkungan yang dilaporkan LSM Bumi Lestari (Koran Fajar {Metropolis-Gowa-Maros}, edisi Sabtu, 14 April 2012. *LSM Melaporkan Dugaan Pencemaran Lingkungan*).

Wacana kerusakan lingkungan juga didalilkan oleh Ketua Lembaga Pemerhati Lingkungan Pemuda Pancasila (LPLPP) Hamzan, tentang proyek perumahan resahkan warga. Proyek penimbunan

kompleks perumahan di Lingkungan Batangase, Kecamatan Mandai resahkan warga dan pengguna jalan. Warga yang berada disekitar proyek perumahan tersebut meminta agar proyek tersebut dihentikan. Pasalnya proyek tersebut mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang sedianya lokasi tersebut berdekatan dengan jalan poros Maros- Makassar. Bahkan tidak sedikit pengguna jalan mengalami kecelakaan ketika melintasi jalan tersebut, sebagaimana yang ditegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pekerja proyek tersebut melanggar aturan pengelolaan limbah akibat penimbunan perumahan itu. Agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros harus tegas menghentikan aktivitas penimbunan perumahan itu (Koran Fajar {Metropolis-Gowa- Maros}, edisi Sabtu, 18 Februari 2012. *Proyek Perumahan Resahkan Warga*).

Wacana kerusakan lingkungan akibat pencemaran tanah diproduksi oleh Ketua LPLPP, Hamzan, mendapat respon dan tanggapan serius melalui wacana yang diproduksi oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Kadistarkim) Maros Agus Salim, mengatakan bahwa permohonan perizinannya masih dalam proses pihaknya belum bisa menerbitkan izin sebelum ada IMB dari Dinas Tata Ruang. Pihaknya sudah turun untuk menghentikan segala kegiatan yang berada di lokasi proyek itu (Koran Fajar {Metropolis-Gowa- Maros}, edisi Sabtu, 18 Februari 2012. *Proyek Perumahan Resahkan Warga*).

Oleh sebab itu, wacana selanjutnya juga diproduksi oleh warga lokal yang bermukim di sekitaran tambang marmer Leang-Leang Maros. Wacana yang diproduksi tentang warga keluhkan aktivitas tambang marmer di Leang-Leang. Beberapa tambang marmer di Leang-Leang Maros dikeluhkan oleh warga. Padahal seharusnya, ke- beradaan tambang tersebut menyejahterakan warga, sebagaimana yang dikatakan oleh perwakilan aliansi masyarakat anti tambang, Abustam, bahwa keberadaan tambang marmer di Maros yang diharapkan dapat mensejahtarakan masyarakat dan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros, justru hanya merugikan masyarakat.

Kondisi ini dikarenakan perusahaan marmer menggunakan jalan masyarakat untuk mengangkut blok-blok marmer yang beratnya ber- ton-ton, sehingga jalan tersebut mengalami kerusakan parah. Ironisnya, pihak Pemerintahan Daerah Maros maupun pihak perusahaan tambang saling lempar tanggung jawab. Selama ini ada empat perusahaan tambang marmer yang beroperasi di Leang leang yakni, PT. Insani, PT. Aimil Insan, PT. Arwacna dan PT. Sumber Guna Makassar Nusa. Perusahaan tersebut rutin melakukan aktivitas penambangan batu marmer yang berlokasi di satu Lingkungan, namun tidak memperduli- kan lingkungan masyarakat (Makassar Tribunnews.Com. 2015. *Warga Keluhkan Aktivitas Tambang Marmer di Leang-Leang*).

Selanjutnya, dalil wacana lainnya juga diproduksi oleh warga tentang dua perusahaan tambang sengsarakan petani di Maros. Kurang lebih tiga tahun bendera PT. Adrian Citra Nugraha dan PT. Sari Bumi Timur berada di Desa Lima Poccoe dan Desa Lebbo Tengae Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros untuk melakukan aktivitas penambangan pasir batu. Sejak itu pula masyarakat petani dilanda kecemasan akan masa depannya dan bakal terancam kelaparan, sebab sawah milik masyarakat yang menjadi tumpuan harapan hidupnya, bakal habis tergerus penambangan golongan C.

Hasil pemantauan wartawan Perintis Nusantara dan Kompak, 27 Maret 2015, didapati pada lokasi, terlihat penambangan yang serampangan dilakukan kedua perusahaan tersebut, sudah sampai tataran memprihatinkan. Sepanjang bibir sungai terlihat sawah yang kini sedang ditumbuhi padi, ternyata terkikis oleh longsor. Beberapa pematang sungai yang menjadi tepi sungai penuh dengan material batu juga terlihat pematang sawah yang berkelok-kelok. Namun aktivitas penambangan di sawah milik warga yang bernama Dadong, telah dihentikan. Namun demikian, masih terlihat banyak material batu yang menumpuk. Dari seberang sungai aktivitas penambangan terus ber- langsung, beberapa truk tongkang sejenis mobil dinas warna merah terlihat lalu lalang mengangkut material. Menurut penuturan warga lokal yang bernama Dadong, mengatakan bahwa sungai tersebut

dulunya tidak terlalu lebar, tetapi begitu hadir penambang maka sungai perlahan bertambah lebar. Warga juga mengakui jika musim hujan memang debit air disungai besar dan kadang membuat longsor sawah mereka, dan masih bisa diatasi. Tetapi ternyata, begitu perusahaan masuk maka longsoran tanah sawah makin parah. Kalau luas sawah miliknya sudah berkurang sekitar lima meter. Selain itu produksinya juga berkurang sekitar 20 karung setiap panen, jadi kalau harga gabah Rp.400.000 perkarung maka kerugiannya sekitar Rp.8.000.000., setiap panen. Warga juga sangat ketakutan dan pasrah saja atas terjadinya aktivitas penambangan yang tidak memperhitungkan dampak secara luas ke masyarakat. Warga sekitar areal penambangan ketakutan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib (Koran Investigasi.Com. 2015. *Dua Perusahaan Tambang Sengsarakan*).

Data wacana yang diproduksi oleh koran investigasi mendapat respon dan tanggapan melalui wacana yang digulirkan oleh perwakilan warga di sekitaran perusahaan tambang, Fatahuddin, mengatakan bahwa beberapa material batu yang berada di bibir sungai ada yang mengambil hingga longsor. Produksi padi selama ini berkurang hingga 10 karung setiap panen atau sekitar Rp.3.500.000. Warga juga ke- takutan dan tidak berani melapor kepada aparat desa, meski dirinya sudah merasa dirugikan. Lokasi tambang tersebut dikelilingi lahan persawahan masyarakat dengan sungai yang kian meluas. Terdapat bagian sungai tertentu yang kelihatan airnya cukup dalam, poisisinya berada di bibir sungai yang menghubungkan pematang sawah masyarakat. Jalan yang dilewati kendaraan penambang lalu-lalang, dulunya adalah sungai, namun kemudian ditimbuni oleh perusahaan, lalu sungai tersebut terpotong, guna tempat mengambil material di seberang sungai. Juga terdapat dugaan jika mobil oknum Kades Desa Lima Poccoe, juga ikut ambil bagian mengangkut material, sehingga Kades diduga mendukung kegiatan penambangan tersebut karena membawa keuntungan, harapan masyarakat disini agar meminta kepada Bupati Maros yang peduli rakyat tetap pro rakyat sebelum

masyarakat merasakan penderitaan (Koran Investigasi.Com. 2015. *Dua Perusahaan Tambang Sengsarakan*).

Data wacana tersebut ditanggapi secara dingin oleh oleh Kepala Dinas Pertambangan melalui Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Ir. A. Murni Sukri, M.M., sebagaimana penegasannya bahwa perusahaan tersebut sudah terdaftar di kantornya dan sah. Menurut Murni, bahwa setahu saya perusahaan itu sudah mengantongi ijin tambang dan sekarang kami dengar sementara ijinnya diperpanjang, tetapi sebaiknya ketemu di Kantor Sistem Satu Atap (Sintap) Kabupaten Maros. Mengenai isu penolakan warga, memang ada surat protes dan sudah diselesaikan melalui aparat pemerintah desa (Koran Investigasi.Com. 2015. *Dua Perusahaan Tambang Sengsarakan*).

Hal ini mendapat respon tegas melalui wacana yang didalilkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Sumber Daya Alam (SDA) Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu (KPPSP) Maros, Tasrif, mengatakan bahwa dalam UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Umum bahwa aktivitas penambangan ilegal (tidak sah) dilakukan sebelum mengantongi izin operasi, meski itu dalam proses perpanjangan izin. Sanksinya pidana kurungan 3 tahun atau denda Rp.1.000.000.000. Dengan demikian, perusahaan penambangan, dilarang melakukan aktivitas penambangan sebelum terbit izin operasionalnya. Sementara laporan warga desa Lima Poccoe Kecamatan Cenrana mengatakan aktivitas penambangan di daerah itu tidak pernah terhenti bahkan biasa hingga malam hari, puluhan mobil keluar masuk lokasi mengangkut material (Koran Investigasi.Com. 2015. *Dua Perusahaan Tambang Sengsarakan*).

Selanjutnya data wacana tentang kisruh penambangan pasir dan batu di wilayah Kecamatan Cenrana ditanggapi Bupati Maros melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Pemkab Maros, Kamaluddin Nur, menegaskan bahwa semua perizinan pertambangan akan dievaluasi ulang, kalau ada penambang tidak sesuai prosedur, akan dihentikan izinnya. Semua ijin tambang akan dievaluasi ulang, katanya. Jadi kalau ada temuan dan indikasi pelanggaran nanti pihak berwajib yang tindaki. Begitu juga kalau ada penambang yang merusak

lingkungan dan ditengarai izinnya belum keluar laporkan saja ke polisi. Terlebih sekarang pemerintah tidak semena-mena mengeluarkan izin tambang, karena masalah tambang adalah krusial, banyak korupsinya. Itulah yang kita hindari, belum lagi Bupati Maros, sangat peduli pada lingkungan. Kita tidak bisa melindungi kontraktor/pengusaha, sekarang era reformasi sebab nanti dianggap bersekongkol. Bupati Maros sangat perhatian tentang masalah tambang, karena masalah tambang melibat- kan masyarakat. Jangan karena hanya memikirkan kepentingan pemerintah, tanpa memikirkan masyarakat maka siapa yang salah. Kedua-duanya harus seiring, apalagi program Bupati kan program pro rakyat (Koran Investigasi.Com. 2015. *Dua Perusahaan Tambang Sengsarakan*).

Berdasarkan data wacana tentang dua perusahaan tambang yang sengsarakan warga masyarakat, ditanggapi serius oleh pihak PT. Sari Bumi Timur yang diwakili H. Amirullah Nur, saat dikonfirmasi via *handphone*-nya, mengungkapkan bahwa perusahaannya telah me- lakukan aktivitas penambangan selama empat tahun dan izin operasionalnya berakhir sampai September 2013, tetapi jauh sebelum- nya, enam bulan sebelumnya sudah diajukan perpanjangan. Mengenai keluarnya izin, bukan kewenangannya yang penting dari pertambangan mengeluarkan rekomendasi dan instansi terkait sudah datang meninjau serta memberikan rekomendasi. Ijin persetujuan sudah keluar dari Dinas Sistem Satu Atap (Simtap), itu hanya soal administrasi, sebab instansi terkait yakni Dinas Pertambangan. Pihak kami sudah meng- klarifikasi dan mengecek surat, serta yang ikut tandatangan di surat ter- sebut, ternyata tidak ada yang punya lahan di situ, kemudian ternyata itu surat palsu. Dalam UU Pertambangan, apakah itu pertambangan galian C, kalau sudah ada persetujuan dari pertambangan, termasuk aparat desa dan kecamatan serta Dinas Pertambangan dan Energi dan instansi terkait, rekomendasinya sudah dikantongi dari sembilan dinas jadi serta merta sudah memiliki izin. Sebanyak 10 masyarakat yang punya lahan di sekitar tambang sudah tandatangan dan menerima dananya semua. Dana kontribusi kita sudah serahkan ke masyarakat,

normalisasi sungai diperbaiki agar sawahnya jangan tergerus air. Pihak perusahaan telah membayar sebesar Rp.25.000.000., kepada masyarakat. Kompensasinya satu mobil kecil Rp.5000, untuk masyarakat. Ada juga masyarakat yang terima hingga Rp.5.000.000., oleh karena tanah yang dikeruk disungai milik masyarakat dan bukan pemerintah. Jadi yang memberi persetujuan masyarakat sendiri bersama aparat pemerintah setempat, sehingga kedua perusahaan itu, bisa ada di lokasi tambang (Koran Investigasi.Com. 2015. *Dua Perusahaan Tambang Sengsarakan*).

Sementara itu data wacana tersebut juga diresponi oleh Kepala Desa Lima Poccoe Abu Bakri yang dikonfirmasi melalui telefon selulernya (*handphone*), bahwa jika operasinya berjalan setelah perpanjangan izin. Soal penolakan warga, saya tidak menerima tembusan surat dan baru diketahui dari sesama Kepala Desa lainnya. Surat pertama keluar semacam surat kaleng tanpa ada lampiran, pendukung setelah surat kedua ada lampiran pendukung, pihaknya menelusuri ke bawah tentang siapa orang yang bertandatangan dan ternyata hasil evaluasi dilapangan, kebanyakan yang tidak punya lahan. Warga juga bertandatangan tidak melihat lampiran depannya. Soal perusahaan ber- operasi, saya menilai dengan adanya rekomendasi dari pertambangan, pihaknya pernah meminta agar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros untuk sama-sama turun meninjau lokasi di areal lokasi penambagangan. Saya juga membenarkan jika kendaraannya ikut satu, dua mengangkut material, tapi semua mobil masyarakat di- persilakan mengangkut, sehingga tidak ada kesan monopoli. Mengenai pemberian kompensasi, bahwa warga khususnya yang punya lahan di pinggir sungai terkena lokasinya, maka sisi kiri dan kanan diberikan kompensasi dari perusahaan. Saya juga berharap kepada pemilik tambang agar setiap bulan diberikan kompensasi. Banyak lahan warga yang dulunya luas tapi sekarang menyempit karena runtuh, tapi bukan pengaruh penambangan. Dengan adanya penambangan, maka akan terbenahi aliran sungai akan membantu warga agar lahannya tidak runtuh lagi, tapi kalau dibiarkan begitu tanpa ada normalisasi maka sungai

tambah lebar yang bisa mengakibatkan runtuh pematang sawah warga. Saya juga menyesalkan warga yang tidak pernah mengadu jika ada hal- hal yang tidak diinginkan, seharusnya warga melaporkan keluhannya, jangan langsung lompat tanpa ada konfirmasi, ke aparat desa (Koran Investigasi.Com. 2015. *Dua Perusahaan Tambang Sengsarakan*).

Motif wacana kerusakan lingkungan akibat pencemaran tanah juga terdapatnya yang didalilkan oleh warga masyarakat lokal, melalui perwakilannya. Dg. Lallo, menegaskan bahwa tambang-tambang marmer yang ada di lingkungan kami tidak memiliki kepedulian ter- hadap masyarakat, jalan yang dibangun dengan swadaya digunakan oleh perusahaan tambang untuk mengangkut bloknya namun tidak perduli dengan kondisi jalan. Saya sangat kecewa karena pihak per- usahaan dan pemerintah saling lempar tanggung jawab padahal batu marmer yang diambil dari desa kami sudah ratusan kontainer namun tidak ada upaya perbaikan jalan. Hal ini berbanding terbalik dengan Sumber Daya Alam (SDA) berupa bebatuan yang berlimpah di Kabupaten Maros menjadi surga bagi penambang marmer. Pengerukan kekayaan alam hingga kini tidak signifikan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan rakyat. Kehadiran perusahaan tambang disinyalir justru merugikan masyarakat karena mobilisasi aktivitas perusahaan yang menggunakan jalan masyarakat mem- perparah kerusakan jalan namun Pemerintah Daerah Maros dan pihak perusahaan saling lempar tanggung jawab. Dari data wacana yang diperoleh saat ini terdapat 4 perusahaan tambang marmer yang meng- eksploitasi kekayaan alam di Leang Leang yakni PT. Insani, PT. Aimil Insan, PT. Arwacna dan PT. Sumber Guna Makassar Nusa (Skornews.Com. 2015. *Mengeruk Untung Masyarakat Buntung*).

Berdasarkan data wacana berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan pertambangan, terdapat beberapa ketimpangan seperti misalnya dimulai dengan perizinan yang tidak memiliki legalitas dari instansi yang berwenang, surat izin usaha pertambangan disebagian perusahaan sudah tidak lagi diperpanjang izinnya, sampai pada motif wacana Pemerintah Kabupaten Maros

hanya mengejar keuntungan perihal pemberian izin pertambangan yang hampir sebagian besar bertempat dilokasi kawasan karst dan biota- biota hewan dan tanaman lainnya yang mengarah kepada ke- punahannya di Kabupaten Maros.

Semaraknya data wacana ihwal kerusakan lingkungan seperti yang diwacanakan oleh Arkeolog Universitas Hasanuddin Makassar, Yadi Mulyadi, tentang eksploitasi karst, kasus Maros jadi pelajaran. Dalam hal ini membandingkan kasus eksploitasi karts Maros dengan yang akan terjadi di Kalimantan Timur. Ekosistem Karst Maros dan Pangkep di Sulawesi Selatan, rusak karena ketidakberimbangan pe- manfaatan potensi yang bersifat eksploitatif untuk pertambangan. Alhasil, terjadinya kerusakan ekosistem berdampak merusak pening- galan cagar budaya di sana (Karst Maros-Pangkep). Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2012, terdapat 139 gua prasejarah. Sebanyak 70 diantaranya bergambar cadas. Namun demikian dari jumlah tersebut kini kualitas gambar yang dimiliki perlahan sudah mulai rusak akibat aktivitas tambang yang cenderung eksploitatif. Sejauh ini Pemerintah Daerah (Pemda) Maros selalu beranggapan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tambang. Tapi, dari 200 perusahaan tambang golongan C, PAD yang diterima cuma dikisaran Rp.200.000.000-an. Sedangkan dari PT.Semen Bosowa Maros (SBM) hanya Rp.1.300.000.000. Jika dibanding ke- rusakan ekologi, meski hitung-hitungan pasti belum ada. Akan tetapi, tidak sebanding keuntungan ekonomi yang diterima. Nominal kedua item tersebut justru kalah dengan tiket masuk pengunjung Air Terjun Bantimurung, Maros. Dari objek wisata itu dan tanpa merusak kawasan karst menghasilkan pemasukan sebesar Rp.4.300.000.000 setahun. Hal ini berarti bahwa peluang terhadap pemanfaatan yang berdampak ekonomi, jelas terlihat bahwa sektor pariwisata bisa memberikan peluang besar jumlah PAD. Berdasarkan amar UU 11/2010 tentang Cagar Budaya, pemanfaatannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya sejahtera dalam ekonomi (Pariwisata Kaltim.Com. 2015. *Eksploitasi Karst Kasus Maros Jadi Pelajaran*).

Dari data wacana tersebut tentang kerusakan ekologi karst dan juga mengancam kepunahan biota-biota disekitaran kawasan endemik, juga wacana kerusakan lingkungan kembali bergulir—didalilkan oleh Pemerhati lingkungan dan sosial Kalimantan Timur dari The Nature Conservancy (TNC), Niel Makinuddin menegaskan bahwa peta indikatif dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur (Pergub Kaltim) 67/2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang Mangkalihat mesti diperkuat dengan penetapan bentang alam karst oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam Pergub tersebut, karst yang membentang di Kutai Timur dan Berau itu seluas 1,867 juta hektare. Dari jumlah tersebut, 430 ribu hektare tidak boleh disentuh, sedangkan di luar itu masih perlu pem- buktian dengan kajian ilmiah. Sepengetahuan kami, usulan tersebut sudah diajukan selepas Pergub tersebut terbit. Hanya, hingga kini belum juga ditetapkan. Dalam hal ini keterkaitannya tidak hanya ke-anekaragaman hayati, sumber mata air, sosial-budaya, juga dengan histori. Dengan demikian, bila ada investor yang tertarik masuk menggarap semen telah memiliki kepastian hukum dan ekologi bila sudah ditetapkan. Sebab, bisnis semen berbeda dengan batu bara. Bila batu bara merupakan usaha jangka pendek yang berkisar 5–7 tahun, lain hal dengan semen yang minimal 50 tahun. Seperti yang terdapat di Cibinong cuma 700 hektare dan Maros 1.200 hektare. Karst diketahui mengandung karbon. Bahkan, konon, kandungannya lebih banyak dari hutan hujan tropis. Kalau dirusak, sama dengan melepaskan emisi karbon yang mempercepat pemanasan global. Faktor itu perlu diperhatikan (Pariwisata Kaltim.Com. 2015. *Eksploitasi Karst Kasus Maros Jadi Pelajaran*).

Motif wacana lainnya juga terdapat di tahun 2010-2016 perihal Dinas Pertambangan dan Energi Maros, melalui Kepala Dinasnya Rachmat Bustar, tentang cabut izin tambang di Situs Bulu Tianang. Aktivitas PT. Grasada Multinasional terancam ditutup. Berdasarkan rekomendasi tim kajian yang merujuk kepada zonasi wilayah tersebut tidak boleh ada aktivitas tambang. Menurut Rachmat Bustar, bahwa

pihak pemerintah tidak saja langsung mencabut serta merta izin usaha PT. Grasada Multinasional, dengan alasan bahwa pihak pemerintah sudah menerima hasil rekomendasi ini dan tidak mungkin kami langsung mencabut izinnya. Melalui tim teknis pertambangan akan mengkaji kembali dan melakukan verifikasi melalui observasi lapangan. Namun demikian, pihak Distamben Kabupaten Maros tetap melakukan koordinasi ke Bupati Maros soalan tindak lanjutnya. Karena bagaimanapun mereka sudah cukup mendatangkan investasi yang cukup besar (Koran Fajar {Metropolis}, edisi Rabu, 14 November 2011. *Cabut Izin Tambang di Situs Bulu Tianang*).

Dari data wacana tersebut diperoleh penjelasan bahwasanya memang terdapat indikasi pelanggaran sebagai akibat dari operasio- nalisasi perusahaan. Perusahaan melakukan pelanggaran dengan jalan diduga tanpa disadari telah merusak lingkungan. Namun demikian, pihak Pemerintah Kabupaten Maros masih menunggu hasil investigasi seperti apa bentuk kerusakan yang terjadi dikawasan yang memiliki keindahan karst terbaik kedua dunia ini setelah Negara China tersebut.

Selanjutnya, data wacana pelanggaran yang diduga berdampak kepada kerusakan lingkungan keanekaragaman hayati juga diproduksi oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Kota Makassar arkeolog BP3 Muhammad Ramli, tentang BP3 perintahkan reklamasi kolam (terkait tambang di bulu samongkeng). Menurutnya, telah terjadi pelanggaran pada situs purbakala Bulu Samongkeng di Kabupaten Maros. Hal ini terdapat pada pembuatan kolam penampungan air di- nilai berpotensi merusak peninggalan sejarah. Tim menemukan adanya aktivitas pertambangan di luar konsesi, yakni pada bagian barat yang berjarak sepanjang 120 meter dari kaki Bulu Samongkeng. Pembuatan kolam penampungan air di kaki Bulu Samongkeng tersebut dipastikan sudah melanggar aturan. Pihak perusahaan sebaiknya tidak merusak atau mengubah fungsi lahan dan tanah minimal 25 meter dari kaki Bulu Samongkeng. Termasuk pembuatan jalan tambang dan kegiatan lain- nya. Selain itu juga meminta pihak perusahaan melakukan reklamasi terhadap kolam penampungan air. Jadi dalam hal ini akan mengundang

komponen yang memiliki kompeten yakni, pihak perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan kajian kembali terhadap rencana aktivitas pertambangan yang akan dilakukan oleh PT. Aimil Insan Marmer (Koran Fajar {Metropolis-Gowa- Maros}. Edisi Senin, 27 Februari 2012. *BP3 Perintahkan Reklamasi Kolam; Terkait Tambang DI Bulu Samongkeng*).

Dari data wacana yang bergulir sebelumnya tentang kerusakan lingkungan disekitaran ekologi karst yang terdapat di Kabupaten Maros ini mendapat sanggahan tanggapan dan respon yang serius dari Wakil Kepala Teknis PT. Aimil Insan Marmer Syaiful Alam, menyatakan bahwa peninjauan ini memastikan lokasi tambangnya tidak masuk ke dalam situs. Hal itu sudah dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi (Koran Fajar {Metropolis-Gowa-Maros}. edisi Senin, 27 Februari 2012. *BP3 Perintahkan Reklamasi Kolam; Terkait Tambang di Bulu Samongkeng*).

Selanjutnya, data wacana tentang kerusakan lingkungan ke-anekaragaman hayati yang diproduksi oleh Kepala Dinas Pertam-bangan dan Energi Kabupaten Maros, Drs. H. E. K. Mustafa, M.M., bahwa perusahaan Semen Asal Cina, Anhui Conch Cement Ltd, akan membangun pabrik semen di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Conch mendapatkan izin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Meneral (Kementrian ESDM) juga mendapatkan izin untuk mengolah karst dan tanah liat menjadi semen di atas lahan 514 hektare. Lokasi- nya berada di Desa Simbang, Kecamatan Simbang dan Desa Toddolimae, Kecamatan Tompobulu. PT.Conch mendapatkan izin sejak awal September 2014, namun sebatas izin eksplorasi. Nantinya, PT. Conch akan membuat perusahaan baru bernama PT. Conch Maros South Sulawesi Mineral. Perusahaan itu telah memenuhi syarat administrasi, lingkungan, dan finansial untuk mendapatkan izin eksploitasi dan sedang proses. Penerbitan izinnya masih lama. PT. Conch memiliki hak untuk melakukan penelitian umum selama satu tahun, eksplorasi selama empat tahun, dan studi kelayakan selama dua tahun. Dengan demikian, butuh waktu lima tahun bagi perusahaan ini

untuk mengantongi Izin Usaha Produksi dari pemerintah daerah (Tempo.co.id. 2014. *Perusahaan China Bangun Semen di Maros*).

Berdasarkan data wacana yang digelontorkan melalui reproduksi wacana tersebut, diketahui selama kurun waktu empat tahun, pihak perusahaan sudah terlebih dahulu untuk mengurus surat izin usaha pertambangan di Dinas Pertambangan Energi dan Mineral Maros. Selanjutnya, pihak Distamben sendiri menanggapinya bahwa hal ini harus menunggu dari data penelitian baik itu yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Conch maupun dari pihak eksekutif sendiri. Oleh karenanya pihak Distamben enggan untuk memberikan penegasan perihal izin usaha pertambangan apakah layak diterbitkan ataukah menunggu hasil penelitian dan pengembangan.

Dari data wacana kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan semen PT. Conch, kini beralih kepada wacana kegirangan dan kebahagiaan bagi penguasa di Kabupaten Maros, ihwal janji yang ditawarkan oleh perusahaan semen PT. Conch tentang kenaikan pen- dapatan daerah, sebagaimana yang diwacanakan oleh Bupati Maros, Ir.
H. M. Hatta Rahman, M.M., bahwa PT. Conch menawarkan kenaikan pendapatan daerah berupa kepemilikan saham 10%. Setelah beroperasi, pabrik semen ini akan menyerap 2.000 tenaga kerja (Tempo.co.id.2014. *Perusahaan China Bangun Semen di Maros*). Data wacana ini menujukkan keberpihakan penguasa dalam mengembang- kan industri di wilayahnya. Respon positif ini ditegaskannya melalui kegembiraan yang ditunjukkan oleh penguasa.

Motif wacana juga muncul dari Dinas Pertambangan dan Eenergi melalui Kepala Dinasnya Drs. H. E.K. Mustafa, M.M., telah hadir wacana pertentangan yang diproduksi oleh sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Front Aksi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Alam Maros (FRAKSI PAM), tentang eksploitasi gunung karst, resahkan warga diduga terjadi gratifikasi di balik kehadiran perusahaan Semen China. Kehadiran perusahaan semen asal China, PT. Conch Maros South Sulawesi Mine di Kecamatan Simbang Kabupaten Maros,

Provinsi Sulawesi Selatan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pemuda dan para aktivis pemerhati lingkungan bersama sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Front Aksi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Alam maros (FRAKSI PAM) gencar melakukan aksi penolakan. FRAKSI PAM menuntut, agar mengusir perusahaan semen China dari Maros, tutup perusahaan semen Bosowa Maros dan adili Bupati Maros Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M., bersama ‗kroni- kroninya'. Organisasi ini menganggap, bahwa pabrik semen China ini merupakan pabrik semen raksasa yang ingin megeksploitasi gunung karst terindah ketiga di dunia setelah china dan brazil yang dimiliki oleh Kabupaten Maros. Menurut tokoh pemuda yang juga merupakan Ketua Tim Lima PB HIPMI Maros Raya, Rauf Mappatunru, bahwa kehadiran semen China di Maros adalah bukti produk kapitalis untuk menarik investor asing menanamkan modalnya. Lebih lanjut menurut Rauf, bahwa Kabupaten Maros memiliki luas wilayah pertanian dan perikanan sangat berlimpah ruah, olehnya itu pemerintah diharapkan memprioritaskan investor yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian petani dan nelayan dan bukan mengeruk kekayaan alam Maros. Masuknya semen China di Maros tidak lepas dari peran Bupati selaku pemilik kewenangan dan kebijakan. Otonomi Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berhak menolak dan menerima investor asing yang ingin menanamkan modalnya selama mengikuti prosedural yang ada. Diduga, keterlibatan Bupati Maros bersama konco-konconya saat beredarnya gambar visual Bupati bersama petinggi PT. Conch Maros South Sulawesi Mine ketika berkunjung ke China pada tahun 2013 lalu yang terkesan dirahasiakan, sehingga diduga terjadi kongkalikong dalam proses terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Proses terbitnya izin usaha pertambangan (IUP) ini mengalami cacat hukum karena sebelum terbitnya IUP tidak diawali dengan penentuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan sosialisasi kepada masyarakat, ungkapnya. Beranjak dari kehadiran pabrik semen Bosowa Maros,

pabrik ini secara terang terangan mengesploitasi gunung karst kita sementara peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak mendapat perhatian khusus, sementara rakyat merasakan dampak lingkungan akibat kegiatan tersebut (Skornews.Com.2015. *Eksploitasi Gunung Karst, Resahkan Warga Diduga Terjadi Gratifikasi Di Balik Kehadiran Perusahaan Semen China*).

Dari data wacana yang menolak keras dengan masuknya perusahaan semen China PT. Conch, sehingga Bupati Maros, Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M., mewacanakan tentang izin tambang di Maros dievaluasi. Menurut Hatta Rahman, bahwa pihaknya akan meng- evaluasi izin tambang di kawasan perbukitan karst yang memiliki goa- goa prasejarah. Hal itu demi menjamin kelestarian goa dan mencegah potensi kerusakan terhadap situs arkeologi bernilai tinggi tersebut. Kami sudah berkunjung ke situs Goa Leang Bulu Bettue di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung. Dalam kunjungannya tersebut menyusul pengumuman temuan arkeolog terkait lukisan goa di kawasan karst Maros-Pangkajene dan Kepulauan yang berusia hampir
40.000 tahun. Lukisan goa prasejarah di Maros itu setara atau bahkan lebih tua dari pada lukisan goa prasejarah di Eropa yang selama ini diyakini paling tua di dunia. Pemerintah Daerah Maros bertanggung jawab melindungi dan melestarikan situs-situs itu. Lalu mengevaluasi semua perizinan tambang di wilayah Maros. Kalau ada izin yang tumpang tindih (dengan goa prasejarah) akan dicabut. Selama ini Pemda Maros tidak pernah menerbitkan izin pertambangan di wilayah yang terdapat goa-goa prasejarah di kawasan karst. Namun demikian pihak kami akan tetap akan memeriksa ulang untuk memastikannya. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Maros untuk melindungi goa-goa itu (Kompas.Com. 2014. *Izin Tambang di Maros Dievaluasi*).

Motif lain dari data wacana ialah tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Rudi Pieter Goni, S.H., menguraikan bahwa

agar berhati-hati

memberikan izin kepada perusahaan semen China untuk beroperasi di Kabupaten Maros. Dari hasil temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Sulawesi Selatan, Semen China dianggap akan melakukan pengrusakan lingkungan karena tidak melakukan kajian dalam terhadap dampak yang akan ditimbulkan. Jika betul tidak ada dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) ataupun tidak sesuai dengan Undang-Undang, maka perusahaan tidak boleh melaku- kan aktivitas di Kabupaten Maros. Semua yang berhubungan dengan Sumber Daya Mineral (Minerba) harus sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku. Intinya tidak boleh ada aktivitas yang merusak lingkungan, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini juga berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi perusahaan semen PT. Conch China unuk meminta Walhi untuk membuktikan adanya pelanggaran. Selain itu, harus dilakukan analisis untuk membuktikannya, termasuk memelajari dokumen Amdalnya, semua kegiatan eksploitasi harus mengembalikan dan bertanggung jawab terhadap fungsi yang berkurang dari lingku- ngan (Radar Makasar.Com. 2015. *Dewan Warning Bupati Maros*).

Data wacana ini juga seakan membenturkan wacana yang selama ini berseliweran tentang perusahaan semen asal Negeri China PT. Conch, sepenuhnya sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kekuasaan yang didaerah seringkali menciptakan sebuah wacana untuk membenamkan wacana yang berbeturan dengannya. Melalui kuasa juga pengusaha mampu memutar balikkan kondisi seakan masalah yang akan dihadapi dikemudian hari dapat diselesaikan hari ini. Indikasi yang berbeda antara penguasa yang didaerah dengan wacana yang digelontorkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, telah mem- buktikan adanya overlapping antara wacana yang mendukung dengan wacana penolakan.

Motif data wacana lainnya juga diprodusi oleh salah seorang warga bernama Abustan, warga keluhkan aktivitas tambang marmer di Leang-Leang. Beberapa tambang marmer di Leang-Leang Maros di- keluhkan oleh warga. Padahal seharusnya, keberadaan tambang

tersebut menyejahterakan warga. Menurut Abustan, bahwa keberadaan tambang marmer di Maros yang diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat dan bisa menambah Penapatan Asli Daerah (PAD) Maros, justru hanya merugikan masyarakat. Hal itu dikarenakan perusahaan marmer menggunakan jalan masyarakat untuk mengangkut blok-blok marmer yang beratnya ber ton-ton, sehingga jalan tersebut mengalami kerusakan parah. Ironisnya, pihak Pemerintah Daerah Maros maupun pihak perusahaan tambang saling lempar tanggung jawab. Selama ini ada empat perusahaan tambang marmer yang beroperasi di Leang- Leang yakni, PT. Insani, PT. Aimil Insan, PT. Arwacna dan PT. Sumber Guna Makassar Nusa. Perusahaan tersebut rutin melakukan aktivitas penambangan batu marmer yang berlokasi di satu Lingku- ngan, namun tidak memperdulikan lingkungan masyarakat (Tribun News.Com. 2015. *Warga Keluhkan Aktivitas Tambang Marmer di Leang-Leang*).

Data wacana tersebut memberikan pengakuan bahwasanya per- usahaan pertambangan batu marmer dalam pengoperasiannya telah melakukan berbagai macam bentuk pelanggaran ihwal kerusakan lingkungan. Pelanggaran ini nampak melalui sarana transportasi jalan yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan alat berat yang dipergunakan oleh perusahaan melintasi jalan perumahan warga masyarakat lokal.

Dari data wacana tersebut, juga telah terjadi produksi wacana tentang kerugian keanekaragaman hayati juga diproduki oleh Majelis Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), peneliti kelompok hewan pada ekosistem karst, Yayuk Rahayuningsih, tentang aktivitas tambang pada karst menyusutkan keanekaragaman hayati, bahwa aktivitas pertambangan kapur pada ekosistem karst, akan menyebabkan susutnya keanekaragaman hayati dan bisa berdampak luas. Sebab, ekosistem karst tidak terpisah dari ekosistem yang lebih luas di luar kawasan karst. Jika ada aktivitas pertambangan kapur lama- kelamaan akan terjadi penyusutan keanekaragaman hayati. Kerusakan yang diakibatkan aktivitas pertambangan atau ekstraktif bersifat

drastis, sehingga tidak memungkinkan hewan-hewan tersebut bersiap untuk melakukan migrasi ke habitat lain dan mempersiapkan diri untuk adaptasi. Umumnya tambang kapur menggunakan bom. Sementara kalau perubahan alamiah, itu berlangsung secara perlahan akibatnya hewan bisa berproses untuk beradaptasi. Dengan melihat kondisi karst sebagai gunung kapur, padahal sebenarnya banyak karst itu merupakan tangki air raksasa yang digunakan oleh penduduk di sekitarnya. Di gunung kapur tidak ada sumber air. Apa yang bakal terjadi kalau itu dihancurkan oleh pertambangan? Dari hasil penelitian yang telah saya lakukan, telah membukukan penelitiannya di Karst Maros, Sulawesi Selatan, menegaskan, bahwa rantai ekosistem karst tidak berdiri sendiri, sehingga jika terganggu akan berdampak ke ekosistem lainnya. Misalnya, kelelawar yang tinggal di gua dalam ekosistem karst. Oleh karena kelelawar merupakan pemencar biji, juga pollinator. Kalau misalnya kelelawar itu pemencar biji duren dan pollinator, juga yang terdapat di kawasan karst itu punah, juga berdampak kepada produktivitas kebun duren yang ada di luar karst. Sementara hewan kecil di dalam gua karst, seperti kaki seribu, jangkrik (*Gryllidae*), atau kecoak merupakan perombak bahan organik. Hewan ini yang selanjut- nya merombak guano kelelawar (kotoran kelelawar). Selain itu, burung walet dan kelelawar juga berfungsi sebagai pengendali hama karena mereka pemangsa serangga. Selanjutnya, dampak yang diakibatkan adalah kelelawar mencari makan di luar gua. Saat ini sudah terjadi penambangan kapur di kawasan karst di Maros, Sulawesi Selatan dan beberapa daerah sudah menjadi incaran pabrik semen selain di Kabupaten Maros, antara lain di Kabupaten Sukolilo, Provinsi Jawa Tengah. Binatang kecil di gua karst juga memiliki fungsi penjaga ekosistem karst dan ekosistem di sekitarnya (Kompas.Com. 2012. *Aktivitas Tambang Pada Karst Menyusutkan Keanekaragaman Hayati*).

Dari data wacana kerusakan tersebut, juga memunculkan wacana dukungan dari aspek regulasi, utamanya regulasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan karst, sebagaimana yang ditegas-

kan peneliti karst dari Universitas Hasanuddin, Rachman Kurniawan, menyatakan bahwa jika sudah ada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Karst yang masih dalam proses, di mana masyarakat bisa memberikan masukan. Sementara untuk valuasi ekonomi terkait karst bisa dilakukan melalui kegiatan ekowisata. Adanya pengaturan yang ketat, terutama terkait berapa kapasitas gua, yaitu berapa orang yang bisa ditampung dalam gua dalam rentang waktu tertentu. Misalnya setiap interval 15 menit hanya boleh masuk 20 orang. Kelompok hewan dalam gua amat sensitif terhadap panas, kebisingan, cahaya, dan bau. Adaptasi hewan yang hidup dalam ekosistem karst antara lain menjadi buta, kehilangan pigmen (pucat), atau sungutnya menjadi lebih panjang (Kompas.Com. 2012. *Aktivitas Tambang Pada Karst Menyusutkan Keanekaragaman Hayati*).

Selanjutnya, data wacana kerusakan lingkungan juga didalilkan oleh Ketua Komsi III Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros, Akbar Endra, tentang Komisi III DPRD Maros ancam cabut izin tambang marmer, sebagaimana yang ditegaskan informan Akbar Endra, bahwa keberadaan marmer tersebut tidak bisa diberikan kebijakan lagi karena tidak memberikan kontribusi yang banyak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal tersebut pihak Komisi III DPRD melakukan peninjauan langsung ke lokasi tambang marmer itu. Jika hanya merugikan warga, tambang itu tidak bisa dibiarkan. Izinnya harus dicabut. Kami akan meminta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Maros untuk mencabut izinnya serta menuntut mereka membayar ganti rugi kepada warga yang merasa dirugikan. Hal ini menyusul pemberitaan, bahwa sejumlah warga di Leang-leang Kabupaten Maros mengeluhkan keberadaan pabrik marmer yang dinilai dapat merusak lingkungan mereka (Tribun News.Com.2015. *Komisi III DPRD Maros Ancam Cabut Izin Tambang Marmer*).

Alhasil, dari maraknya data wacana yang berkembang tentang dampak kerusakan yang diakibatkan oleh perusahaan marmer yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi memunculkan wacana yang didalilkan oleh Bupati Maros Ir. H.M. Hatta Rahman, M.M., tentang merusak lingkungan izin tambang di Maros dicabut. Selanjut- nya, maraknya kegiatan tambang di wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, yang terindikasi merusak lingkungan membuat Bupati Maros gerah. Oleh karena itu, maka menurut Hatta Rahman, bahwa para pelaku yang melakukan aktivitas tambang merusak lingkungan, izin perusahaannya akan dicabut. Ada beberapa aktivitas tambang yang sudah merasakan kegerahan tersebut. Alhasil, beberapa izin usaha tambang karena kegiatan pertambangan mereka telah merusak lingkungan Maros. Pemerintah Daerah Maros tidak ter- lalu menggantungkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan lahan kegiatan tambang. Namun lebih mengandalkan sektor wisata untuk PAD. Kami pun sudah mencabut beberapa izin usaha per- tambangan yang merusak lingkungan. Maros juga tidak menuntut pendapatan daerah dari sektor pertambangan, tapi untuk pemanfaatan lahan, seperti sektor wisata (Sindo News.Com. 2015. *Merusak Lingkungan Izin Tambang di Maros Dicabut*).

Selanjutnya, data wacana kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang digulirkan oleh PT. Semen Bosowa Maros, tentang Semen Bosowa penuhi undangan DPRD Maros. Pihak PT. Semen Bosowa Maros diklaim penyebab dampak turunnya produksi pertanian warga dan pencemaran udara dari debu pabrik. Dalam rapat ini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Terdapat dua keputusan dalam rapat tersebut. Pertama, DPRD akan membentuk tim investigasi independen yang akan memeriksa fakta-fakta yang dikeluhkan masya- rakat Kampung Pulo. Kedua, terhadap hasil investigasi, Semen Bosowa akan bersikap terbuka dan bersedia menindaklanjuti hasil investigasi sebagai hasil tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingku- ngan (Tribun News.Com. 2011. *Semen Bosowa Penuhi Undangan DPRD Maros*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarira Destiani Rerung Isa, tentang SO_2 dan CO di udara serta gangguan pernapasan masyarakat di sekitar PT. Semen Bosowa Maros. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kadar SO_2 dan CO di udara serta keluhan gangguan per- napasan masyarakat sekitar PT. Semen Bosowa Maros, yang dilakukan di Dusun Amesanggeng, Dusun Bontokappong, dan Dusun Manarang. Dari hasil pengukuran kadar SO_2 tertinggi di titik 1 siang hari yaitu 22,166 ug/Nm3 dan terendah yaitu pada pagi hari di titik 3 dengan kadar 22,546 ug/N3. Dengan menggunakan sampel sebanyak 100 orang, sebanyak 85 responden mengaku mengalami gangguan per- napasan selama 6 bulan terakhir. Seluruh sampel udara berada di bawah nilai ambang batas. Namun demikian jarak terdekat dari pabrik memiliki risiko paparan yang lebih tinggi, dengan dibuktikan hasil pengukuran tertinggi pada titik 1 keluhan sebesar 100%, dari masya- rakat di Dusun Amesanggeng yang merupakan titik sekaligus dusun yang terdekat dari pabrik semen (Universitas Hasanuddin Makassar.ac.id. 2015. *So_2 dan Co di Udara Serta Gangguan Pernapasan Masyarakat Sekitar PT. Semen Bosowa*).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarira Destiani Rerung Isa, didapati gangguan pernapasan masyarakat disekitar PT. Semen Bosowa Maros. Di mana terdapat kandungan kadar SO_2 dan CO di udara yang terdapat di Dusun Amesanggeng, Dusun Bontokappong, dan Dusun Manarang. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya kadar SO_2 tertinggi di titik 1 siang hari yaitu 22,166 ug/Nm3 dan terendah yaitu pada pagi hari di titik 3 dengan kadar 22,546 ug/N3. Selain itu sebanyak 100 orang sampel, terdapat 85 responden mengaku meng- alami gangguan pernapasan selama 6 bulan terakhir.

Selanjutnya data wacana yang diproduksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros lewat anggota Komisi III Lory Hendrajaya, tentang dua perusahaan di Maros tidak tertib buang limbah. Akibat ulah dua perusahaan di Maros yang tak tertib dalam pembuangan limbah pabrik, Balai Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Maros turun langsung memantau salah satu perusahaan

yang membandel. BLHD turun langsung di pabrik PT. CS 2 Pola Sehat, perusahaan ini mengelola Teh Gelas. Menurut Lory Hendrajaya, bahwa DPRD akan memanggil pihak PT. CS2 dan mendengar langsung perihal pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) perusahaan itu. Termasuk pengelolaan limbahnya. Jika tidak taat terhadap aturan yang berlaku, maka BLHD diminta untuk bertindak tegas. Khususnya dalam hal pengelolaan limbah. Kalau memang mereka tidak becus, jangan diberi kesempatan. Bila perlu ijin IPAL-nya ditinjau kembali. Kalau tidak mengantongi ijin IPAL pabrik itu harus ditutup (Tribun News.Com. 2013. *Dua Perusahaan di Maros Tidak Tertib Buang Limbah*).

Berdasarkan data wacana yang digulirkan oleh anggota legislatif Kabupaten Maros, perihal pengetatan izin usaha pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Maros. Perusahaan diminta untuk menaati segala regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah. Regulasi yang di- maksudkan adalah bagaimana caranya agar perusahaan berlaku tertib dalam mengelola dan membuang limbah industrinya serta tidak me- rugikan warga yang bermukim disekitaran perusahaan tersebut. Klaim seperti inilah yang seringkali memberikan dimensi untuk melakukan kritikan melalui wacana yang berseliweran dikalangan masyarakat. Wacana yang berseliweran adalah umumnya curahan hati warga masyarakat tentang segala bentuk kerusakan lingkungan yang di- sebabkan oleh operasionalisasi perusahaan. Alhasil, menuntut pihak pemerintah untuk mengelasifikan tipologi keluhan warga masyarakat agar diadakan penindakan untuk menciptakan ruang solusi yang lebih cerdas guna berpihak kepada warga masyarakat lokal dan juga keles- tarian ekosistem dan ekologi karst.

Formasi wacana risiko perusahaan, berkembang menurut pandangan seseorang terhadap suatu objek yang dibentuk dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif tersebut. Wacana dampak lingkungan dicirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi dan perspektif yang paling dipercaya dan dianggap benar.

Dalam memahami formasi diskursif, Foucault (1972) pendekatan arkeologi yang dimaksudkan untuk mengkaji perbedaan-per- bedaan wacana dalam setiap babakan peradaban. Dalam hal ini dikenal, dua macam kontradiksi yakni; (1) kontradiksi yang hanya nampak di permukaan yang akan hilang jika dicermati kesatuan mendalam dari diskursusnya; dan (2) kontradiksi yang menyangkut berbagai fundamen diskursus. Selanjutnya pendekatan arkeologi Foucault (1972), positi- vitas dimaknai sebagai lingkup komunikasi (kesatuan wacana) dari wacana yang bertebaran di mana-mana. Di mana dengan menggunakan tolok ukur ialah apriori historis yang terdapat dalam setiap pernyataan aktor, sehingga menghasilkan medium yang digunakan adalah arsip.

Wacana apriori historis yang terdapat dalam setiap pernyataan aktor yang berujung pada penggunaan arsip ialah adanya wacana pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh operasionalisasi per- usahaan. Kerusakan dan pelanggaran yang dimaksud adalah rusaknya kawasan endemik batuan yang mengakibatkan ekologi karst akan terancam kelestariannya. Sementara itu, pelanggaran yang dimaksud adalah seringkali peusahaan didapati tidak sesuai dengan izin operasi- onal mereka untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun kegiatan eksploitasi disekitaran kawasan ekologi karst di Kabupaten Maros.

Sementara itu, wacana diskursif yang ada di mana-mana bersumber dari wacana risiko perusahaan yang lahir adalah penguasa hanya berpihak kepada pengusaha. Wacana lain juga adanya konspirasi politik dan konspirasi kepentingan diantara penguasa dan pengusaha dalam membuat sebuah kebijakan yang lebih cenderung menguntung- kan pihak perusahaan dibandingkan kesejahteraan warga masyarakat. Kebijakan ini seringkali lahir melalui pemberian izin perusahaan yang tidak memikirkan kepentingan warga masyarakat secara keseluruhan khususnya mereka yang bemukim disekitaran lokasi perusahaan, ke- mudian izin perusahaan ini dikeluarkan karena sebelumnya terjadinya perselingkuhan (pola hubungan gelap) diantara penguasa dan peng- usaha.

Selaras dengan pandangan yang menarik dalam produksi dan reproduksi wacana Foucault adalah apa yang disebutnya sebagai diskontuinitas, tahan, seri, dan keretakan (*rupture*). Foucault (1972), berpandangan bahwa setiap periode peradaban niscaya memiliki ke- khasannya sendiri. Kekhasan masing-masing identitas peradaban sangat ditentukan tiga pilar yang mendominasi, diantaranya; (1) wacana; (2) kekuasaan; dan (3) pengetahuan. Ketiga pilar ini tidak dapat saling dipisahkan hal ini disebabkan ketiga pilar ini saling ber- sinergi satu sama lainnya dalam peradaban pengetahuan (*episteme*).

Konsep wacana yang seringkali didalilkan oleh aktor penguasa seringkali memproduksi asumsi bahwasanya pengembangan per- usahaan adalah sebuah berkah tersendiri dalam peningkatan ekonomi wilayah, namun demikian juga ada wacana pertentangan dari kalangan pemerhati lingkungan maupun tokoh masyarakat yang memproduksi wacana bahwasanya perusahaan tersebut telah merusak lingkungan. Selanjutnya konsep kekuasaan merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh penguasa dalam memproduksi sebuah wacana untuk memengaruhi bahkan menciptakan statemen positif yang digunakan untuk meme- ngaruhi pandangan masyarakat, sehingga dengan harapan mudah di- terima oleh kalangan masyarakat.

Selanjutnya, konsep pengetahuan yang lazim digunakan oleh aktor penguasa adalah dengan membangun model regulasi pengem- bangan perusahaan dengan melakukan beberapa modifikasi agar ter- kesan berpihak kepada warga masyarakat, terkesan menghindari unsur- unsur kerugian ekonomi, sosial, ekologi yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan, dan juga menciptakan kesan bahwasanya per- usahaan tersebut ramah lingkungan. Ketiga konsep inilah yang lazim digunakan oleh penguasa untuk memainkan wacananya, sehingga menarik perhatian warga masyarakat dan menganggap sebagai sebuah keberhasilan bagi Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya. Selaras dengan tujuan untuk menginvestigasi retakan-retakan (*ruptures*) peradaban dari setiap seri episteme, maka Foucault (1972) melalu konsep pendekatan arkeologi menuntut penulis untuk mencermati fitur-

fitur peradaban, karena episteme bukan merupakan apa yang muncul di dalam peradaban, melainkan apa yang tersembunyi di baliknya di- dominasi pengetahuan pada masa lalu.

Hal yang menarik dalam temuan penelitian ini adalah umumnya perusahaan yang diduga merusak ekologi karst adalah perusahaan yang melalui penciptaan iklim usaha. Perusahaan-perusahaan yang dicipta- kan lewat iklim usaha inilah yang seringkali diduga telah melakukan tindakan pengrusakan lingkungan. Dugaan ini memiliki motif yang berbeda-beda, dimulai dari kegiatan eksplorasi dan ekspolitasi, pe- ngerukan tanah, pengrusakan jalan, pencemaran udara dikarenakan debu, pencemaran lingkungan lewat limbah operasional perusahaan, kerusakan keanekaragaman hayati, dan retakan-retakan yang terjadi di dinding batuan gunung yang memiliki ukiran dan gambar yang asli peninggalan nenek moyang. Sementara itu perusahaan yang model usahanya lewat program maupun proyek yang digalakkan oleh peme- rintah jarang diketemukan melanggar dan merusak lingkungan oleh karena konsentrasi usaha mereka di sektor proyek pengadaan barang dan jasa.

Beranjak dari data temuan hasil eksplorasi penelitian yang penulis lakukan, maka konsep wacana yang diajukan Fairlough (1995), dia memahami ideologi sebagai mengonstruksikan makna yang mem- berikan kontribusi bagi pemroduksian, pereproduksian, dan trans- formasi hubungan-hubungan dominasi (Fairlough, 1992; Chouliaraki dan Fairlough, 1999). Ideologi tercipta dalam masyarakat-masyarakat. Menurut definisi Fairlough, wacana bisa kurang lebih bersifat ideo- logis, wacana ideologis yang memberikan kontribusi bagi usaha untuk mempertahankan dan mentransformasikan hubungan kekuasaan.

Pemahaman wacana tentang ideologi sebagaimana yang disisip- kan dalam praktik kewacanaan bergantung pada pandangan yang menyatakan ideologi sebagai praktik yang beroperasi dalam proses pemroduksian makna dalam kehidupan sehari-hari, sebaliknya makna dimobilisasikan agar bisa mempertahankan hubungan kekuasaan (Thompson, 1990). Fokus ini bertentangan dengan konsepsi ideologi

pada banyak pendekatan Marxist. Marxist tidak tertarik pada struktur ideologi-ideologi tertentu, atau pada bagaimana ideologi diartikulasi-kan dalam konteks-konteks sosial khusus. Namun demikian, mereka telah memberikan perlakuan ideologi sebagai sistem nilai abstrak yang memiliki fungsi sebagai daya tarik sosial (*social pull factor*), yakni menarik dan mengikat orang-orang secara bersama-sama dan dengan demikian mengukuhkan keruntutan tatanan sosial.

Beranjak dari pendapat teori Fairlough, Chouliaraki, dan Thompson fenomena relasi penguasa dan pengusaha di Kabupaten Maros adalah melalui wacana keluhan yang terjadi dikalangan warga masyarakat khususnya bagi penduduk lokal yang merasakan dampak terjadinya disintegritas melalui kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perusahaan. Ke- giatan eksplorasi dan eksploitasi inilah yang selanjutnya menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi masyarakat dengan ancaman kerusakan bagi tanaman persawahan dan juga terjadi abrasi di sekitaran bibir sungai yang berdampak terhadap produktivitas pertanian warga.

Respon wacana yang diproduksi oleh penguasa kalangan eksekutif adalah berdalih melalui izin yang telah dikantongi oleh per- usahaan pertambangan ini sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku—dimulai dari perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hingga Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang dilakukan oleh Dinas Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Di samping itu dalih lain yang dikatakan oleh penguasa dari lembaga legislatif adalah sewaktu perusahaan tersebut ingin didirikan warga setuju dengan melakukan penandatanganan perjanjian persetujuan untuk mendirikan perusahaan dengan segala risiko yang akan terjadi di kemudian hari.

Namun hal tersebut mendapat respon sanggahan dari warga bahwasanya tanda tangan tersebut diperoleh atas dasar menjiplak (tanda tangan palsu) dari sebagian besar warga masyarakat lokal yang bermukim di sekitaran perusahaan. Tatanan struktur sosial inilah yang kemudian membentuk logika berpikir cerdas bahwasanya tidak

mungkin warga masyarakat tersebut mengeluhkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan kalau sebelumnya warga masyarakat lokal sudah menyetujuinya, namun sebaliknya wacana penolakan sendiri muncul dari warga masyarakat lokal dan didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga tokoh masyarakat yang konsern terhadap lingkungan.

Beranjak dari fenomena penolakan tersebut yang didasarkan pada gagasan Gramsci bahwa akal sehat berisi beberapa unsur yang saling bersaing yang merupakan hasil negosiasi makna tempat ber- proses keterlibatannya semua kelompok sosial (Gramsci, 1991). Hegemoni tidak hanya merupakan dominasi namun juga proses nego- siasi yang melahirkan konsensus tentang makna. Keberadaan unsur- unsur yang saling bersaing seperti demikian akan menaburkan benih- benih perlawanan oleh karenanya unsur-unsur yang menantang makna dominan membekali orang-orang dengan sumberdaya untuk melaku- kan perlawanan. Sebagai akibat, hegemoni tidak pernah stabil namun senantiasa berubah dan tidak selesai dan konsensus seringkali berkaitan dengan masalah derajat keseimbangan yang saling bertentangan dan tidak stabil (Fairlough, 1992).

Konsep hegemoni Gramsci menjelaskan, dasar material merupa- kan titik awalnya dan superstruktur ditentukan oleh dasar material tersebut. Gramsci mengemukakan dialektik antara dasar dan super- struktur; kondisi dasar material memengaruhi superstruktur, namun proses politik yang terjadi pada superstruktur juga dapat berbalik ke arah dasar material itu. Sedangkan menurut Laclau dan Mouffe, proses politiklah yang paling penting, politik memiliki keunggulan (Laclau, 1990). Artikulasi politik menentukan bagaimana kita bertindak dan berpikir, dan dengan begitu tergambarlah bagaimana masyarakat ter- cipta. Oleh sebab itu, proses penentuan perekonomian sepenuhnya ditiadakan dalam teori wacana. Akan tetapi tidak serta merta segalanya adalah soal bahasa atau bahwa materi itu tidak memiliki signifikansi. Pernyataan tersebut akan jelas bila kita memandang bagaimana Laclau dan Mouffe memahami dua konsep yakni wacana

dan politik.

Beranjak dari teori Hegemoni Gramsci yang dikembangkan oleh Fairlough dan Laclau, maka realitas sosial yang terjadi adalah penguasa memproduksi wacana peningkatan PAD dengan memberikan argumentasi pendapat bahwasanya pengembangan perusahaan merupa- kan berkah bagi daerah terlebih bagi warga masyarakat lokal. Dengan dalih tersedianya kesempatan kerja dan berdampak kepada peningkatan ekonomi warga masyarakat.

B. Investasi dan Perdagangan

Pada bagian ini akan di uraikan wacana yang terdapat pada tahun 2010-2016 tentang investasi dan perdagangan dalam yang di- lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, juga merasa bangga dan senang hati dengan kehadiran perusahaan Teh Gelas yang telah mem- benamkan sahamnya di Kecamatan Bantimurung. Pola perkembangan dan pertumbuhan industri yang selama ini diwacanakan oleh penguasa di Kabupaten Maros, juga berdampak kepada akselerasi yang meliputi industri kecil, menengah, dan besar. Akselerasi pertumbuhan industri ini sangatlah berimbang. Penguasa juga menciptakan iklim usaha dengan menyediakan lahan bagi pelaku usaha kecil, sebagaimana kelompok usaha yang diberi label Pantai Tidak Berombak, yang terletak di Kecamatan Turikale. Selain itu penguasa juga menciptakan iklim usaha yang terletak di Kecamatan Mandai dengan menyediakan lahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penguasa menyediakan lapak bagi pelaku usaha yang sedianya akan ditempati untuk melakukan kegaiatan jual-beli.

Informasi yang ditegaskan oleh Drs. MM, memiliki indikasi bahwa selama ini penguasa telah memberikan keleluasaan bagi para pelaku usaha yang dimulai dari pelaku usaha makro, meso, hingga pada tatanan mikro. Kondisi ini kemudian diketahui bahwa penguasa telah melakukan pendataan awal bagi kelompok pengusaha untuk menempati lokasi yang telah disediakan sebelumnya. Tipologi dukungan dalil wacana pengembangan perusahaan dan industri yang dikumandangkan oleh penguasa juga mendapat respon positif dari

Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Koperindag) Kabupaten Maros, Bapak Drs. MD (47 tahun). Nampak dari penegasannya bahwa dimensi pengembangan usaha di Kabupaten Maros selain memiliki potensi wilayah disektor semen dan marmer, juga memiliki potensi rumput laut, jagung, hasil-hasil pertanian dan palawija. Potensi wilayah ini selanjutnya didukung oleh sarana dan prasarana transportasi. Seperti jalur darat, laut, hingga udara. Selain itu Kabupaten Maros juga berdekatan dengan Kota Makassar, dan juga memiliki Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Hal inilah yang menarik para investor untuk melirik Kabupaten Maros sebagai sasaran pengembangan usaha mereka.

Korelasi pengembangan industri yang diciptakan oleh penguasa melalui iklim usaha, juga berdampak dengan pengembangan industri pertambangan di Kabupaten Maros. Mineral dan logam adalah salah satu magnet untuk mendatangkan para investor dalam membenamkan sahamnya. Investor ini adalah para pengusaha yang bermain di sektor usaha pertambangan. Dari sumber daya yang tersedia tersebut kemu- dian penguasa memanfaatkan dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan Semen asal Negara China yakni PT.Conch, untuk men- dirikan perusahaan di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Kondisi yang sama diwacanakan media bahwa perusahaan ini akan mengancam habitat di kawasan karst dan juga biota-biota hewan lainnya yang ter- dapat di sekitar kawasan yang akan dibangun perusahaan tersebut. Oleh karenanya, maka Pemerintah Kabupaten Maros juga akan me- lakukan evalusai dampak proyek terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) juga memberikan angin segar bagi pengembangan industri di Kabupaten Maros. Oleh karena dalam pengembangannya juga membantu mendatangkan para investor maupun perusahaan lainnya untuk mengadakan kerjasama dengan pihak penguasa di Kabupaten Maros. Dengan harapan akan men- datangkan keuntungan yang diakibatkan oleh CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan juga penyerapan tenaga kerja lokal. Namun tidak

semua kebijakan penguasa mendapat respon positif dari masyarakat. Berbagai kalangan dari masyarakat juga menanggapi perihal dampak operasional perusahaan tersebut. Sebut saja perusahaan yang bergerak disektor usaha penggalian pasir. Umumnya mereka mendatangkan petaka bagi masyarakat lokal yang bermukim di sekitar perusahaan. Mulai dari gangguan debu, tumpahan tanah yang diakibatkan ken- daraan lalu-lalang yang melintasi perumahan mereka, kemudian disaat musim hujan tanah yang mereka angkut tersebut selanjutnya meng- akibatkan kekotoran terhadap lapisan aspal jalanan. Oleh sebab itu, tidak sedikit masyarakat yang mengeluh dengan kondisi ini.

Dampak dengan adanya pengembangan usaha yang diciptakan oleh penguasa melalui iklim usaha, maka warga masyarakat lokal mendapat stimulus tersendiri yaitu mereka berlomba untuk bersekolah ke perguruan tinggi demi untuk diterima sebagai pegawai pada perusahaan PT. CS2 (Teh Gelas) dan perusahaan PT. Semen Bosowa Maros. hal ini nampak dari penegasan keterangan informan tentang penyerapan tenaga kerja yang diprioritaskan adalah warga masyarakat lokal. Selain dampak tenaga kerja, juga warga masyarakat merasa status sosialnya meningkat bilamana mereka bekerja di perusahaan ter- sebut. Kondisi ini disebabkan masyarakat lokal menganggap dengan diterimanya sebagai karyawan perusahaan, salah satu diantara anggota keluarganya memiliki keahlian tersendiri. Selain meningkatnya status sosial, juga berdampak kepada peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi ini dirasakan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh warga masyarakat meningkat dan juga luas lahan semakin bertambah luas. Selain itu dampak lain adalah sarana dan prasarana di Kecamatan Bantimurung sangat terpelihara melalui program perawatan berkala yang seringkali dilakukan oleh perusahaan PT. Semen Bosowa Maros.

Dampak lainnya yang diakibatkan dengan perkembangan per- usahaan adalah kualitas tanam persawahan yang sebelum adanya perusahaan PT. Semen Bosowa Maros, warga masyarakat lokal hanya mampu menanam sebanyak 2 kali dalam setahun, kini dengan adanya perusahaan tersebut dapat menanam sebanyak 3 kali dalam setahunnya.

Selanjutnya, kondisi lahan pertanian yang selama ini dikhawatirkan oleh penduduk akan status kepemilikan yang semakin tahunnya juga akan dibeli dan dimiliki oleh perusahaan belum dapat diketemukan buktinya.

Semarak pengembangan industri di Kabupaten Maros juga mendapat respon dari Kepala Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengendalian Lingkungan (BLHD) Kabupaten Maros, Bapak Ir. SR (55 tahun), perihal wacana didirikannya perusahaan semen asal Negeri China PT. Conch yang mengemukakan bahwa adanya ketidaksesuaian antara aspirasi masyarakat lokal terhadap Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Amdal dari PT. Conch. Dalam pene- gasan informan bahwa masalah Amdal dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), hanya masih dugaan dan wacana yang ber- kembang dikalangan masyarakat dan juga LSM pemerhati lingkungan. Informan menduga bahwa warga masyarakat ini ada yang meng- hasutnya demi kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Informan juga menuding bahwa selama ini LSM yang gencar menolak aksi mendirikannya perusahaan PT. Conch, tidak memiliki kompetensi untuk menilai kasus ini. Dalam keterangan informan ini juga menuding selama ini yang memberikan izin operasional bagi perusahaan adalah Dinas Pertambangan dan Energi yang bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Maros. Bupati selaku pemegang kekuasaan adalah seringkali menerima rekomendasi dari dinas-dinas yang memiliki kompetensi dalam pengembangan perizinan di Kabu- paten, sehingga dalam hal ini seringkali terjadi tumpang tindih diantara pemangku kepentingan.

Perusahaan yang ingin melakukan pengurusan izin usaha walaupun perusahaannya dinilai akan berdampak terhadap kerusakaan lingkungan tetap bisa di-terbitkan. Hal ini disebabkan adanya indikasi yang mengandalkan praktik relasi dan juga pendekatan secara men- dalam pendekatan tatap muka dengan kelompok penguasa yang me- miliki hak dalam mengeluarkan izin operasional perusahaan. Praktik inilah yang seringkali menerbitkan sebuah kebijakan dan kekeliruan

yang berdampak kepada kerugian warga masyarakat dan juga lingkungan. Selanjutnya, wawancara yang dilakukan penulis bersama Anggota Legislatif Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Maros, Bapak AE (46 tahun), tentang pengembangan industri. Pengem- bangan sektor-sektor industri yang terdapat di Kabupaten Maros, sebagaimana yang terdapat dibeberapa kecamatan meliputi, industri energi mineral dan pertambangan, industri pengolahan minuman kemasan. Relasi lembaga legislatif dengan pengusaha masih sebatas sebagai penonton. Hal ini sepenuhnya diambil dan diperankan oleh pihak penguasa eksekutif. Eksekutif yang memiliki domain dan peran sebagai aktor dalam mengeksekusi segala bentuk perizinan maupun kebijakan pengembangan perusahaan.

Diketahui bahwa peran anggota legislatif hanyalah sebagai penonton belaka. Kekuasaan yang semestinya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengembangan wilayah yang menyama- ratakan dan memiliki fungsi masing-masing bagi lembaga eksekutif dan legislatif. Namun pada nyatanya tidak sesuai dengan apa yang di- harapkan dan diregulasikan. Hal ini nampak dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang masih didominasi oleh lembaga eksekutif dalam mengeksekusi sebuah kebijakan. Lembaga legislatif merasa di- kebiri oleh eksekutif, padahal yang semestinya adalah peran dari masing-masing lembaga ini sama dalam penentuan kebijakan. Tertanamnya rasa saling menyaingi dalam menentukan sebuah regulasi yang mana anggota legislatif merasa haknya sudah tidak lagi mendapatkan porsi yang sesuai, begitupun sebaliknya lembaga eksekutif tidak merasa bahwa porsinya sudah melampaui dari porsi lembaga legislatif.

Ihwal pengembangan industri di Kecamatan Moncongloe, sebagaimana yang diwacanakan akan didirikannya perusahaan semen asal Negara China PT. Conch, yang diketahui mendapat respon penolakan dari berbagai kalangan yang berada di sekitar lokasi yang akan dijadikan sebagai objek perusahaan di Kecamatan Moncongloe. Juga diperoleh keterangan bahwa pihak lembaga eksekutif masih

menaruh harapan akan diberikannya izin kepada perusahaan semen asal Negera China PT. Conch dengan dalih akan mendatangkan devisa dan peningkatan ekonomi wilayah.

Semarak pengembangan industri di Kabupaten Maros di-antaranya industri PT. Semen Bosowa Maros dan juga adanya pabrik teh gelas PT. CS2, beragam tanggapan dan aspirasi warga masyarakat lokal. Ada yang setuju dengan alasan penyerapan tenaga kerja yang berkorelasi dengan peningkatan ekonomi masyarakat, dan tidak sedikit yang tidak setuju dikarenakan mengganggu cagar budaya dan kawasan karst yang berkorelasi dengan kerusakan lingkungan.

Selanjutnya, pengembangan industri di Kabupaten Maros juga diikuti dengan akselerasi di Kecamatan Marusu. Pengembangan industri ini berkaitan dengan visi-misi Bupati Maros dengan mem- perhatikan apa yang diharapkan oleh masyarakat, sebagaimana kondisi kekinian yang terdapat di Kecamatan Marusu yang diberi label sebagai wilayah penyangga bagi Kota Makassar dengan diantara Kecamatan Marusu dan Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar. Industri yang terdapat di Kecamatan Marusu adalah meliputi, industri pabrik kerupuk, pabrik kemasan gelas, dan industri pengolahan kayu di- tunjang dengan luasnya ketersediaan lahan yang diikuti dengan per- tumbuhan jumlah industri tiap tahunnya. Semarak perkembangan dan pertumbuhan industri ini juga disambut dengan antusias oleh masya- rakat lokal yang bermukim di sekitaran industri.

Berdasarkan informasi dari responden bahwasanya, industri yang terdapat di Kecamatan Marusu pada umumnya difokuskan di Kelurahan Patte‖ne. Luasnya lahan yang telah disediakan bagi para investor membuat kelurahan ini dipilih sebagai pusat kawasan industri. Oleh sebab itu, maka Kelurahan Patte‖ne direncanakan akan jadikan sebagai Ibukota Kecamatan Marusu. Ini disebabkan mayoritas dimasa yang akan datang Kelurahan Patte‖ne ini akan dijadikan sebagai kawasan pusat industri. Kawasan ini juga menampung Pabrik Parangloe dan juga pabrik kapur.

Dalam pengembangannya industri di Kabupaten Maros, juga tidak terlepas dari berbagai macam kepentingan dan kebijakan. Kepen- tingan dan kebijakan terakumulasi diantara multiaktor yang memiliki kepentingan. Multiaktor ini yang selanjutnya memiliki peran dalam membuat kepentingan. Multiaktor yang dimaksud adalah penguasa dan pengusaha yang sama-sama memiliki kepentingan dan keuntungan. Aktor penguasa memiliki kepentingan agar kawasan industri yang telah disediakannya akan ditempati oleh pengusaha, selanjutnya pengusaha yang memiliki kepentingan untuk mengembangkan dengan memper- timbangkan segala aspek keuntungan dan kepentingan di dalamnya yang telah mereka sepakati secara bersama dan seksama. Lebih lanjut, dalam pola relasi kuasa diantara penguasa dan pengusaha juga mereka menempuh jalur pendekatan yang dilakukan oleh kelompok pengusaha terhadap penguasa bertujuan untuk memperoleh izin. Pengembangan industri maupun perusahaan di Kecamatan Marusu, tidak terlepas pula dari incaran tangan-tangan penguasa yang masih memiliki pengaruh, jabatan, dan memiliki relasi khusus dengan penguasa.

Pada bagian wacana investasi dan perdagangan kelompok penguasa telah berhasil dalam mengantarkan wilayahnya untuk terlepas dari jeratan kemiskinan melalui peningkatan PAD bersumber dari pengembangan perusahaan yang selanjutnya disebut sebagai model penciptaan fenomena sosial pencitraan diri bagi penguasa dalam melanggengkan kekuasaannya yang seringkali juga meninggalkan warna kepartaiannya dalam membuat keputusan politik dan menge- sampingkan dirinya sebagai politisi, demi untuk melanggengkan ke- kuasaannya. Hal ini selaras dengan pemikiran Laclau dan Mouffe dalam reproduksi dan perubahan makna, dalam istilah umumnya, merupakan tindakan politik. Politik dalam teori wacana tidak harus dipahami sebagai misalnya, politik ke-partai-an yang sebagian besar hanya membicarakan representasi politik dan kekuasaan. Akan tetapi, politik dilihat sebagai konsep yang luas dan mengacu pada bagaimana cara kita menyusun fenomena sosial dengan cara-cara yang meniada- kan cara-cara yang lain. Laclau dan Mouffe memahami politik sebagai

organisasi masyarakat dari satu sisi tertentu dengan cara tertentu yang meniadakan semua kemungkinan adanya cara yang lain.

Oleh sebab itu, politik tidak hanya merupakan permukaan yang merefleksikan realitas sosial yang lebih luas, melainkan organisasi sosial yang merupakan hasil proses sosial politik yang terus menerus. Seperti misalnya bila terjadi suatu perjuangan antara wacana-wacana tertentu, maka terlihat dengan jelas bahwa para aktor yang berbeda sedang berusaha mempromosikan cara-cara yang berbeda dalam meng-organisasikan masyarakat. Pada posisi seperti ini, konsep hegemoni muncul antara _objektivitas' dan politik. Sama seperti sesuatu yang objektif yang dapat menjadi bersifat politik dengan berjalannya waktu, konflik yang mencuat bisa menghilang dan memberi jalan munculnya objektivitas karena satu perspektif dinaturalisasikan dan lahirlah kon- sensus. Perkembangan dari konflik politik ke objektivitas akan senan- tiasa melewati garis intervensi hegemonis.

Konsep kekuasaan dalam pendekatan Laclau dan Mouffe erat kaitannya dengan konsep politik dan objektivitas (Laclau, 1990). Kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki orang-orang dan dilaksanakan terhadap orang lain, melainkan sesuatu yang dapat menghasilkan dunia sosial. Kelihatan aneh jika menggunakan kata
_kekuasaan' untuk menggambarkan kekuatan dan proses yang dapat menciptakan dunia sosial kita dan membuat dunia sosial tersebut ber-makna bagi kita. Namun demikian, hal yang utama bahwa pemahaman tentang kekuasaan ini menekankan adanya ketergantungan dunia sosial. Kekuasaanlah yang menciptakan pengetahuan kita, identitas kita dan bagaimana kita berhubungan satu sama lain sebagai kelompok atau individu. Pengetahuan, identitas, dan hubungan sosial tergantung; pada waktu tertentu, ketiganya melahirkan suatu bentuk tertentu, namun bisa saja dan bisa menjadi berbeda.

Ahasil, kekuasaan itu sifatnya produktif maksudnya bisa meng-hasilkan dunia sosial dengan cara-cara tertentu. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang bisa dibuat menjadi tidak ada, tapi sangat tergantung kepada penghidupannya yang berada dalam suatu tatanan sosial dan

tatanan sosial selalu tercipta dalam kekuasaan, namun demikian kita tidak tergantung pada kehidupan pada tatanan sosial tertentu, dan pe- niadaan tatanan-tatanan sosial yang lain juga merupakan salah satu efek kekuasaan. Di satu sisi, kekuasaan menghasilkan dunia yang dapat dihuni yang memang diperuntukkan bagi kita dan di sisi lain kekuasaan dapat menghalangi kemungkinan-kemungkinan alternatif.

C. Transparansi dan Akuntabilitas Daerah

Eksplorasi wacana yang dilakukan untuk mengetahui motif penyelewengan anggaran pada penelitian ini, mengungkapkan be- berapa motif dasar yang mendorong pengusaha untuk melakukan penyelewengan anggaran, dintaranya; penyelewengan Anggaran Pen- dapatan Belanja Daerah/Pendapatan Asli Daerah, penyelewengan dana Bantuan Sosial, penyelewengan pengerjaan proyek, serta mutu dan kualitas kerja perusahaan melalui proyek. Tipologinya memiliki masing-masing perbedaan, sebagaimana yang diungkapkan pada pem- basahan sebelumnya, tidak terlepas dari kedekatan pengusaha dengan penguasa, maupun penguasa yang juga sekaligus aktor sebagai peng- usaha dalam mengelola anggaran negara. Motif wacana terkuat yang paling seringkali muncul adalah penyelewengan anggaran APBD/ PAD, diantara multiaktor yang memiliki kepentingan, sebagaimana yang diwacanakan pada masa kepemimpinan Bupati Maros periode tahun 1999-2004 dan tahun 2005-2010 adalah Drs. H. A. Nadjamuddin Aminullah, M.S. yang memproduksi wacana tentang Dewan Per- tanyakan Realisasi APBD 2002 (Bupati: Perolehan PAD Bakal Meningkat). Menurutnya, untuk menjelaskan pertanyaan dari beberapa wakil rakyat yang duduk di legislatif dia mengupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros dengan melakukan cara penyempurnaan kebijakan melalui rapat kerja serta partisipasi dari masyarakat Maros (Koran Fajar {Metro Makassar}, edisi Sabtu, 22 Juni 2002. *Dewan Pertanyakan Realisasi APBD 2002, Bupati: Perolehan PAD Bakal Meningkat*).

Data wacana selanjutnya yang memiliki kemiripan yang sama, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabaghumas) Pemkab Maros Drs. A. Anwar dan juga Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Maros Muslimin Abbas, tentang dana bantuan eksodus diselewengkan (tim klarifikasi: bukan tanggung jawab tim). Menurutnya, masalah yang ditudukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial (Diksos) Maros seharus- nya ditangani sendiri instansi bersangkutan, bukan masalah dilimpah- kan ke tim. Karena itu tim hanya bertugas mengumpulkan data di lapangan dan mengklarifikasi data tersebut. Dengan demikian tugas tim bukanlah menjawab pertanyaan yang ditudukan ke Diksos (Koran Fajar {Metro Makassar}, edisi Rabu, 13 November 2002. *Dana Bantuan Eksodus Diselewengkan, Tim Klarifikasi: Bukan Tanggung Jawab Tim*).

Lebih lanjut wacana tersebut bergulir dan diproduksi oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Kadis Diksos) Drs. Sudarman, M.Si., tentang eksodus lanjutan dana bansos di Maros (DPRD belum tahu, kadis: itu belum darurat). Menurut Sudarman, pada dasarnya bantuan yang digunakan untuk para eksodus itu bersifat darurat, sehingga bisa disamakan dengan bantuan korban bencana alam. Oleh karena itu, sifat bantuannya adalah darurat, maka tidak dapat di- tetapkan jumlah dan bentuknya. Jadi bantuan itu bisa berubah sesuai dengan keadaan kondisi yang ada (Koran Fajar {Metro Makassar}, edisi Rabu, 19 November 2002. *Eksodus Lanjutan Dana Bansos di Maros; DPRD Belum Tahu, Kadis: itu Belum Darurat*).

Pernyataan wacana tersebut menandakan bahwa terdapat keter- kaitan logis antara penguasa yang mengelola anggaran negara, meng- gunakan anggaran yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Adanya penyimpangan yang mengatasnamakan bantuan sosial. Sama halnya yang terdapat pada data wacana yang diproduksi oleh Wakil Bupati Drs. H. A. Paharuddin, M.M., tentang Sudarman terkait kasus Dana Eksodus? Penyebab pencopotan Drs. Sudarman, M.Si., dari jabatannya sebagai Asisten III Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Maros terus memunculkan reaksi kontroversi. Keterlibatan yang bersangkutan yang sulit untuk dibuktikan, terlebih tidak seorang pun pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros yang bersedia untuk memberikan keterangannya terkait dengan pencopotan Sudarman sebagai Asisten III Pemkab Maros. Sudarman yang ketika itu tidak memiliki lagi jabatan, sehingga pada akhirnya penggantinya pun telah dilantik sebagai pejabat enggan mengomentari hal tersebut. Demikian halnya dengan respon Wakil Bupati Maros Drs. H. A. Paharuddin, M.M., juga eggan untuk terlalu panjang dalam mem- berikan komentarnya terkait dengan pencopotan Sudarman dari jabatannya sebagai Asisten III Pemkab Maros (Koran Fajar {Metro Makassar-Sungguminasa}, edisi Sabtu, 11 Oktober 2003. *Sudarman Terkait Kasus Dana Eksodus?*).

Selanjutnya, data wacana yang diproduksi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, tentang Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros siap ungkap kasus proyek pembangunan permukiman kota terpadu (P3KT) yang terbengkalai. Hal ini di duga oleh karena terdapatnya indikasi penyimpangan dana yang mengakibatkan keresahan di kalangan warga masyarakat Kabupaten Maros. Proyek ini dilaksanakan oleh Dinas PU Maros sejak tahun 2001. Proyek ini sedianya dilaksanakan oleh Dinas PDAM Kabupaten Maros namun pada akhirnya di tolak oleh Dinas PDAM Kabupaten Maros sendiri dengan alasan proyek ini mengalami kesalahan terhadap Bisteknya. Proyek ini memerlukan biaya sebesar Rp.10.000.000.000 yang bersumber dari APBN tahun 2001 dan juga Bantuan Luar Negeri (BLN) (Koran Fajar {Metro Makassar}, edisi Jum‖at, 21 Maret 2003. Kejaksaan Negeri {Kejari} *Maros Siap Ungkap Kasus Proyek Pembangunan Permukiman Kota Terpadu {P3KT} yang terbengkalai*). Data wacana yang diproduksi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros tentang kasus Proyek Pembangunan Permukiman Kota Terpadu (P3KT), diduga terjadi pelanggaran dan penyimpangan Bistek proyek yang pembiayaannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Beranjak dari data wacana praktik kongkalikong diantara penguasa dan pengusaha wacana tahun 1999-2009 di mana terdapat wacana yang diproduksi oleh media online Liputan 6.com., tentang empat kontraktor dan dua PNS Maros dipenjara. Empat kontraktor dan dua pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, baru-baru ini, dijebloskan ke Sel Lembaga Pemasyarakatan Batangase yang terletak di Kabupaten Maros. Dugaan yang dituduhkan adalah kaitannya dengan kasus korupsi pembangunan pasar dan Kantor Dinas Bupati Maros Nadjamuddin Aminullah, senilai Rp 5,8 miliar. Keenam koruptor yang dipenjara itu adalah pimpinan proyek Helmi Abidin. Selain pimpinan proyek, Helmi juga berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Maros. Pengawas proyek sekaligus PNS Pemkab Maros, Risnandar juga mengalami nasib yang sama. Sementara keempat lainnya adalah kontraktor proyek yakni Ridwan, Basri, Yusri, dan Basir. Awalnya keenam koruptor itu sempat kaget tak menyangka langsung ditahan. Setelah diperiksa selama beberapa jam oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Maros, tiba-tiba mereka digiring paksa ke mobil tahanan Kejari Maros (Liputan 6.com.2014. *Empat Kontraktor dan Dua PNS Dipenjara*).

Selanjutnya motif yang dilakukan oleh oknum PNS bersama oknum kontraktor yang dengan sengaja melakukan praktik kecurangan dengan memanipulasi anggaran proyek pembangunan yang sedianya untuk peruntukan fasilitas umum pasar sentral dan pembangunan Kantor Bupati masing-masing berlokasi di wilayah Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale. Praktik kecurangan ini nampak dengan jelas permainan kongkalikong yang dilakukan oleh oknum PNS dan kotraktor, sebagai penyebab lemahnya pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah. Alhasil, praktik kecurangan ini dapat dengan mudahnya dikelabui melalui kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Faktor *opportunities* lainnya dari data wacana ini adalah PNS dengan mudahnya memainkan dan mengubah anggaran yang tidak sesuai dengan kontrak kerja saat

proyek itu ditenderkan, sehingga hasil kerjanya pun tidak maksimal dan memuaskan.

Sehubungan perihal kualitas proyek yang telah dikerjakan oleh pihak kontraktor yang diberi kuasa melalui kontrak kerja dengan pihak pemerintah. Maka beranjak dari wacana pada tahun 1999-2009 yang dimulai dari dalil wacana yang diproduksi oleh Lembaga Legislatif Kabupaten Maros tentang dewan bantah intervensi dapur kontraktor. Kalangan Dewan di Maros secara khusus yang duduk di Komisi D, membantah disebut mengintervensi dapur kontraktor. Menurut ketua komisi, Drs. H. Nurdin Sadik, bahwa apa yang dilakukan komisi D telah sesuai dengan fungsi kontrolnya dan kewenangan yang dimiliki. Komisi menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan tata tertib dewan. Jadi bukan mengintervensi dapur kontraktor (Koran Fajar
{Metro Makassar}, edisi Selasa, 29 Februari 2000. *Dewan Bantah Intervensi Dapur Kontraktor*).

Dalam data wacana tersebut, diduga lembaga legislatif telah me- lakukan intervensi program dan hasil kerja kepada kontraktor yang melakukan pengerjaan proyek pemerintah. Hal ini disebabkan faktor ketidakmaksimalnya hasil kerja yang telah dikerjakan oleh kontraktor. Dampaknya, hasil kerjanyapun asal-asalan disebabkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kontraktor tersebut belum maksimal. Namun demikian muncul juga sanggahan dari anggota lembaga legislatif yang diwakili oleh Ketua Komisi D yang secara tegas membantah dugaan tersebut. Ketua Komisi D yang berdalih selama ini lembaga legislatif hanyalah melakukan pengawasan bukan intervensi sebagaimana yang diwacanakan.

Untuk itu dalam data wacana yang diproduksi oleh Ketua Gapensi Maros periode 2002-2006, Ilham Burhanuddin S.H., M.B.A, menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh DPRD Maros khususnya komisi D yang membidangi masalah pembangunan, sudah sesuai tugas dan kewenangannya selaku wakil rakyat. Gapensi Maros mendukung sepenuhnya langkah dewan untuk melakukan pengawasan di lapangan terhadap kontraktor anggota Gapensi (Koran Fajar {Metro Makassar},

edisi Selasa, 29 Februari 2000. *Dewan Bantah Intervensi Dapur Kontraktor*).

Berdasarkan data wacana yang diproduksi oleh Ketua Gapensi Maros, sudah melakukan klarifikasi sekaligus adanya intimidasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Ketua Gapensi mengatakan apa yang selama ini dilakukan oleh lembaga legislatif telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga wakil rakyat yang turut serta dalam pengawasan pembangunan pemerintah yang dikerjakan oleh kontraktor. Selanjutnya, data wacana yang diproduksi oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros tentang Pemkab-PT.GI kerjasama tingkatkan RSUD Maros. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros nampaknya sudah geram melihat kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang yang sejak beberapa hari terakhir menjadi sorotan berbagai kalangan. Pemkab tidak tinggal diam mereka terus menerus mencari terobosan untuk bisa meningkatkan kualitas rumah sakit. Salah satu keluhan yang dirasakan ialah keterbatasan peralatan yang terdapat di RSUD Salewangang Maros. Terbukti dari hasil kerja keras pihak Pemkab Maros akhirnya mendapat sambutan dari pihak perusahaan swasta bernama PT. Graha Ismaya. Selanjutnya, PT. Graha Ismaya inilah yang kemudian akan menyupali peralatan rumah sakit yang menjadi kebutuhan pihak RSUD Salewangang Maros.

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Bupati Maros periode tahun 2001-2011, Drs. H. A. Nadjamuddin Aminullah, M.S., menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Maros beserta jajaran Dinas Kesehatan sedang mengusahakan pengadaan alat-alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Bukan itu saja, pihak Pemkab juga mengusahakan bantuan dari Dinas Kesehatan (Dinkes). Hal ini dibuktikan dengan kesiapan Direktorat Jendral (Dirjend) Kesehatan yang akan memberikan bantuan satu unit mobil ambulance (Koran Fajar (Metro Makassar). Edisi Kamis, 14 Maret 2002. *Pemkab-PT.GI Kerjasama Tingkatkan RSUD Maros*).

Dari data wacana yang didalilkan oleh Bupati Nadjamuddin Aminullah, diperoleh data bahwa pihak penguasa akan melakukan upaya pengoptimalisasi segala bentuk pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Maros. Pihaknya juga melakukan pengawasan secara ketat agar kualitas proyek pemerintah hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya, data wacana yang diproduksi oleh Ketua BPD Ardin dan juga Ketua Gapensi Maros Ilham Burhanuddin, S.H., MBA., menyatakan bahwa dalam menghadapi tantangan persaingan bisnis ke depan menyusul pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) pada tahun 2003 mendatang. Para pelaku usaha di daerah Buttasalewangang ini bertekad menjadi pelaku ekonomi atau pemain di daerahnya sendiri. Untuk mewujudkan tekad tersebut kalangan pengusaha berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros dan Institusi lainnya sebagai mitra di daerah agar lebih membuka diri, sehingga pengusaha lokal benar-benar memiliki kesiapan. Ihwal kesiapan tergantung kesempatan yang ada, jika peluang ada pastinya kita manfaatkan. Namun demikian bila kita tidak diberi kesempatan, kapan siapnya (Koran Fajar {Metro Makassar}, edisi Selasa, 26 Maret 2002. *Pengusaha Pengadaan Harap Pemkab Terbuka*).

Berdasarkan data wacana, Gapensi mengharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Mitra lainnya di Kabupaten Maros masih tertutup dalam memberikan informasi kepada pengusaha daerah. Hal ini dinilai sangat menyulitkan pengusaha daerah sebab banyak aktivitas ekonomi atau usaha yang tidak terantisipasi. Wacana lain juga yang diproduksi oleh Bupati Maros Drs. H. A. Nadjamuddin Aminullah, M.S., tentang SDM rendah, kualitas proyek jelek (Bupati: kontraktor perlu belajar). Pekerjaan proyek jalan dan gedung di Kabupaten Maros saat itu sangatlah rendah yang membuat kekhawatiran di kalangan masyarakat. Hal ini juga diakui oleh Bupati Maros periode tahun 2001- 2011, Drs. H. A. Nadjamuddin Aminullah, M.S., yang mengatakan bahwa hampir semua kontraktor di Maros memiliki kemampuan yang minim, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dari alat peralatan proyek tersebut. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh

tersebut masih jauh dari harapan ihwal kualitas proyek tersebut (Koran Fajar {Metro Makassar}, edisi Sabtu, 29 Juni 2002. *SDM Rendah, Kualitas Proyek Jelek; Bupati: Kontraktor Perlu Belajar*).

Dari data wacana yang didalilkan oleh Bupati Maros Nadjamuddin Aminullah, diketahui bahwa masih terdapatnya beberapa kontraktor yang memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah kualifikasi yang diharapkan oleh pemerintah. Ini diketahui dari hasil kerja yang dilakukan oleh para kontraktor hasilnya dinilai kurang memuaskan, sehingga menimbulkan pertanyaan kritis mengapa pada saat proses lelang, kontraktor yang dinilai memiliki standar SDM yang rendah bisa lolos sewaktu mengikuti tender pengadaan? Apakah erat kaitannya dengan relasi pengusaha dengan kelompok penguasa, serta adakah bentuk kesepakatan lainnya yang bersifat misteri untuk di- telusuri? Kondisi seperti inilah yang seringkali diketemukan di hampir pelosok wilayah Indonesia yang bukan hanya terdapat di Kabupaten Maros.

Selanjutnya, wacana yang didalilkan oleh Ketua Legislatif Kabupaten Maros Dari Komisi D, H. Zainuddin Tarang, tentang Komisi D segera panggil Pimpro Stadion Kassi Kebo. DPRD Maros berjanji akan segera memanggil Pimpinan Proyek (Pimpro) pem- bangunan Stadion Kassi Kebo yang belakangan ini mendapat sorotan masyarakat. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan belum ada peng- umuman lelang. Padahal proyek tersebut sudah dikerjakan. Menurut Ketua Komisi D H. Zainuddin Tarang, bahwa pemanggilan Pimpinan Proyek (Pimpro) dimaksudkan untuk meminta klarifikasi mengenai pelaksanaan proyek tersebut. Komisi yang menangani pembangunan tersebur menghawatirkan adanya penyimpangan dikemudian hari. Karena itu sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya tindakan yang tidak diinginkan, maka Komisi D DPRD Maros merasa perlu meminta klarifikasi kepada Pimpro tersebut (Koran Fajar {Metro Makassar- Sungguminasa}. Edisi Jum‖at, 10 Oktober 2003. *Komisi D Segera Panggil Pimpro Stadion Kassi Kebo*).

Data wacana ini menunjukkan keganjilan tersendiri, disebabkan proyek telah lebih dulu dikerjakan sementara proses penantian pengumuman lelang masih berjalan. Data wacana ini menimbulkan keraguan tersendiri di mana letak profesionalitas dari kelompok penguasa dalam menyelenggarakan lelang proyek pemerintah? Domain dalam pengerjaan proyek kontraktornya adalah mereka yang seringkali diduga melakukan pelanggaran. Setidaknya ada upaya tindak tegas dari pemerintah untuk menindaklanjuti pengaduan dan juga data wacana yang berkembang dan ada di mana-mana ini. Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pengerjaan proyek yang berujung kerugian negara. Beranjak dari temuan tersebut bahwasanya wacana kesejahteraan yang seringkali didalilkan oleh lembaga ekse- kutif masih sejalan dengan pandangan Foucault (1972), wacana di- cirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi dan perspektif yang paling dipercaya dan dianggap benar. Produksi dan reproduksi wacana dalam arena pertarungan multi-kepentingan akan menghasilkan pola wacana yang dominan dan wacana yang terpinggirkan sebagai efek dari kontestasi.

Lembaga eksekutif memproduksi wacana melalui keberadaan pengembangan perusahaan untuk kesejahteraan sedangkan disisi lain penguasa dari kalangan lembaga legislatif seringkali tidak mengetahui program pengembangan perusahaan tersebut. Alhasil, dikemudian hari baru diketahui bahwasanya lembaga eksekutif telah menjalin kerjasama dengan pengusaha maupun investor untuk melakukan pengembangan perusahaan maupun untuk membenamkan sahamnya. Pandangan wacana lain yang diproduksi oleh penguasa dari lembaga eksekutif adalah dengan adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang selama masa pengembangan perusahaan-perusahaan besar juga mem- bantu warga masyarakat dalam hal pembangunan masyarakat, selain itu juga berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros. Dampak seperti inilah yang menjadi daya dorong bagi penguasa lembaga eksekutif untuk melakukan kerjasama, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya sumber dari peningkatan PAD

hanya sebagian besar saja dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Maros, oleh karena sumber lain dari peningkatan PAD juga bersumber dari sektor pariwisata, pertanian, dan sektor-sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Maros.

Dalam kritikannya penguasa mendalilkan wacana bahwasanya hasil kerja pengusaha tidak sesuai dan tidak optimal yang jauh dari harapan. Anggaran yang ditawarkan dengan hasil kerja juga tidak sesuai dengan realita yang ada. Namun demikian, kontraktor melalui organisasinya Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (Gapeknas), Asosiasi Kontraktor Indonesia (Askrindo) juga mendalilkan wacana bahwasanya pemerintah daerah seringkali terlambat dalam realisasi anggaran. Selanjutnya, keter- lambatan ini membawa dampak negatif terhadap hasil kerja yang di- laksanakan oleh kontraktor tersebut. Anggaran yang sedianya adalah bersumber dari APBD. Hal inilah yang sering berputar dan berkutat di daerah untuk mengadakan pendekatan terhadap kelompok kekuasaan eksekutif yang sedianya adalah pengelola APBD. Beranjak dari konstruksi wacana ini, maka relasi pengusaha dan penguasa juga ber- main pada tatanan struktur sosial dan materialnya.

Struktur sosial yang bermain adalah faktor kedekatan diantara penguasa dengan pengusaha. Pengusaha seringkali memanfaatkan faktor kedekatan untuk selanjutnya melakukan lobi-lobi politik dalam hal anggaran maupun meloloskan kegiatan rencana proyek yang akan dilakukan di daerah. Sementara struktur materialnya meliputi ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Seberapa besar keuntungan dari pengerjaan proyek tersebut umumnya juga berasal dari masukan multi aktor yang memiliki peran dalam meloloskan proyek untuk selanjutnya dikerjakan. Alhasil, ketika dilakukan evaluasi maka hasil yang diharap- kan jauh dari kenyataan. Dimensi ini yang seringkali membuat warga masyarakat menjadi gamang. Di satu sisi proyek itu adalah sebagai fasilitas dan sarana utama dalam mendukung segala kegiatan, namun di sisi lain proyek tersebut tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh warga masyarakat. Asumsi dasar yang selama ini menggurita di

kalangan warga masyarakat bahwasanya pengusaha yang tidak me- miliki akses langsung kepada kelompok penguasa, sehingga secara optimal mereka tidak dapat mengelola sumber daya alam oleh karena- nya sumber daya alam tersebut sudah menjadi bagian dari skenario dari kelompok penguasa untuk memberikannya kepada kelompok peng- usaha yang secara khusus memiliki kedekatan (patron klien) juga belum bisa dibantahkan.

Pembuktian ini diperoleh dari eksplorasi hasil penelitian dan di- dukung dengan hasil wawancara dengan informan. Pengusaha yang masih memiliki kualitas jam kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah dapat mengakses proyek maupun program dari pemerintah. Meskipun kualitas proyeknya di kemudian hari tidak sesuai dengan harapan, namun pengusaha ini masih tetap dijadikan sebagai rekanan bagi penguasa. Selain pengusaha yang memiliki relasi dengan ke- lompok penguasa yang ikut tender proyek yang mana anggarannya tidak sesuai dengan harga penawaran masih tetap diloloskan perihal tender tersebut yang mengakibatkan hasilnya yang tidak maksimal. Lebih lanjut diantara kelompok penguasa diketahui bahwa Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) juga memiliki relasi politik dengan penguasa, relasi politik yang dimaksudkan adalah Ketua HIPMI tersebut juga menjabat sebagai bendahara Partai Amanat Nasional (PAN) DPC Kabupaten Maros. Fenomena inilah yang kemu- dian seringkali marak terjadi praktik-praktik kecurangan yang merugi- kan negara, hasil kerja dan kualitas dari proyek tidak optimal sebagai- mana yang didengung-dengungkan dalam pembangunan daerah.

D. Realisasi Proyek Pembangunan

Pada bagian ini menyajikan wacana proses pengerjaan proyek perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan, sebagaimana yang diproduksi oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Polda Sulselbar), melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kombes Pol. Chevy Sopari, tentang Kadis Pertambangan Maros tersangka korupsi peng-

adaan lampu jalan. Adanya dugaan kasus korupsi dalam proses peng-adaan barang dan jasa pemasangan lampu hias jalan di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2011 menguat. Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sulselbar menetapkan Rahmat Bustar (Kepala Dinas Pertambangan) sebagai tersangka, sebagaimana yang ditegaskan bahwa ada yang tidak sesuai dalam proses pelaksanaan proyek tersebut. Tepatnya Keppres 60 sesuai dengan ketentuan pengadaan dengan anggaran di atas Rp.100.000.000., harus melalui tender. Proyek lampu hias jalan tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp.1.452. 000.000., yang anggarannya bersumber dari APBD Maros (Koran Fajar {Metropolis-Gowa-Maros}, edisi Kamis, 12 April 2012. *Kadis Pertambangan Maros Tersangka Korupsi; Pengadaan Lampu Hias*).

Pernyataan data wacana tersebut menandakan pihak penguasa diduga menyelahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya melalui berbagai kegiatan proyek. Proyek yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas infrastruktur demi pening- katan kesejahteraan, malah menjadi sebuah pendorong untuk melaku- kan tindakan penyimpangan melalui penyelewengan anggaran, lewat kekuasaan yang dimiliki oleh aktor. Penyelewengan kekuasaan ini melalui anggaran dan juga kebijakan yang mengarah kepada kepentingan pribadi maupun kelompok, tidak berpihak kepada warga masyarakat. Akibatnya penyelewengan anggaran dan kebijakan di tangan-tangan penguasa ini dapat merugikan negara utamanya warga masyarakat yang sesegera mungkin dapat menikmati pembangunan di wilayahnya.

Data wacana tersebut tidak saja di diamkan oleh penguasa yang memiliki domain kepentingan di dalamnya, olehnya mereka me- nyanggah wacana sebelumnya digulirkan. Sebagaiman data wacana melalui respon pembelaan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Maros Rahmat Bustar, S.E., M.M., mengatakan bahwa proses pengadaan tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat. Dengan kata lain seluruh mekanisme dari proses pengadaan tersebut masih dilakukan pejabat sebelumnya yakni,

Drs. M Nawir, M.M., terkait

mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut saya menegaskan sama sekali tidak mengetahuinya (Koran Fajar {Metropolis-Gowa-Maros}, edisi Kamis, 12 April 2012. *Kadis Pertambangan Maros Tersangka Korupsi; Pengadaan Lampu Hias*).

Pernyataan data wacana sanggahan yang dilakukan oleh Rahmat Bustar, juga mendapat wacana perlawanan yang menuju pada reproduksi wacana oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Polda Sulselbar), melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kombes Pol. Chevy Sopari, tentang Polisi sudah periksa delapan saksi. Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Sulselbar telah me- meriksa delapan saksi dalam kasus pengadaan lampu hias pada tahun 2011. Sementara yang ditetapkan sebagai tersangka baru satu orang yakni, Rahmat Bustar yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Maros. Dalam keterangannya menurut Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes. Chevi Ahmad Sopari, mengatakan telah menguatkan status Rahmat Bustar sebagai tersangka. Menunggu hasil audit dari BPKP, untuk kerugian negara dalam pengadaan lampu hias jalan di Kabupaten Maros ini sebesar Rp.1.400.000.000. Ber- dasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) nantinya akan terus dikembangkan apakah ada tersangka baru atau hanya satu saja yang ditetapkan sebagai tersangkan, hal itu ter-gantung dari pengembangan kasusnya nanti. Sebelumnya Rahmat Bustar menolak penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Sulselbar. Alasannya dia baru menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros saat itu (Koran Fajar
{Metropolis-Gowa-Maros}, edisi Kamis, 12 April 2012. *Kadis Pertambangan Maros Tersangka Korupsi; Pengadaan Lampu Hias*).

Informasi data wacana ihwal dugaan korupsi pengadaan lampu hias pada tahun 2011, juga disambut dengan wacana yang diproduksi oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, Farhan, S.H., M.H., bahwa Kejari Maros mulai usut dugaan korupsi penerangan jalan 2014. Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari)

Maros sementara melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan tiang tunggal yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp.1.400.000.000. Proyek tersebut mulai dari jalan poros Kota Maros sampai perbatasan Makassar, oleh Dinas Per- tambangan dan Energi Maros (Distamben Maros) yang dikerjakan oleh CV. Anugrah Perdana, sebagaimana yang ditegaskan informan Farhan, bahwa pihaknya masih mengumpulkan informasi dan data-data terkait dugaan pencairan anggaran seratus persen pada tahun 2014 lalu, sebelum pengerjaannya rampung oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Maros, Drs. E.K. Mustafa, M.M., kepada pemenang tender proyek tersebut. Kasus ini masih dalam proses pengkajian dan pengumpulan data dan informasi oleh bagian Intel Kejari Maros (Tribun News.com.2015. *Kejari Maros Mulai Usut Dugaan Korupsi Penerangan Jalan 2014*).

Semarak praktik penyelewengan anggaran berujung pada praktik korupsi berdasarkan wacana yang berkembang, sehingga menjadi magnet perhatian akan munculnya pemerhati Anti Korupsi dan Penyelewengan Anggaran dalam menyoroti kasus ini. Fenomena ini nampak seperti yang didalilkan oleh Salewangang Corruption Watch (SCW), melalui koordinator SCW Akbar Hasan Dg. Polo, tentang kawal kasus korupsi. Lembaga anti korupsi yang mengatasnamakan dirinya sebagai Salewangang Corruption Watch (SCW), sebagaimana yang ditegaskan informan Akbar Hasan Dg. Polo, bahwa pihaknya sedang mengusut kasus korupsi yang saat ini sedang mencuat ke per- mukaan. Dua diantaranya adalah kasus pengadaan lampu hias dan bantuan sosial pendidikan yang sementara ditangani oleh Polda Sulselbar. Jika kasus ini tidak dikawal maka bisa jadi kasus-kasus korupsi hilang secara tiba-tiba. Pihak kami (SCW) memiliki komitmen akan mengawal segala bentuk penyelewengan anggaran yang terjadi di Kabupaten Maros. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk untuk mem- bersihkan Maros dari kasus korupsi (Koran Fajar {Metropolis-Gowa-

Maros}, edisi Sabtu, 14 April 2012. *Polisi Sudah Periksa Delapan Saksi*).

Selanjutnya eksplorasi data wacana berkenaan dengan lanjutan penyelewengan anggaran dengan praktik kongkalikong diantara penguasa dan pengusaha dalam atmosfer politik Kabupaten Maros. Landasan utama data wacana adalah wacana keterlibatan oknum anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kontraktor (pengusaha) yang kedapatan bersenggamah menyalahgunakan wewenang kekuasaannya dan menyelewengkan anggaran pembangunan yang sumber dananya dari negara, kasus korupsi lampu hias yang diduga dilakukan oleh Rahmat Bustar (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, periode 2010- 2012), atas dugaan wacana seringkali melakukan manipulasi proyek yang dilakukan oleh Drs. Abdul Salam (Kepala Dinas Pekerjaan Umum, 2010-2015), ihwal kongkalikong diantara penguasa dan peng-usaha dalam mengerjakan proyek pemerintah

Data wacana praktik kongkalikong semakin menggelinding bagai bola salju yang kemudian disambut melalui wacana yang di- dalilkan Aliansi Mahasiswa Garda Keadilan (AMGK), Awaluddin, tentang Kadis PU diduga manfaatkan kontraktor plat merah ambil alih sejumlah proyek. Adanya indikasi praktik mafia proyek di lingkup Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Maros. Pihaknya menilai bahwa kontraktor plat merah kembali hadir untuk memanfaatkan proyek-proyek pembangunan jalan di Kabupaten Maros.

Informan Awaluddin, menegaskan bahwa tim investigasi AMDK melalui pesan rilisnya ke Koran Makassar Online. Dalam penemuan dan investigasinya, Tim ini menganggap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) mengambil alih berbagai proyek per- baikan dan pembangunan jalan di Kecamatan Marusu, Simbang, Bantimurung, Bontoa, dan Tanralili. Dari hasil Investigasi, pihaknya menemukan bahwa Kadis PU Kabupaten Maros menggunakan nama dan Perusahaan lain untuk mengamankan dirinya dalam proyek milyaran dan ratusan juta rupiah tersebut, akan tetapi Kepala Dinas PU yang menjadi aktor utama dibalik proyek tersebut.Terdapatnya

penyimpangan dari konstitusi yang ada, khususnya UU No.31 tahun 2014 dan PP No.53 Tahun 2010 penyalahgunaan wewenang dan ber- akibat pada tindak pidana korupsi. Makanyakami akan secara dalam mengkaji hal ini, dan jika data sudah kuat, maka tim ini akan melaku- kan langkah lebih lanjut di manakami akan mengkaji hal ini lebih dalam lagi, dan jika data sudah kuat, maka kami akan melakukan gerakan yang menurut kami benar dan sah untuk menuntut keadilan dan kebenaran (Koran Makassar Online. 2015. *Kadis PU diduga manfaatkan kontraktor "plat merah" ambil alih sejumlah proyek*).

Informasi data wacana menguatkan indikasi bahwa praktik kongkalikong proyek yang dilakukan oleh oknum Kepala Dinas Pekerjaan Umum kuat adanya sebagai bukti penyimpangan kekuasaan dan wewenang. Motif yang dilakukan adalah dengan mengerjakan proyek dengan menggunakan kontraktor plat merah. Alhasil, dari wacana tersebut mendapat respon kritis dari Aktivis Aliansi Mahasiswa Untuk Perubahan (Ampuh) melalui Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Abrar Rahman, tentang pemuda LIRA Maros desak Bupati evaluasi SKPD. Aktivis yang ter- gabung dalam Aliansi Mahasiswa Untuk Perubahan (AMPUH) Kabupaten Maros agar mendesak Bupati Maros Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M., untuk segera mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Maros, Drs. Abd Salam.

Abrar Rahman menegaskan bahwa dari hasil investigasi dan diskusi yang mereka lakukan apa yang menjadi desakannya itu cukup beralasan. Diantaranya, pertama, Kadis PU terindikasi kuat ikut mengerjakan proyek pemerintah meskipun secara tidak langsung, tetapi menunjuk rekanan atau kontraktor yang itu-itu saja. Kedua, proses tender proyek yg tidak transparan karena penuh nuansa KKN. Ketiga, rendahnya kualitas pekerjaan proyek disebabkan pengawas internal di Dinas PU tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Keempat, Kadis PU tidak berani dan tidak tegas melakukan upaya black listbagi para kontraktor yang pekerjaannya buruk selama ini. Hal ini menunjukkan ketidak profesionalan seorang kepala dinas. Kelima, Abd Salam selaku

Kepala Dinas PU Maros sudah cukup lama menjabat sebagai kepala dinas namun miskin prestasi. Fakta di lapangan menunjukkan kualitas proyek sangat rendah di mana-mana. Contohnya saja jalan beton yang dibangun sekarang usianya belum setahun tapi sudah mulai rusak. Menurutnya tidak ada alasan bagi Bupati Maros untuk mempertahankannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros seharusnya memaksimalkan fungsi pengawasan mereka dengan melakukan evaluasi menyeluruh secara transparan terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)di seluruh wilayah Kabupaten Maros, utamanya Kadis PU (Abrar Rahman.com. 2014. *Pemuda LIRA Maros Desak Bupati Evaluasi SKPD*).

Data wacana tersebut terus bergulir hingga pada upaya produksi data wacana yang bergulir yang masih didalilkan oleh Aktivis Aliansi Mahasiswa Untuk Perubahan (Ampuh) melalui Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Lumbung Informasi Rakyat (Lira), Abrar Rahman. Beberapa organisasi mahasiswa dan organisasi pemuda di Kabupaten Maros yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Untuk Perubahan (Ampuh) mendesak Bupati Maros, Ir. H.M. Hatta Rahman, M.M., untuk segera mencopot Drs. Abdul Salam., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Maros. Mahasiswa menuding Kadis PU Abdul Salam terindikasi kuat ikut mengerjakan proyek pemerintah, meskipun secara tidak langsung, akan tetapi dia menunjuk rekanan atau kontraktor yang itu saja dan semua ia lakukan dengan tidak transparan.

Abrar Rahman, kembali menegaskan bahwa penciptaan jabatan tersebut sudah sangat bersifat urgen di mana ia menuding Kadis PU itu dalam proses tender proyek tidak transparan dan penuh nuansa KKN. Proses tender di Dinas PU ini tidak pernah transparan dan bernuansa KKN, sehingga hasil dari pengerjaan proyek sangat rendah karena pengawas internalnya di Dinas PU tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kadis PU tidak berani dan tegas untuk mendaftar-hitamkan (*blacklist*) para kontraktor yang pekerjaannya buruk selama ini, sehingga mengakibatkan ketidak profesionalitas seorang Kadis PU

(Abrar Rahman.com. 2014. *Kadis PU Maros Main Proyek, Copot Saja!*).

Informasi yang bergulir melalui data wacana juga ditanggapi lewat informasi yang penulis lakukan dengan berbagai kalangan informan. Informasi yang beredar pada media akan dilakukan upaya silang pendapat dengan informan tentang kongkalikong diantara kelompok penguasa dan kelompok pengusaha, sebagaimana yang di- tegaskan oleh Direktur dan Anggota Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Bapak Syam, S.Sos., (45 tahun) dan Bapak Drs. Herman, M.Si. (45 tahun) diduga lelang maupun tender pengadaan barang dan jasa proyek dari LPSE itu tidaklah berjalan normal dan penuh dengan sandiwara kelompok penguasa dengan pengusaha.

Dari informan tersebut menandakan bahwa terdapat indikasi yang secara tidak langsung memiliki dampak kepada kelompok peng- usaha yang juga memiliki kedekatan dengan partai politik. Kedekatan lainnya juga nampak dari kerjasama multipihak yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dengan pengusaha dalam meloloskan sebuah tender proyek. Dalam hal ini saya melihatnya bahwa, ketika lembaga DPRD (legislatif) sebagai mitra Pemerintah Daerah (eksekutif) yang saat ini posisinya lemah untuk melawan pihak eksekutif dalam membuat kebijakan adalah berbahaya seperti misalnya perampasan asset yang sekarang ini, korupsi dalam hal tujuan yang lebih besar, jika di- analogikan manakala asset itu tiba-tiba dikontrakkan selama 20 tahun, sehingga memunculkan pertanyaan kritis siapakah yang bisa menjamin keberlangsungan sumber daya alamnya?

Kondisi yang telah dikemukakan oleh informan mengenai pe- maknaan pengerjaan proyek yang umumnya dapat diakses bagi mereka yang memiliki kedekatan dan relasi dengan penguasa. Di mana umum- nya mereka yang dapat mengakses langsung dengan penguasa adalah yang memiliki dan memberikan kontribusi secara nyata bagi penguasa sewaktu _sayembara kekuasaan dilaksanakan'. Pengusaha inilah yang memiliki kontribusi secara nyata akan mudah untuk mengakses pe-

kerjaan proyek dari pemerintah agar dimudahkan jalannya untuk mengerjakan proyek tersebut.

Pernyataan informan tersebut menandakan bahwa pengakuan tersebut sangatlah rill, jadi ada hal yang menarik ketika kami melakukan kampanye anti suap kepada pengusaha level menengah ke bawah kemudian mereka merasa diuntungkan oleh karena yang masuk ke dalam jaringan kelompok kekuasaan, seperti misalnya pengusaha kelas menengah yang sebenarnya dia hanyalah tim sukses salah satu Pasangan Calon kepala daerah kalaupun mereka hanya menyumbang dengan sekadar kartu nama, tapi lain halnya yang mereka menyumbang dengan kapasitas yang besar _gede-gede' oleh karena para pemodal ini bukanlah tim sukses, namun berdasarkan dari aspek relasinya dengan calon kepala daerah. Aspek kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa yang di dalamnya tersirat keuntungan multiaktor yang dengan segala cara dan strategi untuk mengutak-atik kebijakan lewat kekuasaan dan modal.

Dari pernyataan informan tersebut terdapat keterkaitan logis di antara relasi penguasa dan pengusaha yang acapkali mengutak-atik kebijakan lewat kekuasaan dan modal yang merugikan negara. Selanjutnya pengusaha yang memiliki relasi dengan penguasa seolah- olah dapat membeli sebuah kebijakan melalui deal-deal politik yang telah disepakati sebelumnya.

Pernyataan informan tersebut menandakan bahwa adanya politik balas jasa diantara multiaktor. Dalam hal ini multiaktor yang dimaksud adalah penguasa ketika melakukan masa-masa kampanye untuk memenangkan pertarungan politik di daerah mereka melakukan deal- deal dengan pengusaha yang memiliki modal yang besar. Bilamana berhasil memenangkan pertarungan pemilihan kepala daerah, maka suatu saat nanti akan diganti sebuah kebijakan yang mengarah kepada kemudahan untuk mengakses pekerjaan proyek yang sedang di- gelontorkan oleh penguasa. Selain itu, fasilitas lainnya adalah peng- usaha akan dengan leluasa untuk mengakses proyek yang akan di- laksanakan oleh LPSE Kabupaten, disebabkan adanya deal-deal politik

yang telah disepakati oleh multiaktor. Seputaran antara relasi penguasa dengan pengusaha yang selanjutnya menyoroti alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perihal ekonomi politik yang secara garis besarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masya- rakat dan membawa ketaraf hidup yang lebih baik. Namun demikian, diduga adanya politik konspirasi yang terjadi dalam kepentingan multi- aktor tersebut. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan sengaja membuat proyek terlebih karena adanaya faktor desakan dan pesanan yang dilakukan oleh kelompok pengusaha terlebih dahulu telah
=membisiki' mereka yang memilih untuk lebih menjalankan proyek pengerjaan fisik infrastruktur jalan dibanding proyek pembangunan masyarakat. Oleh karenanya, potensi untuk melakukan rekayasa
=angka-angka' jauh lebih besar dilakukan.

Selanjutnya, dalam wawancara yang dilakukan penulis bersama Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Maros Bapak ASA, S.E., (34 tahun). Dalam karirnya dia memiliki relasi dengan kelompok penguasa di Kabupaten Maros. Seperti yang dia tegaskan bahwa dirinya juga adalah bendahara Partai Amanat Nasional (PAN) Pimpinan Cabang Kabupaten Maros. Sudah 4 tahun lamanya ASA, menjabat sebagai bendahara PAN sekaligus Ketua Tim Sukses ASA II Pemenangan Pasangan Calon Bupati dengan slogan
=Hatita'ini. Selang waktu berjalan Andi Safriadi Adam memiliki akses khusus kepada jajaran pengambil kebijakan di Kabupaten Maros, sehingga membuatnya juga mudah untuk mengakses informasi perihal proyek yang akan dikerjakan oleh pemerintah.

Selanjutnya, dalam kesempatan yang berbeda wawancara juga dilakukan penulis bersama Direktur PT. Trifa Cahaya Gumilang Makassar, Bapak BJ, S.Si., M.Si. (33 tahun) tentang praktik kong- kalikong diantara penguasa dan pengusaha, yang dalam penelitian ini tidak memiliki relasi dengan penguasa maupun akses secara langsung dengan kepala daerah, dikarenakan dia di luar dari lingkaran kekuasa- an. Dalam pandangannya nyaris beberapa proyek di Kabupaten Maros adalah proyek yang sudah dipesan maupun melalui pemufakatan di

antara multiaktor yang memiliki kepentingan. Pemufakatan ini secara terang benderang nampak dari beberapa proyek yang tidak begitu di-butuhkan kehadirannya oleh warga masyarakat. Meskipun proyek ini tidak berdasarkan aspirasi warga masyarakat, namun tetap saja dikerja- kan.

Berdasarkan informan nampak fenomena perilaku diantara multiaktor yang didalamnya terdapat pemufakatan dan kesepakatan untuk mengerjakan proyek bagi mereka yang hanya memiliki relasi dengan penguasa. Tidak dapat dipungkiri fenomena ini sudah hangat menjadi buah bibir di kalangan warga masyarakat. Kondisi ini disebab-kan adanya unsur balas jasa, diantara penguasa dengan pengusaha yang terjadi sewaktu masa kampanye pertarungan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tidak dapat dihindari pula terjadinya tawar menawar *fee* proyek yang juga seringkali mengemuka bagi penguasa yang ingin menarik keuntungan dari proyek yang telah ditenderkan. Dengan cara melakukan penawaran *fee* proyek bagi mereka yang bersedia untuk mengerjakannya. Selanjutnya, *fee* inilah yang akan mengantarkan pengusaha untuk melanggengkan strateginya dalam mengerjakan proyek tersebut.

Dalam kesempatan yang lain juga dilakukan wawancara yang di-lakukan penulis bersama Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ir. Asm (42 tahun), tentang praktik kongkalikong diantara penguasa dan pengusaha. Beranjak dari feno- mena ini, maka konteks politiknya beberapa diantaranya muncul ber- bagai kepentingandemi untuk membuat kebijakan yang menonjolkan keuntungan kelompok saja. Proyek sengaja dibuat dan diprogramkan sesuai dengan jumlah keuntungan yang akan ditarik dari proyek ter- sebut.

Selanjutnya, pada bagian ini penulis mengeksplorasi data wacana terhadap tunggakan pajak yang dilakukan oleh diantara be- berapa perusahaan yang diproduksi oleh wacana. Wacana tersebut di- produksi oleh Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), yakni Nurlina, S.E., tentang CV.

Gowa Maros penunggak pajak terbesar. Nilai tunggakan pajak kendaraan di wilayah Kabupaten Maros yang setiap tahunnya meningkat membuat pihak Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) geram. Terhitung sejak tahun 2010-2015, potensi pajak berjumlah 41 ribu lebih kendaraan roda empat dan dua, nilai tunggakan telah mencapai leboh dari Rp.32.000.000.000.

Nurlina, menegaskan bahwa kondisi ini memaksa pihak Samsat Maros berencana melahirkan kebijakan baru dengan melakukan upaya sita paksa kendaraan yang tercatat belum memenuhi kewajibannya. Tindakan tegas ini didasari Pergub No 39 tahun 2015 tertanggal 12 Juni 2015 tentang pembayaran pajak dan penyitaan, maka UPTD Samsat Maros mulai menerapkan aturan itu yang dicanangkan mulai 18 Agustus hingga 31 Desember tahun 2015. Salah satunya wajib pajak yang dinilai membandel adalah pengusaha CV. Gowa Maros milik H. Jalil. Pembayaran pajak kendaraanya hingga kini belum dilakukan. Nilai tunggakan pajaknya mencapai Rp.200.000.000. Untuk saat ini, Samsat Maros terus berupaya agar para pengusaha dapat membayar pajak kendaraanya agar pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maros bisa meningkat. Dia menambahkan pembengkakan nilai tungga- kan pajak kendaraan lantaran tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah. Padahal berbagai upaya dilakukan UPTD samsat Maros dengan cara menyurat, menghubungi secara langsung kepada wajib pajak sudah berkali kali dilakukan. Potensi keterlambatan pembayaran pajak kendaraan didominasi perusahaan swasta. Padahal mereka seharusnya menjadi contoh untuk taat membayar pajak kendaraanya. Karena aktivitas usaha mereka setiap hari berjalan, namun oknum pengusaha itu selalu berdalih akan membayar pajaknya jika ada pemasukan hasil usahanya. Selain itu, lanjut Herlina, cara lain yang saat ini kami lakukan agar para wajib pajak bisa membayar tunggakan pajaknya dengan mengunjungi? Alamat pemilik kendaraan. Hal ini dilakukan agar kepemilikan kendaraan ddapat diketahui secara jelas. Karena tidak semua alamat yang dalam data base kendaraan berdomisili di Maros,

karena sudah banyak juga yang sudah berpindah tangan ke orang lain dan belum melakukan pergantian nama atau identitas pemilik kendaraan pertama. _Kami terjun langsung kealamat wajib pajak untuk mengetahui secara jelas kepemilikan awal atau bukan serta apa yang menjadi penyebab, sehingga pajaknya tidak dibayar tepat waktu (Berita Kota Makassar.com. 2015. *Gowa Maros Penunggak Pajak Tertinggi*).

Selain itu juga data wacana tunggakan pajak juga diproduksi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten (Dispenda) Maros Drs. Noor Alim, tentang PT. Semen Bosowa Maros penunggak pajak terbesar. PT. Semen Bosowa Maros adalah Perusahaan yang mengelolah bisnis semen secara full integrated yang terletak di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Desa Baruga dan Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung. Dengan kapasitas produksi se- besar dua juta ton klinker semen per tahun dan 2,4 juta ton semen per tahun. Pabrik semen ini dibangun di atas lahan seluas 147 ha. Dalam realisasi proses produksinya dibutuhkan bahan baku *clay* (tanah liat) dan *limstone* (batu gamping) yang berasal dari tambang yang dikelola sendiri oleh pihak PT. Semen Bosowa, sedangkan PT. Bosowa Mining adalah perusahaan yang bergerak di bidang penambangan marmer yang sampai saat ini masih memproduksi blok atau marmer gelondongan dan pabrik pembuatan tile marmer dan kedua perusahaan tersebut masih menyisahkan tunggakan pajak yang tidak sedikit.

Hal ini dipertegas oleh Noor Alim, bahwa tunggakan pajak kedua perusahaan tersebut sudah sangat besar dan kami terus berupaya untuk melakukan penagihan dan pihak perusahaan wajib menyele- saikannya karena semua kan sudah di atur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros No.15 Tahun 2011. Saya kira semua sudah jelas hak dan kewajiban serta sanksi-sanksinya bila menunggak, bahkan kami sudah memberi teguran berkali-kali Kepala seksi penerimaan Dispenda mengatakan bahwa jumlah tunggakan PT. Semen Bosowa dan PT. Bosowa Mining yang belum terbayarkan hingga saat ini (per tanggal 20 mei 2014) kurang lebih empat milyar dan, staf kami sudah berkali-kali melakukan

penagihan ke pihak wajib pajak di menara Bosowa Lt.19/Lt.16 dan hanya mendapatkan janji-janji saja (Wordpers.com. 2014. *Semen Bosowa Maros Penunggak Pajak Terbesar*).

Berdasarkan data wacana yang terdapat di media, maka melukis- kan kondisi bahwa terdapat bebeapa perusahaan baik yang skala menengah hingga skala besar yang seringkali mengalami tunggakan pajak. Jika hal ini tidak ditindaklanjuti secara tegas, secara langsung akan berdampak terhadap keterlambatan bagi pemasukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dampak lain dari keterlambatan ini jga menghambat pembangunan bagi wilayah setempat.

Aspek sensitif lainnya yang dibuktikan dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Maros, se- bagaimana yang terdapat pada data wacana yang didalilkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembah Hijau Kabupaten Maros Ir. Colleng, menyatakan bahwa objek pajak kedua perusahaan tersebut masing-masing adalah *limstone*, *clay* dan marmer dan per- usahaan tersebut melaporkan hasil produksinya ke Dispenda, saya justru mempertanyakan apakah Pemerintah Daerah mempercayai laporan produksi yang di laporkan itu, apakah sudah melakukan pengecekan secara langsung ke objeknya. Di sini tidak ada keterbukaan pihak perusahaan sekaligus menjadi kelemahan pemerintah dalam hal ini pihak Dispenda untuk melakukan pengawasan, lemahnya peng- awasan memberi peluang keapada wajib pajak untuk melalaikan kewajibannya, kongkalikong data untuk hindari pajak. Pemerintah se- olah ada ketakutan dan trauma berlebihan, sehingga tidak dapat ber- statemen tegas kepada PT. Semen Bosowa Maros, bahkan terkesan selalu memberi jalan keluar dalam bentuk konversi berupa semen dengan alasan bahwa Maros butuh semen dalam jumlah besar. Dari data tunggakan sebesar Rp. 2.103. 869.312, berarti PT. Semen Bosowa merupakan penunggak pajak terbesar di Kabupaten Maros belum ter- masuk PT. Bosowa Mining sebesar Rp. 1.963.943.492. Selain pemerintah keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

sangat strategis dalam menyelesaikan persoalan tersebut dan tidak hanya memenuhi undang Direksi PT. Semen Bosowa, kemudian ikut mendengarkan ceramahnya dan atau memanggil Direksi kemudian memberi penjelasan, DPRD Maros masih punya gigi sebagai fungsi pengawasan untuk memperjuangkannya karena tunggakan pajak ber- imbas kepada pencapaian PAD berserta dampaknya kepada pencapaian pembangunan yang kesemuanya itu untuk kepentingan masyarakat Maros (Wordpers.com. 2014. *Semen Bosowa Maros Penunggak Pajak Terbesar*).

Salah satu kualitas dari pembangunan yang dikerjakan oleh pihak ketiga yang dipercayakan oleh pihak pemerintah adalah kualitas dari hasil kerja yang telah disepakati melalui kontrak kerja proyek. Kualitas tersebut nampak secara terang benderang, manakala pekerjaannya telah selesai dilaksanakan lalu kemudian didakan sebuah evaluasi dari hasil kualitas pekerjaan tersebut. Secara khusus kualitas kerja yang dimaksud adalah bagi perusahaan yang mengerjakan proyek yang bersumber dari pemerintah dan juga anggaran proyeknya ber- sumber dari pemerintah. Dalam hal ini, program yang telah selesai dilaksanakan perlu dievaluasi yang bertujuan; (1) mempertanggung jawabkan keberhasilan program kepada masyarakat atau instansi yang membiayai program yang bersangkutan; dan (2) keberhasilan maupun ketidakberhasilan program ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh mereka yang bersangkutan (Kunarjo, 2002; Sumandiyar, 2016).

Evaluasi proyek pembangunan adalah bagian dari kegiatan pem- bangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, mau- pun pasca proyek. Indikator dan sasaran kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup indikator masukan, keluaran, hasil, dan indikator manfaat serta dampak (Tambunan, 2008; Sumandiyar, 2016).

Selanjutnya wacana pada tahun 2010-2016 tentang Gabungan Pengusaha dan Kontraktor Nasional (Gapeknas) memproduksi wacana tentang anggaran tertahan, kontraktor Maros tidak mampu bayar pekerja. Menurut Andi Safriadi Adam, yang menjabat Ketua Gapeknas Maros, bahwa sejak Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Maros, Ir. H. Andi Herry Iskandar, M.M., menggantikan mantan Bupati Maros Ir. H. M Hatta Rahman, M.M., tidak ada pencairan anggaran proyek. Sementara para kontraktor diwajibkan untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu, sehingga mayoritas kontraktor sudah mengeluh. Setiap se- pekan, kontraktor harus mengeluarkan anggaran sendiri sekitar Rp.300.000.000. Anggaran tersebut kita gunakan untuk membayar upah 100 orang pekerja Rp.100.000.000 dan pembelian material Rp.200.000.000. sebagian besar kontraktor terjepit dengan keterbatasan anggaran yang selama ini mereka miliki (Makassar Tribunnews.Com. 2015. *Anggaran Tertahan Kontraktor Maros Tak Mampu Bayar Pekerja*).

Alhasil, dari wacana yang didalilkan oleh Gapeknas tersebut tentang anggaran tertahan, kontraktor tidak mampu bayar pekerja—hingga bergulir dalil wacana jika proyek tidak selesai, Kontraktor Maros minta Pemda bertanggung jawab, yang menurut Ketua Gapeknas Maros Safriadi Adam, bahwa Gapeknas Maros, menilai be- berapa bulan lalu, tidak ada kontraktor yang mengeluh lantaran pen- cairan anggaran dari Pemerintah Daerah Maros. Bilamana permohonan keuangan dimasukkan ke Pemda, paling lambat tiga hari anggarannya akan cair. Namun saat ini, proses pencairan tidak jelas. Selanjutnya, pihak Gapeknas sendiri mengeluarkan asumsi bahwa kontraktor akan dikorbankan bilamana proyeknya menyebrang tahun. Pihak Gapeknas pun geram, dan mengeluarkan bantahan bahwa, bilamana pencairan seperti ini, kontraktor jangan disalahkan jika proyek tidak sesuai tepat waktu. Pemerintah harus bertanggung jawab. Pemerintah harus secepat mungkin menyelamatkan kontraktor Maros, sehingga memunculkan harapan agar proses pencairan bisa kembali normal dan segera dibenahi supaya pengusaha bisa lebih hebat (Makassar Tribunnews.Com. 2015.

Jika Proyek Tak Selesai Kontraktor Maros Minta Pemda Bertanggung Jawab).

Untuk itu pada kesempatan lain, diperoleh data wawancara yang dilakukan bersama dengan Direktur PT. Trifa Cahaya Gumilang Makassar, Bapak BJ, S.Si., M.Si. (33 tahun) tentang mutu dan kualitas perusahaan melalui proyek. Di mana proses pengerjaan proyek yang bersumber dari pemerintah melalui proses tender/lelang dan penunju- kan langsung. Berdasarkan penegasan yang dikatakan oleh informan BJ, selama ini motif proses pengerjaan proyek melalui sistem tender diadakan oleh LPSE dan juga penunjukan langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penunjukan langsung proyek bilamana anggarannya dibawah Rp.150.000.000, sedangkan anggaran di atas Rp.150.000.000, melalui proses tender yang dilakukan oleh pihak LPSE. Dimensi ini terdapatnya peluang untuk melakukan kongkali- kong anggaran hingga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Anggaran sengaja dibuat sesuai dengan standar operasional, sedangkan pada nyatanya berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Ke- jadian ini seringkali diketemukan oleh karena para pengusaha yang berprofesi sebagai kontraktor ini, semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan belaka, yang tidak memikirkan dampak di kemudian hari sebagai akibat dari kongkalikong anggaran tersebut. Untuk meminima- lisir fenomena ini, maka diperlukan optimalisasi regulasi yang ada serta dibutuhkan lembaga yang independen untuk mengawasi seluk beluk pengerjaan proyek yang bersumber dari dana Anggaran Pen- dapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Sementara itu dalam proyek penunjukan langsung ini juga masih didapati adanya deal-deal khusus diantara penguasa dan pengusaha. Deal ini akan terealisasi manakala proyek yang ingin dikerjakan ter- sebut dinyatakan lolos dan berhak untuk melakukan pengerjaan. Deal ini seringkali disisipkan berbagai macam kepentingan dan juga iming- iming akan diberikannya *fee* proyek. *Fee* proyek inilah yang menentu- kan layak atau tidakkah seorang kontraktor dalam mengerjakan sebuah proyek pembangunan dari pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan data yang diper-oleh dari penegasan informan diketahui bahwa dalam penawaran harga proyek seringkali digunakan oleh kontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi barang dengan harganya. Harganya standar namun kualitas barang yang akan ditawarkan sangatlah dibawah standar penawaran, sehingga hasil dari proyek pun tidak maksimal dan tidak memuaskan. Berdasarkan dari data informan tersebut, maka setidaknya dugaan data wacana tentang kualitas hasil kerja proyek yang dikerjakan oleh kontraktor memiliki kesamaan dengan apa yang diungkapkan dari hasil wawancara. Modus permainan penawaran harga inilah seringkali me- nimbulkan masalah kualitas pengadaan barangpun perlu dipertanyakan. Harga yang tertera dan spesifikasi barang yang tertera dalam pe- nawaran tidak sesuai dengan kenyataan. Alhasil, kualitas pekerjaannya pun tidak sesuai dengan apa yang mesti diharapkan, disinilah letak kerugian negara dari pola relasi penguasa dan pengusaha dikarenakan adanya kongkalikong spefisikasi harga barang. Modus seperti ini seringkali berulang kali dilakukan, walaupun seringkali dipergoki kecurangannya.

Pada bagian ini wacana proses pengerjaan proyek perusahaan ini adalah perusahaan yang terlibat dalam proses lelang atau tender proyek. Perusahaan ini diduga melakukan praktik kecurangan dalam hal keikutsertaannya dalam proses pengerjaan proyek yang bersumber dari pemerintah. Seperti misalnya kasus pengadaan lampu jalan yang terletak di jalan poros Maros-Makassar merupakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan rekanan yang berhasil memenangkan tender yang diduga melakukan tindakan *mark-up* anggaran. Kondisi ini mengantarkan pihak Kejaksaan Negeri Maros untuk mengusut kasus pengadaan lampu kalan his yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan perusahaan CV. Anugerah Perdana. Terdapatnya praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum birokrasi (penguasa) dengan perusahaan (pengusaha) yang terlibat dalam proses pengerjaan proyek ini menguatkan adanya indikasi permainan politik dan dugaan

adanya sekelompok yang hanya ingin mengejar keuntungan dari hasil pengerjaan proyek tersebut.

Dari hasil temuan penelitian maka kondisi ini memicu respon protes dan kritikan dari anggota LSM transparansi dan anggota Komisi III yang mengeritisi pihak pemerintah untuk sesegara mungkin melakukan pemeriksaan dan audit terhadap hasil pelanggaran yang di- lakukan oleh perusahaan. Sementara bagi oknum anggota birokrasi yang melakukan pelanggaran untuk segera diproses. Alhasil, anggota birokrasi (penguasa) yang dimaksud berhasil diamankan dan dilakukan pemeriksaan juga dengan pihak perusahaan yang terlibat dalam pelang- garan kasus masrkup lampu hias jalan yang terletak di jalan Poros Maros-Makassar.

Kondisi ini sejalan dengan uraian pemikiran isu lemahnya kapasitas pemerintah (*state capacity*) di negara-negara yang sedang berkembang yang ditandai dengan ketidakmampuan menjalankan pem- bangunan, menjadi topik hangat yang sering didiskusikan oleh para pakar. Teori-teori kegagalan pemerintah yang dicirikan dengan penekanan pendekatan _*top down*', maupun teori modal sosial yang di- identikkan dengan pendekatan _*bottom up*', keduanya menawarkan *framework* yang melandasi kerangka dasar untuk mengidentifikasikan gejala-gejala _*state incapacity*' (Wallis dan Dollery, 2001). Mengenai *state incapacity*, beberapa pakar yang optimis menyatakan bahwa kapasitas pemerintah dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kegagalan pemerintah dapat diatasi (Betancourt, 1977). Sebaliknya Langford (1999) dengan nada pesimis menyatakan bahwa harus ada intervensi dan advokasi (*trusteeship*) internasional untuk penanggulangan per- masalahan tersebut.

Ada beberapa teori tentang tipologi kegagalan pemerintah yang pernah dikemukakan oleh O‖Dowld, 1978; Weisbord, 1978; Wallis dan Dollery, 1997 (Rustiadi, E. dkk, 2009), penyebab kegagalan tersebut dibagi dalam tiga faktor utama. Pertama, disebabkan oleh inefisiensi dan sistem/struktur politik yang asimetrik. Hal ini sering disebut juga
_*constitutional failure*' atau _*legislative failure*'. Politisi lebih memen-

tingkan kelompok, terutama untuk pemenangan pemilu yang akan datang, sehingga tidak lagi memikirkan kepentingan dan perbaikan- perbaikan kondisi kemasyarakatan. Kedua, disebabkan karena berhenti atau tersendatnya kegiatan pelayanan masyarakat yang berakibat in- efisiensi, di mana hal ini sering disebut sebagai ‗*bureaucratic failure*'. Ketiga, intervensi pemerintah dalam sektor ‗*rent seeker*', sebagai akibat dari *social waste* yang dihasilkan senantiasa lebih besar di- bandingkan *social surplus*-nya. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kegagalan pemerintah disebabkan oleh karena *public sector* seringkali dipandang sebagai *vertical sector*, sehingga menye- babkan rantai birokrasi yang panjang dalam pelayanan masyarakat. Menurut Moe (1984), menjuluki rantai birokrasi ini sebagai ‗*chain of principal-agent relationship*' dengan struktur rantai sebagai berikut; *citizen-politician-bureaucratic superior-bureauratic sub ordinate- lowest bureaucratic-citizen*.

Kondisi ini dapat dihindari bilamana tidak terjadi upaya per- usahaan yang dapat menciptakan halangan masuk ke pasar dengan menguasai sumber daya strategik, atau mengupayakan agar tidak ada barang pengganti (substitusi), selanjutnya akan menikmati laba super normal (rente yang lebih tinggi). Kondisi lain untuk dihindari oleh perusahaan (pengusaha) adalah perolehan keuntungan yang lebih tinggi yang terkadang pengusaha berkolusi dengan penguasa agar mengeluar- kan kebijakan-kebijakan ekonomi yang hanya menguntungkan pihak pengusaha. Sebagai bentuk imbalan dari kebijakan ini maka pengusaha memberikan imbalan atau lebih tepatnya lagi sogokan, baik berupa uang tunai atau berupa imbalan hadiah yang juga berkategori grativi- kasi.

Bab 5
Pola Relasi Ekonomi Politik Pembangunan

A. Pola Relasi Politik

Settingan pada bagian ini adalah dengan memetakan realitas dalam bentuk interaksi kuasa diantara pengusaha dan penguasa. Di mana interaksi yang dimaksud adalah interaksi pengusaha dan penguasa dalam memengaruhi kepala daerah yang terpilih. Melalui proses bentuk dukungannya yang diperoleh semasa kampanye dimana pengusaha memberikan bantuan modalnya untuk dipergunakan bagi calon kepala daerah (penguasa) yang dalam hal ini kapasitas modal yang dimiliki terbatas. Pemberian bantuan modal dari pengusaha ke penguasa yang diharapkan ketika berhasil memenangkan pertarungan politik maka imbalan yang diharapkan adalah melalui kebijakan- kebijakan politik yang dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha. Oleh karena itu maka selanjutnya akan diuraikan beberapa poin khusus perihal relasi penguasa dengan pengusaha dalam atmosfer politik melalui pola pembentukan relasi penguasa dengan pengusaha dalam atmosfer politik.

Atmosfer politik seringkali kita sebut sebagai bentuk dukungan maupun yang memiliki kedekatan secara khusus dengan beberapa penguasa yang memiliki peran dalam mengambil kebijakan. Kedekatan-kedekatan maupun dukungan secara khusus tersebut, yang dicontohkan dalam pendekatan politik maupun pendekatan secara terencana dan identik dengan balas budi, tidak pelak mendatangkan sebuah dampak kepada pembuatan kebijakan yang pada akhirnya hanya menguntungkan multiaktor yang ikut bermain dalam kebijakan tersebut. Hal ini dianalogikan mereka yang berada di dalam lingkaran kekuasaan, maupun mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan.

Pada akhirnya menguntungkan bagi multiaktor yang ikut berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Dalam uraian ini, penulis melakukan wawancara bersama Direktur dan Anggota Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Bapak Syam, S.Sos., (45 tahun) dan Bapak Drs. Her, M.Si. (45 tahun), tentang atmosfer politik dalam pola relasi pengusaha dan penguasa. Persepsi Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia ihwal isu-isu kedekatan pengusaha dengan penguasa. Nampak manakala calon kepala daerah yang ingin maju bertarung pada pemilihan kepala daerah, tidak hanya mengandalkan idealisme mereka, melainkan juga unsur pragmatisme juga membayangi dirinya. Alhasil, tidak sedikit di antara mereka juga menggadaikan sikap idealismenya demi kepen- tingan pertarungan politik.

Berdasarkan penjelasan dari informan Her, bahwasanya di-ketahui untuk menjadi seorang Gubernur, Walikota/Bupati, maka setiap kandidat membutuhkan banyak biaya. Banyaknya biaya yang di-butuhkan membuka peluang ruang untuk menciptakan terbentuknya atmosfer politik sebagai bentuk dukungan dari pengusaha kepada calon penguasa (calon kepala daerah) agar dapat terpilih. Dari proses ini ada berbagai bentuk motif yang dilakukan oleh pengusaha diantaranya menawarkan jasa bantuan dana kampanye pada masa pemilihan. Tawaran dana kampanye ini diharapkan dipergunakan bagi calon kepala daerah untuk melakukan kegiatan kampanye agar dapat meme- nangkan pertarungan politik. Dalam proses tawaran bantuan dana kampanye ini, maka pengusaha dengan cermatnya juga menawarkan kebijakan bilamana suatu saat penguasa yang diberikan bantuan modal untuk melakukan kampanye maka dia juga berhak atas kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan politik seringkali disisipkan oleh kepentingan-kepentingan pengusaha belaka, serta tidak mengindahkan dampak positif bagi kemaslahatan warga masyarakat. Transaksi kebijakan ini yang seringkali mengakibatkan kerugian dan dilematis bagi penguasa yang berhasil memenangkan pertarungan politiknya, karena dia sudah bersepakat untuk melakukan kerjasama

dengan pengusaha melalui proses pengeluaran kebijakan. Kebiakan ini seringkali diketemukan dalam proses perizinan izin usaha baik usaha pertambangan mineral dan batu bara hingga perusahaan swasta lainnya yang memiliki hak politik maupun pemenangan tender usaha dalam proyek kontraktor atau sejenisnya.

Selanjutnya, suasana atmosfer politik juga sangat menentukan kualitas pendidikan politik yang bermain dalam membangun sebuah wilayah. Atmosfer politik umumnya mereka yang bermain pada level kekuasaan yang juga selaku aktor dalam membentuk lingkaran kekuasaan, dengan menyukseskan pembangunan di wilayah tersebut yang memiliki hubungan dengan penguasa di tingkat kepala daerah. Dimensi inilah yang acapkali disalahgunakan oleh oknum-oknum kelompok yang dengan sengajanya memanfaatkan momentum untuk mengejar keuntungan baik bersumber dari proyek pemerintah, izin usaha, hingga pengembangan industri sarat dengan kepentingan politis.

Kutipan penegasan informan tersebut diikat oleh faktor kede- katan diantara multiaktor yang berada dilingkaran kekuasaan. Faktor kedekatan dijadikan sebagai ‗kendaraan' untuk mengakses proyek maupun memperoleh hingga memperpanjang izin usaha. Pada dasarnya pengusaha telah berkontribusi dan mendukung program penguasa. Kontrbusi umumnya berupa bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun ikut serta dalam partisipasi politik.

Pola pembentukan relasi penguasa dengan pengusaha juga ditunjukkan melalui hubungan emosional Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Maros dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional (DPC-PAN Kabupaten Maros) yang juga didaulat sebagai Bendahara Umum PAN. Dalam kondisi yang nyata Ketua HIPMI yang juga sekaligus Bendahara Umum PAN tersebut menjalankan perannya dengan melakukan pendekatan lewat Partai politik dalam menjalin hubungan dengan penguasa.

Berdasarkan dari keterangan yang bersumber dari Asm, maka dapatlah diketahui bahwasanya pola relasi penguasa dengan pengusaha yang terbentuk di Kabupaten Maros juga masuk dalam tatanan ruang

politik. Pengusaha memasuki ruang tersebut melalui pintu politik untuk melibatkan diri dalam kepengurusannya pada Partai PAN yang me- miliki kekuasaan dalam mengendalikan sistem birokrasi di Kabupaten Maros, sehingga dengan sendirinya akan dengan leluasa membangun jaringan politik dengan penguasa dan leluasanya pula pengusaha ini akan mengusulkan kebijakan perihal proyek-proyek yang akan dia kerjakan. Pandangan selanjutnya diberikan oleh Syam yang juga mem- berikan argumentasinya tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Semen yang diberikan kepada perusahaan semen China PT. Conch yang sedianya akan dijalankan pada wilayah Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

Dalam penegasan yang diberikan oleh informan Syam, maka diketahui bahwasanya perusahaan semen China PT. Conch melakukan pendekatan dengan jalan memanfaatan pintu-pintu partai politik untuk melakukan upaya lobi-lobi dalam memuluskan usahanya mendapatkan izin usaha. Momen ini terjadi di saat kepala daerah sudah memiliki kekusaan dan otoritas untuk memberikan izin usaha. Kondisi lainnya adalah dimana kepala daerah ingin melakukan pertarungan politik dalam pemilihan kepala daerah di periode berikutnya. Dalam melaku- kan lobi-lobi politik pihak perusahaan memanfaatkan kedekatannya dengan pengurus partai politik yang memiliki hubungan emosional dengan penguasa yang sekaligus adalah kendaraan politik bagi penguasa dalam meraih kedudukannya sebagai kepala daerah.

Berdasarkan eksplorasi data dari fenomena tersebut, maka faktor kedekatan dan hubungan emosional yang dilakukan oleh pihak per- usahaan tidak dapat dipungkiri lagi dalam pola pembentukan relasi penguasa dengan pengusaha dalam atmosfer politik. Bgai pengusaha yang skala besar dalam industri pertambangan dan galian, mereka umumnya memanfaatkan kedekatan melalui pintu-pintu politik dalam menarik simpatik dan membangun hubungan diantara penguasa dengan pengusaha. Pengusaha melakukan upaya lobi-lobi lewat sumbangannya yang berbentuk materil maupun non materil, sehingga dengan mudah- nya dia masuk dalam lingkaran jaringan kekuasaan. Sumbangan-

sumbangan ini selanjutnya dimanfaatkan oleh penguasa yang ingin ber- kontestasi dalam pertarungan pemilihan calon kepala daerah.

Kondisi lainnya yang dimanfaatkan bagi pengusaha yang ber- gerak dalam sektor tender dan penunjukan langsung di bidang proyek kontraktor adalah mereka memanfaatkan kedekatannya dengan penguasa yang ingin bertarung dalam pemilihan kepala daerah juga melalui pintu-pintu politik. Pengusaha juga melibatkan dirinya dalam kepengurusan salah satu partai politik yang ingin mengusung calon kepala daerah yang ingin ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Dari kondisi ini maka dengan mudahnya membentuk spektrum yang disebut politik patron klien. Kondisi patron klien ini terbentuk berkat kerjasama yang dilakukan dalam pemberian modal atau bantuan kepada calon kepala daerah yang ingin berkontestasi dalam pemilihan. Bilamana berhasil menduduki tampuk kursi kekuasaan, maka dia ber- hak melalui otoritas kebijakannya.

Kondisi politik patron klien seringkali terjadi disebabkan mahal- nya biaya dalam kampanye yang seringkali membuat rasa dilematis bagi calon kepala daerah untuk melakukan upaya penolakan. Mahalnya biaya kampanye juga sebagai faktor utama dan penyebab bagi calon kapala daerah untuk menolak bantuan yang diberikan oleh pengusaha, sehingga muncul motif balas jasa yang diberikan oleh calon kapala daerah yang telah berhasil menjadi seorang penguasa. Motif balas jasa ini selanjutnya disebut sebagai konsep simbiosis mutualisme yang juga berkorelasi dengan konsep patron klien. Dimana penguasa menjadi patron atas pengusaha yang selanjutnya menjadi klien. Meskipun pada dasarnya keuntungan yang diperoleh pengusaha seringkali tidak se- besar dengan pengorbanan, namun tetap saja pengusaha tersebut merasa puas. Kepuasaanya terletak pada konteks pengambilan sebuah kebiajakan yang telah berhasil diberikan oleh penguasa kepada peng- usaha, sehingga pengusaha tetap saja merasa puas karena berhasil me- mengaruhi kebijakan yang diberlakukan di daerah tersebut, sehingga pengusaha juga merasa dihargai dengan adanya pemberlakukan kebijakan tersebut. Kondisi ini seringkali membuat penguasa berada

pada posisi yang dilematis. Dilematis disebabkan dia tidak berdaya akan ketentuan yang sebelumnya disepakati bersama dengan peng- usaha dalam hal pemberian bantuan materil dan non materil, bilamana berhasil menjabat sebagai kepala daerah, maka segala konsekuensi yang dilakukan adalah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam bentuk kebijakan. Penguasa juga seringkali dilema dan tidak dapat berbuat banyak bilamana dari kebijakan tersebut menimbulkan konflik dan pertentangan yang terjadi dalam kehidupan warga masyarakat bilamana programnya tidak sesuai dengan aspirasi dan kenginannya.

Dampak lainnya adalah dengan mahalnya biaya politik dan kampanye khususnya dalam pemilihan kepala daerah, maka akan dengan sendirinya terbuka peluang bagi pengusaha untuk masuk dan terlibat dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik baik dalam bentuk perizinan maupun dalam pemberian pengerjaan proyek yang sumbernya dari keputusan daerah setempat dimana mereka memberi- kan bantuannya. Pola pembentukan ini yang seringkali masih saja terjadi bilamana semarak pagelaran kontestasi pemilihan calon kepala daerah. Semaraknya kejadian-kejadian yang memiliki motif yang sama yang terjadi pada tatanan aras makro (Nasional), mezo (Provinsi), dan mikro (Kabupaten/Kota). Dengan demikian kondisi ini juga sudah tersebar luas di kalangan warga masyarakat bahwasanya sebagian dari kebijakan politik tersebut adalah terselip beberapa kepentingan peng- usaha (pemodal yang memberikan bantuannya) kepada calon kepala daerah.

B. Pola Relasi Ekonomi Politik

Pada bagian ini settingan uraian perihal relasi penguasa dengan pengusaha dalam atmosfer ekonomi politik di Kabupaten Maros yang selanjutnya memetakan realitas dalam bentuk praktik sosial. Kondisi atmosfer ekonomi politik terbentuk berkat ‗jalinan kasih penguasa dengan pengusaha' yang terbangun dan terbentuk dari koalisi yang sebelumnya terlebih dahulu terbentuk dalam pusaran atmosfer politik. Pusaran atmosfer politik ini selanjutnya akan berimbas kepada

atmosfer konomi politik sebagaimana yang terdapat di Kabupaten Maros. Atmosfer ekonomi politik adalah bentuk dari pemberian kebija- kan yang dilakukan bagi penguasa yang berhasil memenangkan kontestasi pertarungan dalam pemilihan calon kepala daerah yang ber- dampak kepada balas jasa bagi pengusaha yang telah berkontribusi.

Proses utama pada pemilihan kepala daerah, berbeda dengan pemilihan calon anggota legislatif oleh karena pemilihan kepala daerah disebabkan pertarungannya besar dan sangat kompetitif maka *cost* politiknya juga besar. Bilamana kita mengecek di pelaporan keuangan mereka total yang ada jumlah kekayaannya dengan cost politik yang dipakai tidak akan muncul. Maka dengan sendirinya dia (calon kepala daerah) membutuhkan suplai modal dari pihak-pihak luar.

Berdasarkan data informan diketahui bahwa ibarat dua sisi keping mata uang, maka wilayah hingga negara tidak akan bisa *survive* manakala dalam proses perumusan kebijakan seringkali menyisipkan kepentingan bagi mereka yang terlibat dalam proses pemilihan calon kepala daerah. Mereka yang terlibat adalah para pengusaha yang me- miliki sumbangan bantguan modal dan memiliki peran sesuai dengan bentuk-bentuk kerjasama yang sebelumnya telah disepakati. Tidak mengeherankan bilamana di suatu kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, bilamana ada sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi dan harapan warga masyarakat. Karena kebijakan tersebut sudah terlebih dahulu disisipkan oleh berbagai macam kepentingan diantara aktor pengusaha yang berhasil memenangkan calon kepala daerah dalam perebutan kursi kekusaan. Mereka adalah sektor swasta atau dalam hal ini adalah aktor pengusaha yang seringkali diharapkan dapat mendatangkan moderat namun tidak sedikit yang mendatangkan petaka bagi warga masyarakat. Dalam penegsannya terdapat sanggahan yang dilakukan oleh inforaman ASA, perihal adanya dugaan-dugaan praktik kecurangan perihal meloloskan tender proyek atau proyek penunjukan langsung yang dilakukan oleh penguasa. Data informan ini berkembang melalui kutipan penegasan wawancara berkenaan dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang di dalamnya terselip

berbagai

macam dan ragam kepentingan. Seperti misalnya kepentingan dalam memenangkan sebuah tender proyek yang diadakan oleh pemerintah.

Lebih lanjut informan ASA, mengaskan bahwasanya dalam proses tender dan lelang mereka bekerja secara profesional dan men- junjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas. Pihaknya tidak memandang adanya faktor kedekatan yang terjadi diantara penguasa dengan pengusaha dalam proses tender maupun lelang proyek yang dilaksanakan pemerintah (penguasa).

Berdasarkan dari penegasan data wawancara informan ASA, maka diketahui bahwasanya dalam proses tender proyek maupun pe- nunjukan langsung proses yang berjalan sudah sesuai dengan mekanis- me yang diberlakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang- undangan perihal barang dan jasa. Titipan-titipan proyek maupun kebijakan-kebijakan yang selama ini dianggap sebagai sebuah alat kontroversial dibantah oleh informan ASA, melalui penegasannya karena sudah melewati proses yang amat sulit dan berjalan sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya, wawancara yang dilakukan penulis bersama Direktur PT. Trifa Cahaya Gumilang Makassar, Bapak BJ, S.Si., M.Si. (33 tahun) tentang pola relasi penguasa dengan pengusaha dalam atmosfer ekonomi politik dalam pola relasi penguasa dan pengusaha di Kabupaten Maros. Sebagaimana penegasan ini diperoleh dari fenomena yang dialami oleh pengusaha yang diketahui bahwa untuk mengerjakan sebuah proyek pemerintah diperlukan pengalaman kerja selama 5-10 tahun baru perusahaan tersebut dinyatakan lulus dan berhak untuk ikut berkompetisi dalam lelang proyek.

Berdasarkan penegasan informan BJ, maka diperoleh keterangan bahwasanya kondisi yang terjadi sudah sesuai dengan ketentuan dan prasyarat yang diberlakukan oleh pemerintah (penguasa) tidak me- nampakkan adanya faktor hubungan diantara penguasa dengan pengusaha. Semua proses berjalan dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan. Dalam penegasannya juga informan BJ, tidak memberikan keterangan bahwasanya dalam penentuan tender proyek terlebih dahulu

sudah ada terselip berbagai macam kepentingan dan titipan dari penguasa.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan penulis bersama Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak ASM (42 tahun), tentang pola relasi penguasa dengan pengusaha dalam atmosfer politik di Kabupaten Maros, sebagaimana yang ditegaskan melalui data wacana tentang akan didirikannya perusahaan semen asal Negara China PT. Conch, untuk melihat pola relasi diantara penguasa dan pengusaha dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Kecamatan Simbang yang terletak di Kabupaten Maros.

Berdasarkan data informan Asm, maka diperolehpenegasan pola yang terjadi hampir memiliki kesamaan dengan pola yang terjadi di PT. Freeport yang terletak di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Di mana diduga adanya politik konspirasi diantara lembaga legislatif dan kelompok pengusaha untuk melakukan lobbi politik kepada penguasa dapat memperoleh perpanjangan izin perusahaannya. Kalau ditarik
_benang merahnya' apa yang ada di Provinsi Papua lebih kepada motif untuk mengejar keuntungan saham. Di mana terjadinya penawaran transaksi saham diantara anggota legislatif yang menginginkan nilai sahamnya dinaikkan menjadi 10%. Sebaliknya pihak PT. Freeport belum sepenuhnya menyetujui usulan dari anggota legislatif yang meminta penawaran harga tersebut. Kesamaan kasus PT. Freeport Indonesia dengan PT. Conch adalah segala keputusannya berada di tangan penguasa.

Dengan mempertimbangkan segala aspek keuntungan dan kerugian. Melalui rencana akan didirikannya perusahaan PT. Conch di Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, maka dengan sendirinya akan mampu menyerap dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal, namun sebaliknya dampak negati yang mencolok adalah kerusakan ekologi karts dan juga biota-biota yang terletak disekitar wilayah operasional perusahaan. Hal inilah yang menjadi sebuah pertentangan di kalangan pemerhati lingkungan hingga masyarakat lokal.

Selanjutnya, fenomena ini akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan serta konstruksi berpikir yang analitis bagi kelompok penguasa, bilamana hanya mengejar keuntungan semata dengan meng- gadaikan potensi sumber daya alamnya maka hal ini masih perlu untuk direnungkan secara seksama. Oleh karena, masih banyak potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk mendatangkan devisa bagi pembangunan wilayah dengan tidak merusak ekologi karts wilayah tersebut.

Berdasarkan data informan, maka eksistensi jumlah pertumbuhan perusahaan diketahui berkorelasi dengan semaraknya hubungan diantara penguasa dan pengusaha. Ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perusahaan di Kabupaten Maros. Selain dari eksistensi perusahaan besar juga ada yang namanya perusahaan yang bergerak di sektor firma dan sejenisnya. Umumnya perusahaan firma ini mereka yang bergerak untuk menangani proyek-proyek yang di- programkan oleh pemerintah. Mereka pulalah yang seringkali untuk ditunjuk sebagai pihak ketiga dalam pengerjaan proyek pembangunan.

Selanjutnya, dari kegiatan perusahaan firma tersebut juga di- ketahui bahwa mereka umumnya mengerjakan proyek dari pemerintah melalui proses penenderan maupun penujukan langsung. Dalam hal ini, dalam proses penenderan pihak yang berkompeten dan diberikan tanggung jawab adalah lembaga LPSE. Dalam hal ini akan dilihat motif netralitas dan tidak berpihaknya lembaga LPSE dalam menjalan- kan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan data informan Asm, maka diketahui bahwasanya proyek tender yang dilakukan oleh pemerintah (penguasa) meskipun melalui kontrol yang kuat tetapi masih saja memiliki celah untuk dilakukan sebuah praktik kecurangan-kecurangan yang didalamnya ter- dapat kepentingan dan mengejar keuntungan. Praktik kecurangan ini seringkali didapati akibat dari kelalaian atau pengawasan yang tidak terlalu ketat dari pemerintah, sehingga praktik kecurangan pun tidak dapat dihindari lagi.

Wawancara lainnya juga dilakukan penulis bersama tokoh masyarakat Kabupaten Maros juga sekaligus anggota legislatif periode tahun 2004-2014 F-PAN, Bapak Dr.RH, S.H., M.H. (54 tahun), perihal pola relasi penguasa dengan pengusaha dalam atmosfer ekonomi politik. Dugaan tentang upaya krusial mengenai tender proyek maupun penunjukan langsung yang dilakukan oleh kelompok penguasa dengan pengusaha adalah bagian dari skenario maupun rekayasa yang dilaku- kan oleh kelompok penguasa. Alhasil, memunculkan hipotesis bahwa pengusaha yang berhasil mengerjakan proyek dari penguasa (lembaga eksekutif dan legislatif) adalah hasil kongkalikong. Proyek tersebut sudah diatur dan disetting sedemikian rupa agar kelak dikerjakan oleh pengusaha yang telah ditunjuk sebelumnya.

Dari faktor relasi yang terjadi diantara kelompok penguasa dan kelompok pengusaha dalam pola atmosfer politik Maros. Adanya dugaan bahwa diantara anggota legislatif juga ada yang berprofesi sebagai pengusaha. Mereka yang awalnya memiliki latar belakang sebagai pengusaha maupun setelah menjadi anggota legislatif mendiri- kan sebuah perusahaan untuk menerima dana bantuan sosial yang selanjutnya dianggarkan dalam bentuk pembangunan masyarakat. Namun pada nyatanya hal tersebut fiktif, setelah dilakukan pengecekan kembali didapati perusahaan yang dimaksud tidak terdaftar dan tidak memiliki badan hukum.

Dalam memutuskan sebuah kebijakan dan regulasi, nyatanya syarat dengan berbagai bentuk kepentingan. Kepentingan yang di- maksud umumnya mengarah kepada kepentingan politik dan bisnis. Mereka yang mendominasi kepentingan politik dan bisnis adalah yang masuk dalam lingkaran kekuasaan dan tim sukses pemenangan ketika pemilihan kepala daerah. Selain dari pada masalah kebijakan juga seringkali terdapat perusahaan-perusahaan yang ikut tender adalah perusahaan yang tidak terdaftar dalam jenis perusahaan yang selama ini diakui oleh pemerintah (perusahaan bodong). Perusahaan bodong ini seringkali memanfaatkan momen-momen di saat perumusan kebijakan perihal proyek pembangunan, sehingga kondisi ini yang mengakibat-

kan kerugian yang tidak sedikit ditanggung oleh pemerintah melalui gelontoran dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/ Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang merupakan bagian dari pembangunan untuk warga masyarakat. Fenomena inilah yang melatarbelakangi mencuatnya pola relasi penguasa dengan pengusaha dalam atmosfer ekonomi politik di Kabupaten Maros.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan RH, maka diketahui dalam proses pengambilan kebijakan khususnya masalah tender proyek dan penunjukan langsung terdapat peran kelompok yang menamakan dirinya sebagai _pandawa lima'. Aktor dalam kelompok ini yang diduga seringkali memainkan perannnya dalam penentuan lolos tidaknya sebuah proyek tersebut dilaksanakan, serta besaran anggaran yang akan direalisasikan oleh pemerintah (penguasa). Aktor yang memiliki kedekatan dengan kelompok _pandawa lima' ini meru- pakan umumnya memiliki rekasi politik dengan penguasa yang se- belumnya telah memberikan dukungan politiknya pada proses pemilihan calon kepala daerah yang berujung kepada upaya balas budi yang dilakukan oleh penguasa kepada pengusaha yang mengikut- sertakan perusahaannya dalam proses tender dan lelang proyek.

Kondisi tersebut juga tidak menutup kemungkinan terdapatnya upaya kongkalikong yang dilakukan oleh penguasa dengan pengusaha dalam proses pengerjaan proyek yang diberikan wewenangnya kepada pengusaha yang telah memberikan dukungannya. Dalam konteks ini peran lembaga legislatif sebagai lembaga wakil rakyat sendiri jarang untuk diikutsertakan dalam proses perumusan kebijakan dan arah pem- bangunan. Kondisi yang terjadi adalah nanti setelah pembangunan selesai dikerjakan barulah lembaga legislatif mengetahui bahwasanya telah terjadi pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh rekanan yang me- miliki relasi politik dengan penguasa. Fenomena ini seringkali menjadi tumpang tindih dalam penentuan kebijakan utamanya dalam kebijakan pemberian pengerjaan proyek yang dilakukan kepada pengusaha.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan bersama anggota legis- latif Komisi III Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Maros, Bapak AE,

S.Sos (46 tahun), tentang pola relasi penguasa dengan pengusaha dalam atmosfer politik.

Berdasarkan data hasil wawancara informan AE, diketahui bahwasanya terdapat praktik kekuasaan yang sepenuhnya hanya di- pegang dijalankan oleh lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif yang memegang kendali adalah kepala daerah. Kepala daerah hanya sedikit memberikan ruang gerak bagi lembaga legislatif untuk melakukan pe- rencanaan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros. Dalam aplikasinya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijalankan tidak sesuai dengan aspirasi warga masyarakat melainkan diambil dari visi-misi ketika masa kampanye calon kepala daerah. Alhasil, dimensi kekuasaan inilah yang akan menggiring kepada kurang optimalnya pelaksanaan RPJMD yang sepenuhnya tidak sesuai dengan aspirasi warga masyarakat.

Berdasarkan data dari informan AE, diketahui bahwasanya untuk mengembalikan citra dari anggota legislatif secara proporsional adalah harus bergulat pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), hal ini dikarenakan lembaga legislatif harus bergerak secara profesional daripada secara institutional, karena lembaga legislatif juga harus memiliki peran dalam merencanakan pembangunan, sehingga di- harapkan jauh dari titipan-titipan politik dan bisnis.

Dalam hal ini lembaga legislatif juga memiliki hak dan wewenang perihal penyusunan kebijakan khususnya dalam pemberian dan perpanjangan izin usaha, dan pemberian atau penunjukan langsung proyek yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun demikian, kondisi yang terjadi adalah malahan sebaliknya. Dari hasil investigasi dan eksplorasi data wawan- cara informan AE, maka diketahui bahwasanya lembaga legislatif merasa _dikebiri‘ dan sedikit sekali diberikan tempat untuk meng- ekspresikan hak-hak politiknya perihal pembangunan, sehingga yang terjadi adalah tumpang tindih kebijakan diantara legislatif dan ekse- kutif. Dengan demikian, maka akan menimbulkan sebuah proses yang

alot bilamana kondisi yang akna berujung kepada perpecahan dalam merumuskan sebuah kebijakan dalam pemerintahan yang berujung kepada perbedaan pendapat diantara kedua lembaga.

Sebagaimana yang dijelaskanoleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros melalui salah satu anggota DPRD, Drs. Sudirman, tentang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Maros (anggota DPRD nilai ada anggaran belanja mengada-ada). Pembahasan anggaran RAPBD Maros Tahun Anggaran 2002 di DPRD setempat berlangsung alot. Bahkan beberapa diantara anggota dewan cukup kritis mempersoalkan daftar anggaran belanja daerah. Mereka menilai ada diantaranya mengada-ada dan tidak masuk akal, sebagaimana yang ditegaskan oleh Sudirman, bahwa pembahasan RAPBD untuk satu tahun ini lebih baik dibahas dengan baik walau harus mulur dari waktu yang ada. Karena dikhawatirkan bila pembahasan yang kesannya dipaksakan akan membuahkan hasil yang kurang baik. Pihak kami harus memperjuangkan dan meng- usahakan pembahasan RAPBD ini selesai tepat waktu (Koran Fajar {Metro Makassar}, edisi Selasa, 6 Februari 2002. *Alot Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Maros; Anggota DPRD Nilai Ada Anggaran Belanja Mengada-ada*).

Berdasarkan informasi tersebut diperoleh penjelasan bahwa pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) lembaga legislatif dalam pola hubungannya dengan lembaga eksekutif tidak berjalan dengan optimal. Lembaga legislatif tidak setuju dengan alokasi APBD yang dinilainya terdapat data yang direkayasa. Selanjut- nya, lembaga legislatif meminta agar mekanisme pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) diundur pelaksanaan- nya. Hal ini dinilai penting agar pemanfaatan APBD sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat.

Berikutnya, informasi tentang belanja rutin naik 24,25% DPRD Maros tetapkan APBD 2002. Setelah melalui pembahasan yang cukup alot yang mengakibatkan penetapannya molor dari jadwal yang di- tentukan, akhirnya dua Peraturan Daerah (Perda) disahkan DPRD

Maros. Kedua Perda yang dimaksud mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maros Tahun Anggaran 2002 bersama Peraturan Daerah (Perda) No. 2/2002 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros untuk bekerja lebih baik, efektif dengan kemampuan yang optimal, sebagaimana yang ditegas- kan oleh Nadjamudin Aminullah bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Maros selama 2002. Dengan demikian, APBD merupakan rencana pelaksanaan seluruh pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tahun ini. Alhasil, pe- mungutan seluruh penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan (Koran Fajar {Metro Makassar},edisi Selasa, 12 Februari 2002. *Belanja Rutin Naik 24,25% DPRD Maros Tetapkan APBD 2002*).

Selanjutnya informasitentang DPRD Kabupaten Maros tetapkan 21 Perda, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nadjamuddin Aminullah, bahwa hal ini merupakan indikator betapa transparannya suatu proses pembahasan pengambilan kebijakan publik dengan tidak memaksakan suatu kehendak kepada siapapun. Adapun diantara 21 Perda yang di- tetapkan tersebut seperti, Perda No. 15/2002 tentang usaha pariwisata, Perda No. 16/2002 tentang retribusi izin usaha kepariwisataan, Perda No.17/2002 tentang retribusi jasa pelabuhan sungai dan tempat pen- daratan kapal, Perda No.18/2002 tentang retribusi pengukuran, pen- daftaran, pemberian surat tanda kebangsaan kapal, sertifikat, ke- sempurnaan kapal ukuran isi kotor lebih kecil dari gross tonase (GT.7) (Koran Fajar {Metro Makassar}, edisi Kamis, 19 Desember 2002. *DPRD Kabupaten Maros Tetapkan 21 Perda*).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melalui ke- kuasaannya membuat regulasi yang mengatur pungutan dari izin be- berapa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Maros. Adanya regulasi yang dibuat oleh penguasa bertujuan untuk meraup ke- untungan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, informasi tentang Maros butuh dana pembangunan besar, sebagaimana yang ditegaskan oleh

Nadjamuddin Aminullah bahwa kondisi keuangan daerahnya yang membutuhkan dana pembangunan yang besar, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Pada tahun 2000 diupayakan beberapa proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni. Proyek-proyek tersebut sangat vital, khususnya untuk menunjang pelayanan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Maros. Proyek pembangunan kantor Bupati Maros yang baru dan perampu- ngan pasar raya Maros. Kedua proyek tersebut yang berlokasi di kawasan pengembangan kota baru Maros ini sungguh membutuhkan dan yang cukup besar. Untuk pembangunan kantor bupati saja mem- butuhkan dana sebesar Rp. 4.000.000.000., belum lagi untuk perampu- ngan pembangunan pasar raya Maros (Koran Fajar {Metro Makassar}, edisi Selasa, 11 Januari 2000. *Maros Butuh Dana Pembangunan Besar*).

Selanjutnya informasi Dinas Kesejahteraan Sosial (Diksos), tentang Diksos Maros sosialisasikan bantuan terminasi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Sudarman bahwa pemberian bantuan kepada para eksodus yang ada di Kabupaten Maros selama ini mampu meringankan kesulitan mereka. Makanya sosialisasi ini dimaksudkan untuk mem- berikan pemahaman pada para pendamping untuk menyongsong bantuan tersebut (Koran Fajar {Metro Makassar},edisi Jum‖at, 24 Desember 2002. *Diksos Maros Sosialisasikan Bantuan Terminasi*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguasa memberikan bantuan sosial yang bersifat terminasi bagi beberapa eksodus di Kabupaten Maros yang bertujuan untuk meringankan beban mereka. Bantuan ini dikerjakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial (Diksos) yang juga seka- ligus sebagai pendamping dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Dari data wacana bantuan untuk eksodus yang diproduksi oleh Dinas Kesejahteraan Sosial (Diksos), kini wacana bergulir yang diproduksi oleh Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dan Asosiasi Rekanan Barang dan Distributor Indonesia (Ardin) Kabupaten Maros Ilham Burhanuddin, S.H., M.B.A.,

tentang pengusaha dukung Pemkab Maros (pemanfaatan DAU berskala prioritas). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros harus memberikan skala prioritas dalam pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Maros yang sebesarnya Rp.147.500.000.000., sebagaimana yang ditegaskan oleh Ilham Burhanuddin, bahwa pada dasarnya pihak- nya mendukung sepenuhnya pelaksanaan pembangunan yang kini di- laksanakan Pemkab Maros di bawah kepemimpinan Bupati Drs. H. A. Nadjamuddin Aminullah, M.S. Untuk kesejahteraan masyarakat lebih meningkat maka Pemkab harus memanfaatkan DAU yang diterima berdasarkan skala prioritas, meski tetap berdasarkan peraturan atau ketetapan yang ada (Koran Fajar {Metro Makassar},edisi Rabu, 8 Maret 2003. *Pengusaha Dukung Pemkab Maros; Pemanfaatan DAU Berskala Prioritas*).

Berdasarkan informasi yang dilontarkan oleh Ketua Gapensi yang mendukung sepenuhnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Disamping itu, juga memberikan saran dan masukan agar memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kepentingan pening- katan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Maros yang me- miliki standar skala prioritas di Kabupaten Maros.

Beranjak dari kondisi tentang pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU), selanjutnya menuju kepada informasi tentang APBD Kabu- paten Maros tahun 2003 disahkan (Bupati: layanan ke masyarakat lebih baik), sebagaimana yang ditegakan oleh Nadjamuddin Aminullah bahwa perubahan struktur APBD yang berbasis pada anggaran kinerja diharapkan dapat menyempurnakan berbagai kelemahan pada pelaksa- naan APBD di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga dapat lebih transparan yang melingkupi proporsi pendapatan, belanja, dan pem- biayaan. Asumsi dasar penyusunan APBD tahun 2003 ini adalah untuk membenahi pertumbuhan ekonomi daerah, adanya peningkatan pada sektor penerimaan pajak dan retribusi daerah (Koran Fajar {Metro Makassar}, edisi Senin, 17 Maret 2003. *APBD Kabupaten Maros Tahun 2003 di Sahkan; Bupati: Layanan ke Masyarakat Lebih Baik*).

Berdasarkan kondisi ersebut, maka diperoleh penjelasan bahwa- sanya alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk membenahi pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan eko- nomi di daerah ini diikuti dengan meningkatnya sektor penerimaan pajak dan retribusi. Selanjutnya melalui Kepala Bappeda Drs. Syamsu Alam Ibrahim, tentang P2KP Anggarkan Rp.2.300.000.000., di Maros. Terdapatnya empat kecamatan yang tercakup dalam wilayah perkotaan di Kabupaten Maros bakal memperoleh alokasi dana sebesar Rp.2.300.000.000., dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Per- kotaan (P2KP). Dana tersebut diperuntukkan bagi keluarga pra- sejahtera (miskin) yang tergabung dalam kelompok mandiri setelah sebelumnya mendapat pembelajaran manajemen usaha dari Konsultasi Manajemen Wilayah (KMW) VII.

Syamsu Alam Ibrahim menegaskan bahwa pemerintah Kabu- paten (Pemkab) Maros sekarang sudah memiliki Peraturan Daerah mengenai partisipasi pembangunan masyarakat yang bisa disinergikan dengan proyek tersebut. Di tiap wilayah seperti kelurahan, kecamatan, dan kabupaten sudah memiliki semacam lembaga yang berunsurkan elemen masyarakat, lembaga tersebut disebut sebagai *Tudang Sipulung*. Dalam hal ini masyarakat masih memiliki keterbatasan tentang usaha apa yang nantinya dia kelola untuk dijadikan sebagai bagian dari program pembangunan masyarakat. Oleh karenanya, dengan kekurangan tersebut maka pihak pelaksana melakukan pem- binaan dan pelatihan terhadap potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang mereka kembangkan yang dijadikan acuan dalam program prioritas (Koran Fajar {Metro Makassar-Sungguminasa}, edisi Kamis, 5 Februari 2004. *P2KP Anggarkan Rp.2.300.000.000., di Maros*).

Selanjutnya informasi perihal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, tentang pembangunn jalan dianggarkan Rp.2.000.000.000. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan per- baikan jalan di Kabupaten Maros. Pelaksanaan proyek dibagi ber- dasarkan perkecamatan. Tiap kecamatan PNPM Mandiri meng- anggarkan sebesar Rp.2.000.000.000., dengan lebar dan

panjang jalan

yang bervariasi sesuai dengan kebutuhannya. Perbaikan/pembangunan jalan juga dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Ada yang hanya sekadar pengerasan, ada pembangunan jalan tani, paving block, bahkan jalan beton, sebagaimana yang ditegaskan oleh A. Azis, bahwa dari seluruh proyek perbaikan/pembangunan jalan yang dilaksanakan lembaganya jalan paving block yang dilaksanakan disalah satu Desa di Kabupaten Maros yang terletak di Desa Minasabaji Kecamatan Bantimurung yang tercepat pelaksanaannya. Panjang jalan 716x2,5 meter dan menghabiskan anggaran sebesar Rp.269.038.700. lebih lanjut, anggaran tersebut diperoleh dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp.265.763.700., dan dana Swadaya Rp.3.275.000., yang membutuhkan proses pengerjaan 30 hari kerja yang dimulai pada tanggal 25 Oktober 2010 (Koran Fajar {Pamminasata}, edisi Sabtu, 27 November 2010. *Pembangunan Jalan Dianggarkan Rp.2.000.000. 000*).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diketahui bahwa peruntukan pembangunan cenderung mengarah perbaikan/pembangunan infra- struktur jalan bagi warga masyarakat yang menggunakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Perbaikan/pembangunan ini diharapkan mendukung segala aktivitas bagi warga masyarakat, khususnya yang menggunakan fasilitas transportasi darat. Oleh sebab itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Maros Kamaluddin Nur, tentang Moncongloe-Bantimurung ditenderkan. Rencana Pemerintah Kabu-paten (Pemkab) Maros untuk memperbaiki jalur jalan Moncongloe-Bantimurung segera terealisasi. Upaya ini di-lakukan untuk mempersingkat waktu tempuh dan sebagai jalur alternatif menuju kawasan wisata Bantimurung. Selanjutnya, diharap-kan nantinya wisatawan asal Kota Makassar maupun Kabupaten Gowa dapat menghemat waktu tempuhnya menuju Bantimurung. Akses jalan dari ujung jalan Paccerakkang ini panjangnya sekitar 40 Km ke Kecamatan Bantimurung, sebagian besar jalannya mengalami rusak parah, sehingga akan dilakukan upaya betonisasi (Koran Fajar

{Metropolis-Gowa-Maros}, Edisi Senin, 27 Februari 2012. *Maret, Moncongloe-Bantimurung Ditenderkan*).

Beranjak kondisi tersebut, maka diketahui bahwa penguasa fokus untuk memperbaiki dan membenahi infrastruktur jalan utamanya yang sudah tidak layak digunakan lagi. Hal ini nampak dari wacana yang akan dikerjakan di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Di mana infrastruktur jalan sudah mengalami kerusakan, sehingga Pemerintah Kabupaten Maros lewat kuasanya melakukan upaya untuk perbaikan jalan.

Selanjutnya, data wacana oleh Pemerintah Kabupaten Maros melalui Kepala Bidang Dinas Pengelolaan Keuangan (DPK) Maros Drs. Nasrun, tentang utang Pemkab Rp.26.900.000.000. Utang Pemerintah Kabupaten Maros terus mengalami pengurangan jika mengacu pada pada tahun 2010 yang mencapai sebesar Rp.63.000.000. 000., kini berkurang menjadi Rp.26.900.000.000., pada saat itu Pemkab Maros telah membayar hutangnya sebesar Rp.36.100.000. 000., sebagaimana yang ditegaskan Nasrun bahwa meski belum di- lunasi secara keseluruhan Pemkab terus mengupayakan membayar utangnya ke rekanan di mana Pemkab akan terus melakukan upaya untuk melunasi utangnya ke rekanan. Dengan catatan semua berkas dan dokumen rekanan sudah dinyatakan lengkap. Jumlah utang ter-sebut masih bersifat sementara, karena akan terus bertambah sesuai dengan laporan Satuan Kerja Perangkat Daserah (SKPD) yang dikuatkan dengan rekomendasi Inspektorat Kabupaten. Oleh sebab itu, pembayaran utang Pemkab Maros untuk tahun 2010 menggunakan Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab Maros dan penguatan arus kas tahun 2010 Rp.30.000.000.000., yang berasal dari Bank Sul- Sel Cabang Maros. Diharapkan setiap SKPD lebih proaktif untuk me- laporkan kondisi keuangannya baik diminta maupun tidak diminta (Koran Fajar {Pamminasata}, edisi Rabu, 1 Juni 2011. *Utang Pemkab Rp.26.900.000.000*).

Berdasarkan informasi oleh Kepala Bidang Dinas Pengelolaan Keuangan (DPK) Maros, Drs. Nasrun, diketahui bahwa Pemerintah

Kabupaten Maros melalui kuasanya mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk melakukan upaya pelunasan utang kepada para rekanan yang telah melakukan kerjasama dengan Pemkab Maros. Selain itu juga harapan Bupati Maros, agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih melakukan upaya proaktif agar me- laporkan kondisi keuangan didinas masing-masing.

Berikutnya, upaya untuk membenahi sektor belanja daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB) kembali diwacanakan, tentang Pemkab Siapkan Rp.65.000.000.000. Pemerintah Kabupaten Maros harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar yang sedikitnya Rp.65.000.000.000., anggaran untuk disiapkan untuk membayar gaji pegawai, gaji-13, dan beberapa tunjangan lainnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Hatta Rahman bahwa Kabupaten Maros butuh Rp23.000.000.000., untuk bayar gaji dan Rp.22.000.000. 000., untuk bayar gaji-13. Selain itu masih ada kebutuhan lainnya misalnya pembayaran Anggaran Dana Desa (ADD) anggaran PNPM- Mandiri dan tunjangan untuk guru mengaji, imam dusun hingga imam desa (Koran Fajar {Metropolis}, edisi Rabu, 20 Juni 2011. *Pemkab Siapkan Rp.65.000.000.000*).

Upaya yang dilakukan oleh Kepala Daerah untuk memperbaiki sektor belanja daerah ini bertujuan untuk memberikan gaji 13 kepada pegawai negeri sipil, peruntukan Anggaran Dana Desa (ADD), anggaran bantuan PNPM-Mandiri, dan tunjangan fasilitas bagi guru mengaji dan imam mesjid di Kabupaten Maros.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros, melalui Ketua Komisi II DPRD Maros, Akbar Endra, tentang prioritas- kan program pro rakyat. Anggota DPRD Maros meminta agar APBD tahun 2012 lebih memprioritaskan program pro rakyat. Utamanya pen- didikan dan kesehatan gratis, berikut penegasan Akbar Endra bahwa draft Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 yang telah diserahkan eksekutif juga perlu menitikberatkan pada program yang prioritas pro rakyat, misalnya pembanguan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan irigasi. Karena kalau pendidikan gratis

sudah menjadi program nasional, dan sudah memiliki alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Koran Fajar
{Metropolis}, edisi Rabu, 24 November 2011. *Prioritaskan Program Pro Rakyat*).

Selanjutnya informasi mengenai Cekdam Lekopancing dianggar- kan Rp.1.500.000.000. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros akan membangun cekdam di Desa Lekopancing yang terletak di Kecamatan Tanralili, sebagaimana yang ditegaskan oleh Hatta Rahman bahwa rencana pembangunan infrastruktur Cekdam ini tujuannya adalah ter- kait dengan pengairan ke sawah-sawah petani di tiga kecamatan, yakni; Kecamatan Tanralili, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Mandai. Harapannya dengan adanya cekdam tersebut maka sedikitnya sekitar
10.000 Ha sawah dapat digarap pada musim kemarau. Oleh karenanya, selama ini sawah-sawah tersebut hanya dipergunakan sebatas sawah tadah hujan, sehingga pada musim kemarau petani tidak dapat meng- garap sawahnya oleh karena air bendungan di Lekopancing mengalir semuanya ke Kota Makassar. Cekdam yang akan dibangun ialah sepanjang 150 meter dengan anggaran pembangunan sebesar Rp.1.500.000.000., (Koran Fajar {Pamminasata}, edisi Selasa, 6 April 2011. *Cekdam Lekopancing Dianggarkan Rp.1.500.000.000*).

Selanjutnya informasi kesejahteraan melalui Anggaran Pen- dapatan Belanja Daerah (APBD) ini diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros agar tepat sasaran, sehingga mampu meng- optimalkan pemanfaatan sawah dibanding dengan kondisi sebelumnya. Situasi tersebut disambut melalui pernyataan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Maros Drs. H. M. Salim, bahwa pengerjaan Cekdam akan dilakukan setelah pengumuman tender, oleh karenanya tahun ini pembangunan cekdam akan ditargetkan selesai, sehingga pada musim tanam tahun depan sudah dapat dimanfaatkan oleh petani (Koran Fajar
{Pamminasata}, edisi Selasa, 6 April 2011. *Cekdam Lekopancing Dianggarkan Rp.1.500.000.000*).

Adanya dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum Maros Drs. H.

M. Salim, dari unsur lembaga eksekutif membuktikan bahwasanya

eksekutif sangat mendukung segala upaya wacana yang diproduksi oleh kepala daerah. Selanjutnya data wacana pembangunan pasar Tradisional Modern (Tramo) yang terletak di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, akan tetap dilanjutkan. Menurut Hatta Rahman, bahwa banyaknya sorotan mengenai tersendatnya pembangunan pasar yang beranggaran Rp.300.000.000.000. Pasar Tramo ini merupakan kelanjutan dari Bupati periode Tahun 2004-2009 Drs. Nadjamuddin Aminullah, M.Si., (Koran Fajar {Pamminasata}, edisi Kamis, 28 April 2011. *Pembangunan Pasar Tramo Dilanjutkan*).

Berdasarkan informasi data wacana yang diproduksi oleh Bupati Maros tentang pembangunan pasar tradisional modern yang diketahui bahwa merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya dilakukan oleh periode Bupati Maros Drs. Nadjamuddin Aminulah, M.S., sebelumnya mengalami kendala dikarenakan mendapat sorotan karena proses pembangunannya yang lama selesai juga telah melewati masa kontrak pengerjaan proyeknya. Alhasil, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap kondisi pembangunan pasar tradisi- onal modern (Tramo) tersebut. Selain itu juga pembangunan Pasar Tramo ini sedianya telah memakan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adanya dugaan bahwa tidak selesainya pembangunan Pasar Tramo ini disebabkan karena masalah pembayaran yang belum diselesaikan kepada pihak rekanan dibantah oleh Wakil Ketua DPRD Maros, A.S Chaidir Syam, bahwa Pemda telah membayar ke rekanan sebesar RP.1.800.000.000. Dengan harapan setelah dibayarkan diharapkan rekanan bisa menyelesaikan atap pasar Tramo Maros (Koran Fajar {Pamminasata}, edisi Kamis, 28 April 2011. *Pembangunan Pasar Tramo Dilanjutkan*).

Beranjak dari data wacana yang digulirkan tentang pembangunan Pasar Tramo Kabupaten Maros, diproduksi oleh Bupati Maros Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M., tentang Pemkab Alokasikan Rp.8.000.000.000. (Buka Jalur Moncongloe-Bantimurung). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros terus membuka akses jalan baru. Pemkab Maros telah memberi prioritas terhadap jalur akses

Bantimurung yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp.8.000.000.000. Menurut Hatta Rahman, bahwa jalan sepanjang 40 Km tersebut membutuhkan anggaran Rp.50.000.000.000. Alokasi penggunaan anggaran dilakukan secara bertahap yang mulai dilakukan pada Tahun 2011. Pada tahun 2011 Pemkab Maros mengucurkan dana anggaran sebesar Rp.12.500.000.000., sumbernya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maros. Untuk tahun 2012 anggaran akan di- tambah lagi sebesar Rp.8.000.000.000., (Koran Fajar {Metropolis- Gowa-Maros},edisi Senin, 6 Februari 2012. *Pemkab Alokasikan Rp.8.000.000.000.; Buka Jalur Moncongloe-Bantimurung*).

Kondisi tersebut disambut dengan dukungan oleh lembaga legis- latif yang diwakili oleh legislator asal Partai Demokrat Akbar Endra, S.S., menegaskan bahwa hal ini merupakan langkah yang sangat bagus, oleh karenanya Kecamatan Moncongloe itu sangat tertinggal dibanding kecamatan yang lain. Belum lagi dengan kondisi jalan di Moncongloe yang rusak parah. Jadi jika di Kecamatan Moncongloe akses jalannya diperbaiki sudah sangat tepat (Koran Fajar {Metropolis-Gowa-Maros}, edisi Senin, 6 Februari 2012. *Pemkab Alokasikan Rp.8.000.000.000.; Buka Jalur Moncongloe-Bantimurung*).

Selanjutnya, melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pemerintah Kabupaten Maros Kamaluddin Nur, tentang Pemkab akan bangun hotel di Bantimurung. Kawasan wisata Bantimurung mulai dibenahi. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp.30.000.000.000. Sebagian dana tersebut diperuntukkan untuk membangun hotel dan fasilitas lainnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Kamaluddin Nur bahwa untuk tahap pertama pada APBD Tahun 2012 dialokasikan anggaran Rp.10.000.000.000. Dana itu diperuntukkan untuk perbaikan infrastruktur dalam kawasan objek wisata. Hal ter- sebut sejalan dengan pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Maros Rahmat Burhanuddin, bahwa dana Rp.10.000.000.000., rencananya di- gunakan untuk pengembangan loket dipintu gerbang serta peruntukan pembangunan halte bus dan pintu parkir. Dari hasil wacana ini di- temukan bahwa upaya Pemkab untuk fokus dalam pengembangan

sarana infrastruktur objek wisata dengan mengalokasikan dana APBD dan juga terkait dengan kepentingan ekonomi politik Kabupaten Maros dalam hal mendatangkan devisa bagi pengembangan wilayah (Koran Fajar {Metropolis-Gowa-Maros}, edisi Jum‖at, 10 Februari 2012. *Pemkab Bangun Hotel di Bantimurung*).

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan pembangunan yang di-arahkan kepada fasilitas sarana perhotelandan fasilitas pendukung lainnya yang terletak di Kecamatan Bantimurung. Dana untuk proyek pembangunan hotel dan fasilitas lainnya adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun 2012. Proyek pembangunan hotel ini diharapkan untuk mem- promosikan destinasi wisata alam yang terletak di Kecamatan Banti- murung.

Selanjutnya, data wacana tentang 2012, Pemkab target lunasi utang, sebagaimana yang ditegaskan oleh Hatta Rahman, bahwa utang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros ke Pemerintah Pusat sekira Rp.12.000.000.000., di mana utang itu sudah ada sejak Tahun 1995. Sejak Tahun 2011 Pemkab Maros sudah melakukan pembayaran utang secara bertahap hingga Tahun 2012. Utang itu kini tersisah sebesar Rp.2.100.000.000., dan kemudian telah dibayarkan sebesar Rp.1.600.
000.000. Utang tersebut dipergunakan untuk beberapa pembangunan dan Program di Maros seperti pembangunan terminal dan program air bersih. Lebih lanjut menurut Hatta Rahman, bahwa pihaknya optimis utang-utang Maros dapat diselesaikan, sehingga pengelolaan di Kabupaten Maros bisa pulih (Koran Fajar {Metropolis-Gowa-Maros}, edisi Kamis, 2 Agustus 2012. 2012, *Pemkab Target Lunasi Utang*).

Hal ini direspon oleh pihak legislatif yakni, Wakil Ketua Komisi II Bidang Anggaran dan Pembangunan DPRD Maros, Akbar Endra, bahwa selama dua tahun terakhir ini Pemkab Maros fokus membayar utang daerah ke pihak ketiga. Lebih lanjut Akbar mengatakan, maka dari itu kita harapkan tahun ini utang-utang itu sudah bisa dilunasi (Koran Fajar {Metropolis-Gowa-Maros}, edisi Kamis, 2 Agustus 2012. 2012. *Pemkab Target Lunasi Utang*).

Informasi tentang target pelunasan hutang yang sedianya berada di beberapa rekanan—bagian dari proyek pembangunan di Kabupaten Maros. Proyek pembangunan ini umumnya adalah bersifat pem- bangunan fisik lewat tender maupun penunjukan langsung. Adanya pe- lunasan hutang dibeberapa rekanan ini disambut secara positif melalui wacana yang diproduksi oleh salah satu legislator asal Partai Demokrat Akbar Endra, S.S. Lembaga legislatif juga mengharapkan agar alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dipergunakan untuk melunasi beberapa hutang yang berada di rekanan dengan harapan Kabupaten Maros dapat membangun daerahnya dengan mem- pertimbangkan segala tunggakannya di beberapa rekanan mereka.

Dari informasi pelunasan hutang di beberapa rekanan, melalui salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) Akbar Endra, tentang DPRD Maros sahkan APBD 2015 sebesar Rp.1,1 Triliun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros bersama Pemerintah Kabupaten Maros mengesahkan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 menjadi Perda dalam rapat pari- purna di gedung DPRD Maros. Dalam APBD 2015 ini pendapatan Maros ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000.000. Sumber pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar >Rp.125.000.000. 000, dana perimbangan sebesar Rp.748.000.000.000., dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.266.000.000.000. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maros sempat mengkritisi sumber pendapatan khususnya sektor PAD. Beberapa item PAD dan retribusi daerah yang mesti digenjot terutama sektor pajak parkir bandara sebesar Rp.6.000.

000.000. serta pajak tambang Rp.14.000.000.000., sebagaimana yang ditegaskan oleh Akbar Endra, bahwa Banggar juga menyoroti beberapa hal seperti Pagu Anggaran yang disebarkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih kurang dari rencana belanja yang diusulkan SKPD misalnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang dan Dinas Kesehatan. Akibatnya terdapat beberapa kegiatan prioritas tidak dimasukkan. Namun dari postur APBD 2015 ini terdapat surplus

sebesar Rp.228.000.000., (Maros Kab.go.id.2014. *DPRD Maros Sahkan APBD 2015 Sebesar Rp.1,1. Triliun*).

Dari informasi tersebut diketahui bahwasanya Kabupaten Maros mengalami peningkatan APBD. Ini dibuktikan dengan terjadinya lonjakan pemasukan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dana lain-lain, dana sumber parkir dari Bandara Sultan Hasanuddin. Namun demikian masih tetap ada sorotan dari lembaga legislatif khususnya menyorot masalah pagu anggaran yang telah disebarkan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga Rumah Sakit Umum Salewangang Kabupaten Maros. Selanjutnya perihal APBD 2014 Maros tembus Rp.1,1 Triliun.

APBD Kabupaten Maros untuk pertama kalinya dalam sejarah menembus angka Rp1,1 Triliun. APBD Tahun 2014 ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maros di ruang rapat utama DPRD Maros. Dalam rancangan ringkas APBD 2014 disebutkan pendapatan sebesar Rp.1.037.028.157.000, sementara belanja daerah sebesar Rp.1.036.597.439.000 atau mengalami surplus sebesar Rp.430.718.

000. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.120.206.000. 000 yang terbagi atas hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dana perimbangan Rp.719.808.366.000., yang terdiri atas bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum serta dana alokasi khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.197.013.791.000., yakni pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan ke- uangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Sedangkan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai mencapai Rp.465.176.435.000 dan belanja langsung Rp.540.191.004.000. Menurut Hatta Rahman, bahwa hal ini menjadi prestasi tersendiri. Pasalnya, sejak beberapa tahun terakhir APBD Maros selalu ditetapkan tepat waktu bahkan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Ketepatan APBD dua tahun terakhir membuat pemerintah pusat mem-

berikan penghargaan seperti pemberian Dana Insentif Daerah (DID), peningkatan DAU dan DAK. Selain tembus angka Rp. 1 Triliun, pengesahan APBD ini juga tercepat di Sulsel (Maros Kab.go.id.2013. *APBD 2014 Maros Tembus Rp.1,1 Triliun*).

Informasi tersebut memberikan penegasan bahwa terjadinya peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ber- sumber dari berbagai macam sektor. Wacana ini juga menegaskan bahwasanya merupakan prestasi tersendiri bagi Kabupaten Maros untuk meningkatkan APBD-nya. Selain itu Bupati Maros juga meng- ungkapkan prestasi lainnya selama memimpin pemerintahan di Kabu- paten Maros juga termasuk kabupaten yang tercepat dalam pengesahan APBD di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya informasi tentang Realisasi PAD Maros 2014 ter- tinggi dari pajak mineral bukan logam. Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maros Tahun Anggaran 2014 yang diperoleh dari data kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Maros. Nampak bahwa PAD bersumber dari hotel dengan target Rp.300.000.000, realisasi Rp.635.000.000 Restoran, target anggaran Rp.5.000.000.000., realisasi Rp.5.300.000.000. Target hiburan, Rp.98. 000.000, realisasi Rp.31.000.000. Reklame ditargetkan Rp.1.800. 000.000, namun realisasinya hanya mencapai Rp.670.000.000. Pajak penerangan jalanan ditargetkan Rp.13.000.000.000., realisasi Rp.17. 000.000.000. Parkir ditargetkan Rp.5.000.000.000, realisasi Rp.5.200.
000.000. Pajak air tanah ditargetkan Rp.500.000.000, terealisasi hanya Rp.347.000.000. Pajak sarang burung walet ditargetkan Rp.1.000.000, realisasi nihil. Mineral bukan logam dan batuan, ditargetkan Rp.13.500.000.000, terealisasi Rp.13.900.000. BPHTB ditargetkan Rp.9.000.000.000, terealisasiRp.6.000.000.000. Target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp.11.000.000.000., dan terealisasi Rp.7.900.000.
000. Target tersebut diberikan hanya secara umum. Dibandingkan dengan target PAD Kabupaten Pangkep Tahun 2014 sebesar Rp.67.757.773.595. Terealisasi Rp.73.602.416. PAD tertinggi Rp.50.870.869.499 diperoleh oleh pajak Mineral bukan logam (Tribun

News.com. 2015. *Realisasi PAD Maros 2014 Tertinggi Dari Pjak Mineral Bukan Logam*).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara bersama Direktur dan Anggota Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Bapak Syam, S.Sos., (45 tahun) dan Bapak Drs. Her, M.Si. (45 tahun) tentang pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sejatinya melibatkan elemen dari masyarakat yang berfungsi sebagai pengontrol dan pengawasdalam pendistribusian belanja di daerah.

Dari informasi yang ditegaskan oleh informan diketahui bahwa-sanya peruntukan APBD memiliki indikasi dualisme. Pertama, APBD bagi pihak penguasa adalah sangat berperan dalam pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa ungkapan yang dikemukakan oleh lembaga eksekutif dan didukung dengan pernyataan lembaga legislatif tentang pemanfaatan serta alokasi APBD untuk pembangunan warga masyarakat di berbagai wilayah. Kedua, APBD bagi pihak LSM seringkali disalahgunakan dengan menggunakannya bukan pada tempatnya dan tidak sesuai dengan postur anggaran yang dikeluarkan hingga tahap perencanaan anggaran di RAPBD. Penyebabnya adalah LSM seringkali menemukan kejanggalan dalam pengalokasian dana APBD yang tidak sesuai dengan kapasitas dan porsi yang diterima oleh masyarakat, sehingga menimbulkan ketimpangan melalui wacana dan realitas. Wacana yang diproduksi adalah membahasakan bahwa APBD untuk kesejahteraan warga masyarakat, sedangkan realitanya adalah telah terjadi penyimpangan alokasi belanja anggaran daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi warga masyarakat. Hal ini yang sering disalahgunakan pemanfaatannya tentang penyalahgunaan APBD lewat pemanfaatan dana Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga masyarakat.

Berdasarkan penegasan data yang diperoleh melalui wawancara bahwasanya pemanfaatan dana Bantuan Sosial (Bansos) itu umumnya seringkali disalahgunakan oleh berbagai kepentingan penguasa. Kepen- tingan penguasa ini seringkali nampak dalam berbagai bentuk kegiatan bantuan yang fiktif tidak ada perusahaan yang melakukan kegiatan

proyek pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang memiliki andil dalam pemerintahan. Seluruh kegiatan di daerah yang berkaitan dengan peruntukan APBD yang memiliki program Bantuan Sosial (Bansos) seringkali disalahgunakan oleh berbagai macam pihak yang memiliki relasi dengan penguasa. Pihak ini yang mengatasnamakan program pem- bangunan, namun demikian didalamnya telah terjadi kebohongan publik dikarenakan seringkali digunakan sebagai ajang kampanye kepala daerah hingga anggota legislatif, juga berbagai macam kepen- tingan politik dan kepentingan multiaktor.

Beranjak dari dana Bansos yang menurut penegasan informan seringkali diakali hingga pada masalah penganggaran perihal peruntukan APBD yang sedianya seringkali diakali melalui program- program yang mengatasnamakan kepentingan publik namun di balik semuanya itu ada tersisipkan kepentingan politik. Program ini sering- kali diakali dengan dalih bahwasanya merupakan aspirasi dari warga masyarakat. Namun pada dasarnya tidak sesuai dengan harapan masya- rakat. Demikian halnya ketika ada program yang menjadi skala prioritas bagi pemerintah justru berbanding terbalik tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga masyarakat. Selain itu juga program yang sedianya akan dikerjakan melalui sumber dana dari APBN seringkalai dikalim sebagai keberhasilan dari kepala daerah.

Berdasarkan data informan ini diketahui bahwasanya adanya ketidaksesuaian program yang seringkali dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah seringkali membuat program yang didalamnya hanya menggunakan kesempatan untuk menghabiskan anggaran dimana programnya tidak sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Warga masyarakat dijadikan sebagai simbol untuk menggunakan APBD yang membuat program-program pembangunan, namun pada dasarnya di balik motif program tersebut ada hal lain yang tidak sesuai dengan harapan dan aspirasi warga masyarakat, sehingga menimbulkan bias di wilayah.

Hal ini ditegaskan dalam wawancara yang dilakukan bersama Anggota Legislatif Komisi III Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Maros, Bapak AE (46 tahun), tentang pemanfaatan APBD. Seperti yang diketahui bahwasanya setiap program yang akan direncanakan oleh lembaga eksekutif seyogyanya melakukan koordinasi dengan lembaga legislatif. Tujuannya adalah agar program yang akan di- rencanakan dan dikerjakan tepat sasaran sesuai dengan aspirasi warga masyarakat. Namun berbeda dengan fenomena di Kabupaten Maros, tidak adanya kesamaan pendapat dan tidak adanya koordinasi diantara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, sehingga mengalami salah persepsi ketika program tersebut akan dilaksanakan.

Dari penegasan informan AE diketahui lembaga legislatif sudah melakukan pemetaan (*mapping*) yang diambil dari RPJMD Kabupaten Maros yang kemudian disinkronkan dengan RPJMD-nya Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian sinkronisasi RPJP-nya Kabupaten Maros. Hal ini bertujuan untuk mengetahui arah pembangunan Kabupaten Maros pada 25 tahun di masa yang akan datang. Namun demikian masih terdapat beberapa kesimpangsiuran data, bahwasanya masih ada beberapa Kepala Dinas di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum mengerti akan program pembangunan.

Dari informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bahwasanya terdapat perbedaan pendapat diantara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif di Kabupaten Maros. Perbedaan ini mencuat manakala lembaga eksekutif diminati keterangannya tentang padangannya terhadap pembangunan pada masa yang akan datang. Hal ini disebabkan faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum mampu untuk memetakan setiap rencana kegiatan dan program yang akan dikerjakan di masa yang datang, wewenang dari lembaga legislatif dibatasi oleh kekuasaan politik (*bargaining politic*) yang dimiliki oleh kepala daerah yang sekaligus sebagai pemegang kontrol partai politik di daerah, dan koordinasi diantara aktor lembaga eksekutif dan lembaga legislatif seringkali menonjolkan ego sektoral. Ego sektoral itu nampak manakala terjadi persetujuan alokasi anggaran dan program

pembangunan. Selain itu juga terjadinya pengkotakan diantara elite di dalam kepentingan kekuasaan meliputi aktor eksekutif, legislatif, dan pengusaha masing-masing memiliki kepentingan tersendiri untuk melanggengkan program dan rencana kerjanya.

Membahas fenomena APBD serta program kerja pembangunan di Kabupaten Maros juga tidak dapat dipisahkan dengan keberhasilan dan kekurangan dari setiap kepala daerah di masa kepemimpinan Bupati Drs. H. A. Nadjamuddin Aminullah, M.S., dan Wakil Bupati Drs. H. A. Paharuddin, M.M., juga masa pemerintahan Bupati Maros Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M., dan Wakil Bupati Drs. H. A. Harmil Mattotorang, M.M.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penegasan informan maka diketahui bahwasanya pada masa pemerintahan Bupati Drs. H. A. Nadjamuddin Aminullah, M.S., orientasi pembangunannya cenderung kepada kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibandingkan dengan belanja publik. Sedangkan di masa kepemimpinan Bupati Ir. H.
M. Hatta Rahman, M.M., cenderung kepada pembangunan fisik yang dilakukan di pelosok wilayah. Kondisi ini yang memicu terjadinya perbedaan diantara setiap kepala daerah pada satu tempat. Namun demikian, perbedaan inilah yang kemudian dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, sebagaimana yang nampak bahwa- sanya di masa pemerintahan Nadjamuddin Aminullah yang mana APBD sebesar Rp.500 Miliyar lebih dan di masa pemerintahan Bupati Ir. H. M. Hatta Rahman, M.M. menembus angka sebesar Rp.1,4 Triliun.

Selanjutnya, informasi tentang Maros jadi incaran pengembang. Kabupaten Maros menjadi incaran pengembang perumahan besar asal Kota Makassar. Bahkan investor asing juga sudah antre untuk mem- benamkan modal di Kabupaten Maros yang dikenal dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Bupati Maros menerima Rombongan Idris Manggabarani. Pengusaha sekaligus *owner* IMB Group, Idris Manggabarani menemui Bupati Maros Hatta Rahman untuk menyampaikan minatnya membangun sejumlah perumahan di Maros

bahkan membangun kota baru di Maros. Seperti yang ditegaskan oleh Idris Manggabarani, bahwa pihaknya siap membangun sejumlah perumahan di Maros, kami juga siap membangun perumahan untuk pegawai Maros bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Maros (Maros Kab.go.id.2013. *Maros Jadi Incaran Pengembang*).

Bupati Maros pun jugamenyambut kedatangan pengusaha untuk melakukan pembangunan diKabupaten Maros. Namun demikian, pihak Pemerintah Kabupaten Maros tetap saja meminta pihak investor menyesuaikan rencananya dengan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Pemerintah Kabupaten Maros, sebagaimana yang ditegaskan oleh Hatta Rahman, bahwa saat ini Maros menjadi incaran para investor karena letaknya sangat dekat dengan Makassar.Selain itu di Maros juga terletak Bandara Sultan Hasanuddin, sehingga investor dari luar provinsi mudah menjangkau Maros. Saat ini pihak kami akan membangun perumahan dengan luas lokasi sekitar 40 hektar di Maros. Dengan kehadiran perumahan ini akan meningkatkan perekonomian warga Maros karena simpul-simpul ekonomi baru akan tumbuh. Investor yang sudah menanamkan modalnya di Maros saat ini antara lain pabrik teh gelas cap Orang Tua, sejumlah pengembang perumahan, dan pabrik pakan ternak, pabrik smelter, dan beberapa pabrik (Maros Kab.go.id.2013. *Maros Jadi Incaran Pengembang*).

Berdasarkan informasi tersebut, diperoleh penegasan bahwa- sanya pihak Pemerintah Kabupaten Maros dengan senang hati menyambut kehadiran pengusaha untuk membangun perusahaan hingga membenamkan sahamnya. Hal ini dibuktikan melalui langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dengan menyediakan lahan bagi pengusaha perumahan untuk mendirikan perumahan mereka dengan harapan mendatangkan devisa bagi pengembangan wilayah Kabupaten Maros.

Selanjutnya data tentang Kima akan bangun kawasan industri baru di Maros. Rencana membangun kawasan industri baru seluas 250 hektare yang berlokasi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Proyek yang diperkirakan bakal menelan investasi

mencapai Rp. 750.000.

000.000., itu dipersiapkan untuk menampung hingga 250 industri baru yang akan melakukan ekspansi ke daerah. Berdasarkan informasi data wacana menunjukkan bahwasanya Pemerintah Kabupaten memberikan keleluasan untuk mendirikan perusahaan Kima II yang berlokasi di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Perusahaan KIMA II ini di- harapkan akan mendatangkan devisa dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros, sebagaimana yang ditegaskan oleh Direktur Utama Kima Bachder Johan, bahwa ketersediaan lahan di Kima dinilai sudah tidak mampu lagi menampung pabrik maupun industri, di mana lahan produktif yang tersisa hanya 27% dari total luasan Kima yang mencapai 370 hektare. Pembangunan Kima II di- targetkan terealisasi tahun ini, yang pengerjaannya akan dikerja- samakan dengan investor swasta. Adapun, PT. Kima merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan komposisi ke- pemilikan saham 60% pemerintah pusat, 30% oleh Pemprov Sulsel dan sisanya dipegang Pemkot Makassar. Lokasi pembangunan Kima II di Kabupaten Maros juga terbilang potensial karena menjangkau kawasan pengembangan Mamminasata selain Kota Makassar. Untuk menunjang kenyamanan industri dalam kawasan Kima II, PT.Kima juga berencana membangun pembangkit listrik pribadi berkapasitas 20 MW. Seluruh tahapan perencanaan pembangunan Kima II telah kami finalisasi, seperti pengwilayahan ruang maupun rencana infrastruktur pendukung lainnya, meskipun demikian dalam hal ini tidak dicantumkan siapakah dari pihak investor swasta yang turut serta dalam kerja sama proyek tersebut. Adapun, pembangunan Kima II menjadi bukti komitmen Sulsel dalam mempersiapkan diri menuju kota berbasis industri dan diyakini di masa yang akan datang akan banyak tumbuh industri baru dalam menunjang perekonomian daerah (Sulawesi Bisnis.com. 2014.

KIMA Akan Bangun Kawasan Industri Baru di Maros).

Beranjak dari informasi maka pihak pengusaha yang merencana- kan untuk membenamkan sahamnya di Kabupaten Maros, dimana data wacana yang diproduksi oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Dinas Tarkim) melalui Kepala Dinas, Ir. H. Agussalim, M.Si., tentang

investor di Maros diharapkan tidak asal bebaskan lahan. Setiap investor yang melakukan investasi di Kabupaten Maros diharapkan tidak asal membebaskan lahan. Setiap rencana pembebasan lahan milik warga agar melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan mempelajari RTRW (Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah) Kabupaten Maros, sebagaimana yang ditegaskan Agussalim, bahwa saat ini memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Maros. Perda ini akan mengatur tentang kawasan untuk industri, pertanian, pariwisata, pertambangan. Pihaknya sangat meng- apresiasi jika investor ingin melakukan investasi di Maros. Tapi imbauan ini perlu dilakukan agar para investor tidak asal membebaskan lahan. Lagipula, koordinasi yang baik juga akan menguntungkan para investor (Berita Maros. 2015. *Investor di Maros Diharapkan Tidak Asal Bebaskan Lahan*).

Selanjutnya, tentang pertambangan di Maros tinggal satu perusahaan. Hal ini disebabkan pihak pemerintah tidak diperkenankan hanya mengejar pendapatan asli daerah (PAD) dengan memberikan perizinan tambang, tanpa menghiraukan kelestarian lingkungan dan ekosistem, sebagaimana yang ditegaskan oleh Gunawan Palaguna, bahwa usaha pertambangan marmer di Kabupaten Maros, Sulsel kini hanya tersisa satu perusahaan marmer dari 19 perusahaan marmer yang pernah beroperasi, kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel. Hanya satu perusahaan marmer saja yang ber- tahan, sedang 18 perusahaan marmer lainnya sudah tutup, karena lokasi operasinya berada dalam kawasan hutan lindung, di manapengusaha tambang marmer yang berada di Kabupaten Maros dan Pangkep, tidak boleh mengeksplorasi lahan tambang seenaknya, karena sudah ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang mengatur tentang pelarangan tambang di areal lahan konservasi. Oleh karena itu, tidak heran jika 18 perusahaan tambang marmer di Kabupaten Maros, Sulsel terpaksa tidak beroperasi lagi. Sementara mengenai jumlah izin pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Sulsel hingga akhir 2009, berdasarkan data Dinas ESDM diketahui, terdapat 327 izin.

Dari jumlah tersebut terdapat tiga izin Kontrak Karya (KK) (Antara Sulsel.com. 2015. *Di Pertambangan Maros Tinggal Satu Perusahaan*). Selanjutnya, informasi dari Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perizinan Maros, Drs. Baharuddin, M.M, tentang Maros akan cek ulang izin investor. Dalam waktu dekat Pemkab Maros melalui Kelompok Kerja (Pokja) Perizinan Pemkab Maros akan mengunjungi kantor-kantor investor yang melakukan investasi di wilayah adminis- trasi Pemkab Maros. Menurut Baharuddin, bahwa jika hal ini dilakukan untuk mengecek ulang izin para pengusaha. Pasalnya Pokja Perizinan Maros ‗mencium' banyak investor di Maros yang belum mengantongi izin lengkap. Jika ini dibiarkan, pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maros berpotensi menguap. Kami meminta agar investor yang belum memiliki izin agar segera melengkapi izinnya. Tim Pokja Per-izinan akan turun menginventarisir izin yang dimiliki investor dalam rangka pembuatan data base perizinan Pemkab Maros. Tujuannya dalam rangka penataan data perizinan (Tribun News. 2014. *Maros Akan Cek Ulang Izin Investor*).

Berdasarkan informasi tersebut, maka diketahui Pemerintah Kabupaten Maros memberikan pengetatan lewat mengunjungi kantor- kantor yang akan melakukan investasi maupun mendirikan perusahaan di Kabupaten Maros. Pemerintah Kabupaten Maros membentuk tim yang dinamakan Tim Kelompok Kerja (Tim Pokja) yang bertugas untuk mengevaluasi seluruh persyuratan perizinan perusahaan di Kabu- paten Maros.

Selanjutnya, berkenaan dari hasil eksplorasi data wacana yang penulis lakukan, kini menguraikan hasil eksplorasi wawancara men- dalam dengan informan penelitian yang dilakukan bersama Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ir. Asm (42 tahun), tentang sumbangan perusahaan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari sektor perusahaan PT. Semen Bosowa Maros adalah tidak berdampak secara langsung dan positif kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros.

Berdasarkan data informan diketahui bahwasanya perusahaan PT. Semen Bosowa Maros, tidaklah berdampak secara signifikan dan positif terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Maros. Justru keberadaan PT. Semen Bosowa Maros dapat menimbulkan kerugian bagi destinasi dan panorama alam di wilayah yang memiliki kawasan karst yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Hal ini disebabkan karena kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang berada di kawasan ekologi karst tersebut. Justru sebaliknya dari informasi yang ditegaskan oleh informan bahwasanya sumber dari PAD Kabupaten Maros adalah bersumber dari kunjungan wisatawan yang mengunjungi wilayah-wilayah yang me- miliki destinasi dan panorama alam yang sangat unik dan menarik utamanya yang terletak disekitar kawasan karst di Kecamatan Banti- murung Kabupaten Maros.

Wawancara yang dilakukan penulis bersama Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros, Bapak Drs. MD (47 tahun), tentang sumbangan perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagian juga bersumber dari *Corporate Social Responsibility* yang digelontorkan oleh perusahaan. Potensi lain bagi nilai tambah yang disumbangkan oleh pengusaha terhadap per-tumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah adalah bersumber dari program kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dengan perusahaan. Selanjutnya, wawancara yang di- lakukan penulis bersama Kepala Seksi Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Maros, Bapak IA, S.T., M.Si. (45 tahun), tentang sumbangan perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), umumnya sumber PAD dari perusahaan pertambangan sudah mencukupi postur APBD Kabupaten Maros, dengan beberapa devisa yang berikan oleh perusahaan pertambangan tersebut.

Hal ini ditegaskan dalam wawancara yang dilakukan bersama Anggota Legislatif Kabupaten Maros dari Komisi III Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Maros, Bapak H. ZD, S.E., tentang sumbangan perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD), dimana diketahui bahwasanya saat ini investasi di sektor per- tambangan tidak terlalu berdampak positif. Melainkan perusahaan yang memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Maros bersumber dari perusahaan minuman kemasan. Dari keterangan informan ZD, diketahui bahwasanya sumbangan untuk Pendapatan Asli Daerah tidaklah sepenuhnya berada pada perusahaan di sektor pertambangan melainkan juga perusahaan lainnya yang bergerak di sektor minuman kemasan, juga memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kemajuan dan peningkatan Anggaran Pen- dapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros

Berdasarkan eksplorasi data penelitian diketahui senantiasa diwarnai berbagai macam kepentingan. Mulai dari politik kepentingan diantara multiaktor, kepentingan untuk mengejar keuntungan (*rent seeking*), kepentingan dengan dasar mengembangkan wilayah dalam pola pengembangan perusahaan, relasi politik diantara penguasa dengan pengusaha sewaktu masa pemilihan kepala daerah, dan motif adanya kekuatan yang dimiliki oleh pengusaha yang memiliki jejaring keluarga dengan penguasa di tingkat nasional agar dengan mudahnya diterbitkan izin perusahaan. Tipologi inilah yang menjadi dasar dan batu loncatan untuk merekonstruksi sebuah tatanan baru dalam pola relasi penguasa dan pengusaha yang terpancarkan lewat relasi peng-usaha dengan penguasa.

Harapan besar yang ditunjukkan dari data penelitian bahwasanya pihak pengelola industri yang berskala besar mau dan secara sadar agar memenuhi segala persyaratan dan ketentuan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Diantara harapan yang muncul adalah senantiasa perusahaan tersebut rajin untuk membayar pajak dan juga memenuhi kewajiban yang lain, seperti misalnya memperhatikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang selama ini semakin ‗seksi' men- dengung dikalangan warga masyarakat awam yang tidak terlalu paham dan mengerti arah dan tujuan dari CSR tersebut. Namun demikian, dari hasil temuan dilapangan masih ada terdapat perusahaan yang berskala

besar dan kecil yang seringkali terlambat dalam pelunasan pembayaran pajaknya.

Harapan selanjutnya, agar relasi diantara multiaktor ini yang me- miliki kepentingan hendaknya untuk tidak mempolitisasi segala bentuk kebijakan dan perizinan agar arah pembangunan dan pengembangan perusahaan tersebut tidak hanya diuntungkan dari kalangan penguasa dan pengusaha saja lewat kebijakan perizinan tersebut, melainkan juga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, serta tidak mengakibatkan dampak negatif yang akan merugikan warga masyarakat khususnya yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah masalah ekologi karst, kerusakan keanekaragaman hayat, polusi udara debu, tanah, dan air, selain itu juga dikarenakan faktor kedekatan pengusaha dengan kelompok penguasa, sehingga dengan mudahnya mereka dapat mengakses segala program dan proyek yang akan di- kerjakan oleh pemerintah.

Harapan lain yang diperoleh dari data penelitian ini hendaknya-lah pola komunikasi diantara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif agar mengurangi gesekan dan tidak menonjolkan rasa ego sektoral yang meninggi satu sama lainnya. Kondisi ini diharapkan agar kedua lembaga dapat bersinergi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing, di mana lembaga eksekutif mengatur dan menata arah kebijakan dan perizinan serta sistem birokrasi yang dijalankan sesuai dengan nafas reformasi, dan tidak menonjolkan faktor kedekatan diantara aktor yang memiliki kepentingan. Program dan proyek yang sementara direncanakan dan dilaksanakan sejatinya lebih pro-rakyat, lebih menjunjung tinggi azas akuntabilitas, sehingga potensi untuk ter- jadinya pelanggaran maupun tindakan yang mengarah ke praktik tindak pidana korupsi dan penyimpan lainnya dapat segera dicegah melalui optimalisasi aturan yang telah ada sebelumnya.

Selanjutnya, untuk lembaga legislatif maka hendaknyalah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi segala bentuk peraturan perundang-undangan dan menyetujui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga tidak pernah

keluar dari tugas pokoknya yang telah lebih dahulu mereka ketahui. Selain itu, lembaga legislatif juga sejatinya membangun komunikasi politik yang ideal diantara lembaga eksekutif dan juga pengusaha dengan cara melakukan koordinasi di sektor-sektor potensil untuk di- jadikan sebagai acuan dalam pengembangan perusahaan yang berguna menciptakan pola relasi ideal diantara kelompok penguasa dan kelompok pengusaha.

Lembaga legislatifyang dinilai cenderung masih menjadi tempat pengesahan saja atau bahkan hanya sebagai _stempel' keinginan-keinginan penguasa birokrasi juga sudah saatnya untuk ditiadakan. Caranya dengan jalan beri keleluasan dalam hal penentuan arah dan kebijakan dalam pemerintahan. Tidak adanya relasi terselubung di antara penguasa dari kalangan lembaga eksekutif dengan aktor penguasa yang mengakibatkan lembaga legislatif terzolimi oleh relasi terselubung yang dibangun sebelumnya. Optimalisasi fungsi kontrol yang selama ini menjadi keluhan yang tidak bisa jalan, bilamana dianalogikan secara cermat maka lembaga legislatif ini berada pada posisi yang _dikebiri' melalui peraturan menteri, bilamana dilihat dari undang-undang secara estetika cukup bagus dan cukup elegan yang akan melahirkan pemerintahan yang pemerintahan yang bersih (*good governance*). Tetapi ketika undang-undang ini diturunkan dalam ketetapan menteri, maka semua kewenangan berada pada pihak pemerintah tidak di legislatif, mau tidak mau maka peran DPRD melemah. Singkatnya, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diharapkan, sebagai akibat DPRD harus bergerak secara profesional dan proporsional daripada secara institutional, karena DPRD juga harus memiliki peran dalam merencanakan pembangunan, sehingga diharapkan jauh dari titipan-titipan politik dan bisnis. Oleh sebab itu kedepan dalam atmosfer politik Maros diharapkan akan jauh lebih dinamis dan mensejahterakan warga masyarakat dengan berbasis pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Hal yang menarik dalam pembahasan ini adalah menghubung-kan dengan teori *distributive combines* yang dikembangkan oleh De

Soto dengan teori keadilan (*theory of justice*) yang dikembangkan oleh Rawls (1999). Dalam pandangannya Rawls (1999), tentang relasi antara dua teori ini bisa dilacak dari dua logika berikut. Pertama, teori *redistributive combines* mengandaikan adanya otoritas penuh dari negara/pemerintah untuk mengalokasikan kebijakan kepada kelompok- kelompok (ekonomi) yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan tertentu. Masalah yang berkembang ialah negara/pemerintah bukanlah agen yang netral, melainkan organ yang memiliki kepentingan (seperti yang diasumsikan dalam teori pilihan publik).

Alhasil, kebijakan yang muncul sebagai hasil dari interaksi antara kelompok kepentingan (ekonomi) dan pemerintah yang kerap-kali cuma menguntungkan salah satu diantara pihak saja serta merugi-kan pihak yang lainnya. Selanjutnya, memunculkan isu ketidakadilan. Kedua, kelompok kepentingan (ekonomi) yang eksis tidak selamanya mengandaikan tingkat kemerataan seperti yang diharapkan masyarakat, khususnya masalah kekuatan ekonomi (*economic power*). Pada kasus struktur produksi sistem kapitalis, bahwa struktur kepemilikan modal yang inheren di dalam strukturnya memiliki kekuatan lebih dibanding- kan dengan struktur lainnya.

Dengan kondisi demikian, Rawls (1999), struktur yang akan mendikte perilaku agen yang bekerja dibawahnya (kelompok kepen-tingan ekonomi yang memiliki modal yang lebih besar akan dipastikan akan lebih mampu membeli kebijakan pemerintah dibandingkan dengan kelompok kepentingan yang memiliki modal kecil). Sehubu- ngan dengan itu, Rawls (1999), mengonseptualisasikan teori keadilan yang bertolak dari prinsip; pertama, setiap orang harus memiliki hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar (*equal basic liberties*) yang sekaligus kompatibel dengan skema kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani, sehingga keduanya dapat diekspektasikan secara logis (*reasonably expected*) menguntungkan bagi setiap individu dan dican- tumkan posisi jabatan yang terbuka bagi seluruh pihak. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian membawa Rawls pada sikap untuk meyakini

bahwa sebetulnya keadilan (*justice*) itu tidak lain dari bentuk kepatutan/kepantasan (*fairness*). Kebijakan yang mengandaikan adanya relasi antar aktor dan struktur dengan sendirinya akan mengakibatkan ketidakadilan apabila isi dari kebijakan tersebut mengandung unsur ketidakpatutan (*unfairness*).

Kondisi lainnya adalah terdapatnya sekat diantara mereka yang memiliki pola relasi dengan kelompok kekuasaan dengan mereka yang berada di luar kelompok kekuasaan. Dari kondisi seperti ini berpotensi untuk saling menjatuhkan dan menciptakan suasana yang gaduh di dalam sistem pemerintahan. Singkat kata, harapan dengan kondisi politik di Maros yang cenderung masih sarat dengan atmosfer politik yang memiliki sifat yang tendensius terhindar dari sekat diantara multi aktor yang memiliki kepentingan.

Terdapatnya upaya saling menjatuhkan dan pengkotak-kotakan politik diantara para politisi dan pengusaha yang berebut proyek dari pemerintah, serta birokrasi yang memiliki peran dalam penentuan proyek. Idealnya kondisi tersebut bekerja sesuai dengan indikator nilai- nilai kejujuran dan menjunjung asas akuntabilitas. Bilamana tidak se- segera mungkin diatasi, maka kita selaku generasi penerus akan memandang secara pesimis bahwasanya di masa yang akan datang, pembangunan di wilayah itu mandeg, oleh karena para pejabatnya hanya sibuk mengurusi politik sementara pembangunannya lambat bahkan jika hal ini terus terjadi maka akan jauh ketinggalan dengan daerah lainnya yang memiliki suasana kondisi politik yang kondusif.

Dalam menjalin kerjasama penguasa dengan pengusaha hendak- nya lembaga eksekutif menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tidak tergadai oleh kepentingan modal. Lembaga eksekutif menjunjung tinggi asas netralitas dan tidak men- capuradukkan kepentingan kelompok dalam proses penentuan dan pengambilan kebijakan. Sementara kedua, mengenai fungsi legislatif hendaknya hanya menjalankan fungsinya seperti misalnya fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran kepada eksekutif dan juga kepada masyarakat. Bilamana diantara fungsi-fungsi ini berjalan sesuai

dengan tugasnya masing-masing, maka suatu daerah akan meningkat taraf kesejahteraannya.

Lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif juga diharapkan mampu bertahan dari pengaruh kepentingan pemilik modal. Idealnya, seorang pejabat publik tidak boleh merangkap menjadi suatu pimpinan perusahaan yang kemudian memiliki perusahaan. Kondisi relasi yang mendukung itu sebenarnya banyak misalnya barisan pemodal ketika calon kepala daerah itu ingin mencalonkan diri, maka di belakangnya berjejer barisan-barisan pemodal yang siap untuk membantunya men- jadi seorang penguasa. Alhasil, bilamana di suatu saat nanti terpilih dan menduduki jabatan, maka konsekuensinya adalah melahirkan politik balas jasa. Fenomena ini terbukti dengan terbukanya peluang kebijakan konspirasi yang dilakukan oleh aktor yang terlibat. Singkat kata, di- harapkan dari pembangunan hanyalah dinikmati oleh orang-orang yang memiliki peran kepada penguasa. Oleh sebab itu, maka peran dari ketiga lembaga ini jangan sampai terus menerus ikut dan terlibat dalam politik konspirasi.

Dalam pandangannya Rawls, 1999 (dalam Little, 2002), mem- berikan fokus pemikiran untuk menciptakan sistem prinsip-prinsip politik (*political principles*) yang berbasis kontrak (*contract*) atau kesetaraan (*equality*). Di mana prinsip inilah yang kemudian membeda- kan konsep keadilan prosedural (*procedural juctice*) dengan prinsip keadilan sosial (*social justice*) yang dikembangkan oleh Rawls. Ke- adilan sosial ini yang kemudian diarahkan pada penyiapan penilaian terhadap sebuah standar aspek distribusi dari struktur dasar masyarakat. Sejalan dengan konsep keadilan yang telah dikemukakan oleh Rawls, pandangan dari Mujahidin (2012), bahwa dengan meningkatkan kualitas demokrasi dengan budaya politik hibrid di mana kekuasaan demokrasi ditentukan oleh seberapa besar publik ikut mengontrol ke-kuasaan. Dalam konstruksi pemikirannya Imam Mujahidin Fahmid, memberikan contoh terhadap penggunaan simbol budaya, kuasa, dan uang dalam proses pembentukan elite politik dan ekonomi di Sulawesi- Selatan akan sangat membahayakan pertumbuhan demokrasi.

Seharusnya demokrasi yang dimaksudkan untuk memberi ke- sempatan yang sama kepada warga negara untuk bermain pada panggung publik. Untuk menghindari penggunaan simbol budaya, kuasa dan uang yang berlebihan, maka proses demokrasi harus di- jalankan dengan sistem yang jelas dan pengawalan yang ketat oleh kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini sangat berkenan dengan pola relasi diantara kelompok penguasa dengan kelompok pengusaha di mana peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengontrol pola kerjasama yang dibangun diantara mereka, selain itu juga menghindari terjadinya monopoli ekonomi dan kekuasaan dalam kerangka atmosfer poltik yang hanya menguntungkan sebagian pihak saja. Dengan begitu, keadilan sosial berdiri diatas bangunan kepatutan (*justice as fairness*). Olehnya, fenomena ini terjadi disebabkan karena prinsip-prinsip ke- adilan tersebut akan menghasilkan kesepakatan dan negosiasi yang imparsial (situasi yang didesain untuk memperkuat ketiadaan kepenti- ngan perwakilan yang dapat dibebankan kepada pihak lain).

Semaraknya warna dan ornamen multikepentingan yang tertuang dalam wadah tim sukses dimasa pemilihan calon kepala daerah, maupun mereka-mereka yang memiliki hubungan atau kedekatan secara biologis dengan kepala daerah. Mereka yang tergabung dalam tim sukses pemilihan calon kepala daerah adalah mereka yang berlatar belakang sebagai pengusaha, politisi, birokrat, tokoh masyarakat, hingga akademisi. Tujuannya adalah ikut bergabung dan menjadi bagian dalam lingkaran kekuasaan politik. Beragam macam latar belakang inilah kemudian membuka ruang untuk membentuk sebuah pola relasi diantara penguasa dan mereka yang memiliki andil dan dukungan semasa pemilihan kepala daerah.

Modal, kuasa, dan dukungan sangatlah penting dalam sebuah kondisi atmosfer politik. Khususnya bagi pendukung yang berlatar belakang sebagai pengusaha yang berduit maka konsekuensi dalam deal-deal politik yang terjadi adalah dengan jalan transaksi kebijakan. Transaksi kebijakan ini seringkali nampak dalam proses maupun rencana kerja dalam pemerintahan yang mengarahkan kepada proyek

pengadaan maupun proyek jasa, hingga membuka iklim usaha. Bagi politisi yang memiliki kepandaian dan kepiawaian dalam menyusun strategi pemenangan, kelak di kemudian hari akan menjadi salah satu penentu kebijakan khususnya dalam penanganan masalah pem- bangunan maupun tender proyek yang dinilai memiliki simbol ‗lahan basah'. Sementara bagi tokoh masyarakat hingga bagi akademisi umumnya mereka akan ditempatkan sebagai bagian dari penyusun maupun tim dalam pelaksanaan roda pemerintahan, diantaranya sebagai staf ahli. Fokus kajian di sini adalah mereka yang berlatar belakang sebagai pengusaha yang juga sudah sukses menjadikan salah satu kandidat pemilihan kepala untuk duduk di kursi kekuasaannya. Selanjutnya, tidak jarang pengusaha yang sudah rela untuk mengorban- kan segala sumber daya yang dimilikinya secara tidak langsung sudah mengantongi ‗tiket nota kesepakatan politik' diantara penguasa yang telah berhasil terpilih dalam pemilihan kepala daerah.

Kesepakatan politik inilah yang selanjutnya akan dijadikan rujukan untuk membuat sebuah program-program yang mengarah kepada pembangunan namun tidak sedikit juga untuk menciprati dari kese- pakatan diantara pengusaha dengan penguasa yang telah lebih dahulu memiliki janji politik semasa kampanye dahulu. Hal ini dapat dicermati ketika pada masa awal setelah pengumuman penetapan kepala daerah kita dapat mengeceknya melalui tiba-tiba munculnya pemodal asing— membenamkan sahamnya hingga mengembangkan perusahaannya di masa awal-awal kepala daerah tersebut menjabat. Transaksi kebijakan diantara pola relasi penguasa dan pengusaha adalah umumnya dalam bentuk pembangunan gedung baru, renovasi gedung baru, perbaikan sarana dan parasarana jalan, program betonisasi, program penerangan lampu jalan dan lampu hias, hingga perbaikan median tanaman di sepanjang jalan ibukota.

Berdasarkan transaksi politik tersebut, seringkali diketemukan ketimpangan dan kejanggalan, misalnya program tersebut yang tidak sesuai dengan aspirasi warga masyarakat, kemudian program tersebut tidak tepat sasaran oleh karena berbanding terbalik dengan apa yang di-

harapkan oleh warga masyarakat. Ketidaksesuaian program tersebut di- sebabkan karena kepala daerah membangun sesuai dengan visi-misi mereka semasa kampanye yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam visi-misi ini seringkali disisipkan kepen- tingan-kepentingan kelompok politik diantara multiaktor yang bermain di belakang panggung kekuasaan. Hal ini selaras dengan pemikiran Hay, 1997 (Keith Faulks, 2012), mengusulkan agar setiap analisis tentang kekuasaan mempertimbangkan faktor-faktor, diantaranya; pertama, jenis kekuasaan, bisa digunakan negara dan juga dimanfaat- kan oleh kelompok-kelompok terorganisir yang berusaha mengubah cara pengelolaan sebuah masyarakat, termasuk rangkaian teknik yang berkenaan dengan persoalan resolusi konflik dan kompromi di antara kelompok-kelompok sosial yang bertentangan dengan mengamankan pendistribusian kekuasaan sesuai dengan ketertiban dan keadilan. Kedua, sumber daya kekuasaan, termasuk kemakmuran, informasi, gagasan, bahasa dan teknologi. Pendistribusian semua sumber daya ini sangat penting untuk memahami siapa yang memiliki kemampuan untuk menjalankan kehendaknya.

Ketiga, metode kekuasaan, termasuk penggunaan kekuatan, manipulasi, persuasi, dan otoritas. Di mana bentuk yang paling aman adalah mengurangi otoritas, di mana A mengakui hak B untuk ber- tindak atas kemauannya sendiri, Keempat, struktur kekuasaan, ter- masuk kelas, etnisitas, generasi dan gender. Pemisahan sosial semacam ini bisa berlaku bagi pembatas kekuasaan sejumlah aktor dalam men- jalankan kehendak mereka, sementara para individu yang menikmati status kelas istimewa, misalnya, lebih berkemungkinan besar untuk menguasai sumber daya yang dibutuhkan untuk kepentingan mereka. Kelima, situs kekuasaan, didalamnya termasuk keluarga, asosiasi masyarakat sipil dan negara. Hubungan kekuasaan akan dijalankan dalam situs-situs ini. Para pakar sosiologi politik secara legitimatif dapat fokus terhadap perhatian mereka pada hakikat kekuasaan yang ada didalamnya. Namun demikian, karena berbagai macam alasan mereka seringkali berkonsentrasi pada institusi negara. Keenam, akibat

kekuasaan, terdapatnya sisi lain, meningkatnya rasa percaya diri dan rasa mampu diantara para individu yang berkekuasaan, dan disisi lain, rasa terasing dan apatis dipihak mereka yang menjadi objek dari apa yang mereka pandang sebagai kekuasaan yang tidak sah atau mereka yang tidak berkekuasaan lantaran tidak adanya sumber daya.

Adapun temuan dalam eksplorasi penelitian ini dari pola relasi penguasa dan pengusaha terdapat tiga dimensi penting yang terjadi dalam fenomena atmosfer politik Maros di Indonesia. Pertama, dimensi kekuasaan dapatlah dipengaruhi melalui relasi politik dan bisnis yang telah dibangun pada saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Kedua, dimensi kekuasaan memiliki pola yang dinamis sesuai dengan kebutuhan diantara multiaktor yang didalamnya terdapat be- berapa kepentingan-kepentingan politik dan bisnis untuk memetakan arah kebijakan pembangunan. Ketiga, dimensi kekuasaan lebih cen- derung mengarah kepada aspirasi dari relasi yang dibangun melalui konspirasi politik dan bisnis. Ketiga dimensi ini yang seringkali ber- kutat dan berseliweran dalam tatanan atmosfer politik Maros di Indonesia. Selanjutnya ekonomi politik juga dikaji dari aspek dimensi kubus kekuasaan yang diperkenalkan oleh Gaventa, 2005. Melalui teori kubus kekuasaannya (*the power cube approach*), di mana pendekatan ini memisahkan tiga komponen yakni; (1) ruang-ruang interaksi, (2) wilayah-wilayah interaksi, dan (3) dimensi-dimensi kekuasaan. Dengan demikian, pandangan ini difokuskan pada ruang-ruang yang telah di- buat baik oleh elite Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan maupun masyarakat secara umum.

Selaras dengan pemikiran Gaventa, maka untuk membantu membaca kualitas proses keterlibatan politik dan ekonomi dalam setiap ruangnya, maka penulis memasukkan _tangga proses keterlibatan' yang diperkenalkan oleh Pretty di mana terdapat 7 anak tangga proses keterlibatan yang dimulai dengan; (1) proses keterlibatan pasif, (2) proses keterlibatan melalui informasi, (3) proses keterlibatan sebagai konsultan, (4) proses keterlibatan dalam pemberian material, (5) proses keterlibatan secara fungsional melalui pembentukan kelompok-

kelompok, (6) proses keterlibatan secara interaktif dan (7) proses keter- libatan sebagai kemampuan memobilisir diri dalam menghadapi per- soalan internal. Pandangan tentang ruang sudah cukup luas digunakan dalam literatur sosiologi politik dan sosial khususnya dalam konteks kekuasaan, kebijakan, demokrasi, dan aksi warga (Gaventa, 2005).

Selanjutnya, mengenai pembahasan pengalokasian APBD dapat- lah diketahui bahwasanya pemanfaatan alokasi APBD ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembangunan wilayah lewat program maupun proyek pembangunan yang sebelumnya telah lebih dahulu direncanakan. Proyek maupun program pemerintah ini yang selanjut- nya dilaksanakan oleh penguasa dari lembaga eksekutif yang selanjut- nya dijalankan oleh kelompok pengusaha melalui beberapa program yang telah disepakati. Seperti misalnya program tender maupun penun- jukan langsung yang dilakukan yang dilaksanakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Selain itu juga harapannya dari proyek maupun program inilah akan selanjutnya kembali mendatang- kan devisa bagi daerah yang akan membawa ke arah peningkatan PAD. Sejalan dengan hal tersebut juga dalam hal ini pemerintah seringkali mengeluarkan dan menerbitkan tentang aturan pungutan pajak yang bersumber dari operasional perusahaan yang berada di Kabupaten Maros, dengan tujuan sebagai bahan kompensasi beroperasinya per- usahaan tersebut di wilayah yang memiliki kualitas Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai.

Sebagaimana yang terdapat dalam eksplorasi data wacana di mana penguasa dari lembaga eksekutif yang selanjutnya memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pengaturan terhadap kinerja birorasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) memulai pembangunannya pada sektor fasilitas umum. Fasilitas umum yang dimaksud adalah pembangunan pasar sentral yang terletak di Kota Maros. Selain itu pemerintah juga membangun gedung Kantor Bupati Maros yang sejati- nya menggunakan APBD. Selain renovasi pembangunan rumah dinas Bupati Maros yang diketahui menggunakan APBD yang hingga 6

tahun tahap pengerjaannya dimulai pada tahun 2011-2016 belum selesai dikerjakan.

Fasilitas lainnya yang menggunakan APBD adalah pembangunan jalan betonisasi yang berlaku di seluruh pelosok Kabupaten Maros dengan target panjang jalan 530 Km tiap tahunnya yang seringkali mendapatkan kritikan, dikarenakan kualitas jalan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karenanya, jalan beton tersebut mendapatkan banyak sorotan dan kritikan dari warga masyarakat khususnya mereka yang berada di sekitaran jalan beton tersebut di- sebabkan kualitas semen dan Conchya tidak baik dan mudah terkelupas serta menimbulkan debu di sepanjang jalan.

Fenomena betonisasi jalan ini juga sringkali mendapat respon dan tanggapan yang serius di kalangan warga masyarakat. Selanjutnya, dari iklim usaha, pemerintah senantiasa mengharapkan pajak yang ber- sumber dari kegiatan usaha baik yang dilakukan oleh perusahaan yang berskala kecil, menengah, hingga besar yang dapat membantu mening- katkan PAD. Tidak sedikit pula dari harapan ini juga muncul ketim- pangan misalnya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang di- harapkan mampu untuk meningkatkan PAD Kabupaten Maros, justru malah lebih besar membawah dampak kerugian khususnya kerugian bagi ekologi karst, temuan inilah yang menjadi dasar argumentasi bahwa penguasa dari kalangan eksekutif dalam hal konsep pem- bangunan wilayah tidak terlepas dari nuansa praktik politik yang di- bungkus dengan konsep pencitraan yang kesannya berhasil, namun sebaliknya.

Selanjutnya temuan data lainnya dari hasil ekplorasi yang dilakukan melalui data wacana mengenai pemanfaatan APBD adanya laporan keuangan yang mengalami masalah yang terjadi pada tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009. Laporan ini sekaligus menjadi momok bagi pemerintah Kabupaten Maros untuk membenahi sektor keuangan- nya. Kemudian nanti di masa tahun 2011-2015, baru kemudian di- lakukan pembenahan dari struktur APBD Kabupaten Maros yang mulai menembus angka Rp.1,4 Triliun.

Selanjutnya dari hasil temuan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan bahwasanya tidak hanya APBD seluruhnya bersumber dari perusahaan-perusahaan besar, menengah, hingga kecil. Namun demikian, APBD juga banyak disumbangkan dari sektor-sektor unggulan, sektor pariwisata. Meskipun demikian, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwasanya sebuah daerah jika ingin eksis dalam hal pembangunan juga tidak terlepas dari peran para pengusaha-pengusaha untuk senantiasa mengembangkan perusahaannya dan juga mem- benamkan sahamnya pada suatu wilayah agar terjadi pembangunan melalui dana CSR-nya. Selanjutnya temuan lain dari ekplorasi data wawancara adalah APBD sejatinya perlu mendapat pengawasan yang ketat oleh karena, di mana APBD yang sangat kualified tersebut berada pada posisi dan distribusi yang benar. Pada posisi distribusi dia berada pada asas dinamisme, adanya porsi untuk posisi dinamisme seberapa banyak jumlahnya untuk kepentingan politik dan seberapa banyak pula untuk kepentingan publik.

Temuan jumlah pegawai yang hanya 11.000 itu mengambil angka 67% angka APBD yang dalam masyarakat itu ada 400 ribu jumlah penduduk di Kabupaten Maros, yang hanya mengambil pada posisi 30%. Hal ini yang menjadi ironi bilamana APBD dibagi dalam satu kepala keluarga itu hanya Rp.1000/tahunnya. Mestinya publik yang kalau sebenarnya ingin marah, oleh karena mereka diberi alokasi APDB hanya Rp.1000/tahunnya.

Selaras dengan data tersebut, maka pendekatan Keynesian tentang keputusan untuk menabung tidaklah menimbulkan atau mendorong orang untuk membeli barang kapital (investasi riil). Kalau pemikir-pemikir sebelum Keynes memandang bahwa terdapatnya per- imbangan antara tabungan dengan konsumsi yang sama seperti per- imbangan antara membeli sarana produksi dengan membeli barang konsumsi (perimbangan *trade off*) dalam artian jika yang satu naik maka dengan sendirinya yang lain akan turun dan sebaliknya. Semakin besar niatan masyarakat untuk menabung, maka semakin parah kondisinya di masa sekarang dan masa depan. Hal ini merupakan kritik

terhadap argumen ekonomi politik yang membenarkan kesenjangan pendapatan yang ditimbulkan oleh operasi-operasi dalam pasar yang tidak diregulasi dengan baik.

Ketika diasumsikan bahwa stabilisasi memang perlu dilakukan terhadap perekonomian swasta, beberapa ekonom memandang bahwa metode-metode stabilisasi adalah sekadar alat, di mana proses politik dan penilaian politik tidak perlu ikut campur. Dengan demikian, tindakan stabilisasi dipandang sebagai sebuah masalah teknis belaka yang sebaiknya dijalankan oleh mereka yang memiliki pengetahuan dalam melakukannya.

Pandangan bahwa, tindakan stabilisasi adalah masalah teknis belaka merupakan pandangan yang memang sesuai dengan agenda pendekatan klasik yaitu depolitisasi terhadap masyarakat. Bahkan dalam kondisi di mana intervensi dari lembaga politik dirasa perlu, aspek politik masih tetap bisa dikurangi sedapat mungkin dari dalam intervensi itu. Jika negara dipandang sebagai manager ekonomi yang kompeten, maka kita tidak perlu menggunakan konteks politik untuk memahami apa yang dilakukan negara, karena manajemen ekonomi dapat tetap dipandang sebagai kegiatan ekonomi biarpun pelaksananya adalah lembaga politik. Sebaliknya, jika pengelolaan ekonomi itu sudah mulai melibatkan proses politik dan jika intervensi negara tergantung pada politik juga, maka kita tidak dapat lagi memandang negara sekadar manager ekonomi yang kompeten, oleh karena aspek politik sudah tidak dapat dihindari lagi di dalam kegiatan stabilisasi terhadap perekonomian (Caporaso dan Levine, 2015). Sehubungan dengan itu, literatur dari teori siklus bisnis politik menekankan sebuah dimensi politik yang penting dalam pengelolaan terhadap permintaan (Kalecki, 1971).

Kondisi ekonomi dalam sebuah masyarakat membawa dampak besar terhadap hasil-hasil dari proses pemilu. Ketika para pejabat dianggap bertanggung jawab atas kondisi perekonomian negara, maka kemungkinan apakah mereka akan terpilih lagi akan ditentukan oleh apakah perekonomian sedang mengalami resesi yang membuat mereka

disalahkan ataukah perekonomian sedang mengalami lonjakan naik, sehingga mereka dipuji. Jika kalangan pemilih (*electorate*) memiliki ingatan yang pendek, maka para pejabat dapat memperbesar kemung- kinan mereka untuk terpilih lagi dengan cara mengelola siklus ekonomi sedemikian rupa, sehingga dapat memastikan fase tertentu dari siklus itu akan terjadi pada masa-masa tidak lama sebelum pemilu dilaksana- kan. Hal ini menjadi pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang akan menjadi lebih besar bobotnya daripada pertimbangan ekonomi dan instabilitas ekonomi yang terjadi dalam masyarakat bukannya men- dorong pejabat-pejabat untuk mengelolanya dengan kompeten melain- kan akan menghasilkan apa yang disebut sebagai siklus bisnis politik.

Ada satu dimensi politik lain yang memiliki implikasi yang bahkan lebih luas daripada siklus bisnis politik, adalah ketika terjadi penolakan atau tantangan terhadap institusi-institusi dasar dari pasar tenaga kerja. Beberapa teoretisi memandang bahwa tantangan seperti ini adalah upaya untuk menstabilkan perekonomian dan melindungi level pendapatan dari naik turunnya pasar yang tidak diregulasi (Offe, 1984). Semakin kuat anggapan masyarakat bahwa, fungsi perekono- mian harus diserahkan kepada administrasi politik, maka semakin lemah pula keyakinan masyarakat tentang pentingnya pasar yang me- regulasi dirinya sendiri. Dekomodifikasi terhadap tenaga kerja di- anggap bukan lagi komoditas yang bisa diperjualbelikan akan menim- bulkan krisis legitimasi yang dapat menimbulkan tantangan politik ter- hadap perekonomian pasar.

Adapun pengelolaan terhadap permintaan, biarpun diupayakan untuk didepolitisir (dijadikan masalah administrasi) sedapat mungkin, tetap memiliki dampak-dampak yang relevan dengan dimensi politik. Pengelolaan permintaan membuat masalah konfigurasi hubungan antara publik dengan swasta masuk ke dalam agenda politik dan menimbulkan dorongan untuk mempertahankan kembali prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengatur sistem pasar swasta. Jika proses pengelolaan terhadap permintaan dapat menghapuskan sifat komoditas dari tenaga kerja, sehingga nilai tenaga kerja harus ditentu-

kan berdasarkan kebutuhan untuk menyejahterakan individu yang me- miliki tenaga kerja itu, maka batas-batas dari pasar dan spesifikasi dari sifat komoditas menjadi problematis dan menjadi bahan perdebatan politik mengenai regulasi pasar terhadap dirinya sendiri.

Selain itu, interaksi antara kekuasaan dengan fenomena ekonomi dapat menjadi fokus dalam ekonomi politik. Namun demikian, hambatan-hambatan yang mempersulit pembentukan kerangka eko- nomi politik dengan berdasarkan pada kekuasaan juga tidak sedikit. Konsep pasar sangat erat kaitannya dengan ide bahwa individu dapat memilih dan membuat kontrak secara sukarela. Terdapatnya struktur pembeli dan penjual yang bersifat impersonal dan tersebar di mana para pembeli dan penjual ini bekerja secara independen di dalam mengejar tujuan-tujuan pribadi mereka sendiri-sendiri inilah yang di- katakan sebagai pasar. Pasar seringkali dipahami sebagai terdiri dari banyak orang, di mana biaya peluangnya tidak besar. Namun di balik itu pasar juga menyimpan kepentingan diantara relasi multiaktor. Peran multiaktor kemudian bermain dan bersembunyi di balik kebijakan dan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa.

Aktor pengusaha selanjutnya memperoleh akses melalui relasi- nya dengan penguasa. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kerangka konsep pembangunan yang berbasis masyarakat yang memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Ketimpangan pem- bangunan dan kemiskinan warga masyarakat akan dapat terselesaikan dengan baik manakala aktor-aktor ini berlaku dengan bijak dan bajik dalam menyalurkan APBD yang sesuai dengan porsi dan kebutuhan- nya. Lebih mengutamakan kepentingan publik daripada politik. Mengesampingkan kepentingan partai dan mengutamakan penguatan regulasi untuk mengontrol dan mengatur keluar-masuknya APBD.

Selanjutnya, mengenai adanya beberapa pengusaha yang mem- bangun relasi dengan penguasa untuk mengembangkan perusahaan hingga membenamkan sahamnya di Kabupaten Maros. Pengusaha ini umumnya berlatar belakang dari berbagai macam usaha. Diantaranya pengusaha di bidang perindustrian, kontraktor, hingga pengembang

perumahan (*developer*). Pengusaha tertarik membangun relasi dengan aktor penguasa adalah karena fasilitas sarana dan prasarana serta infra- struktur yang dimiliki oleh Kabupaten Maros termasuk mumpuni. Kondisi ini yang menjadi daya tarik sendiri bagi pengusaha untuk membangun relasi dengan penguasa.

Fenomena inipun juga disambut dengan antusias oleh Bupati Maros, dengan jalan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas terhadap pengusaha yang ingin mengembangkan perusahaannya di Kabupaten Maros. Sebagaimana langkah awal yang dilakukan oleh kelompok penguasa dari lembaga eksekutif ini adalah dengan menye- diakan lahan bagi para perusahaan yang dengan leluasanya mengem- bangkan perusahaan maupun untuk membangun beberapa perumahan ynag menjadi cikal bakal pembangunan tersebut. Kondisi kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi kelompok penguasa dari lembaga eksekutif yang berasumsi bilamana para pengusaha tersebut ber- datangan di Kabupaten Maros dengan maksud untuk mengembangkan perusahaannya maka dengan sendirinya juga akan berdampak terhadap peningkatan PAD yang muaranya kepada peningkatan APBD Kabu- paten Maros. Kondisi tersebut juga disambut dengan sikap positif oleh penguasa yang berasumsi bilamana perusahaan maupun para pengembang perumahan tersebut berdatangan dan ingin mengembang- kan usaha mereka di Kabupaten Maros.

Penguasa juga mempertimbangkan aspek-aspek peningkatan perekonomian warga masyarakat Kabupaten Maros—disebabkan karena menciptakan simpul-simpul baru dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Selanjutnya bagi investor yang membenamkan sahamnya juga mendatangkan devisa bagi perekonomian wilayah. Meskipun demi- kian, hal ini bukanlah menjadi tolok ukur untuk dijadikan sebagai asumsi dasar untuk menjalin relasi dengan penguasa, meskipun di- ketahui kondisi saat ini yang terjadi di seluruh pelosok daerah Republik Indonesia yang menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah adalah dengan penciptaan iklim usaha oleh penguasa dan juga beberapa program-program dan proyek-proyek yang strategis baik di

tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga pelosok pedesaan yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan bagi kerangka konsep pembangunan di daerah.

Namun demikian, hal itu juga tidak menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penguasa untuk dengan leluasanya menjalin dan membangun relasi dengan kelompok pengusaha dengan cara menggadaikan seluruh Sumber Daya Alam (SDA), namun di satu sisi juga akan menggadaikan kelestarian ekosistem dan ekologi lingkungannya, oleh karena disebabkan segala aktivitas yang akan ditimbulkan sebagai bentuk kegiatan perusahaan yang telah beroperasi diwilayah yang memiliki ekosistem dan ekologi karst yang selama ini menjadi andalan destinasi wisata.

Wilayah yang memiliki ekosistem dan ekologi karts yang unggul adalah umumnya seringkali ditempati oleh beberapa perusahaan yang bergerak disektor minuman kemasan. Penulis menemukan data wacana dari eksplorasi didapati beberapa warga yang mengalami keluhan di- sebabkan beroperasinya perusahaan tersebut. Seperti misalnya keluhan limbah, debu, faktor bising (disebabkan kegiatan peledakan yang ter- jadi di sekitar kawasan gunung dan lalu lintas kendaraan alat berat), keretakan yang terjadi di sekitar wilayah ekologi karts, keretakan di dinding lukisan yang memiliki arti sejarah simbolik. Namun di satu sisi juga menimbulkan dampak positif bagi warga masyarakat yang meng- inginkan untuk mengembangkan kariernya melalui ekruitmen tenaga kerja di perusahaan.

Singkat kata, warga masyarakat merasa adanya stimulus tersendiri untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi di banding dengan kondisi sebelum ada perusahaan tersebut. Masyarakat tertarik untuk melanjutkan studinya dengan harapan dapat diterima menjadi karyawan swasta di perusahaan tersebut beroperasi. Meskipun dengan menempuh berbagai jalan dan cara agar berhasil melanjutkan studinya, seperti misalnya menjual sawah, emas, hingga kebun demi membiayai pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Beberapa pertimbangan inilah yang

menjadikan penguasa di Kabupaten Maros untuk mengambil keputusan dalam menjalin relasi dengan pihak penguasa yang bukan hanya me- miliki latar belakang sebagai politisi, maupun yang turut memiliki andil terhadap pemilihan kepala daerah, namun dengan memper- timbangkan aspek peningkatan PAD dan juga berbagai aspek lainnya.

Selanjutnya, nyaris dalam setiap keputusan seringkali mendapatkan sanggahan dan kritikan dari berbagai macam kalangan yang dimulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menganggap Bupati Maros telah melakukan politik konspirasi dengan menggadai beberapa kelestarian ekosistem hayati, demi untuk mengejar pening- katan PAD. Kegiatan pelarangan untuk mengeksplorasi kegiatan Sumber Daya Alam (SDA) ini sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1991, mengatur tentang pelanggaran tambang di areal lahan konservasi.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, maka faktor hambatan atau kesulitan adalah sangat penting perannya di dalam mendefinisikan kekuasaan. Dalam bukunya *Economy and Society*, Max Weber (1956, 1978) mendefinisikan kekuasaan sebagai probabilitas bahwa seseorang pelaku dalam hubungan sosial mampu melaksanakan kehendaknya sendiri meskipun ditemukan masih mengalami hambatan, dengan menghiraukan dasar-dasar untuk menemukan probabilitas tersbut. Akan tetapi, meskipun faktor hambatan/kesulitan selalu ada dalam hubungan kekuasaan dalam politik, tapi faktor hambatan ini tidaklah secara logis menjadi syarat mutlak agar sesuatu dapat disebut sebagai kekuasaan (misalnya seseorang memanipulasi kondisi yang dihadapi orang lain sedemikian rupa, sehingga orang lain ini akhirnya merasa perlu untuk bertindak yang dapat menguntungkan orang yang pertama tadi, sehingga hambatan bagi kepentingan orang itu menjadi tersingkir).

Selanjutnya, ide tentang hambatan memegang peranan penting di dalam analisis kekuasaan, namun perannya memiliki banyak jenis dan kadang-kadang tidak kentara. Hambatan bisa saja terjadi karena kita berusaha mengubah sesuatu yang pada dasarnya memang sulit

untuk berubah. Ini dapat disebut sebagai hambatan alami (*natural resistance*). Tapi di sisi lain hambatan juga bisa timbul dari orang lain yang memiliki tujuan yang berbeda dari diri kita. Hambatan juga bisa berbentuk adanya atau tidak adanya institusi sosial politik tertentu. Institusi bisa menghambat pencapaian tujuan manusia (Caporaso dan Levine, 2015).

Dapat dikatakan bahwa memiliki kekuasaan terhadap alam bilamana individu dapat mencapai tujuannya biarpun ada hambatan dari alam seperti misalnya membajak tanah, di mana individu dituntut untuk mengeluarkan tenaga yang dimiliki berasal dari tubuh individu sendiri. Selanjutnya, individu dapat menguasai individu lain dengan cara mengubah insentif yang diperoleh individu itu agar menjadi positif bagi individu itu, atau yang disebut sebagai dorongan atau mengubah insentif yang diterima orang lain agar menjadi negatif yang biasanya disebut sebagai koersi atau kekuasaan. Jenis kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan bersama individu lain adalah lebih kompleks sifatnya. Individu tidak selalu bisa mencapai tujuannya kalau harus berusaha sendirian, sehingga agar tujuan itu tercapai, maka ia harus bekerja sama dengan orang lain. Kerja sama ini bisa bersifat sementara tetapi bisa juga memerlukan adanya institusi (Caporaso dan Levine, 2015). Semua konsep kekuasaan didasarkan pada ide tentang tujuan atau kepentingan. Ketika kepentingan ini didasari oleh pelaku yang mem- buat keputusan (ketika pelaku itu secara sadar berusaha mengejar kepentingan mereka), maka kita dapat menyebutnya sebagai kebutuhan, pilihan, dan tujuan (Caporaso dan Levine, 2015).

Ketika para pelaku tidak sadar tentang pentingnya berbagai dampak tertentu bagi dirinya, maka kita dapat menyebutnya sebagai kepentingan (*interest*). Sehubungan dengan itu, maka Max Weber dalam bukunya yang berjudul *Protestant Ethic and Spirit of Capitalism* (1904-1905, 1958), manusia didominasi oleh keinginan untuk men- dapatkan uang, oleh keinginan untuk mendapatkan kekayaan (*aqusition*) sebagai tujuan yang paling utama dalam hidupnya. Ke- inginan untuk mendapatkan kekayaan ekonomi bukan lagi untuk me-

muaskan kebutuhan meterial melainkan sudah menjadi tujuan akhir atau tujuan mutlak. Oleh karenanya, dalam pandangan para ekonom, kepentingan secara otomatis akan diterjemahkan menjadi pilihan, dan pilihan secara otomatis berubah menjadi keputusan mempetimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia yang akan diambil di mana konsep ini yang selanjutnya disebut sebagai kepentingan langsung (*direct interest*) (Caporaso dan Levine, 2015).

Selanjutnya, para ekonom menyebut konsep ini sebagai kepentingan subjektif (Flathman 1966; Balbus 1971) atau konsep kepentingan behavioral (Lukes, 1974). Menurut Connoly (1983), tentang kepentingan riil adalah kepentingan yang terbentuk akan adanya kesadaran akan diri sendiri (*self awereness*) dan pilihan yang dibuat dengan informasi lengkap (*fully informed choice*). Sehubungan dengan itu, Balbus (1971) berpendapat bahwa kepentingan dalam artian ini dapat diketahui dengan melihat bahwa dapat mengajukan bukti untuk membuktikan bahwa seorang individu bisa memiliki kepentingan walaupun ia tidak menyadarinya atau biarpun apa yang dianggap individu itu sebagai kepentingannya sebenarnya bukanlah kepentingan- nya yang sebenarnya. Konsep pendapatan yang ditransformasikan menjadi konsep perburuan rente. Konsep ini sangat penting untuk menjelaskan perilaku pengusaha, politisi, dan kelompok kepentingan lainnya (Rachbini, 2002). Di mana teori *rent-seeking* pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Krueger pada tahun 1974 yang kemudian dikembangkan oleh Bhagwati Tahun 1982, dan Srinivisan tahun 1991 (Yustika, 2014).

Perilaku mencari rente dianggap sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi atau menelikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente (Little, 2002). Asumsi dasar yang dibangun dari teori ekonomi politik adalah setiap kelompok kepentingan (*self-interest*) berupaya untuk mendapat- kan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya (*effort*) yang sekecil-kecilnya. Pada titik inilah seluruh sumber daya ekonomi

politik yang dimiliki seperti misalnya lobi yang akan ditempuh demi menggapai tujuan tersebut (Olson, 1982; Dasgupta, 1998).

Selanjutnya, kegiatan mencari rente (*rent seeking*) bisa di- definisikan sebagai upaya individual atau kelompok untuk meningkat- kan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Kelompok- kelompok bisnis dan perseorangan (individu) mencari rente ekonomi ketika mereka menggunakan kekuasaan pemerintah untuk menghambat penawaran atau peningkatan permintaan sumber daya yang dimiliki (Clark, 1998). Selanjutnya pandangan yang dikemukakan oleh Prasad (2003), tentang *rent-seeking* yang mendefinisikannya sebagai proses di mana individu memperoleh pendapatan tanpa didasari dengan pening- katan produktivitas, bahkan mengurangi produktivitas. Kondisi ini juga didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Little (2002), tentang semakin besar perluasan pemerintah untuk menentukan alokasi kese-jahteraan (*allocation of wealth*), maka kian besar kesempatan bagi munculnya para pencari rente.

Untuk kasus di Indonesia, misalnya dalam pemerintahan Orde Baru, kegiatan *rent-seeking* tersebut dapat ditelusuri dari persekutuan bisnis besar (yang menikmati fasilitas monopoli maupun lisensi impor) dengan birokrasi pemerintah. Perusahaan-perusahaan swasta itu se- bagian besar dikuasai oleh mereka yang memiliki hubungan pribadi khusus dengan elite pemerintah, dan dalam banyak kasus dengan pemerintahan Soeharto (Mallarangeng, 2002). Dengan adanya duku- ngan fasilitas tersebut, maka secara langsung pemilik ekonomi rente sekaligus memperoleh dua keuntungan; pertama, mendapatkan laba yang berlebih, dan kedua, mencegah pesaing masuk dalam pasar.

Selanjutnya menurut Krueger (2000), menjelaskan ihwal akti- vitas mencari rente, seperti misalnya lobi untuk mendapatkan lisensi atau surat izin, akan mendistorsi alokasi sumber daya, sehingga mem- buat ekonomi menjadi tidak efisien. Sehubungan dengan hal itu, Tullock juga memberikan contoh yang terdapat di negara berkembang, dimana pejabat pemerintah menjual posisinya untuk merekrut tenaga kerja. Pada saat pejabat pemerintah tersebut menerima uang sebagai

imbalan atas jasanya memasukkan seseorang menjadi pegawai tanpa kompetensi yang memadai, maka implikasi kinerja (ekonomi) negara tersebut akan buruk oleh karena ditangani pegawai-pegawai yang tidak cakap (Tullock, 1980; Dasgupta, 1998).

Pada kategori ini *rent-seeking* behavior tidak saja membuat alokasi sumber daya ekonomi menjadi melenceng, melainkan secara langsung mengikis kesempatan untuk mencapai efisiensi ekonomi yang lebih tinggi. Dengan begitu, maka beberapa hal bisa disimpulkan dari penjelasan mengenai perilaku mencari rente (Krueger, 2000), pertama, masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menangkap pe- luang hak milik (*property rights*) yang ditawarkan oleh pemerintah. Pada titik ini, kemungkinan munculnya perilaku mencari rente sangat besar. Kedua, bahwa setiap kelompok atau individu pasti akan ber- upaya untuk mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan. Selanjutnya, implikasi terhadap keseimbangan politik mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka panjang karena akan selalu muncul kelompok penekan baru yang mencoba untuk mendapatkan fasilitas istimewa. Ketiga, bahwa di dalam pemerintah sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dengan kata lain, kepentingan pemerintah bersifat heterogen. Dalam konteks inilah ideologi menjadi faktor determinan penting yang akan menuntun bentuk kepentingan pemerintah.

Selanjutnya menurut Mas‖oed (2003), melalui pandangannya tentang gagasan pemberdayaan masyarakat lapisan menengah dan bawah, terutama melalui pemupukan sumberdaya ekonomi mereka. Masyarakat lapisan bawah masih mengalami keburukan kekuasaan negara dalam kehidupan nyata, misalnya dalam bentuk klientisme dan *rent-seeking*. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa negara masih berfungsi sebagai monopolis politik, pengendali sosial, dan sekaligus sebagai katalisator ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah memonopoli kemampuan dalam mencari dan mengerahkan aliran investasi ke arah yang mereka tetapkan.

Oleh karenanya, banyak pengusaha yang berhasil di tingkat lokal sebab memiliki hubungan patronase politik dengan penguasa lokal, berbagai cara yang dimanfaatkan oleh para kelompok pengusaha untuk mencari akses ke dalam birokrasi (kelompok penguasa). Alhasil, me- munculkan hipotesis kaum modernisasionis tentang hubungan antara asset ekonomi dengan asset otonomi perilaku politik diputarbalikkan. Sementara hipotesis tersebut menyatakan bahwa asset ekonomi yang dikuasai seseorang berkorelasi positif dengan tingkat otonomi politik- nya yang kenyataannya di kalangan pengusaha di tingkat lokal umum- nya menunjukkan korelasi yang negatif. Dengan kata lain, semakin besar asset usaha, semakin kecil otonomi politiknya. Sebagaimana yang dicontohkan Mas‖oed tentang sektor bisnis konstruksi. Kontraktor besar (misalnya, type B) di daerah kabupaten cenderung memiliki otonomi politik lebih kecil dibanding dengan kontraktor kecil (misalnya, type C) hal ini disebabkan semakin besar volume pekerjaan yang ditangani semakin banyak pula memerlukan peranan pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa betapa pengembangan kekuatan eko- nomi lokal sangat ditentukan oleh peran negara.

Selain itu, Mas‖oed (2003), mengungkapkan pandangannya ikhwal dampak rentannya pengorganisasian kekuatan di tingkat masya- rakat lapisan bawah sebab lemahnya mekanisme artikulasi. Tanpa pengorganisasian yang efektif, potensi rakyat pada lapisan bawah tidak akan bisa diterjemahkan menjadi kekuatan aktual untuk memperbaiki nasibnya. Seharusnya proses demokratisasi yang bermakna mesti di- topang dengan upaya pemberdayaan aktor pada lapisan bawah. Baik pada sektor birokrasi, bisnis, maupun kegiatan masyarakat yang pada umumnya bertujuan agar aktor pada tingkat lokal dapat mengembang- kan dan mengelola sumberdayanya secara mandiri.

Sehubungan dengan itu, menurut Stigler (dalam Rachbini, 1996), ada dua alternatif pandangan tentang bagaimana sebuah per- aturan diberlakukan. Pertama, peraturan dilembagakan terutama untuk memberlakukan proteksi dan kemanfaatan tertentu untuk publik atau sebagian subkelas dari publik tersebut. Kedua, suatu

tipe analisis di

mana proses politik dianggap merupakan suatu penjelasan yang rasional. Pada posisi ini, masalah peraturan ekonomi adalah bagian dari proses politik dan fenomena ekonomi. Di dalam sistem politik yang demokratis, sistem politik bisa menjadi medium yang tepat bagi penduduknya.

Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi yang dibuat menurut perspektif ekonomi politik, pertama-tama yang harus dianalisis sampai sejauh mana kebijakan tersebut berpotensi memunculkan perilaku mencari rente. Jika kemungkinan ke arah itu terbuka secara lebar, maka sebaliknya kebijakan ekonomi tersebut dibatalkan. Dalam pemanfaatan hukum bagi kepentingan kelompok tertentu, saat ini perkembangannya sudah sedemikian memuncak, sehingga pembentukan organisasi untuk memperoleh pendapatan dengan cuma-cuma (*unearned income*) yang dibagikan oleh negara atau disalurkan melalui sistem hukum, atau setidak-tidaknya untuk melindungi diri sendiri dengan membentuk apa yang dinamakan *redistributive combines* (kelompok redistribusi) yang tidak terbatas pada bidang-bidang lazimnya erat berhubungan dengan kegiatan politik, partai politik, media massa, atau organisasi informal, tetapi meluas sampai ke perusahaan-perusahaan dan bahkan pada keluarga-keluarga penguasa maupun pengusaha. Kelompok-kelompok ini selalu bertarung satu sama lain untuk menjaga jangan sampai suatu peraturan baru mengancam kepentingan mereka, tetapi juga dapat menguntungkan. Akibatnya, pihak yang berwenang di negara jika membuat peraturan hukum hampir selalu semata-mata untuk tujuan membagi-bagi pendapatan tanpa kerja dan menjadikan negara sebagai sebuah demokrasi kelompok-kelompok kepentingan (De Soto, 1992).

Selain itu, menurut Rachbini (1996), dalam pola *redistributive combines* ini sumber-sumber ekonomi, aset produksi, dan modal di- distribusikan secara terbatas hanya di lingkungan segelintir orang saja. Dengan demikian, di dalam suatu negara korporatis kesejahteraan dan hasil-hasil pembangunan ekonomi hanya bergulir di lingkungan ter- batas, puncak kekuasaan dan segelintir pengusaha besar yang mem- peroleh *previlege* khusus.

Dalam kerangka pemikiran De Soto (1992), berlakunya pola *redistributive combines* ini terjadi akibat sistem politik yang tertutup oleh karena dilindungi sistem hukum yang kabur dan ketiadaan *rule of law* di bidang ekonomi. Dengan demikian sistem ekonomi bersedia mengabdi kepada sistem politik dengan pola *redistributive combines* tersebut. Sistem hukum sengaja dibiarkan kabur dan prosedur penetapannya dikendalikan di tangan kekuasaan eksekutif, sehingga produk hukum yang muncul tetap berpihak kepada penguasa.

Selanjutnya model ideal relasi penguasa dengan pengusaha dalam atmosfer politik Maros di Indonesia adalah harapannya jangan adalagi pengusaha yang berperan sebagai tim sukses yang terpilih karena dikhawatirkan kembali memberikan pengaruh politiknya yang dapat mengakibatkan patronklien. Patron klien tercipta karena peng-usaha memberi jasa melalui bentuk modal kepada penguasa. Kondisi hubungan pertukaran diantara penguasa dengan pengusaha ini terjadi karena pengusaha kuat secara modal, sementara penguasa lemah secara modal yang membiayai kampanye poltiknya, sehingga dia berkuasa maka dia kuat secara politik, sementara berbanding terbalik dengan pengusaha yang lemah secara politik. Kondisi ini yang membuat peng- usaha untuk memberikan bantuan modal, dimana ketika pengusaha memberikan bantuan ke penguasa maka pengusa menjadi patron lalu pengusaha menjadi klien. Patron klien itu siapa yang memberi lebih banyak tetapi sedikit menerima ketika penguasa memberi proyek ke pengusaha maka terjadilah patron klien. Kondisi lain adalah dengan jalan menghindari terjadinya adanya perburuan rente yang disebut laba salah satu bentuk kekuasaan. Untuk memperoleh laba sekaligus ke- kuasaan yang lebih tinggi, maka perusahaan berusaha memengaruhi para pengambil keputusan halangan untuk masuk pasar (*barriers to entry*). Dengan mendekati para pengambil keputusan agar pengusaha bisa mendesak pemerintah meregulasi industri atau perusahaan demi kepentingan usaha mereka.

Bab 6
Penutup

A. Kesimpulan

Secara umum, fokus studi ini adalah menjelaskan pola relasi penguasa dengan pengusaha yang teridentifikasi dengan berbagai macam kepen-tingan dan kebijakan, sebagai hasil atmosfer politik dan ekonomi politik yang berlangsung secara simultan dan sistematis dalam ruang-ruang interaksi sosial warga masyarakat. Oleh karena itu, maka simpulan yang dirumuskan pada studi ini adalah sebagai berikut:

1. Formasi wacana yang terbentuk dalam relasi penguasa dan peng-usaha terdiri dari; (a) wacana kesejahteraan karena pertambangan;
   (b) wacana transparansi dan akuntabilitas daerah; (c) wacana investasi dan perdagangan; (d) wacana pertambangan sebagai investasi daerah; (e) wacana dampak lingkungan pertambangan; dan (f) wacana proses pengerjaan proyek perusahaan. Dari ke enam formasi wacana tersebut terdapat wacana yang bertentangan dan ada pula wacana yang searah.

   Dengan kelompok wacana yang terbentuk ini dapat di- klasifikasikan berdasarkan aktor yang memproduksi wacana ter- sebut. Dimulai dari wacana kesejahteraan karena pertambangan, wacana investasi dan perdagangan, serta wacana petambangan sebagai investasi daerah, merupakan wacana yang searah yang aktornya diproduksi oleh pemerintah (penguasa) disebut berpihak kepada pengusaha. Sementara wacana transparansi dan akuntabi- litas daerah, serta wacana dampak lingkungan pertambangan meru- pakan wacana yang bertentangan dengan pemerintah (penguasa), dimana wacana ini diproduksi oleh aktor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) transparansi dan LSM pemerhati lingkungan, serta anggota Legislatif Komisi III disebut tidak pro kepada peng- usaha. Sementara wacana proses pengerjaan proyek perusahaan

diproduksi oleh aktor dari kalangan masyarakat juga tergolong

wacana pertentangan yang disebut tidak pro kepada pengusaha. LSM dan kalangan masyarakat mengkritisi pemerintah dalam rangka pemroduksian wacana. Dengan demikian, maka formasi wacana tersebut tidak berdiri sendiri, namun disebabkan banyak- nya wacana-wacana lainnya.

2. Pola relasi pengusaha dengan penguasa dalam atmosfer politik ber- mula dari pengusaha memberikan dukungan kepada penguasa yang berkontestasi dalam pemenangan politik dan berakhir dengan dukungan kepada pemenang politik pada saat berkuasa. Selain dari pada itu pengusaha berusaha masuk dalam dunia politik untuk memberikan dukungan kepada salah satu kontestan politik. Peng- usaha juga berinvestasi dalam dunia politik untuk dapat mem- bangun relasi dengan dunia politik. Pengusaha juga memberikan bantuannya berupa dukungan politik, menyediakan konsultan politik, memfasilitasi pencitraan politik, hingga terlibat sebagai seorang politisi atau menggerakkan massa.
3. Pola relasi penguasa dengan pengusaha dalam atmosfer ekonomi politik adalah penguasa membalas budi melalui pemberian kebija- kan perizinan investasi, pemberian kebijakan proyek yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengusaha yang dukungan ekonominya besar terhadap penguasa yang ingin berkontestasi dalam pemilihan Calon Kepala Daerah adalah umumnya pengusaha yang memiliki modal besar bergerak di sektor pertambangan, galian, dan mineral batubara. Pengusaha tersebut memberikan dukungan kepada penguasa untuk dijadikan sebagai modal kampanye dengan harapan di kemudian hari pem- berian atau perpanjangan izin investasinya dapat dipermudah. Sementara pengusaha yang membantu dalam proses menyediakan fasilitas pencitraan politik untuk kampanye adalah pengusaha dalam bidang kontraktor, bilamana berhasil memenangkan per- tarungan politik maka hasil yang akan diberikan adalah pemberian proyek yang sumber anggarannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sementara bagi pengusaha yang terlibat

langsung sebagai politisi atau penggerak massa mereka akan diberikan fasilitas sebagai penghubung proyek yang berada di tiap- tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas untuk mengurusi dan menentukan pemenang dari tender proyek. Dengan demikian maka penguasa membalasdukungan ekonomi dari peng- usaha melalui dukungan politik dengan cara memudahkan akses pemberian izininvestasi, memberikan proyek yang anggarannya bersumber dari APBD, dan memberikan kewenangan untuk meng- akses proyek-proyek yang ada di tiap SKPD.

B. Kontribusi Buku Ini

1. Implikasi Teori

Pada bagian ini diuraikan implikasi terhadap teori kuasa/ pengetahuan Michel Foucault yang meskipun dalam penelitian ini menggunakan perspektif Foucauldian, namun tidak berarti bahwa pandangan orisinil Michel Foucault dapat diterima begitu saja, terlebih lagi tidak bermaksud untuk memaksakan keberlakuan teorinya secara utuh. Pada aspek tertentu perspektif teoretis Foucault bahwasanya kuasa menyebar di mana-mana; kuasa senantiasa bersinergi dengan wacana/pengetahuan; kuasa bukanlah milik melainkan strategi, di- pandang masih relevan, namun pada aspek lain juga mendapat peno- lakan sekaligus pengembangan.

Melalui penafsiran teori Michel Foucault, realitas sosial struktur pengendalian dibangun dalam relasi kekuasaan dan pengetahuan, dan relasi keduanya beroperasi dalam formasi diskursif. Dalam sejarah pengetahuan, Foucault mengkaji wacana dengan memperhatikan aspek penggunaan bahasa, dan bagaimana penggunaan bahasa diartikulasikan dalam praktik sosial. Wacana dimaknai sebagai penggerak penge- tahuan di mana kuasa terdapat di dalamnya. Kajian wacana Foucault menekankan pada relasi kekuasaan, bahwasanya kekuasaan didefinisi- kan sebagai suatu yang produktif ialah kuasa dibangun, diterapkan, dan dipelihara melalui regulasi wacana. Kekuasaan terlaksana melalui wacana, dan wacana selalu berakar pada kekuasaan. Bilamana di-

sandingkan dengan dalil penelitian ini perihal formasi wacana yang terbentuk dalam relasi penguasa dengan pengusaha adalah formasi wacana investasi yang diproduksi oleh penguasa tidak dapat berdiri sendiri, disebabkan adanya wacana-wacana lain yang tidak searah dengan wacana investasi. Wacana-wacana lainnya yang tidak searah tersebut berasal dari kalangan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Wacana-wacana yang bertentangan terproduksi mengikuti formasi wacana kesejahteraan yang diformulasikan oleh penguasa sebagai bentuk dukungannya kepada pengusaha, sehingga muncul pula wacana yang bertentangan mengikuti pola wacana investasi yang diproduksi penguasa.

Implikasi teoretis mengenai pola relasi penguasa dan pengusaha secara sistematis akan mengutip pandangan dari James Scott, 1972 (Salman, 2006), dalam jurnalnya yang berjudul *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*. Makna hubungan patron-klien adalah suatu kasus khusus hubungan antar dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan per- lindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien), yang pada gilirannya membalas pem- berian tersebut dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron. Dalam hubungan ini, pertukaran tersebut merupakan jalinan yang rumit dan ber-kelanjutan, biasanya baru terhapus dalam jangka panjang. Imbalan yang diberikan klien bukan imbalan berupa materi melainkan dalam bentuk lainnya. Si patron tidak akan mengharapkan materi atau uang dari klien tapi mengharapkan imbalan lainnya yang dibutuhkan si patron. Selanjutnya, ikatan patron klien didasarkan dan berfokus pada pertukaran yang tidak setara yang berlangsung antara kedua belah pihak, serta tidak didasarkan pada kriteria askripsi. Oleh karena itu, siapa saja yang memiliki modal dalam hubungan yang bersifat vertikal, maka ia dapat berstatus sebagai patron.

Pada dasarnya sifat ikatan patronasi juga bervariasi, namun lebih kuat tertanam dalam sistem stratifikasi kerajaan, dimana pembagian peran otoritas lokal/daerah kadang didasarkan atas hubungan patronase tersebut. Peran otoritas pada tingkat lokal diambil alih/terletak pada tokoh-tokoh yang mampu untuk menggerakan pengikutnya sehingga lalu diakui sebagai agen pemimpin di daerah. Ketika seiring melemah- nya sistem kerajaan tradisional dan menguatnya sistem pemerintahan modern, maka yang terjadi adalah jaringan patron-klien yang ter- struktur tidak teratur di lokasi sekitar jalur-jalur perdagangan, pemajakan. Selanjutnya secara kultural dan geografis dapat dikatakan bahwa semakin jauh dari pusat—pada tempat dan kebudayaan pinggir dan pada dasar dari hirarki sosial-ikatan patron klien kurang ter- lembaga dan karenanya sifatnya menjadi fleksibel.

Dalam konteks desa dan pertanian, Scott, 1972 (Salman, 2006), menyebutkan bahwa faktor lahan menjadi faktor yang dominan untuk dijadikan bahan bargaining antara patron-klien. Penghalang utama bagi bentuk-bentuk ikatan patron klien yang lebih eksploitatif di Asia Tenggara adalah tersedianya lahan luas yang dapat ditanami. Dengan investasi yang murah dan mudah seseorang dapat dengan cepat ber- pindah dan membentuk pemukiman baru. Dalam hal ini tidak secara otomatis kemudian menciptakan klien yang tergantung pada patronnya demi kehidupan subsistensinya, seperti lahan-lahan langka yang subur. Kendali tenaga kerja menjadi lebih penting untuk dipertahankan daripada sekedar penyediaan lahan baru. Ketersediaan lahan yang banyak membuat situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi klien karena patron tidak bisa membuat jaminan subsistensi menjadi dasar ketergantungan yang memperbudaknya.

Hubungan patron-klien yang terjadi pada Masyarakat Bugis-Makassar yang dikaji dan dianalisa oleh Christian Pelras, 1981 (Salman, 2006), bahwa hubungan semacam ini telah terpelihara sejak zaman kolonial Belanda, terbukti dengan beberapa penelitian yang di-lakukan oleh peneliti Belanda tetapi konsep pada zaman itu belum di-namakan patron-klien, nama lain dari bentuk yang serupa. Pelras

mengindikasikan patron-klien yang terjadi di Sulawesi Selatan merupakan pola umum yang juga terjadi di wilayah-wilayah lain berdasar pengamatannya. Hubungan patron-klien dalam pandangan Pelras dapat digolongkan sebagai hubungan yang tidak sejajar antara patron dan klien (tetapi tidak mengikat). Terdapat hubungan timbal balik antara patron (pemimpin) dan klien (bawahan, pengikut, pelayan), patron ter- gantung pada para klien yang memberikan pelayanan kepadanya (berupa tugas ekonomis, dukungan politik) dan sebagai imbalan seorang patron juga harus berperan sebagai pemimpin bagi klien baik sebagai pemberi pinjaman uang atau perlindungan kepada para klien jika diperlukan. Patron-klien berasal dari suatu model hubungan sosial pada zaman romawai kuno. Seorang patronus merupakan bangsawan yang memiliki sejumlah warga dari tingkat lebih rendah yang disebut clientes yang berada dibawah perlindungannya. Ikatan antara patron dan klien merupakan hubungan timbal balik yang harus dijaga dan biasanya bersifat turun temurun.

Menurut Pelras, di Sulawesi Selatan, orang yang memiliki jabatan hanya bisa memiliki pengaruh apabila ia mempunyai pengikut yang mendukungnya berdasarkan kepentingan mereka sendiri dengan harapan jika pemimpin mereka memegang kekuasaan, maka semua pengikutnya akan ikut memperoleh keuntungan. Pertama, seorang patron, dapat memperluas jaringan klien. Salah satu cara adalah dengan menunjukkan kedermawanan dan membangkitkan rasa hormat dari kalangan pengikut dengan melindungi dan menjaga kesejahteraan mereka lebih baik dibanding yang lain. Kedua, dengan membangkitkan kebanggan pengikut dan harapan akan masa depan yang lebih baik dengan menduduki jabatan tinggi atau tampak sebagai orang yang paling berpeluang untuk menduduki jabatan tersebut. Pengikut akan merasa ikut terhormat dengan hal ini, karena dengan patron memegang jabatan yang tinggi seorang patron dapat mendistribusikan kembali kekayaan yang diperolehnya. Manfaatnya bersifat timbal balik. Ketiga, melalui _perkawinan politik‘. Perkawinan memang dapat digunakan

sebagai strategi politik untuk mendapatkan pengikut. Perkawinan politik antar dua patron dapat menambah jumlah pengikut antar patron.

Hasil penelitian menunjukkan pengusaha dalam melegalkan sebuah kebijakan yang mengarah kepada keberpihakannya kepada kelompok pengusaha memiliki relasi dan terdapat kepentingan-ke- pentingan politik. Pengusaha menganggap dirinya telah memiliki andil dalam hal meloloskan penguasa ketika berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah, sehingga cenderung dapat memengaruhi arah kebijakan kepada pengusaha. Kondisi inilah yang selanjutnya memberikan warna politik klientisme di mana pengusaha juga menuntut balas jasa dari kelompok penguasa yang berhasil meraih kedudukan kekuasaannya. Kondisi ini sesungguhnya bertentangan dengan konsepsi proses demo- kratisasi yang memiliki landasan filosofis dalam upaya pemberdayaan aktor pada lapisan bawah. Baik pada sektor birokrasi, bisnis, maupun kegiatan masyarakat yang pada umumnya bertujuan agar aktor pada tingkat lokal dapat mengembangkan dan mengelola sumberdayanya secara mandiri.

Hasil penelitian selanjutnya adalah terdapatnya kelompok-kelompok kepentingan diantara kelompok pengusaha yang juga berperan sebagai pengurus partai politik yang memiliki kekuasaan penuh terhadap segala kebijakan yang diberlakukan oleh penguasa. Peng- usaha yang memiliki akses langsung kepada penguasa akan dengan mudahnya dapat melakukan lobi-lobi perihal pembuatan kebijakan maupun izin investasi untuk melegalkan segala aktivitas perusahaan mereka dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara melalui tender proyek, pemberian izin investasi, hingga penciptaan iklim usaha yang diberikan oleh penguasa. Dengan demikian maka kondisi relasi penguasa dengan pengusaha dalam atmosfer politik Maros di Indonesia cenderung masih mengarah ke babakan *patron client*, di mana pengusaha senantiasa menjaga dan memelihara hubu- ngannya dengan penguasa yang dibangun sewaktu berlangsungnya kontestasi politik.

Selanjutnya konsep sosiologi politik yang dikemukakan oleh Conchwall, A. bahwa ruang-ruang yang dimaksud adalah ruang tertutup (*closed*), ruang tersediakan (*invited*), dan ruang terciptakan, di- klaim atau bahkan dibuat sendiri (*created*). Dalam hal ini di bagi dalam ke dalam tiga bagian ruang yakni; (1) ruang tertutup; (2) ruang ter- sediakan; dan (3) ruang terciptakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya untuk konsepsi ruang tertutup kelompok pengusaha mampu dan berhasil dalam membenamkan pengaruhnya terhadap regulasi-regulasi yang berlaku melalui pemberian izin usaha yang cenderung hanya menguntungkan dalam kepentingan-kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap kelompok kekuasaan.

Sementara untuk ruang tersediakan lebih banyaknya didominasi oleh kelompok pengusaha yang merasa bahwasanya mereka telah me- miliki peran oleh karena berperan sebagai sponsor dalam pertarungan politik calon penguasa ke kursi kekuasaan. Fenomena ini yang mem- buat dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan lebih banyak didominasi oleh aspek-aspek kepentingan balas budi dan jasa daripada kesejahteraan warga masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan untuk ruang terciptakan yang terjadi adalah warga masyarakat merasa kecewa dengan beberapa kebijakan yang dianggap hanya berpihak kepada kelompok pengusaha dengan tidak memperhatikan kepentingan warga masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan dan aturan sengaja di- rancang dan di legalkan yang hanya memberikan efek kesejahteraan dan keuntungan bagi kelompok pengusaha, sementara efek kerugian hingga kesengsaraan bagi warga masyarakat.

Dengan melakukan eksploitasi dan eksplorasi dari hasil-hasil sumber daya alam yang dimiliki wilayah tanpa mengedepankan aspek pemberdayaan yang di butuhkan oleh warga masyarakat. Disamping itu juga kelompok penguasa sengaja mengadakan proyek baik berupa proyek pengadaan maupun proyek pembangunan fisik di mana sifatnya lebih kepada aspek kepentingan bagi kelompok pengusaha untuk mengejar keuntungan. Alhasil, apa yang diharapkan oleh warga masya- rakat masih jauh dari harapan serta semangat demokrasi, disebabkan

relasi penguasa dan pengusaha masih saja terselimuti oleh awan hitam atmosfer politik yang seringkali mempertontonkan tarian politiknya di panggung pemerintahan.

Sementara itu untuk implikasi terhadap pengembangan sosiologi pengetahuan dalam perkembangannya, sosiologi pengetahuan hanya menjadi domain wacana di kawasan semenanjung Eropa dan Amerika, diantaranya Mannheim (1954) yang mengkaji tentang relasi penge- tahuan dengan ideologi; Berger dan Luckmann (1966) bahwa penge- tahuan terbentuk sebagai hasil dialektika antara individu dan masya- rakat (perihal memperbaharui pandangan Mannheim), Habermars (1971) mengungkap relasi pengetahuan dengan kepentingan; demikian pula dengan Foucault (1980) mengkaji pengetahuan dalam relasinya dengan kekuasaan.

Kontribusi ilmiah dari beberapa ilmuwan tersebut tentu sangatlah bermanfaat untuk menjelaskan realitas pengetahuan, namun tidak berarti bahwasanya kajian sosiologi pengetahuan sudah sampai pada taraf yang jenuh dan menjadi belenggu pemikiran para ilmuwan saat ini dan dimasa yang akan datang. Kajian sosiologi pengetahuan dalam era postmodernisme semakin terbukan dalam melihat relasi pengetahuan dengan konteks sosial historisnya. Dalam konteks pene- litian ini, eksperimen yang dihasilkan dari disertasi ini adalah ber- implikasi pada pengembangan anasir-anasir sosiologi pengetahuan di Indonesia dengan basis kajiannya pada kontestasi wacana.

2. Implikasi Kebijakan

Dari hasil implikasi teoritis, maka diperlukan implikasi kebijakan yang diharapkan untuk memperkuat daya saing nasionalisme yang unggul dalam berdemokrasi, oleh sebab itu maka hendaknya implikasi kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi kalangan pemerintahan khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia, pemerintah selaku pemegang amanah rakyat yang didaulat menjalankan kekuasaan hendaknya menggunakan kekuasaannya dalam menetapkan

kebijakan-kebijakan yang sesuai dan tepat sasaran. Setiap kebijakan yang diputuskan lebih mengarah kepada kepentingan warga masyarakat yang tidak terpengaruh terhadap kepentingan- kepentingan kelompok tertentu yang hanya memanfaatkan kesempatan untuk meraih keuntungan dari sebuah kebijakan yang akan dirumuskan dan diaplikasikan oleh pemerintah. Selanjutnya kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah sesuai dengan ke- inginan dan kebutuhan warga masyarakat yang sesungguhnya mengurangi bahkan menghindari terjadinya penolakan-penolakan sosial yang dilakukan oleh warga masyarakat.Setiap kebijakan yang diputuskan tidak dipengaruhi oleh kelompok-kelompok ter- tentu yang dapat merubah konstruksi kebijakan yang orientasi utamanya adalah mengutamakan kepentingan warga masyarakat.

2. Bagi kalangan pengusaha hendaknya tidak memberikan dukungan politik kepada salah satu pasangan calon kepala daerah. Kondisi ini diharapkan agar pengusaha tidak lagi memberikan pengaruhnya kepada penguasa dalam hal pembuatan kebijakan yang sifatnya hanya mementingkan kelompok tertentu saja dan mengesamping- kan kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat. Pengusaha juga hendaknya tidak melakukan lobi-lobi politik untuk melakukan intervensi kepada kebijakan yang diambil oleh penguasa untuk menghindari praktik pemburuan ekonomi rente (*rent seeking*). Selanjutnya, dalam hal mengurus izin usaha maupun memper- panjang izin usaha juga memperhatikan segala aspek yang akan di- timbulkan sebagai akibat dari operasionalisasi perusahaan. Selanjutnya bagi perusahaan yang bergerak di sektor pengadaan barang dan jasa, serta kontraktor hendaknya untuk memperhatikan segala bentuk aturan yang diberlakukan oleh pemerintah dengan tidak memanfaatkan relasi politiknya dengan penguasa, sehingga menginginkan adanya fasilitas khusus maupun menggunakan cara- cara yang tidak fair dalam mengerjakan tender maupun proyek dari pemerintah yang berpotensi menimbulkan kolusi dan nepotisme diantara

mulitiaktor. Terbuka dan jujur dalam mengerjakan setiap

proyek maupun program dari pemerintah dan menyesuaikan antara penawaran harga yang dilakukan saat lelang dengan aplikasi pengerjaan proyek ketika proyek tersebut selesai dikerjakan. Tidak melakukan upaya mark-up harga yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara yang mengarah kepada praktik tindak pidana korupsi.

3. Bagi kalangan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat mewarnai segala bentuk perilaku dalam mengawasi proses pelaksanaan demokrasi yang berlaku disetiap daerah. LSM lewat seminar-seminar dapat meng- integrasikan informasi relasi penguasa dan pengusaha dalam pen- dekatan atmosfer politik dan atmosfer ekonomi politik yang mereka lakukan. LSM seiogianya merefleksikan nilai-nilai luhur dalam melestarikan sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan secara optimal, sehingga segala bentuk kebijakan yang dihasilkan oleh penguasa akan lebih mengarah kepada kepentingan warga masyarakat.
4. Bagi kalangan politisi seyogyanya studi ini juga bermanfaat bagi setiap pengambilan keputusan yang memberikan manfaat penge- tahuan perihal relasi penguasa dan pengusaha. Mengurangi wacana pencitraan yang diproduksi oleh penguasa khususnya bagi politisi untuk mengabsahkan dan melegitimasi dirinya sebagai pemilik kekuasaan. Politisi juga hendaknya lebih banyak mempergunakan kekuasaannya untuk memperhatikan rancangan kebijakan yang arah dan tujuannya untuk mensejahterakan warga masyarakat. Optimalisasi peran lembaga perwakilan rakyat juga sangat di- harapkan sebagai alat kontrol dari kekuasaan yang berada di setiap daerah agar setiap kebijakan-kebijakan berdampak positif terhadap kebutuhan pembangunan di setiap sektor wilayah.

C. Saran

Temuan-temuan yang didapatkan dalam penulisan disertasi ini merupakan eksplorasi dan eksperimen tentang data wacana yang menggurita dan berlangsung dalam pola relasi penguasa dan pengusaha studi atmosfer politik Maros di Indonesia ini dianalisis menggunakan analisis wacana dengan didukung sejumlah teori. Selain perspektif teoritik tersebut, studi ini juga dilengkapi dengan penggambaran perspektif dari berbagai kalangan, yakni; birokrasi, politikus, LSM, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan temuan-temuan studi ini memiliki kegunaan bagi penelitian selanjutnya yang membahas dan mengkaji fenomena serupa dengan hasil penelitian ini. Oleh sebab itu, diharapkan maka penelitian selanjutnya adalah; (1) meneliti dan meng- kaji pola relasi penguasa dengan pengusaha dalam konteks pemberian izin usaha pertambangan; (2) melakukan penelitian dan pengkajian perihal proses tender proyek bagi perusahaan di sektor kontraktor, pengadaan barang dan jasa, hingga penyediaan alat-alat berat konstruksi bangunan yang diadakan oleh pemerintah; dan (3) melakukan penelitian dan pengkajian perihal produksi wacana dan kekuasaan dalam relasi penguasa, pengusaha, dan aparat TNI/Polri.

Daftar Pustaka

Buku

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maros. 2016. *Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maros Tahun 2015*. BKD Kabupaten Maros.

Caporaso, J. A., dan Levine, D. P. 2015. *Teori-teori Ekonomi Politik. Terjemahan dari Theories of Political Economy 1992*. Cambridge: Cambridge University Press. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Clark, B. 1998. *Political Economy: A Comparative Approach*. Second Edition. London: Praeger Wesport-Connecticut.

Connoly, W. E. 1986. *The Terms of Political Discourse*. (ed. II). Princeton, N.J: Princeton University Press.

Conchwall, A. 2002. *Making Spaces, Changing Places: Situating Participation in Development*. Institute of Development Studies: The University of Michigan.

Dasgupta, B. 1998. *Structural Adjusment, Global Trade and the New Political Economy of Development*. London and New York: Zed Book.

De Soto, H. 1992. *Masih Ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*. Terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Elkington, John. 1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21" Century Business*. Oxford: Capstone Publishing.

Fairlough, N. 1992. *Critical Language Awareness*. The University of Michigan: Longman.

. 1993. *Discourse and Social Change*. Blackwell Publishing, Incorporated.

. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. The University of Michigan: Longman.

Faulks, K. 2012. *Sosiologi Politik* (*Pengantar Kritis*). Terjemahan dari *Political Sociology: A Critical Introduction*. 1999. Edinburgh: Edinburgh University Press. Bandung: Nusa Media.

Foucault, M. 1972. *The Archeology of Knowledge*. London: Tarvistock.

. 1973. *The Birth of Clinic*. London: Tavistock.

. 1977. *Disciplineand Punish, The Birth of the Prison*. New York: Random House.

. 1978. *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*. New York: Pantheon Books.

. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and other Writing 1972-1977*. New York: Pantheon Books.

. 1987. _The Ethic of Care for the Self as a Practice of Freedom', dalam James Bernauer dan David Rasmussen (Eds.) *The Final Foucault*. Boston: MIT Press.

. 1991. _Politics and the Study of Discourse', dalam Burchel, Graham, Colin Gordon dan Peter Miller (Eds.) *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. Chicago: The University of Chicago Press.

. 2003a. *Society Must Defended: Lectures at the College de Frence 1975-1976*. New York: Picador.

. 2003b. *Kritik Wacana Bahasa*. Terjemahan *The Discourse of Language* oleh I.R. Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD.

. 2008. *The Birth of Politics, Lectures at the College de Frence 1978-1979*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Galbraith, J. K. 1983. *The Anatomy of Power*. Boston: Houghton Atifflin.

Gaventa, J, dkk., 2005. *orde Proses Keterlibatan*. Bunga Rampai Proses Keterlibatan dan Politik Anggaran, Perkumpulan Prakarstta, 2005.

Giddens, A. 1985. *The National State and Violance*. University of California, Press.

. 1986. *The Constitutions of Society: outline of the Theory of Structuration*. University of California Press.

Giddens, A., David Held. 1985. *Classes, Power, and Conflict: Classical and Contemporary Research*. Aldine.

Hirsch, F. 1977. *Social Limits to Growth*. London: Routledge and Kegan Paul.

Kalecki, M. 1971. *Selected Essays on the Dynamic of Capitalist Economy*. Cambridge: Cambridge UniversityPress.

Keohane, R. 1984. *After Hegemony, Princeton*. N.J: Princeton University Press.

Keynes, J. M. 1936. *General Theory of Employment, Interest and Money*. New York: Harcourt, Bract and World.

Krueger, A. O. 2000. _Government Failures in Development'. Dalam Jeffrey Frieden et al. (eds). *Modern Political Economy and Latin America*: Theory and Policy. USA: Westview Press.

Laclau and Mouffe. 1985. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. Verso.

Laclau. 1990. *Kapitalist Devlet Sorunu*. Iletisim.

Linblom, C. E. 1977. *Politics and Markets*. New York: Basic Books.

Little, I. M. D. 2002. *Ethics, Economics and Politics: Principles of Public Policy*. New York: Oxfod Universty Press.

Lukes, S. 1974. *Power: A Radical View*. London: Macmillan.

. 1986. _Introduction'. Dalam, Steven Lukes, ed., *Power, New York*: New York University Press.

Mallarangeng, R. 2002. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia Bekerja sama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.

Mas'oed, M. 2003. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Miller, T dan Veena Klasen. 2002. *Critical Cultural Policy Studies: A Reader*. Wiley-Blackwell.

Mills, S. 1997. *Discourse*. London: Routledge.

. 2003. *Michel Foucault*. London: Routledge.

Mujahidin, Imam Fahmid. 2012. *Identitas dalam Kekuasaan*. Makassar: Ininnawa-ISPEI.

Neal, A. W. 2009. _Michel Foucault', dalam Jenny Edkins and Nick Vaughan-Williams (Eds.) *Critical Theorists and International Relations*. London: Routledge.

Neil, R, V. 1984. *Munculnya Elite Modern di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Offe, C. 1984. *Contradiction of Welfare State*. Cambridge, Mass: MIT Press.

Okun, A. M. 1970. *The Political Economy of Prosperity*. New York: W.W. Norton.

Profil Daerah Kabupaten Maros. 2015. *Maros Lebih Baik*. Pemerintah Kabupaten Maros.

Porter, M. E. 1990. *The Competitive Advantages of Nations*. London: Macmillan.

Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. 2012. *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar*. Makassar: PPs UNM.

Rachbini, D. J. 2002. *Ekonomi Politik*. Paradigma dan Teori Pilihan Publik. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rabinow, P. 1984. *The Foucault Reader*. New York. Phanteon Books. Rawls. J. 1999. *A Theory of Justice*. Resived Edition. USA: The Belknap Press of Harvard University Press.

Rustiadi, E. dkk. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Salman, D. 2006. *Jagad Maritim*. Makassar: Ininnawa.

. 2012. *Sosiologi Desa: Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*. Makassar: Ininnawa-ISPEI.

Soja, E. W. 1996. *Postmodern Geographies: The Ressertion of Space in Critical Social Theory*. Verso.

Sumandiyar, A. 2016. *Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat; refleksi atas program pembangunan masyarakat di Indonesia*. Kendari: Literacy Institute.

Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gremedia Widiasarana Indonesia.

Thompson, 1990. *Ethics and Politics: cases and comments*. Nelson-Hall.

Tucker. R. C., ed. 1978. *The Marx Engels Reader*. New York: W.W Norton.

Wachterhauser. B. R. 1986. *Hermeneutic and Modern Philosophy*. New York: State University of New York.

Watts, M. 2003. _Chapter 16. Political Ecology', in Eric Sheppard and Trevor J. Barnes (Eds.), *A Companion to Economic Geography*. Oxford: Blackwell Publisher Ltd.

Weber, M. 1958. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Terjemahan Talcott Parsons. New York: Charles Scribner‖s Sons.

_____. 1978. *Domination by Economic Power and Authority*. Dalam: Economic and Society. Barkeley: University of California Press. Yustika, A. E. 2014. *Ekonomi Politik* (*Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal dan Hasil Penelitian

Balbus, I. D. 1971. The Concept of Interest in Pluralist and Marxist Analysis. Dalam *Politics and Society*, 1, no. 2, hal. 77-151.

Betancourt, E. E. 1977. Anew Approach to Developing Institutional Structure. *Studies in Comparative International Development*, 32 (2), 3-28.

Langford, T. 1999. Things fall apart: State Failure and The Politics of Intervention. *International Studies Review*, 1 (1), 59-82.

Liou, C. S. 2009. Bureaucratic politics and overseas investment by chinese State-owned oil companies. *Asian Survey*, Vol. 49, Issue 4, pp. 670–690 ISSN 0004-4687, electronic ISSN 1533-838X. (Online), (http://search.proquest.com/), (diakses 12 Juni 2015). Mc William, A. dan D. Siegel. 2001. Corporate Social Responsibilty: A Theory of the Firm Perspective. *Academy of Management Review* 26 (1): 117-127.

Moe, T, M. 1984. The New Economics of Organizations. *American Journal of Political Science*, 28 (4), 739-777.

Prasad. B. C. 2003. Institutional Economics and Economic Development: The Theory of Property Rights, Economic Development, Good Governance and the Environtment. *International Journal of Social Economics*. Vol. 30, No. 6: 741-762.

Sarira, D, R. 2015. SO2 dan CO di Udara Serta Gangguan Pernapasan Masyarakat Sekitar PT. Semen Bosowa. *Makassar: Universitas Hasanuddin*. (Online)

, (http://repocitory.unhas.ac.id/handle/123456789/15436), (diakses 06 Mei 2016).

Wallis, J. Dan B, Dollery. 2001. Government Failure, Social Capital and the Appropriateness of The New Zealand Model for Public Sector Reform in Developing Countries. *World Development*, Vol. 29, No. 2, hlm.245-263.

Media Cetak

Koran Fajar (Metro Makassar). *Posisi Strategis Maros Harus Dimanfaatkan*. Edisi, Selasa, 4 Januari 2000.

Koran Fajar (Metro Makassar). *Maros Butuh Dana Pembangunan Besar*. edisi Selasa, 11 Januari 2000.

Koran Fajar (Metro Makassar). *Masyarakat Bangga Dengan SBM* (*Masukkan PAD Rp.1.300.000.000., Pekerjakan 60% Putra Daerah*). Edisi Sabtu, 15 Januari 2000.

Koran Fajar (Metro Makassar). *Dewan Bantah Intervensi Dapur Kontraktor*. Edisi Selasa, 29 Februari 2000.

Koran Fajar (Halaman Pertama). *Maros Diproyeksi Jadi Kawasan Industri Khusus Asal Korea*. Edisi Selasa, 5 Februari 2002.

Koran Fajar (Metro Makassar). *Alot Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah* (*RAPBD*) *Maros* (*Anggota DPRD Nilai Ada Anggaran Belanja Mengada-ada*). Edisi Selasa, 6 Februari 2002.

Koran Fajar (Metro Makassar). *Belanja Rutin Naik 24,25% DPRD Maros Tetapkan APBD 2002*. Edisi Selasa, 12 Februari 2002.

Koran Fajar (Metro Makassar). *Pemkab-PT. GI Kerjasama Tingkatkan RSUD Maros*. Edisi Kamis, 14 Maret 2002.

Koran Fajar (Metro Makassar). *Pengusaha Pengadaan Harap Pemkab Terbuka*. Edisi Selasa, 26 Maret 2002.

Koran Fajar (Metro Makassar). *Penambang Liar Rusak Lingkungan*. Edisi Sabtu, 8 Juni 2002.

Koran Fajar (Ekonomi dan Bisnis). *Pemkab Maros Investor Gandeng Pengusaha Lokal*. Edisi Senin, 17 Juni 2002.

Koran Fajar (Metro Makassar). *Dewan Pertanyakan Realisasi APBD 2002* (*Bupati: Perolehan PAD Bakal Meningkat*). Edisi Sabtu, 22 Juni 2002.

Koran Fajar (Metro Makassar). *SDM Rendah, Kualitas Proyek Jelek* (*Bupati: Kontraktor Perlu Belajar*). Edisi Sabtu, 29 Juni 2002.

Koran Fajar (Metro Makassar). *Dana Bantuan Eksodus Diselewengkan* (*Tim Klarifikasi: Bukan Tanggung Jawab Tim*). Edisi Rabu, 13 November 2002.

Koran Fajar (Metro Makassar). *Eksodus Lanjutan Dana Bansos di Maros* (*DPRD Belum Tahu, Kadis: itu Belum Darurat*). Edisi Rabu, 19 November 2002.

Koran Fajar (Metro Makassar). *DPRD Kabupaten Maros Tetapkan 21 Perda*. Edisi Kamis, 19 Desember 2002.

Koran Fajar (Metro Makassar). *Diksos Maros Sosialisasikan Bantuan Terminasi*. Edisi Jum‖at, 24 Desember 2002.

Koran Fajar (Ekonomi dan Bisnis). *Pemkab Kembangkan Maros Jadi Kota Dagang*. Edisi Jum‖at, 30 Desember 2002.

Koran Fajar (Metro Makassar). *Bagian Humas Maros Kecewa* (*Kemungkinan Tidak Kebagian Anggaran Dalam APBD Tahun 2003*). Edisi Rabu, 5 Maret 2003.

Koran Fajar (Metro Makassar). *Pengusaha Dukung Pemkab Maros* (*Pemanfaatan DAU Berskala Prioritas*). Edisi Rabu, 8 Maret 2003.

Koran Fajar (Metro Makassar). *APBD Kabupaten Maros Tahun 2003 di Sahkan* (*Bupati: Layanan ke Masyarakat Lebih Baik*). Edisi Senin, 17 Maret 2003.

Koran Fajar (Metro Makassar). *Kejaksaan Negeri* (*Kejari*) *Maros Siap Ungkap Kasus Proyek Pembangunan Permukiman Kota Terpadu* (*P3KT*) *yang terbengkalai*. Edisi Jum‖at, 21 Maret 2003.

Koran Fajar (Metro Makassar-Sungguminasa). *Komisi D Segera Panggil Pimpro Stadion Kassi Kebo.* Edisi Jum‖at, 10 Oktober 2003.

Koran Fajar (Metro Makassar-Sungguminasa). *Sudarman Terkait Kasus Dana Eksodus?* Edisi Sabtu, 11 Oktober 2003.

Koran Fajar (Metro Makassar-Sungguminasa). *P2KP Anggarkan Rp.2.300.000.000., di Maros*. Edisi Kamis, 5 Februari 2004.

Koran Fajar (Pamminasata). *Kerusakan Hutan Penyebab Bencana*. Edisi Sabtu, 6 November 2010.

Koran Fajar (Pamminasata). *Pembangunan Jalan Dianggarkan Rp.2.000.000.000*. Edisi Sabtu, 27 November 2010.

Koran Fajar (Pamminasata). *Cekdam Lekopancing Dianggarkan Rp.1.500.000.000*. Edisi Selasa, 6 April 2011.

Koran Fajar (Makassar). *Safriadi Pimpin Gapeknas Maros*. Edisi Jum‖at, 8 April 2011.

Koran Fajar (Pamminasata). *Pembangunan Pasar Tramo Dilanjutkan*. Edisi Kamis, 28 April 2011.

Koran Fajar (Pamminasata). *Utang Pemkab Rp.26.900.000.000*. Edisi Rabu, 1 Juni 2011.

Koran Fajar (Pamminasata). *Hatta Tekad Hapus Predikat Disclaimer*. Edisi Rabu, 8 Juni 2011.

Koran Fajar (Metropolis). *Pemkab Siapkan Rp.65.000.000.000*. Edisi Rabu, 20 Juni 2011.

Koran Fajar (Metropolis). *Cabut Izin Tambang di Situs Bulu Tianang*. Edisi Rabu, 14 November 2011.

Koran Fajar (Metropolis). *Prioritaskan Program Pro Rakyat*. Edisi Rabu, 24 November 2011.

Koran Fajar (Metropolis-Gowa-Maros). *Jajaki Investasi*. Edisi Jum‖at, 3 Februari 2012.

Koran Fajar (Metropolis-Gowa-Maros). *Pemkab Alokasikan Rp.8.000.000.000.* (*Buka Jalur Moncongloe-Bantimurung*). Edisi Senin, 6 Februari 2012.

Koran Fajar (Metropolis-Gowa-Maros). *Pemkab Bangun Hotel di Bantimurung*. Edisi Jum‖at, 10 Februari 2012.

Koran Fajar (Metropolis-Gowa-Maros). *Perusahaan Diminta Berpartisipasi*. Edisi Kamis, 16 Februari 2012.

Koran Fajar (Metropolis-Gowa-Maros). *Proyek Perumahan Resahkan Warga*. Edisi Sabtu, 18 Februari 2012.

Koran Fajar (Metropolis-Gowa-Maros). *BP3 Perintahkan Reklamasi Kolam* (*Terkait Tambang DI Bulu Samongkeng*). Edisi Senin, 27 Februari 2012.

Koran Fajar (Metropolis-Gowa-Maros). *Maret, Moncongloe-Bantimurung Ditenderkan*. Edisi Senin, 27 Februari 2012.

Koran Fajar (Metropolis-Gowa-Maros). *Warga Keluhkan Tambang Uruk*. Edisi Kamis, 5 April 2012.

Koran Fajar (Metropolis-Gowa-Maros). *Kadis Pertambangan Maros Tersangka Korupsi* (*Pengadaan Lampu Hias*). Edisi Kamis, 12 April 2012.

Koran Fajar (Metropolis-Gowa-Maros). *LSM Melaporkan Dugaan Pencemaran Lingkungan*. Edisi Sabtu, 14 April 2012.

Koran Fajar (Metropolis-Gowa-Maros). *SCW Kawal Kasus Korupsi Lembaga anti korupsi yang mengatasnamakan dirinya sebagai Salewangang Corruption Watch* (*SCW*). Edisi Sabtu, 14 April 2012.

Koran Fajar (Metropolis-Gowa-Maros). *Polisi Sudah Periksa Delapan Saksi*. Edisi Sabtu, 14 April 2012.

Koran Fajar (Metropolis-Gowa-Maros). *2012, Pemkab Target Lunasi Utang*. Edisi Kamis, 2 Agustus 2012.

Media Online

(http://www.kemendagri.go.id/news/2011/03/09/bupati-undang-investor-ke-maros). Bupati Undang Investor ke Maros. Kemendagri. (diakses 04 Desember 2014).

(http://makassar.tribunnews.com/2011/09/26/semen-bosowa-penuhi-undangan-dprd-maros). Semen Bosowa Penuhi Undangan DPRD Maros. Tribun News. (diakses 4 Desember 2014).

(http://nasional.kompas.com/read/2012/08/29/22553220/Aktivitas.Tambang.Pada.Karst.Menyusutkan.Keanekaragaman.Hayati). Aktivitas Tambang Pada Karst Menyusutkan Keanekaragaman Hayati. Kompas. (diakses 04 Desember 2014).

(http://kptsppm.maroskab.go.id/2013/02/maros-jadi-pilihan-berinvestasi.html). Maros Jadi Pilihan Berinvestasi. Maros Kab. (diakses 08 September 2014).

(http://www.tribunnews.com/regional/2013/09/26/dua-perusahaan-di-maros-tidak-tertib-buang-limbah). Dua Perusahaan di Maros Tidak Tertib Buang Limbah. Tribun News. (diakses 07 September 2014).

(http://makassar.tribunnews.com/2014/03/27/maros-akan-cek-ulang-izin-investor). Maros Akan Cek Ulang Izin Investor. Tribun News. (diakses 4 Desember 2014).

(https://binpers.wordpress.com/2014/06/03/pt-semen-bosowa-maros-penunggak-pajak-terbesar/). PT.Semen Bosowa Maros Penunggak Pajak Terbesar. Word Press. (diakses 4 Desember 2014).

(http://m.liputan6.com/news/read/94851/empat-kontraktor-dan-dua-pns-maros-dipenjara). Empat Kontraktor dan Dua PNS Maros Dipenjara. Liputan 6. (diakses 13 Desember 2014).

(http://www.abrarrahman.com/2014/12/pemuda-lira-maros-desak-bupati-evaluasi.html). Pemuda Lira Maros Desak Bupati Evaluasi. Abrar Rahman. (diakses 13 Desember 2014).

(http://www.tribunnews.com/regional/2014/11/25/dprd-maros-tolak-semen-china). DPRD Maros Tolak Semen China, 2014. Tribunnews. (diakses 23 Januari 2015).

(http://maroskab.go.id/2014/12/dprd-maros-sahkan-apbd-2015-sebesar- rp11-triliun.html). DPRD Maros Sahkan APBD 2015 Sebesar Rp.11 Triliun. Maros Kab. (diakses 23 Januari 2015).

(http://maroskab.go.id/2013/02/maros-jadi-incaran-pengembang.html). Maros Jadi Incaran Pengembang. Maros Kab. (diakses 23 Januari 2015).

(http://maroskab.go.id/2013/11/apbd-2014-maros-tembus-rp1-triliun.html). APBD 2014 Maros Tembus Rp.1 Triliun. (diakses 23 Januari 2015).

(http://koran-investigasi.blogspot.co.id/2014/04/dua-perusahaan-tambang-sengsarakan.html). Dua Perusahaan Tambang Sengsarakan. Koran Investigasi. (diakses 23 Januari 2015).

(http://sulawesi.bisnis.com/read/20140609/20/178648/kima-akan-bangun-kawasan-industri-baru-di-maros). Kima Akan Bangun Kawasan Industri Baru di Maros. Sulawesi Bisnis. (diakses 23 Januari 2015).

(http://sains.kompas.com/read/2014/10/14/15083211/Izin.Tambang.di.Maros.Dievaluasi). Izin Tambang di Maros Dievaluasi. Kompas. (diakses 23 Januari 2015).

(http://radarmakassar.com/walhi-bupati-maros-gagal/2589/). Walhi: Bupati Maros Gagal, 2015. Radar Makassar. (diakses 23 Januari 2015).

(http://www.abrarrahman.com/2015/01/foto-kadis-pu-maros-plesiran- ke-turki.html). Kontraktor Fasilitasi Kadis PU Plesiran. 2015. Radar Makassar. (diakses 16 Mei 2015).

(http://makassar.tribunnews.com/2015/02/02/komisi-iii-dprd-maros- ancam-cabut-izin-tambang-marmer). Komisi III DPRD Maros Ancam Cabut Izin Tambang Marmer. Tribun News. (diakses 02 Juli 2015).

(http://makassar.tribunnews.com/2015/02/03/kejari-maros-mulai-usut-dugaan-korupsi-penerangan-jalan-2014). Kejari Maros Mulai Usut Dugaan Korupsi Penerangan Jalan. Tribun News. (diakses 02 Juli 2015).

(http://beritamaros.com/2015/02/19/investor-di-maros-diharapkan- tidak-asal-bebaskan-lahan.html). Investor di Maros Diharapkan Tidak Asal Bebaskan Lahan. Berita Maros. (diakses 02 Juli 2015).

(http://skornews.com/skor-bosowa-tolak-ganti-rugi-peledakan.html).Bosowa Tolak Ganti Rugi Peledakan. 2016. Skornews. (diakses 07 April 2016).

(http://rri.co.id/makassar/post/berita/230329/daerah/gapensi_maros_opt imis_pembangunan_di_daerah_maros_akan_berkembang.html). Gapensi Maros Optimis Pembangunan di Daerah Maros Akan Berkembang. 2015. RRI Makassar. (diakses 16 Juni 2015)

(http://upeks.co.id/loker/kontraktor-lokal-harus-berdaya-saing.html). Kontraktor Lokal Harus Berdaya Saing.2015. Upeks. (diakses 16 Juni 2015).

(http://radarmakassar.com/dewan-warning-bupati-maros/2841/). Dewan Warning Bupati maros. 2015. Radar Makassar. (diakses 17 Juni 2015).

(http://www.seputarsulawesi.com/news-17013-tiga-desa-di-kabupaten-maros-terancam-dengan- kehadiran-pt-conch.html). Tiga Desa di Kabupaten Maros Terancam Dengan Kehadiran PT.Conch. 2015. Seputar Sulawesi. (diakses 27 Juli 2015).

(http://www.kabarkami.com/karst-maros-pangkep-eksploitasi-turun- temurun-untuk-kepentingan-elit.html). KarstMaros-Pangkep Eksploitasi Turun Temurun Untuk Kepentingan Elit. 2015. Kabarkami. (diakses 27 Juli 2015).

(http://makassar.tribunnews.com/2015/08/06/warga-keluhkan-aktivitas-tambang-marmer-di-leang-leang). Warga Keluhkan Aktivitas Tambang Marmer di Leang-leang. Tribun News. (diakses 20 September 2015).

(http://makassar.tribunnews.com/2015/08/06/warga-keluhkan-aktivitas-tambang-marmer-di-leang-leang). Warga Keluhkan Aktivitas Tambang Marmer di Leang-leang. Tribunnews. (diakses 20 September 2015).

(http://makassar.tribunnews.com/2015/08/27/realisasi-pad-maros-2014-tertinggi-dari-pajak-mineral-bukan-logam). Realisasi PAD Maros 2014 Tertinggi Dari Pajak Mineral Bukan Logam. Tribun News. (diakses 20 September 2015).

(http://makassar.tribunnews.com/2015/09/30/anggaran-tertahan-kontraktor-maros-tak-mampu-bayar-pekerja). Anggaran Tertahan Kontraktor Maros Tak Mampu Bayar Pekerja. Makassar Tribunnews. (diakses 08 September 2015).

(http://makassar.tribunnews.com/2015/09/30/jika-proyek-tak-selesai- kontraktor-maros-minta-pemda-bertanggungjawab). Jika Proyek Tak Selesai Kontraktor Maros Minta Pemda Betanggungjawab. Makassar Tribunnews. (diakses 08 Oktober 2015).

(http://beritakotamakassar.com/2015/09/30/cv-gowa-maros-penunggak-pajak-tertinggi/). CV. Gowa Maros Penunggak Pajak Tertinggi. Berita Kota Makassar. (diakses 29 Oktober 2015).

(http://sulsel.pojoksatu.id/read/2015/11/23/pilkada-maros-pengusaha-padi-siap-menangkan-hatita/). Pilkada Maros: Pengusaha Padi Siap Menangkan Hatita‖. 2015. Sulsel Pojok Satu. (diakses 13 Desember 2015).

(http://www.majalahpinisi.com/index.php/component/content/article/4 6-headlines/124-hatta-rahman-kami-ingin-jadikan-maros-kota- industri-dan-mandiri). Hatta Rahman: Kami Ingin Jadikan Maros Kota Industri dan Mandiri. Majalahpinisi. (diakses 13 Desember 2015).

(http://www.skornews.com/skor-mengeruk-untung-masyarakat-buntung.html). Mengeruk Untung Masyarakat Buntung. Skornews (diakses 13 Desember 2015).

(http://www.pariwisatakaltim.com/berita-eksploitasi-karst-kasus-maros-jadi-pelajaran.html). Eksploitasi Kasus Maros Jadi pelajaran. Skornews (diakses 13 Desember 2015).

(http://radarmakassar.com/walhi-bupati-maros-gagal/2589/). Walhi: Bupati Maros Gagal. RadarMakassar. (diakses 13 Desember 2015).

(http://www.kabarkami.com/karst-maros-pangkep-eksploitasi-turun-temurun-untuk-kepentingan-elit.html). Karst Maros-Pangkep Eksploitasi Turun Temurun Untuk Kepentingan Elite. Kabar Kami. (diakses 13 Desember 2015).

(http://ekbis.sindonews.com/read/681800/34/merusak-lingkungan-izin-tambang-di-maros-dicabut-1350885643). Merusak Lingkungan Izin Tambang di Maros Dicabut. Sindo News. (diakses 31 Desember 2015).

(http://www.antarasulsel.com/berita/13492/di-pertambangan-maros-tinggal-satu-perusahaan). Di Pertambangan Maros Tinggal Satu Perusahaan. (diakses 31Desember 2015).

31

(www.tokohindonesia.com.biografi/article/285-ensiklopedi/56-pengusaha-dan-politisi-negarawan). Pengusaha dan Politisi Negarawan. Senin, 21 Oktober 2015.(diakses 31 Desember 2015).

(http://pengusaha.us/2013/10/bosowa-membangun-mental-erwin-aksa.html?m=1) Biografi Pengusaha. Bosowa Membangun Mental Erwin Aksa. Senin, 21 Oktober 2013.(diakses 31 Desember 2015).

(http://makassar.tribunnews.com/2015/02/02/komisi-iii-dprd-maros-ancam-cabut-izin-tambang-marmer). Komisi III DPRD Maros Ancam Cabut Izin Tambang Marmer. Senin, 21 Oktober 2015. (diakses 31 Desember 2015).

(http://www.tribunnews.com/regional/2013/02/20/teh-botol-sosro-investasi-di-kabupaten-maros). Teh Botol Sosro Investasi di Kabupaten Maros. Rabu, 20 Februari 2013. (diakses 31 Desember 2015).

(http://makassarterkini.com/m/berita/487/banyak-ternak-mati-pabrik-pt-cs2-pola-sehat-dinilai-rugikan-warga-maros). Banyak Ter-nak Mati Pabrik PT. CS2 Pola Sehat Dinilai Rugikan Warga Maros. Minggu, 16 Oktober 2016. (diakses 30 November 2016).

Tentang Penulis



Penulis lahir di Kabupaten Maros, pada tanggal 15 April 1983, sebagai anak ke lima dari tujuh bersaudara, pasangan H. Abd. Rochim, B.R dan (Almh) Hj. Sitti Saddiyah Yohannes Erong. Pendidikan SD Negeri 1 tahun 1989 lulus tahun 1995 di Kabupaten Maros, SMP Negeri 1 tahun 1995 lulus tahun 1998 di Kabupaten Maros, dan SMU Negeri 2 tahun 1998 lulus tahun 2001 di Kabupaten Maros. Selanjutnya pendidikan Sarjana ditempuh di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sawerigading Makassar (tamat 2007). Penulis melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin di Makassar (tamat 2010). Pada tahun 2012, penulis berkesempatan untuk melanjutkan ke Program Pascasarjana Doktoral Sosiologi Universitas Negeri Makassar dan diselesaikan pada tahun 2017.

Penulis pernah bekerja sebagai konsultan perencanaan wilayah pada program kerjasama dengan Non-Government Organization untuk sejumlah proyek perencanaan wilayah di Indonesia Timur (2010- 2012). Penulis aktif berorganisasi diantaranya; anggota Ikatan Ahli Perencanaan (IAP-Sulsel) (2011-2019); Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Sawerigading (2016-2020); anggota Himpunan Pengem- bangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS-Sulsel) (2015-2019); anggota Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI-Sulsel) (2016-2020); anggota Forum Dosen Indonesia (FDI-Sulsel) (2016-2020); anggota Assosiasi Dosen Pendidi- kan dan Kewarganegaraan (ADPKn-Sulawesi) (2016-2020); Tim Pen- diri Yayasan Institute Toddopuli Makassar (2016); Sekretaris Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Sulawesi Selatan (2022-2027); Anggota Pengurus Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian (IRMLA) Provinsi Sulawesi Selatan (2022-2027); Ketua Program Studi Sosiologi FISIP UNSA Makassar (2016-2020); Dekan FISIP UNSA Makassar (2020-2024).

3. Buku Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Relasi Kuasa Michel Foucault.docx

ORIGINALITY REPORT

2%	1%	1%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1%
2	penerbit.literacyinstitute.org Internet Source	<1%
3	123dok.com Internet Source	<1%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
5	Submitted to University of Ghana Student Paper	<1%
6	www.researchgate.net Internet Source	<1%
7	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
10	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1%
11	makassar.tribunnews.com Internet Source	<1%
12	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1%

13	www.slideshare.net Internet Source	<1%
14	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1%
15	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1%
16	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1%
17	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1%
18	karyailmiah.uho.ac.id Internet Source	<1%
19	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
20	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
21	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1%
22	pmb.lipi.go.id Internet Source	<1%
23	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	<1%
24	Submitted to Macquarie University Student Paper	<1%
25	Submitted to University of Witwatersrand Student Paper	<1%
26	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
27	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	<1%

28	Submitted to Politeknik STIA LAN Student Paper	<1%
29	Submitted to University of KwaZulu-Natal Student Paper	<1%
30	literacyinstitute.org Internet Source	<1%
31	akuntansi18auliamercubuana.blogspot.com Internet Source	<1%
32	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	<1%
33	gunungtoba2014.blogspot.com Internet Source	<1%
34	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
35	text-id.123dok.com Internet Source	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		